LAPORAN TAHUNAN 2016



BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

ANNUAL REPORT 2016

2016
Laporan Tahunan
Annual Report

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL



GEOSPASIAL SATU UNTUK **INDONESIA**

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

Jika memerlukan laporan tahunan ini, silakan hubungi
For additional copies of this annual report, please contact

Pusat Penelitian, Promosi dan Kerja Sama
Center for Research, Promotion and Cooperation

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
Jl.Raya Jakarta Bogor KM. 46
Cibinong 16911, Indonesia
Telp : 62-21-8752062, 63 / 8753155
Fax: 62-21-87916647
Email: info@big.go.id
Website: www. big.go.id
Geoportal: tanahair.indonesia.go.id

Hasanuddin Z. Abidin, Narasumber | *Resource Person*
Titiek Suparwati, Narasumber | *Resource Person*
Dodi Sukmayadi, Narasumber | *Resource Person*
Nurwadjedi, Narasumber | *Resource Person*
Adi Rusmanto, Narasumber | *Resource Person*

Wiwin Ambarwulan, Penanggung Jawab | *Responsible Person*

Wiwin Ambarwulan, Penyunting | *Editor*
Sri Lestari Munajati, Penyunting | *Editor*
Dian Ardiansyah, Penyunting | *Editor*

Ratih Destarina, Penyusun | *Compiler*
Luciana Retno Prastiwi, Penyusun | *Compiler*
Nuruli Khotimah, Penyusun | *Compiler*
M. Zahrul Muttaqin, Penyusun | *Compiler*

Sri Hartini, Penerjemah | *Translator*
Meilani Ardaya, Penerjemah | *Translator*

Kontributor | *Contributor*
Ali Nor Hidayat
Enjang Faridl
Slamet Turseno
Desi Afrina
Akbar Hiznu Mawanda
Abdul Aziz Nurussadad
M. Ridwan
Annisa Nur Fadilah
Fitri Nurcahyani
Fakhruddin Mustofa
Erna Kusumawati
Suhardi
Ali Nurmoko
Akhmad Yulianto Basuki
Muhammad Al Kautsar
Moh. Fifik Syafiudin
Dinni Sanni Hafidzah
Agri Krista
Arum Wahyu Hastuti
Catur Susilo Ardi
Eko Artanto
Martya Noor Aini M
Suzan Novtalia Gill
Yenny Elfrida Hutasoit

Nuruli Khotimah, Tata Letak & Desain | *Layout & Design*
M.Zimamul Adli, Tata Letak | *Layout*

2016
Laporan Tahunan
Annual Report





846

TOTAL VOLUME
PEMETAAN RUPABUMI
SKALA 1:5.000

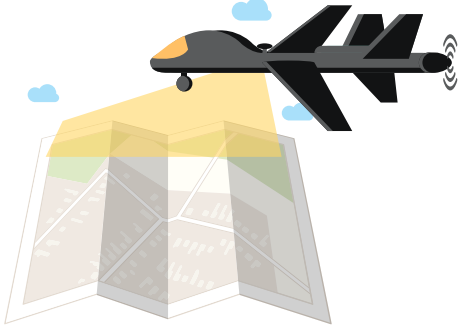
793

ORANG YANG TELAH TERDIDIK
383 ORANG (APBN)
362 ORANG (PNBP)
48 ORANG (SWAKELOLA)



27%

SEGMEN BATAS DEFINITIF
DELINEASI BATAS DAERAH
SECARA KARTOMETRIK



SURVEI GARIS PANTAI
DENGAN MENGGUNAKAN UAV

300 KM

WILAYAH PANTAI SELATAN JAWA
(GUNUNG KIDUL HINGGA TRENGGALEK)



40 TITIK

PEMBANGUNAN JARING KONTROL
GEODESI DAN GEODINAMIKA



78 IGT YANG TELAH DIKOMPILASI

63 IGT YANG TELAH DIINTEGRASI

KEBIJAKAN SATU PETA (ONE MAP POLICY)
DI WILAYAH KALIMANTAN



PALAPA VERSI 3

KEMUDAHAN OPEN SOURCE YANG INTEGRASI DENGAN PORTAL NASIONAL DENGAN DATA/INFORMASI GEOSPASIAL YANG VALID DAN AKURAT

INDEKS REFORMASI BIROKRASI
64.21

INDEKS RB NAIK SEBESAR 3.61% DIBANDING RB TAHUN 2015



PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENILAIAN KESESUAIAN DI BIDANG INFORMASI GEOSPASIAL (KKPK IG) YANG BERANGGOTAKAN 13 ORANG.

5 PERKA BIG

TERKAIT PENGAWASAN YANG BERFUNGSI UNTUK MENJADI LANDASAN ATAU STANDAR BAGI PEGAWAI DALAM MELAKSANAKAN PROGRAM PENGUATAN PENGAWASAN DI MASING-MASING UNIT KERJA BIG



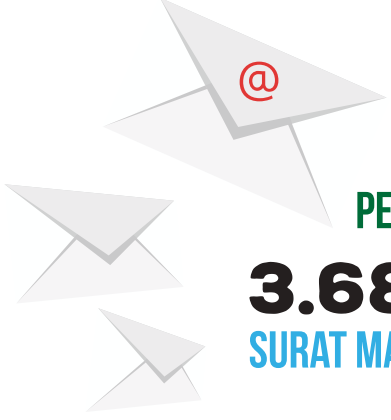
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA (SKKNI) TERDIRI DARI 6 SUB BIDANG YAITU SURVEY TERESTRIS, HIDROGRAFI, FOTOGRAMETRI, PENGINDERAAN JAUH, SISTIM INFORMASI GEOGRAFIS (SIG) DAN KARTOGRAFI.



PENGHARGAAN SIMPUL JARINGAN KEPADA 5 INSTANSI TERBAIK



1.316x PERTEMUAN BIG TELAH MENGASISTENSI KONSULTASI TATA RUANG



PENGELOLAAN SURAT

3.682 SURAT MASUK

3.761 SURAT KELUAR



1.263
DOKUMEN HUKUM

TERDIRI DARI PERATURAN KEPALA, KEPUTUSAN KEPALA, KEPUTUSAN SESMA, KEPUTUSAN DEPUTI DAN KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN.

Daftar isi
Table of Content

LAPORAN TAHUNAN 2016
ANNUAL REPORT 2016

Dari Pimpinan ix
From Chairman ix
Sejarah Badan Informasi Geospasial x
History of Geospatial Information Agency x
Visi dan Misi xii
Vission and Mission BIG xii





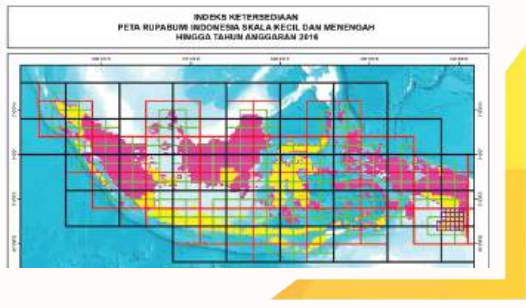
SEKRETARIAT UTAMA
MAIN SECRETARIAT

Reformasi Birokrasi 2
Bureaucratic Reform 2
Inspektorat 6
Inspectorat 6
Promosi dan Kerja Sama 10
Promotion and Coordinating 10
Penelitian Geospasial 11
Geospatial Research 11
Manajemen SDM 20
SDM Management 20
Layanan Hukum 24
Law Services 24
Layanan Umum dan Keuangan 28
Financial and General Affairs Services 28
Layanan DIklat 36
DIklat Service 36

2016
Laporan Tahunan
Annual Report

INFORMASI GEOSPASIAL DASAR
BASIC GEOSPATIAL INFORMATION

Pemetaan Rupabumi dan Toponimi.....40
Mapping of Topographic and Toponym..... 40
Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika.....48
Geodetic Control Network and Geodinamics..... 48
Pemetaan Batas Wilayah.....54
Boundary Mapping 54
Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai 68
Mapping of Marine and Coastal..... 68



INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK
THEMATIC GEOSPATIAL INFORMATION



Pemetaan dan Integrasi Tematik 74
Integration Thematic Mapping..... 74
Pemetaan Tata Ruang dan Atlas 86
Mapping of Spatial Planning Atlases..... 86

Daftar isi
Table of Content

INFRASTRUKTUR INFORMASI GEOSPASIAL
INFRASTRUCTURE OF GEOSPATIAL INFORMATION

Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial 102
Manajemen and Assesmination of Geospatial Information 102
Standardisasi dan Kelembagaan Informasi Geospasial..... 110
Standardization and Institution of Geospatial Information..... 110



ACARA BIG
EVENT OF BIG

Workshop Geospasial : "Pembangunan Desa Agar Tercapainya Kebijakan Satu Peta"..... 122
Geospatial Workshop: "Village Development To Achieve One Map Policy "..... 122
Pengambilan Sumpah Pegawai Negeri Sipil BIG untuk Terciptanya Good Governance..... 123
BIG Civil Servant Oath Taking for Good Governance Creation..... 126
Percepatan Kebijakan Satu Peta adalah komitmen BIG pada K/L dan Pemerintah Daerah 128
Acceleration of One Map Policy is BIG's commitment to K / L and Local Government..... 128
Puncak Peringatan Hari Informasi Geospasial ke-47 130
Peak of 47th Anniversary of Geospatial Information Day..... 130
"Selamat Datang Kepala BIG yang Baru"..... 133
"Welcome to the New BIG Head..... 134
Senam Bersama Dukung Kampanye Revolusi Mental "BIG Melayani" 139
Gymnastics Together Supports Mental Revolutionary Campaign "BIG Serve" 139
Informasi Geospasial Mendukung Provinsi NTB Gemilang 139
Geospatial Information Supporting NTB Province Scintillating 139





Dari Pimpinan

From the Chairman

Kepala Badan Informasi Geospasial
Prof. Dr. Ir. Hasanuddin Z Abidin, M.Sc.

Seiring dengan berjalannya waktu, eksistensi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) semakin diakui baik oleh lembaga pemerintah di pusat dan daerah maupun pelaku usaha dan masyarakat. Peran BIG sebagai satu-satunya lembaga penyelenggara Informasi Geospasial Dasar (IGD) menjadi kunci keberhasilan Kebijakan Satu Peta (One Map Policy) yang telah didengungkan sejak pemeritahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan kini diaktualisasikan dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo. Perencanaan pembangunan yang tidak didasarkan pada informasi geospasial yang akurat dan handal terbukti menjadi pemicu konflik peruntukan lahan sebagai akibat dari tumpang tindih perijinan. Demikian juga dengan penyusunan tata ruang yang menjadi dasar perencanaan pembangunan nasional dan daerah perlu disusun secara sistematis dan komprehensif dengan mempertimbangkan kondisi wilayah yang direpresentasikan pada informasi Geospasial Tematik (IGT) yang terintegrasi.

Menyadari peran penting informasi geospasial dalam perencanaan pembangunan secara nasional, BIG sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden ini, kini dikoordinasikan di bawah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Kebijakan perencanaan pembangunan menetapkan bahwa perencanaan pembangunan harus disusun berdasarkan data stasistik dan informasi geospasial. Sesungguhnya tugas penyelenggaraan informasi geospasial secara nasional untuk mendukung kebijakan pembangunan yang telah dicanangkan oleh pemerintah ini adalah tugas yang besar bagi BIG. Salah satu contoh adalah komitmen pemerintah untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan mengharuskan penyediaan IGD skala besar. Demikian juga dengan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pada skala 1 : 5.000. Untuk itu, BIG berupaya memenuhi kebutuhan informasi geospasial (IG) nasional dengan menggunakan berbagai teknologi yang tersedia dan dengan kerja sama dengan semua pihak yang terkait. BIG juga mendorong berkembangnya sumber daya manusia IG dan industri IG nasional untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan informasi geospasial di Indonesia. Melalui Laporan Tahunan (Annual Report) 2016 ini, tugas dan fungsi BIG serta berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan disajikan dengan harapan dapat bermanfaat bagi kepentingan nasional.

Kepala BIG
Hasanuddin Z. Abidin

The existence of Geospatial Information Agency (BIG) has increasingly recognized by both government agencies at the central and regional levels, as well as businesses and communities. The role of BIG as the sole institution to provide Basic Geospatial Information (IGD) is the key success of One Map Policy that has been touted since the leadership of President Susilo Bambang Yudhoyono and now has been actualized in the leadership of President Joko Widodo. Development planning that is not based on accurate and reliable geospatial information has proven to be a trigger for conflict over land use as a result of the overlapping of permits. Likewise, spatial planning is the basis of national and regional development planning that needs to be carried out systematically and comprehensively considering the area is represented on integrated Thematic Geospatial Information (IGT).

Recognizing the important role of geospatial information in national development planning, BIG as Non-Ministerial Government that directly responsible to the President, is now coordinated under the Ministry of National Development Planning/the Agency for National Development Planning (Bappenas). Development planning policy stipulates that development planning should be based on statistical data and geospatial information. Indeed providing geospatial information for the entire area to support the development policy that has been announced by the government is a huge task for BIG. One example is the government's commitment to develop Indonesia starting by strengthening the border areas and villages within the framework of a unitary state. This commitment requires the provision of large-scale maps. Similarly, the preparation of the Detailed Spatial Planning (RDTR) also should be carried out at a scale of 1: 5,000. Therefore, BIG seeks to meet the needs of geospatial information (IG) nationwide using various available technologies and in cooperation with all relevant parties. BIG also facilitates the development of human resources and industries related to geospatial information nationally to meet the needs of geospatial information services in Indonesia. Through the Annual Report 2016, duties and functions of BIG, as well as the activities that have been implemented in 2016 are presented for the benefit to the national interest.

Chairman of BIG
Hasanuddin Z. Abidin



Sejarah Badan Informasi Geospasial

History of Badan Informasi Geospasial

Badan Informasi Geospasial (BIG) merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial sebagai pengganti dari Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL).

Cikal bakal BAKOSURTANAL bermula pada 1938 saat kegiatan pengukuran dan pemetaan ditangani Hindia Belanda. Pasca kemerdekaan, pemerintah Indonesia membentuk Dewan dan Komando Direktorium yang kemudian berubah menjadi Komando Survei dan Pemetaan Nasional (Kosurtanal) dan Dewan Survei dan Pemetaan Nasional (Desurtanal) yang diatur berdasarkan Peraturan Presiden. Perkembangan dari lembaga ini pada akhirnya dibentuklah secara khusus organisasi baru bernama Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional yang disingkat dengan BAKOSURTANAL pada 1969 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres RI) Nomor 63 Tahun 1969.

BAKOSURTANAL dibentuk untuk mengkoordinasikan kegiatan dan pelaksanaan survei dan pemetaan secara nasional sehingga efektif dan efisien, termasuk dalam penggunaan anggaran negara. Dengan demikian, badan-badan yang melakukan kegiatan survei dan pemetaan nasional dikoordinasikan oleh lembaga ini.

Kegiatan survei dan pemetaan di wilayah Republik Indonesia dilakukan untuk mendapatkan data spasial yang meliputi posisi, nama geografi, nama objek di muka rupabumi, yang disajikan dalam bentuk peta, baik secara digital maupun cetak. Data spasial ini dapat digunakan oleh pemerintah maupun swasta.

Wilayah Indonesia, yang membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), begitu luas, terdiri atas ribuan pulau, serta kaya sumberdaya alam dan lainnya. Untuk mengelola sumberdaya tersebut diperlukan informasi geospasial, atau yang biasa dikenal dengan istilah peta dalam arti yang luas.

Penyelenggaraan informasi geospasial perlu diatur agar tertib, terpadu, berhasil guna, dan berdaya guna sehingga terjamin keakuratan, kemutakhiran, dan kepastian hukum. Dalam hal ini, undang-undang tentang IG yang dibutuhkan. Pemerintah dan DPR, menanggapi kebutuhan ini dengan menyetujui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (UU-IG) pada 5 April 2011. Tak sampai sebulan kemudian, tepatnya pada 21 April 2011, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono mengesahkan UU tersebut. Dengan demikian, UU-IG merupakan regulasi resmi yang menjamin ketersediaan informasi geospasial yang andal.

Informasi geospasial yang akurat, dapat dipertanggungjawabkan, dan mudah diakses oleh masyarakat sangat diperlukan sebagai dasar perencanaan penataan ruang, penanggulangan bencana, pengelolaan sumber daya alam dan sumberdaya lainnya sehingga

Geospatial Information Agency (BIG) is a non-ministerial government institution established under Law No. 4 of 2011 on Geospatial Information as a substitute of the National Survey and Mapping Coordinating Agency (BAKOSURTANAL).

The initial of BAKOSURTANAL began in 1938 when the Government of Dutch East Indies handled activity of measurement and atlas making. After its independence, the Indonesian Government established National Board and Command that later turned into the National Survey and Mapping Command (Kosurtanal) and the National Survey and Mapping Board (Desurtanal), which is governed by Presidential Regulation. Further development of these two institutions was the establishment of a new special organization called National Survey and Mapping Coordinating Agency that abbreviated as BAKOSURTANAL in 1969 based on Presidential Decree of the Republic of Indonesia No. 63 of 1969.

BAKOSURTANAL was established to coordinate activities and implementation of surveys and mapping nationally, to achieve its effectiveness and efficiency, including in terms of budget expenditure. Thus, the national survey and mapping activities conducted by various agencies had been coordinated by this agency.

Survey and mapping activities in Indonesia have been carried out to obtain spatial data, which includes geographical positions, geographical names, and names of objects in topographic features. Those data are presented in maps both digital and printed maps. Government and private sectors can used the spatial data.

The region of Indonesia, which form the Republic of Indonesia (NKRI), is considerably vast, consisting of thousands island, and rich of natural resources and others. Geospatial information or commonly known as maps in wider meaning, is essential for managing these resources and to cope with natural disasters.

The provision of geospatial information needs to be regulated through a law for being compliant, integrated, effective, and efficient to guarantee the accuracy, currency, and conformity to the law. Indeed, a strong regulation is required. Therefore, the Government and Parliament responded to this need by approving the Law No. 4 of 2011 on Geospatial Information (UU-IG) on 5 April 2011. Less than a month later, on 21 April 2011, President Susilo Bambang Yudhoyono endorsed the bill. Hence, the Law of Geospatial Information becomes a formal regulation that ensures the availability of reliable geospatial information.

Accurate geospatial information, accountable for and easily accessible by the public, is required to be a basis for spatial planning, disaster mitigation, and natural and other resource management so it can be harnessed for the prosperity of the people of Indonesia.

dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.

Selain itu, informasi geospasial sebagai data geospasial yang sudah diolah, dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu untuk merumuskan kebijakan, pengambilan keputusan dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.

UU Informasi Geospasial mewujudkan sebuah referensi tunggal dalam industri geospasial yang mencakup seluruh wilayah Indonesia dan wilayah yurisdiksinya. Kebijakan 'referensi tunggal' ini diharapkan dapat menjamin informasi geospasial yang diselenggarakan oleh pemangku kepentingan di Indonesia dapat saling terintegrasi.

Menyusul terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, maka perlu dibentuk sebuah badan yang menangani informasi geospasial. Presiden RI, melalui Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 pada 27 Desember 2011, menetapkan Badan Informasi Geospasial (BIG) sebagai lembaga yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial. Dalam Perpres ini disebutkan kedudukan, tugas, dan fungsi BIG, juga susunan organisasi, tata kerja, eselonisasi, dan pembiayaan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial pada Bab XI Pasal 40 perihal Ketentuan Peralihan, yang kemudian dijabarkan dalam Bab VII Pasal 40 Ketentuan Peralihan pada Perpres Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial maka bidang tugas yang terkait dengan informasi geospasial tetap dilaksanakan oleh BAKOSURTANAL sampai dengan selesainya penataan organisasi BIG. Dan, BAKOSURTANAL wajib menyerahkan seluruh arsip dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya kepada BIG.

BIG, yang bertransformasi dari BAKOSURTANAL, berwenang menyelenggarakan informasi geospasial, khususnya untuk informasi geospasial dasar yang terdiri atas jaring kontrol geodesi, dan peta dasar. Jaring kontrol geodesi menjadi acuan referensi posisi horizontal, vertikal, dan acuan gaya berat. Peta dasar, yang meliputi Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI), Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI), dan Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN), menjadi kerangka bagi pembuatan informasi geospasial tematik.

BIG merupakan lembaga pemerintah yang sangat penting dalam mengumpulkan dan mendata berbagai informasi mengenai wilayah kedaulatan NKRI. Pasca-transformasi dari BAKOSURTANAL, BIG mendapat tugas lebih luas. BIG tidak hanya terbatas menangani dan mengkoordinasikan kegiatan survei dan pemetaan yang berada di sektor hulu dari rangkaian penyelenggaraan IG, tetapi juga sampai ke sektor hilir, yaitu masalah penyimpanan, pengamanan, penyebarluasan, dan pemanfaatan IG.

Transformasi BAKOSURTANAL menjadi BIG diharapkan dapat meningkatkan kesadaran keruangan di kalangan pemerintah maupun masyarakat akan pentingnya aspek geospasial. Dengan demikian, semua keterbatasan yang selama ini dihadapi akan lebih mudah diatasi sehingga terjadi percepatan ketersediaan IG di seluruh Indonesia.

In addition, geospatial information, as processed geospatial data, can be used for policy formulation, decision making and/or implementation activities associated with the Earth space.

The Law of Geospatial Information facilitates a single reference in the geospatial industry, which covers the whole area of Indonesia and its jurisdiction. The policy of 'single references' is expected to ensure that geospatial information conducted by all stakeholders in Indonesia can be integrated each other.

The Law of Geospatial Information facilitates a single reference in the geospatial industry, which covers the whole area of Indonesia and its jurisdiction. The policy of 'single references' is expected to ensure that geospatial information conducted by all stakeholders in Indonesia can be integrated each other.

Following the issuance of the Law of Geospatial Information, it is necessary to set up an agency carrying on geospatial information. President, through Presidential Decree No. 94 of 2011 on 27 December 2011, established the Geospatial Information Agency (BIG) as the agency with its task is to carry out government responsibility in providing geospatial information. The regulation states position, duties and functions of BIG, as well as organizational structure, work procedures, echelon determination, and financial management.

Based on the Law No. 4 of 2011 on Geospatial Information in Chapter XI of Article 40 concerning the Transitional Provision, which are then described in Chapter VII, Article 40 of the Transitional Provisions on Presidential Decree No. 94 of 2011 concerning the Geospatial Information Agency so that BAKOSURTANAL was still working on tasks related to geospatial information until the completion of organizational structure of BIG. In this case BAKOSURTANAL should submit all records and documents relating to its duties to BIG.

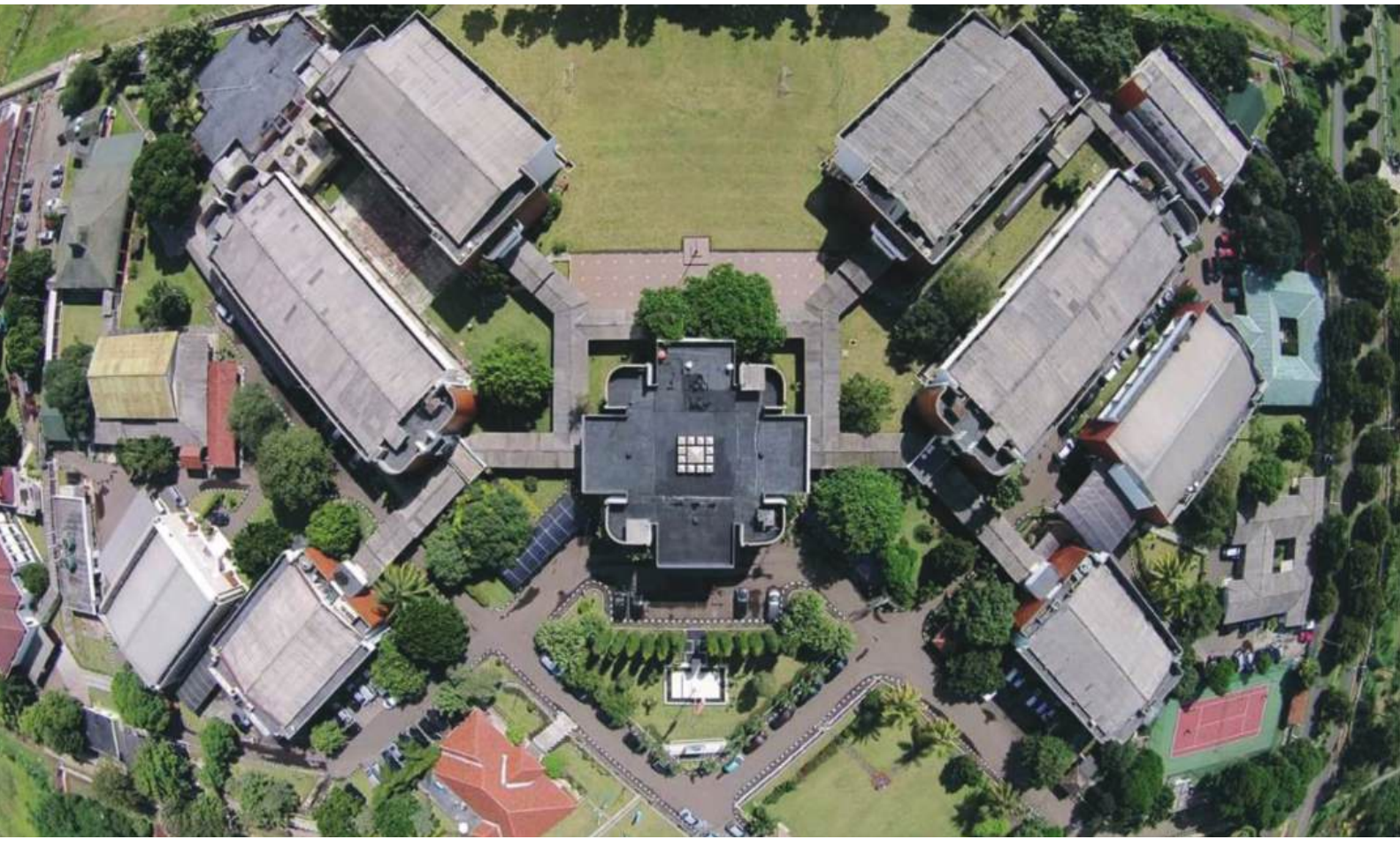
BIG, that has been transformed from BAKOSURTANAL, has authorities to work on geospatial information, especially for basic geospatial information consisting of geodetic control networks and base maps.Geodetic control networks are references for horizontal position, vertical position, and gravity. While the base maps, which include Topographic Map of Indonesia (RBI), Coastal Environment Map of Indonesia (LPI), and the National Marine Environment Map (LLN), are the "platform" for the development of thematic geospatial information.

BIG is a very important government agency in collecting and recording information about the sovereign regions of the Republic of Indonesia. It has broader tasks following the transformation from BAKOSURTANAL. BIG is not only handling and coordinating any surveying and mapping activities in the upstream sectors of the connecting structure of geospatial information implementation, but also in the downstream sectors, such as the issues of storage, security, dissemination, and utilization of geospatial information.

The transformation of BAKOSURTANAL into BIG is expected to improve geospatial awareness within government and communities on the importance of geospatial aspects. Hence, the agency will be easily overcome all the constraints it deals with so that it will result in accelerating the availability of geospatial information across Indonesia.

Visi & Misi Badan Informasi Geospasial

Vission & Mission Badan Informasi Geospasial



Visi Vision

"Menjadi integrator penyelenggaraan informasi geospasial sebagai landasan pembangunan Indonesia".

"Being an integrator of geospatial information provision as the basis for the development of Indonesia"

Misi Mission

1. Meningkatkan sinergi proaktif dalam penyelenggaraan informasi geospasial nasional,
2. Mengintegrasikan informasi geospasial agar dapat memberikan nilai tambah bagi pembangunan nasional, dan
3. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas penyelenggaraan informasi geospasial nasional.

1. *Improving proactive synergies in the provision of the national geospatial information,*
2. *Integrating geospatial information in order to provide added value to national development and*
3. *Improving the capacity and capability of the organization of national geospatial information*

SEKRETARIAT UTAMA

MAIN SECRETARIAT



Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi, dan sumber daya di lingkungan BIG. Berdasarkan Struktur Organisasi BIG, Sekretariat Utama terdiri atas:

a. Biro Perencanaan, Kepegawaian, dan Hukum; dan

b. Biro Umum dan Keuangan,

dan mengkoordinasikan :

a. Inspektorat dan

b. Pusat Penelitian, Promosi dan Kerja Sama;

Main Secretariat has the task of planning, development, and control of the program, administration, and resources in the environment BIG. Based on BIG Structure Organization, Main Secretariat consists of:

a. Bureau of Planning, Human Resources, and Legal; and

b. General Affairs and Finance,

and coordinating for :

a. Inspectorat and

b. Center for Research, Promotion and Coorperation;

Informasi Geospasial Dasar
Informasi Geospasial Tematik
Infrastruktur Informasi Geospasial
Sekretaris Utama
Acara BIG



REFORMASI BIROKRASI

PENCAPAIAN REFORMASI BIROKRASI (RB) BIG

Penilaian reformasi birokrasi di lingkungan BIG dilakukan dengan menilai pencapaian dari setiap program dan kegiatan dalam komponen pengungkit (proses) dan sasaran reformasi birokrasi sebagai komponen hasil. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan BIG yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), diketahui bahwa indeks RB BIG pada tahun 2014, 2015 dan 2016 terus mengalami kenaikan. Namun kenaikan indeks RB di tahun 2016 tidak sebesar kenaikan di tahun 2015.

ACHIEVEMENT OF BIG BUREAUCRACY REFORM (RB)

The implementation of bureaucratic reform in BIG is conducted by assessing the achievement of each program and activity in the leverage components (processes) and objectives of bureaucratic reform as a component of the outcome. Based on the evaluation of bureaucratic reform implementation in BIG issued by the Ministry of Administrative and Bureaucracy Reform (KemenPAN-RB), it is recognized that the BIG RB index in 2014, 2015 and 2016 continued to increase. However, the increase of RB index in 2016 was not as big as 2015.

Tabel Perbandingan Pencapaian Reformasi Birokrasi BIG Tahun 2014, 2015, dan 2016

Comparative Table of BIG Bureaucratic Reform Achievements of 2014, 2015 and 2016

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai RB Th 2014	Kenaikan RB Th 2014 ke 2015	Nilai RB Th 2015	Kenaikan RB Th 2015 ke 2016	Nilai RB Th 2016
Indeks Reformasi Birokrasi		100	49,88	10,72	60,60	3,61	64,21
A	Pengungkit	60	23,54	10,43	33,97	0,86	34,83
1	Manajemen Perubahan	5	2,74	0,85	3,59	-0,16	3,43
2	Penataan Peraturan PerUUan	5	2,09	0,00	2,09	0,00	2,09
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	6	0,99	1,00	1,99	0,67	2,66
4	Penataan Tatalaksana	5	2,63	0,84	3,47	-0,43	3,04
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	15	5,25	5,73	10,98	0,54	11,52
6	Penguatan Akuntabilitas	6	2,39	1,22	3,61	-0,89	2,72
7	Penguatan Pengawasan	12	4,35	0,00	4,35	1,04	5,39
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6	3,10	0,79	3,89	0,09	3,98

B	Hasil	40,00	26,35	0,28	26,63	2,75	29,38
1	Kapasitas Akuntabilitas Kinerja Organisasi	20	13,37	0,29	13,66	-0,84	12,82
2	Pemerintah Yang Bersih Dan Bebas KKN	10	5,52	0,00	5,52	2,57	8,09
3	Kualitas Pelayanan Publik	10	7,45	0,00	7,45	1,02	8,47

Indeks RB tahun 2015 sebesar 60,6 atau naik sebesar 10,72 dibandingkan nilai indeks RB tahun 2014. Sedangkan indeks RB tahun 2016 sebesar 64,21 atau naik sebesar 3,61 dibandingan nilai indeks RB tahun 2015. Artinya kenaikan indeks RB di tahun 2016 mengalami penurunan hampir sepertiga dari kenaikan indeks RB di tahun 2015.

RB index in 2015 was 60.6 or increased by 10.72 compared to RB index in 2014. While RB index in 2016 was 64.21 or increased by 3.61 compared to RB index in 2015. This means that the increase in RB index in 2016 declined almost a third of the increase in RB index in 2015.

Berdasarkan penilaian masing-masing detil komponen juga dapat diketahui bahwa di tahun 2016 kenaikan komponen pengungkit berada pada Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Kenaikan sub komponen pengungkit terbesar berada pada Penguatan Pengawasan sebesar 1,04 dimana BIG telah menetapkan peraturan-peraturan terkait dengan Program Penguatan Pengawasan melalui beberapa Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial.

Assessment of each component showed that in 2016 there has been an increase in leverage components namely Organizational Enhancement, Structuring of Human Resource Management System, Supervision Enhancement, and Public Service Quality Improvement. The largest increase in leverage components occurred in Supervision Enhancement by 1.04 where BIG has established regulations relating to the Supervision Enhancement Program through several Regulations of the Chairman of the Geospatial Information Agency.

Tidak hanya kenaikan, di tahun 2016 nilai sub komponen pengungkit juga ada yang mengalami penurunan, diantaranya Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, dan Penguatan Akuntabilitas. Sedangkan untuk sub komponen pengungkit Penataan Peraturan Perundang-undangan tidak mengalami kenaikan, maupun penurunan nilai.

In addition to the increase, in 2016, some leverage component values also declined including Change Management, Procedure Management, and Performance Accountability Enhancement. Meanwhile, the leverage component of Legislation Management did not experience an increase or decrease.

Pada komponen hasil secara umum mengalami kenaikan nilai sebesar 2,75. Namun sebenarnya terjadi penurunan nilai sub komponen hasil pada nilai hasil Kapasitas Akuntabilitas Kinerja Organisasi. Nilai komponen kapasitas dan akuntabilitas organisasi diukur melalui 2 (dua) pencapaian, yaitu nilai akuntabilitas kinerja serta nilai kapasitas organisasi melalui survei internal. Nilai akuntabilitas kinerja BIG menunjukkan bahwa BIG masih perlu melakukan peningkatan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja.

In general, the outcome components increased by 2.75. In fact, there was a decline in the value of outcome component of Organizational Performance Accountability Capacity. The value of organizational capacity and accountability components is measured by 2 (two) achievements, namely the value of performance accountability and the value of organizational capacity through internal surveys. The value of BIG performance accountability shows that BIG needs to improve the realization of performance accountability.

Tahun 2016 BIG juga melakukan kajian terhadap pelaksanaan program Reformasi Birokrasi BIG. Berdasarkan hasil kajian identifikasi akar permasalahan untuk setiap area perubahan, telah disusun rekomendasi solusi yang akan menjadi dasar penyusunan rencana aksi dalam *roadmap* reformasi birokrasi (RMRB) BIG 2015 – 2019. Rekomendasi perbaikan disusun dengan memprioritaskan pada pencapaian yang masih berada dibawah 60% atau mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, yaitu capaian hasil pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, capaian pengungkit penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penguatan pengawasan serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Selain itu, peningkatan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi juga dilakukan untuk program lainnya agar nilai reformasi birokrasi dapat meningkat secara signifikan.

In 2016, BIG reviewed the implementation of the Bureaucracy Reform program internally. Based on the review, BIG has identified the roots of the problem for each area of change. Recommendations have also been formulated to serve as the basis for the preparation of an action plan in BIG bureaucratic reform roadmap for the period of 2015 - 2019. The improvement recommendations are prepared by prioritizing the achievement values below 60% or decreased values compared to the previous year. Those values are the achievement value of clean and KKN free government, the achievement value of leverage of Legislation Management, Organizational Enhancement, Supervision Enhancement, and Public Service Quality Improvement. In addition, the improvement of bureaucratic reform quality implementation is also conducted for other programs so that the value of bureaucratic reform can increase significantly.

Rekomendasi solusi yang diberikan berdasarkan beberapa akar permasalahan diatas adalah:

Recommendations given based on some roots of problem above are:

1. Melakukan survei persepsi korupsi secara periodik setiap tahun, khususnya dalam melaksanakan tindak lanjut perbaikan hasil survei atas persepsi korupsi di BIG.
2. Menyusun dan menyepakati standar biaya pengadaan barang dan jasa Badan Informasi Geospasial.
3. Menyusun harga satuan (SBU) berupa perka yang akan diajukan kepada Kemenkeu.
4. Memperbaiki prosedur dan mekanisme pengadaan barang dan jasa melalui pendampingan internal yang optimal oleh inspektorat.
5. Mengusulkan jenis pekerjaan di BIG yang belum diatur dalam Perpres pengadaan barang dan jasa.
6. Meningkatkan kompetensi teknis auditor internal.
7. Merekrut pegawai dari unit teknis (minimal madya yang berpengalaman 3-5 tahun) untuk dididik menjadi auditor.
8. Merekrut *fresh graduate* bidang ilmu teknis kebumian untuk menjadi auditor.
9. Menyusun jenjang karir untuk auditor.
10. Membentuk tim khusus dalam RB pengelola arsip terintegrasi (fisik maupun digital) yang tersebar di masing-masing pusat teknis.
11. Mengoptimalkan jabatan fungsional arsiparis.
12. Membangun komunikasi profesional secara intensif kepada auditor eksternal melalui berbagai forum konsultansi.
13. Menerapkan budaya komunikasi profesional dalam agenda perubahan BIG melalui :
    a. Berbagai kegiatan *outdoor* lintas kedeputian.
    b. Forum RB secara intensif
    c. Melatih berpikir holistik dan komprehensif melalui *role playing*.
    d. Pelatihan intensif terkait *effective communication skill*.
    e. Menerapkan hari "komunikasi profesional" BIG.
    f. Melakukan rotasi terhadap 20% pegawai sesuai dengan jenjang karir.
14. Memperbaiki sistem pencatatan keuangan internal BIG melalui :
    a. Perbaikan NSPK terkait pencatatan keuangan.
    b. Menerapkan sistem informasi pengelolaan keuangan terintegrasi sesuai SAP secara *online*.
    c. Audit keuangan lebih didorong kepada audit proses.
15. Menyusun NSPK terkait evaluasi organisasi di lingkungan BIG.
16. Mengadakan forum evaluasi organisasi secara periodik.
17. *Monitoring* dan evaluasi atas pelaksanaan penguatan organisasi di lingkungan BIG secara terpusat.
18. Membangun *reward, recognition and punishment system* yang ketat di lingkungan inspektorat.
19. Meningkatkan kompetensi auditor.
20. Optimalisasi peran APIP.

1. *Performing periodic surveys of corruption perception annually, especially in carrying out follow-up improvement of survey results on perceptions of corruption in BIG.*
2. *Preparing and agreeing on standard cost of procurement of goods and services in BIG.*
3. *Preparing the unit price (SBU) in the form of chairman regulations (perka) to be submitted to the Ministry of Finance.*
4. *Improving procedures and mechanisms for procurement of goods and services through optimal internal assistance by the inspectorate.*
5. *Proposing the types of work in BIG that has not been regulated in the Presidential Regulation (Perpres) of procurement of goods and services.*
6. *Increasing technical competence of internal auditors.*
7. *Recruiting employees from technical units (minimum intermediate level (madya) with 3-5 years experience) to be trained as auditors.*
8. *Recruiting fresh graduates of technical field of earth science to become auditors.*
9. *Developing career paths for auditors.*
10. *Establishing a special team within the RB integrated archives management (physical and digital) scattered in each technical center.*
11. *Optimizing the functional position of the archivists.*
12. *Building intensive professional communication to external auditors through various consultancy forums.*
13. *Implementing a professional communication culture on the BIG change agenda through:*
    a. *Various outdoor activities across deputies.*
    b. *RB Forum intensively*
    c. *Training of holistic and comprehensive thinking through role-playing method.*
    d. *Intensive training on effective communication skill.*
    e. *Implementing "professional communication days" in BIG.*
    f. *Rotating 20% of employees according to career path.*
14. *Improving internal financial recording system of BIG through:*
    a. *Improving NSPK related to financial recording.*
    b. *Implementing an integrated and online financial management information system according to SAP.*
    c. *Financial audits are more encouraged to audit processes.*
15. *Developing NSPK related to evaluation of organization in BIG.*
16. *Organizing periodic organizational evaluation forums.*
17. *Monitoring and evaluation of the implementation of organizational strengthening within the BIG centrally.*
18. *Building a strict reward, recognition and punishment system in the inspectorate.*
19. *Increasing auditor competence.*
20. *Optimizing the role of APIP.*

21. Melakukan audit kinerja di lingkungan inspektorat secara periodik.
22. Membangun *whistle-blowing system* berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
23. Optimalisasi peran APIP melalui pemberdayaan agen perubahan.
24. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan.
25. Menyusun standar pelayanan minimal untuk seluruh layanan publik yang diberikan BIG.
26. Menerapkan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) untuk pelayanan publik BIG.

Melakukan survei kepuasan masyarakat (*customer engagement survey*) secara periodik setiap 6 bulan sekali.

21. *Undertaking performance audits in the inspectorate periodically.*
22. *Building whistle-blowing system based on information and communication technology.*
23. *Optimizing the role of APIP through the empowerment of change agents.*
24. *Evaluating the implementation of the control system for the drafting of legislation.*
25. *Establishing minimum service standards for all public services provided by BIG.*
26. *Implementing one-door integrated service (PTSP) for BIG public services.*

Conducting a customer engagement survey periodically every 6 months.







FOTO KEGIATAN 2016





Informasi Geospasial Dasar
Informasi Geospasial Tematik
Infrastruktur Informasi Geospasial
Sekretaris Utama
Acara BIG



Inspektorat yang berdasarkan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial merupakan unit organisasi dalam penyelenggaraan pengawasan fungsional di lingkungan BIG yang berkedudukan di bawah Kepala dan bertanggung jawab kepada Kepala melalui Sekretaris Utama. Inspektorat menyelenggarakan fungsi perumusan dan penyusunan rencana pengawasan fungsional; pelaksanaan pengawasan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; pelaksanaan urusan administrasi Inspektorat; dan penyusunan laporan hasil pengawasan.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Badan Informasi Geospasial melaksanakan tugas/fungsi pengawasan intern terhadap pelaksanaan APBN dengan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan melaksanakan tugas/ fungsi yang terdiri dari audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.

Pengawasan intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.

Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Badan Informasi Geospasial diantaranya:

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah *(assurance activities);*

According to Geospatial Information Agency (BIG) Chairman Regulation No. 2 of 2014 on the Organization and Working Procedures of the BIG, the Inspectorate is an organizational unit in the implementation of functional supervision in BIG whose position is under the Chairman and responsible to the Chairman through the Main Secretary. The Inspectorate performs the formulation and preparation a functional supervision plan; the implementation of functional supervision in accordance with the provisions of legislation; the implementation of administrative affairs of the Inspectorate; and the preparation of supervisory reports.

The Government Internal Supervisory Apparatus in accordance with BIG Chairman Regulation No. 4 of 2015 on the Management of State Budget in BIG, performs the duties/functions of internal supervision over the execution of APBN based on the provisions of the legislation to perform the tasks/functions consisting of audit, review, evaluation, monitoring, and other supervisory activities.

Internal Supervision in accordance with Government Regulation No. 60 of 2008 regarding Government Internal Control System, is the whole process of audit activity, review, evaluation, monitoring, and other supervisory activities on organizing duties and functions of the organization in order to provide reasonable assurance that activities have been carried out in accordance with the standards established effectively and efficiently for the interests of leaders in realizing good governance.

The role of Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) of BIG are:

1. *Provide adequate confidence on the compliance, austerity, efficiency and effectiveness of the achievement of the objectives of the governmental tasks and functions (assurance activities);*

2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (anti corruption activities); dan
3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (consulting activities).

Sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis BIG Tahun 2015-2019, salah satu strategi guna mendukung arah kebijakan terkait pelaksanaan reformasi birokrasi BIG adalah:

1. Mendorong akselerasi pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan BIG; dan
2. Penguatan fungsi Inspektorat.

Penguatan fungsi Inspektorat di tahun 2016 merupakan fondasi awal dalam membangun reformasi birokrasi di BIG, dimana penguatan yang dimaksud tidak hanya pada aspek tugas dan fungsi, namun meliputi aspek kelembagaan Inspektorat serta aspek SDM Inspektorat, baik secara kualitas maupun kuantitas. Perubahan paradigma di tahun 2016 terhadap pengawasan fungsional yang diemban oleh Inspektorat selaku aparat pengawasan intern pemerintah (APIP), diantaranya adalah dalam hal pelaksanaan fungsi APIP sebagai konsultan dalam memberikan solusi atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara, memberikan pendapat/jaminan *(quality assurance)*, mengutamakan kredibilitas dari pada hukuman *(punishment)*. APIP diharapkan dapat mendorong terciptanya reformasi birokrasi pada instansi pemerintah guna mewujudkan pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, peningkatan kualitas pelayanan publik dan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Capaian utama dari Inspektorat Badan Informasi Geospasial di tahun 2016 antara lain:

1. Pelaksanaan *Public Campaign* kegiatan pengendalian gratifikasi.

Sistem Pengendalian Gratifikasi merupakan integrasi dari perangkat-perangkat yang bekerja secara dinamis untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan bebas dari korupsi. Tahun 2016 Sistem Pengendalian Gratifikasi di Badan Informasi Geospasial fokus kepada *Public Campaign* kegiatan pengendalian gratifikasi. Bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Public Campaign* dilaksanakan dengan sasaran para pegawai Aparatus Sipil Negara di Lingkungan Badan Informasi Geospasial. Pada pelaksanaannya, Kepala BIG juga berperan aktif didalam proses *Public Campaign* tersebut, sehingga perangkat Sistem Pengendalian Gratifikasi yang terdiri dari aturan, fungsi pengendalian, komitmen pimpinan, dan diseminasi/sosialisasi aturan dapat berjalan dengan optimal.

2. Penyusunan Roadmap RB

Tahun 2016, Inspektorat Badan Informasi Geospasial melakukan kajian Reformasi Birokrasi dengan melibatkan pihak konsultan didalam pelaksanaannya. Keluaran dari kajian ini adalah rencana implementasi reformasi birokrasi di BIG untuk periode 2015 – 2019. Rencana implementasi ini meliputi Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2015 – 2019, RoadMap Reformasi Birokrasi 2015 – 2019, Quick Wins Reformasi Birokrasi 2015 – 2019, dan Petunjuk Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Unit Kerja. Agar reformasi birokrasi di lingkungan BIG berjalan secara efektif, seluruh komponen rencana implementasi di atas perlu diterapkan secara terintegrasi, melembaga, berkelanjutan, dan konsisten.

2. Provide early warning and improve the effectiveness of risk management in the implementation of governmental tasks and functions (anti corruption activities); and
3. Maintain and improve the quality of governance of the governmental tasks and functions (consulting activities).

According to BIG Strategic Plan 2015-2019, one of the strategies to support policy directions related to the implementation of bureaucratic reforms of BIG is:

1. Encourage the acceleration of bureaucracy reform in the BIG; and
2. Strengthening the Inspektorat function.

Strengthening the function of the Inspectorate in 2016 is the initial foundation in building bureaucratic reform in BIG, where the strengthening effort is not only on the aspects of duties and functions, but also includes the institutional aspects of the Inspectorate and the aspect of human resources of the Inspectorate, both in quality and quantity. The paradigm shift in 2016 to the functional supervision carried by the Inspectorate as the Government Internal Control Apparatus (APIP), among others, is in the implementation of APIP function as a consultant in providing solutions for the management of state revenue and expenditure budget, quality assurance, prioritizing credibility rather than punishment. APIP is expected to encourage the achievement of bureaucratic reforms in government agencies to realize clean and free government from corruption, collusion and nepotism, improving the quality of public services, and improving capacity building and performance accountability of government agencies.

Major achievements of the Inspectorate of BIG in 2016 include:

1.Public Campaign of gratification control activities.

Gratification Control System is an integration of devices that work dynamically to create a clean and free environment from corruption. In 2016, the Gratification Control System at BIG focuses on Public Campaign of gratification control activities. In collaboration with the Corruption Eradication Commission (KPK), the Public Campaign targets the State Civil Apparatus in the BIG. In its implementation, the BIG Chairman also plays an active role in the Public Campaign process, so that the Gratification Control System device consisting of rules, control functions, leadership commitment, and dissemination of rules, can run optimally.

2. Preparation of RB Roadmap

In 2016, the Inspectorate of BIG conducts a review of Bureaucracy Reform by involving the consultant in its implementation. The output of the review is the implementation plan of bureaucratic reforms in BIG for the period 2015-2019. The implementation plan includes the Bureaucracy Reform Implementation Strategy 2015-2019, Bureaucracy Reform RoadMap 2015-2019, Quick Wins Bureaucracy Reform 2015-2019, and Bureaucracy Reform Implementation Instructions at the Work Unit. In order to perform an effective bureaucracy reform in the BIG, all components of the above implementation plan need to be implemented in an integrated, institutional, sustainable, and consistent manner.

3. Penyusunan, Penetapan dan Sosialisasi Peraturan Kepala BIG terkait Program Penguatan Pengawasan

Dalam rangka membangun pondasi awal Program Penguatan Pengawasan Badan Informasi Geospasial, tahun 2016 Inspektorat menyusun Peraturan Kepala BIG terkait pengawasan yang berfungsi untuk menjadi landasan atau standar bagi pegawai dalam melaksanakan Program Penguatan Pengawasan di masing-masing unit kerja BIG. Aturan-aturan tersebut antara lain:

a. Peraturan Kepala BIG nomor 5 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Badan Informasi Geospasial;
b. Peraturan Kepala BIG nomor 6 tahun 2016 tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Dan Whistleblowing System Di Lingkungan Badan Informasi Geospasial;
c. Peraturan Kepala BIG nomor 7 tahun 2016 tentang Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Badan Informasi Geospasial;
d. Peraturan Kepala BIG nomor 8 tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Badan Informasi Geospasial; dan
e. Peraturan Kepala BIG nomor 9 tahun 2016 tentang Penetapan Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Badan Informasi Geospasial.

Lima peraturan tersebut menjadi pondasi program penguatan pengawasan dan telah berkontribusi besar didalam kenaikan nilai Reformasi Birokrasi BIG atas pelaksanaannya di tahun 2016. Tidak hanya ditetapkan, semua aturan tersebut disosialisasikan kepada para pegawai Aparatus Sipil Negara di Lingkungan Badan Informasi Geospasial yang didukung penuh oleh para pimpinan tinggi.

D. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Pasal 57 Ayat 1 :

Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern melakukan reviu atas laporan keuangan Kementrian Negara/ Lembaga sebelum disampaikan Menteri/Pimpinan lebga kepada menteri keuangan.

E. Standar Reviu atas laporan keuangan Kementrian Negara/ Lembaga

PMK 255 tahun 2015 tentang Standar Reviu atas laporan keuangan Kementrian Negara/Lembaga.

Pasal 1 Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementrian Negara/Lembaga yang selanjutnya disebut Standar Reviu adalah persyaratan yang diperlukan oleh Aparat Pengawasan Intern Kementrian/Lembaga untuk menjalankan dan mengevaluasi pelaksanaan reviu atas laporan keuangan Kementrian Negara/Lembaga.

3. Preparation, Stipulation and Dissemination of BIG Chairman Regulation related to Strengthening Supervision Program

In order to build the initial foundation of the BIG Control Supervisory Program, in 2016, the Inspectorate compiles BIG Chairman Regulation related to supervision that serves as the basis or standard for employees in implementing the Strengthening Supervision Program in each BIG work unit. These rules include:

a. BIG Chairman Regulation No. 5 of 2016 on the Implementation of Government Internal Control System at the BIG;
b. BIG Chairman Regulation No. 6 of 2016 on Complaints Management and Whistleblowing System in the BIG;
c. BIG Chairman Regulation No. 7 of 2016 concerning Handling of Conflict of Interest in the BIG;
d. BIG Chairman Regulation No. 8 of 2016 on Guidelines for Gratification Control in the BIG; and
e. BIG Chairman Regulation No. 9 of 2016 on Determination of Free Corruption Area and Clean Bureaucracy Area and Serve in the BIG.

These five rules serve as the foundation for the strengthening supervision program and contributes greatly to the increasing value of BIG Bureaucracy Reforms implementation in 2016. These rules are stipulated and disseminated to State Civil Apparatus in the BIG with fully supported by the top leaders .

D. Government Internal Control System

Government Regulation No. 60 Year 2008 on Government Internal Control System. Article 57 Paragraph 1:

The Inspectorate General or any other name functionally performing internal supervision shall review the financial statements of the State Ministry / Institution before it is submitted by the Minister / Leader of the lebga to the Minister of Finance.

E. Standard Review of the financial statements of the State Ministry / Institution

PMK 255 of 2015 on the Upper Standard Review

financial report of the State Ministry / Institution.

Article 1 Standard Review of the State Ministry / Institution Financial Report hereinafter referred to as the Revision Standard is a requirement required by the Ministry / Institution's Internal Audit Officer to exercise and evaluate the implementation of the review of the financial statements Ministry of State / Institution.







FOTO KEGIATAN 2016









Informasi Geospasial Dasar
Informasi Geospasial Tematik
Infrastruktur Informasi Geospasial
Sekretaris Utama
Acara BIG



PROMOSI DAN KERJASAMA

PERKEMBANGAN KERJASAMA DI BIG

Keberadaan lembaga pendidikan dan perguruan tinggi dianggap memiliki peranan penting dan strategis bagi instansi pemerintah untuk memberikan masukan terhadap program kerja yang akan dipersiapkan, maupun dalam rangka mencetak kebutuhan sumber daya manusia (SDM). Tidak terkecuali juga bagi Badan Informasi Geospasial (BIG) yang kini memiliki posisi strategis dalam Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Selama ini, BIG sudah aktif menjalin kerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi ternama di Tanah Air. Memasuki tahun 2016, BIG terus memperluas kerja sama dengan perguruan tinggi nasional, tidak hanya terbatas pada universitas negeri, tetapi juga dengan perguruan tinggi swasta.

Kepala BIG Priyadi Kardono (kanan) bersama Wakil Rektor III UPN "Veteran" Yogyakarta Nurcholis, memperlihatkan naskah kerja sama yang ditandatangani kedua belah pihak di Gedung Jenderal Sudirman, Kampus Gondongcatur, Yogyakarta, akhir Januari 2016.

Pada akhir Januari lalu, BIG bersama Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Akademi Aplikasi Komputer (AKAKOM) Yogyakarta menginisiasi penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama (NKB) atau Memorandum of Understanding (MoU). Acara yang bertajuk "Sarasehan Pemanfaatan Sumberdaya BIG dan LIPI untuk Riset Perguruan Tinggi" ini dihadiri oleh Kepala BIG, Priyadi Kardono, beserta jajaran pejabat BIG lainnya, seperti Kepala Pusat Penelitian, Promosi dan Kerja Sama (PPPKS) Wiwin Ambarwulan; Kepala Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas (PTRA) Mulyanto Darmawan; dan Kepala Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial (PPIG) Khafid. Penandatanganan NKB dilaksanakan di Ruang Seminar STMIK AKAKOM Yogyakarta pada 28 Januari 2016. Di luar BIG, penandatanganan NKB itu turut dihadiri pihak dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan beberapa universitas swasta lainnya yang juga melakukan penandatanganan NKB pada hari yang sama.

DEVELOPMENT OF COOPERATION IN BIG

Educational institutions and universities play important and strategic roles for government agencies to provide input in preparing work programs and produce human resources (HR). This also applies to Geospatial Information Agency (BIG) which now has a strategic position in Jokowi-Jusuf Kalla Government. During this time, BIG has been actively cooperating with several prominent universities in Indonesia. At the beginning of 2016, BIG continues to expand its cooperation with national universities, both state and private universities.

Chairman of BIG Priyadi Kardono (right) with Vice Rector III UPN "Veteran" Yogyakarta Nurcholis, showed a cooperation script signed by both parties at Jenderal Sudirman Building, Gondongcatur Campus, Yogyakarta, end of January 2016.

At the end of January, BIG and Computer Application Academy (AKAKOM) of Computer and Informatics Management College (STMIK) Yogyakarta initiated the signing of a Memorandum of Understanding (MoU). The event, titled "BIG and LIPI Resource Utilization Workshop for Higher Education Research" was attended by Chairman of BIG Priyadi Kardono, along with other BIG officials including Head of Research, Promotion and Cooperation Center (PPPKS) Wiwin Ambarwulan; Head of Spatial and Atlas Mapping Center (PTRA) Mulyanto Darmawan; and Head of Geospatial Information Management and Dissemination Center (PPIG) Khafid. The NKB signing was held at the Seminar Room of STMIK AKAKOM Yogyakarta on 28 January, 2016. The NKB signing was also attended by the Indonesian Institute of Sciences (LIPI) and several other private universities which also signed NKB on the same day.

Penandatanganan NKB ini merupakan kelanjutan dari pertemuan inisiasi yang telah dilakukan BIG dengan STMIK AKAKOM pada tanggal 17 Desember 2015 lalu, dalam rangka membahas pelaksanaan kegiatan kerja sama antar kedua belah pihak. NKB antara BIG dengan STMIK AKAKOM tersebut membahas tentang pemanfaatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait Informasi Geospasial (IG). NKB tersebut ditandatangani oleh Kepala BIG, Priyadi Kardono bersama dengan Ketua STMIK AKAKOM, Cuk Subiyantoro. Ruang lingkup NKB meliputi : penyediaan data dan informasi geospasial; pemanfaatan bersama dan berbagi pakai data dan informasi geospasial; serta penyebarluasan data dan informasi geospasial; penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi di bidang informasi geospasial. Selanjutnya, penyelenggaraan kegiatan peningkatan dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi di bidang informasi geospasial; penyelenggaraan kegiatan peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia terkait informasi geospasial; pembangunan infrastruktur terkait informasi geospasial; pemanfaatan bersama sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan, diseminasi informasi terkait bidang IG untuk mendukung kegiatan pengabdian pada masyarakat serta kegiatan lain yang dipandang perlu.

The NKB signing is a continuation of initiation meeting between BIG and STMIK AKAKOM on 17 December, 2015, in order to discuss the implementation of cooperation activities between both parties. NKB between BIG and STMIK AKAKOM discussed the utilization and development of science and technology related to Geospatial Information (IG). The NKB was signed by the Chairman of BIG, Priyadi Kardono, along with the Chairman of STMIK AKAKOM, Cuk Subiyantoro. The scope of NKB includes: geospatial data and information provision, sharing, and dissemination; research and development of science and technology in geospatial information; organizing scientific and technological improvement and development activities in the field of geospatial information; organizing activities to increase and develop human resources competencies related to geospatial information; infrastructure development related to geospatial information; sharing utilisation of facilities and infrastructure to support activities; IG dissemination to support community service activities as well as other activities that are deemed necessary.

Acara penandatanganan NKB ini juga bertepatan dengan rencana STMIK AKAKOM membuka program studi master di bidang pemetaan. Dengan adanya rencana tersebut, maka STMIK AKAKOM sangat membutuhkan berbagai dukungan penuh dari BIG, demi terciptanya suatu pengajaran yang memenuhi standar dan kualifikasi untuk SDM bidang IG. Dengan terjalinnya hubungan kerja sama tersebut, diharapkan terjadi perkembangan teknologi, khususnya di bidang IG agar semakin berkembang, demi terciptanya pembangunan Indonesia yang semakin baik.

The NKB signing ceremony coincided with the STMIK AKAKOM plan to open a masters study program in the field of mapping. STMIK AKAKOM requires full support from BIG to run the program to create a teaching system that meets the standards and qualifications for IG human resources. Furthermore, the cooperation is expected will encourage the technological development, especially in the field of IG, in order to create a better development of Indonesia.

MOU DENGAN UPN YOGYAKARTA

Tak hanya dengan STMIK AKAKOM, sehari setelahnya BIG juga menandatangani MoU dengan perguruan tinggi lainnya. Masih di kota yang sama, BIG menjalin kerja sama dengan Universitas Pembangunan Nasional (UPN) "Veteran" Yogyakarta. MoU antara BIG dan UPN "Veteran" Yogyakarta ditandatangani pada tanggal 29 Januari 2016 di Ruang Rapat Lantai I Gedung Jenderal Sudirman Kampus Condongcatur, Yogyakarta. Nota kesepahaman ini berisi kerja sama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Nota kesepahaman ini berlaku selama lima tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan bersama kedua belah pihak.

Kerja sama ini bertujuan untuk menambah pengetahuan dan pemanfaatan teknologi informasi tentang informasi geospasial dalam rangka meningkatkan peran serta di dunia pendidikan. Selain itu, juga dalam rangka meningkatkan sinergi antara kedua belah pihak demi mewujudkan peningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya di bidang informasi geospasial.

KERJA SAMA DENGAN UNILA

Dari Kota Pelajar, BIG terus memperluas jaringan kerja samanya dengan kampus-kampus lain di Indonesia. Kali ini sasaran berlokasi di luar Pulau Jawa, tepatnya di Provinsi Lampung, yakni Universitas Lampung (Unila). Penandatanganan NKB antara BIG dan Unila dilaksanakan di Hotel Novotel, Bandar Lampung pada tanggal 18 Februari lalu. Naskah NKB tersebut ditandatangani

MOU WITH UPN YOGYAKARTA

The day after the NKB signing with STMIK AKAKOM, BIG also signed MoU with another university located in the same city. BIG established a cooperation with National Development University (UPN) "Veteran" Yogyakarta. The MoU between BIG and UPN "Veteran" Yogyakarta was signed on 29 January, 2016 at the First Floor Meeting Room of Jenderal Sudirman Building, Condongcatur Campus, Yogyakarta. This Memorandum of Understanding contains cooperation in education, research and community service. This Memorandum of Understanding is valid for five years and may be extended in accordance with the mutual agreement of both parties.

This cooperation aims to increase knowledge and utilization of information technology on geospatial information in order to increase its participation in education. In addition, it also aims to improve the synergy between the two parties to improve the quality of human resources, especially in the field of geospatial information.

COOPERATIONS WITH UNILA

BIG continues to expand its cooperation network with other campuses in Indonesia. The next target was located outside Java Island namely University of Lampung (Unila) in Lampung Province. The NKB signing between BIG and Unila was held at Novotel Hotel, Bandar Lampung on 18 February 2016. The NKB document was signed by Chairman of BIG, Priyadi Kardono, and Unila Rector,

oleh Kepala BIG, Priyadi Kardono bersama Rektor Unila, Hasriadi Mat Akin. Pada hari itu juga ditandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait pembangunan Pusat Pengembangan Infrastruktur Informasi Geospasial (PPIIG) dengan nama Unit Pengembangan dan Pemanfaatan Informasi Geospasial di Unila dan Pelayanan Produk Informasi Geospasial Badan Informasi Geospasial (Sentra Peta). Penandatanganan PKS dilaksanakan oleh Kepala Pusat Penelitian, Promosi, dan Kerja Sama (PPPKS) BIG, Wiwin Ambarwulan, bersama Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UNILA, Muhammad Fuad.

Hasriadi Mat Akin. At the same day, it was also signed a Cooperation Agreement (PKS) related to the development of Geospatial Information Infrastructure Development Center (PPIIG) under the name of Geospatial Information Development and Utilization Unit in Unila and BIG Geospatial Information Products Services (Sentra Peta). The PKS was signed by Head of Research, Promotion and Cooperation Center (PPPKS) BIG, Wiwin Ambarwulan, and Dean of Faculty of Teacher Training and Education UNILA, Muhammad Fuad.

Dengan dibentuknya PPIIG di Unila diharapkan dapat menjadi perpanjangan tangan BIG, terutama dalam pengembangan SDM, karena BIG tidak akan mampu menangani sendiri untuk seluruh wilayah di Indonesia. Ke depannya, Unila juga diharapkan mampu memberikan training atau pelatihan terkait Sistem Informasi Geografis (SIG). Sebab, di daerah/tingkat kabupaten masih sangat kurang SDM yang memahami tentang SIG. Terkait RDTR juga, nantinya sebelum ke BIG, pemerintah daerah bisa ke PPIIG dulu untuk melakukan konsultasi, sehingga apabila sudah 90% selesai barulah diberikan ke BIG. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk menghemat biaya dan waktu.

The establishment of PPIIG in Unila is expected to be an extension of BIG, especially in the development of human resources, because BIG will not be able to handle it alone to meet the needs throughout Indonesia. In the future, Unila is also expected to provide training related to Geographic Information System (GIS) because human resources who understand GIS at the district/city level are still lacking. Other expectations related to RDTR where the local government can consult to PPIIG prior to BIG so that only RDTR that are nearly completed (90%) can be submitted to BIG. It will save costs and time.

HARI INFORMASI GEOSPASIAL KE-47 'BIG BANGKIT DAN TERBARUKAN'

Dalam rangka memperingati Hari Informasi Geospasial (HIG) ke-47 yang jatuh pada 17 Oktober 2016, Badan Informasi Geospasial (BIG) telah menyelenggarakan berbagai kegiatan selama sebulan penuh sejak 1 hingga 31 Oktober 2016. Penyelenggaraan Bulan Informasi Geospasial Tahun 2016 ini mengangkat tema "BIG Bangkit dan Terbarukan". Bulan Informasi Geospasial Tahun 2016 dimanfaatkan BIG sebagai momentum untuk terus berubah dan menjadi besar. Menurut Kepala BIG Priyadi Kardono, tema ini sebagai implementasi dari Kabinet Kerja untuk Kerja, Kerja, dan Kerja. Tema ini sekaligus menjadi komitmen BIG dalam penyelenggaraan IG yang mengacu kepada satu standar, satu referensi, satu geodatabase dan satu geoportal sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (One Map Policy).

THE 47TH GEOSPATIAL INFORMATION DAY 'BIG RISE AND RENEWABLE'

In order to celebrate the 47th Geospatial Information Day (HIG) on 17 October 2016, the Geospatial Information Agency (BIG) organized various activities for a month from 1 to 31 October 2016. The 2016 Geospatial Information Month is titled "BIG Rise and Renewable". BIG used this event as a momentum to keep changing and become substantial. According to Chairman of BIG, Priyadi Kardono, the theme of this event is an implementation of the motto of Working Cabinet namely Work, Work and Work. It is also a commitment of BIG in the IG implementation which refers to one standard, one reference, one geodatabase and one geoportal as mandated by Presidential Regulation (Perpres) No. 9/2016 on Accelerating the Implementation of One Map Policy.



Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Prof Dr Bambang P.S. Brodjonegoro bersama Kepala BIG Dr. Priyadi Kardono, M.Sc, Gubernur Kalimantan Timur Drs. H. Awang Faroek Ishak, M.M, M.Si, Gubernur Kalimantan Utara

Minister of National Development Planning (PPN)/Head of Bappenas Prof Dr Bambang P.S. Brodjonegoro with Chairman of BIG Dr. Priyadi Kardono, M.Sc, Governor of East Kalimantan Drs. H. Awang Faroek Ishak, M.M, M.Si, Governor of North Kalimantan Dr. Ir. H. Irianto

Dr. Ir. H. Irianto Lambrie M.M., Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar, Dirjen Planologi Hutan dan Tata Lingkungan Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc, serta Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BNPB, Ir. B. Wisnu Widjaja, M.Sc memukul kendang secara bersamama-sama sebagai tanda dibukanya Puncak Peringatan Bulan Informasi Geospasial 2016.

Bulan Informasi Geospasial dan HUT BIG ke-47 diisi berbagai kegiatan yang digelar sejak 1-31 Oktober 2016. Kegiatan yang menyentuh berbagai lapisan masyarakat umum dan dilaksanakan di berbagai tempat itu,yakni seminar nasional, pertandingan olah raga, bazar, khitanan massal, pengobatan gratis, donor darah, open house, workshop dan roadshow geospasial. BIG juga memberikan penganugerahan "Bhumandala Award" kepada Kementerian/ Lembaga (K/L), pemerintah provinsi, kabupaten/kota yang telah mengembangkan Simpul Jaringan Informasi Geospasial dalam kerangka pembangunan nasional. Penganugerahan ini meliputi lima kategori, yaitu 5 Simpul Jaringan Terbaik untuk kategori K/L, 5 Simpul Jaringan Terbaik untuk Kategori Provinsi, 5 Simpul Jaringan Terbaik untuk Kategori Kabupaten, 5 Simpul Jaringan Terbaik untuk Kategori Kota, serta 5 Terbaik untuk Kategori Simpul Jaringan Berkembang.

Puncak peringatan HUT BIG ke-47 pada 17 Oktober 2016 diawali dengan pelaksanaan upacara bendera yang diikuti seluruh jajaran pegawai BIG. Lalu dilanjutkan dengan pemotongan nasi tumpeng. Puncak peringatan PPN/Kepala Bappenas Bambang P.S. Brodjonegoro, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) San Afri Awang, serta Deputi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Wisnu Wijaya.

Hadir juga sejumlah kepala daerah, baik gubernur, bupati dan wali kota, diantaranya Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak, Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Rustam Effendi dan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar.

LOMBA GAMBAR PETA UNTUK ANAK TAHUN 2016

Lomba Gambar Peta Untuk Anak (LGPA) Tahun 2016 dilaksanakan oleh BIG bekerjasama dengan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) serta UPT Terpadu Universitas Diponegoro. LGPA 2016 dilaksanakan di Auditorium FPIK Universitas Diponegoro, Semarang 10 April 2016 diikuti oleh 231 peserta dari 253 pendaftar dengan tema "Bumiku di Masa Kini". Tema ini sesuai dengan tema lomba gambar peta untuk anak tingkat internasional tahun 2015 yang memperebutkan "Barbara Patchenik Award".

LGPA 2016 adalah lomba gambar peta untuk anak tingkat regional yang dibagi dalam 4 kelompok yaitu:

Lambrie M.M., Vice Governor of West Java Deddy Mizwar, Director General of Forestry and Environmental Planning Dr. Ir. San Afri Awang, M. Sc, and Deputy of Prevention and Preparedness of BNPB, Ir. B. Vishnu Widjaja, M.Sc hits the kendang jointly as a sign of the opening of the peak activity of 2016 Geospatial Information Month.

The Geospatial Information Month and the 47th Anniversary of BIG is filled with various activities held from 1 to 31 October 2016 involving various levels of public and implemented in various places. Those activities are national seminars, sports events, bazaars, mass circumcisions, free medical treatment, blood donation, open houses, workshops and geospatial roadshows. BIG also provides "Bhumandala Award" to Ministries/Agencies (K/L) as well as provincial and district governments that have developed the Geospatial Information Network Node within the national development framework. This award includes five categories: 5 Best Network Nodes for K/L categories, 5 Best Network Nodes for Provinces Category, 5 Best Network Nodes for Regency Categories, 5 Best Network Nodes for City Categories, and 5 Best for Developing Network Node Categories.

The commemoration of the 47th anniversary of BIG on 17 October 2016 begins with a flag ceremony followed by all BIG employees. Then proceed with the cutting of rice cone. Peak commemoration is attended by the Minister of National Development Planning (PPN)/ Head of Bappenas Bambang P.S. Brodjonegoro, Director General of Forestry and Environmental Planning, Ministry of Environment and Forestry (KLHK) San Afri Awang, and Deputy of Prevention and Preparedness of National Disaster Management Agency (BNPB) Wisnu Wijaya.

The event is also attended by regional governors, regents and mayors, including East Kalimantan Governor Awang Faroek Ishak, North Kalimantan Governor Irianto Lambrie, Bangka Belitung Islands Governor Rustam Effendi and Vice Governor of West Java Deddy Mizwar.

MAP DRAWING COMPETITION FOR CHILDREN 2016

Map Drawing Competition for Children (LGPA) 2016 is organized by BIG in cooperation with Faculty of Fisheries and Marine Sciences (FPIK) and Integrated UPT of Diponegoro University. The LGPA 2016 is held at the FPIK Auditorium of Diponegoro University, Semarang on 10 April 2016, followed by 231 participants from 253 registrants with the theme "My Earth Today". This theme is in accordance with the international map drawing competition for children in 2015 who competed for "Barbara Patchenik Award"

The LGPA 2016 is a regional map drawing competition for children divided into 4 groups:

Kelompok	Jenis Lomba	Jumlah Peserta
Kelompok A: PAUD – TK	mewarnai	74
Kelompok B: SD kelas 1 – Kelas 3	menggambar	98
Kelompok C: SD kelas 4 – Kelas 6	menggambar	54
Kelompok B : SMP	menggambar	31

Lomba Gambar Peta Untuk Anak tahun 2016 dibuka oleh Kepala Pusat Penelitian, Promosi dan Kerja Sama, Dr. Wiwin Ambarwulan. Dalam sambutannya beliau mengatakan bahwa lomba ini dimaksudkan untuk mengenalkan tentang informasi geospasial khususnya peta kepada anak-anak sejak dini. Selain itu juga untuk memberikan pengalaman bersosialisasi dan berkompetisi kepada anak-anak. Sementara itu, dari Unpversitas Diponegoro hadir Dr.rer. nat Anto Budihardjo mewakili Wakil Rektor I Universitas Diponegoro. Dalam sambutannya beliau berterima kasih kepada BIG yang telah memberikan kepercayaan kepada Universitas Diponegoro berkerjasama menyelenggarakan acara lomba gambar ini.

Kegiatan ini merupakan pengalaman berharga bagi Universitas Diponegoro, khususnya kepada seluruh panitia yang berasal dari mahasiswa dan staf UNDIP yang terlibat dalam kegiatan ini dalam penyelenggaraan kegiatan yang belum pernah dilaksanakan di kampus. Kegiatan ini merupakan bagian dari tridarma perguruan tinggi terutama untuk pengabdian kepada masyarakat.

Penjurian lomba gambar dilaksanakan pada hari yang sama, oleh tim juri yang terdiri dari Diah Kirana, MSc (Universitas Pakuan), F. Wahyutomo, SH (BIG), Dr. Ing. E. Pradipto (UGM), Dr. Suwarno (ISI Yogyakarta) dan Prof. Dr. Agus Hartoko (UNDIP), yang bertindak selaku ketua Dewan Juri.

Hasil penjurian menetapkan pemenang untuk setiap kelompok sebagai berikut:

The Map Drawing Competition for Children 2016 is opened by Head of Research, Promotion and Cooperation Center BIG, Dr. Wiwin Ambarwulan. In her speech, she mentions that the competition is intended to introduce geospatial information, especially maps, to children from their early ages. It is also to provide experience of socializing and competing to the children. This event is also attended by Dr.rer.nat Anto Budihardjo representing Vice Rector I of Diponegoro University. In his speech, he expresses his gratitude to BIG who has given confidence to Diponegoro University in collaboration to organize this drawing competition event.

This event is a valuable experience for Diponegoro University, especially for students and UNDIP staff involved in the organizing committees. This event has never been implemented before in UNDIP campus. This event is part of the tridarma of higher education especially for community service.

The judging of the drawing competition takes place on the same day, by a jury consisting of Diah Kirana, MSc (Pakuan University), F. Wahyutomo, SH (BIG), Dr. Ing. E. Pradipto (UGM), Dr. Suwarno (ISI Yogyakarta) and Prof. Dr. Agus Hartoko (UNDIP), acting as the chair of the jury.

The judging result sets the winners for each group as follows:

Kelompok A

Juara	Nama	Asal Sekolah
Juara 1	Yoga Tantra	TK Martinus
Juara 2	Fulvian Daffa Aptancya N	TK RA Istiqomah Ungaran
Juara 3	Carell Alberth Adi Nugroho	TK Gratia
Harapan 1	Naura Khalisa Zabrina	TKIT Hydayatullah Banyumanik Semarang

Kelompok B

Juara	Nama	Asal Sekolah
Juara 1	Farah Putri Fathimah Hidayanto	SD Tlogosari Kulon 4 Semarang
Juara 2	Irfan Hertanu Wijaya	SD Karangturi Semarang
Juara 3	Muhammad Faiz	SD Islam Istiqomah Ungaran
Harapan 1	Salma Nadhiroh	SD Pedurungan Tengah 2 Semarang

Kelompok C

Juara	Nama	Asal Sekolah
Juara 1	Alya Rizky s	SDIT Tunas Harapan
Juara 2	Cahya Heningtyas Regina	SD Kalinegoro 5
Juara 3	Kimberly Chrisbelle Singgih	SD Kanisius Jepara
Harapan 1	Febionetta Probowati	SDN Tambak Aji 4 Ngaliyan Semarang

Kelompok D

Juara	Nama	Asal Sekolah
Juara 1	Dian Putri Anggreini	SMPN 3 Semarang
Juara 2	FF. Risqiawan	SMPN 3 Semarang
Juara 3	Dealis Sabilla Huda	SMP 14 Semarang
Harapan 1	Dian Putri Anggreini	SMPN 3 Semarang







FOTO KEGIATAN 2016









Informasi Geospasial Dasar
Informasi Geospasial Tematik
Infrastruktur Informasi Geospasial
Sekretaris Utama
Acara BIG



PENELITIAN

Indonesia dengan jumlah penduduk lebih dari 200 juta jiwa, publikasi ilmiahnya masih kurang jika dibandingkan dari negara tetangga ASEAN seperti Malaysia (urutan ke-37) dengan jumlah publikasi karya ilmiah 125.084, Singapura (peringkat ke-32) dengan jumlah publikasi 171.037, dan Thailand (peringkat ke-43) dengan jumlah publikasi 95.690. Indonesia hanya unggul sedikit di atas Vietnam peringkat 66 yang memiliki jumlah publikasi sebanyak 20.460. Badan Informasi Geospasial (BIG) melalui Pusat Penelitian, Promosi dan Kerja Sama khususnya melalui Bidang Penelitian telah menetapkan hasil penelitian yang berkualitas untuk mendukung program prioritas nasional dan program BIG.

PENELITIAN BIG DALAM MENYELESAIKAN PERMASAHAN NASIONAL

Penelitian yang dilaksanakan oleh para Peneliti BIG difokuskan pada bidang IG, yang secara umum terbagi atas 3 fokus yaitu penelitian terkait Informasi Geospasial Dasar (IGD), Informasi Geospasial Tematik (IGT) dan Infrastruktur Informasi Geospasial (IIG). Bidang Penelitian BIG, saat ini membentuk setidaknya 2 kelompok penelitian (Kelti) yaitu kelti IGD dan kelti IGT. Masing-masing Kelti diketuai oleh seorang Peneliti Utama (Profesor Riset) yang sesuai dengan kompetensi keahliannya.

Berlatar belakang di atas, maka Kepala Bidang Penelitian bersama dengan para peneliti dan didukung oleh kepala Pusat PPKS, menentukan topik-topik penelitian yang dapat mendukung Prioritas Pembangunan Nasional dan sekaligus juga mendukung Prioritas BIG. Harapannya penelitian yang dilakukan dapat bermanfaat bagi pemecahan permasalahan nasional dan permasalahan internal BIG.

Adapun topik-topik penelitian yang dilaksanakan tahun 2016 dan kaitannya dengan program prioritas nasional dan prioritas BIG, seperti yang tercantum pada **Tabel 1.**

Indonesia with a population of more than 200 million people, the number of scientific publications is less than that of neighboring ASEAN member countries such as Malaysia (ranked 37th) with the number of publications of 125,084 papers, Singapore (ranked 32nd) with 171,037 papers, and Thailand (ranked 43rd) with 95,690 papers. Indonesia is only slightly ahead of Vietnam (ranked 66th) with 20,460 papers. The Geospatial Information Agency (BIG) through the Research, Promotion and Cooperation Center particularly the Research Field, has established qualified research results to support the national priority programs and BIG programs.

BIG RESEARCH IN SOLVING NATIONAL PROBLEMS

BIG Research is focused on the field of IG, which is generally divided into 3 focuses: Basic Geospatial Information (IGD), Thematic Geospatial Information (IGT), and Geospatial Information Infrastructure (IIG). The field of BIG Research, currently, forms at least 2 research groups (Kelti), namely IGD and IGT groups. Each Kelti is chaired by a Principal Researcher (Research Professor) in accordance with his/her competency and expertise.

Based on the above background, the Head of Research Field together with the researchers and supported by the head of the PPKS Center, determine the research topics that can support the National Development Priority and also support the BIG Priority. The hope that the research can be useful for solving national problems and internal problems of BIG.

The research topics are conducted in 2016 and relate to BIG national priority programs and priorities, as listed in Table 1.

Tabel 1. Topik Kegiatan Penelitian Tahun 2016 dan Prioritas Nasional

No	Topik Penelitian	Kontribusi pada Prioritas
1	Dinamika Spasial untuk mendukung Ketahanan Pangan	Dimensi pembangunan sektor unggulan: Pembangunan Kedaulatan Pangan
2	Kajian kesesuaian RTRW pada potensi daerah dan realisasinya	Dimensi pembangunan pemerataan dan kewilayahan, prioritas nasional Tata Ruang dan Pertanahan
3	Penelitian Lahan Gambut	Pembangunan Kawasan Khusus; Mendukung BRG
4	Penelitian Marin Habitat dan kualitas air laut menggunakan Citra Satelit	Prioritas Nasional kemaritiman
5	Penelitian Pemetaan Desa Terpencil/tertinggal (Peta Desa)	Dimensi pembangunan pemerataan dan kewilayahan prioritas Pembangunan Perkotaan dan Pedesaan
6	Pengembangan Geodesi Kelautan dan Kadaster Kelautan	Prioritas Nasional Kemaritiman
7	Penelitian integrasi DEM untuk membangun DEM Nasional	Mendukung penyelenggaraan IG Dasar Nasional
8	Kajian integrasi multi source GNSS untuk perapatan jaring kontrol geodesi dan geodinamika	Mendukung penyelenggaraan data IG Nasional

PROGRAM LINTAS NASIONAL DALAM MENDUKUNG AGENDA PRIORITAS NASIONAL (NAWA CITA)

Dalam rangka turut melaksanakan prioritas nasional, maka BIG melalui Pusat Penelitian, Promosi dan Kerja Sama pada TA 2015 telah menyusun program lintas nasional untuk mendukung agenda prioritas nasional, diantaranya adalah: kegiatan penelitian, pendidikan dan pelatihan, kerjasama lintas K/L serta daerah dan perguruan tinggi untuk penyelenggaraan dan pemanfaatan bersama informasi geospasial untuk mendukung pembangunan, serta pelayanan publik geospasial kepada berbagai *stakeholders*.

NATIONAL CROSS PROGRAM IN SUPPORT OF NATIONAL PRIORITY AGENDA (NAWA CITA)

In order to participate in national priorities, BIG through the Center for Research, Promotion and Cooperation in FY 2015 has developed a cross-national program to support the national priority agenda, including: research, education and training activities, cross-K / L and regional cooperation and universities high for the implementation and shared use of geospatial information to support development, as well as geospatial public services to various stakeholders.

Tabel 2. Kegiatan Pusat PPKS yang Merupakan Program Lintas Nasional dalam Mendukung Agenda Prioritas Nasional

Table 2. PPKS Center Activities which is a National Cross Program in Support of the National Priority Agenda

No	Kegiatan	Program Prioritas Nasional	Unit Pelaksana
1	Penelitian Dinamika Spasial Penggunaan Lahan untuk Mendukung Ketahanan Pangan	dimensi pembangunan sektor unggulan: Pembangunan Kedaulatan Pangan	Bidang Penelitian
2	Penelitian Marin Habitat danKualitas air laut menggunakan citra satelit	dimensi pembangunan sektor unggulan: Pembangunan Kemaritiman dan Kelautan	
3	Penelitian Pemetaan Desa Terpencil/tertinggal (Peta Desa)	dimensi pemerataan dan kewilayahan: Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan	
4	Penelitian Penelitian kesesuaian RTRW pada potensi daerah dan realisasinya	dimensi pemerataan dan kewilayahan: pembangunan wilayah	
5	Penelitian Gambut	dimensi pembangunan sektor unggulan: kebencanaan	
6	Pengembangan geodesi kelautan dan kadaster kelautan	dimensi pembangunan sektor unggulan: Pembangunan Kemaritiman dan Kelautan	

No	Kegiatan	Program Prioritas Nasional	Unit Pelaksana
7	Penyelenggaraan Promosi Geospasial (Pameran yang ada kaitannya dengan prioritas nasional)	dimensi pemerataan dan kewilayahan: Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan	Bidang Promosi dan Kerja Sama
8	Kerjasama dengan Kementerian, Lembaga dan Swasta	dimensi pemerataan dan kewilayahan: Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan	
9	Kerjasama dengan Pemerintah Daerah	dimensi pemerataan dan kewilayahan: Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan	
10	Penyelenggaraan Kehumasan dan Pengelolaan Media	dimensi pemerataan dan kewilayahan: Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan	
11	Diklat Teknis Geospasial dan Fungsional Survei dan Pemetaan	dimensi pembangunan manusi : Pembangunan Pendidikan	Balai Diklat Geospasial
12	Layanan Produk Geospasial	dimensi pemerataan dan kewilayahan: Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan	Balai Layanan Jasa dan Produk Geospasial
13	Layanan Jasa Geospasial	dimensi pemerataan dan kewilayahan: Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan	

PENELITIAN INFORMASI GEOSPASIAL YANG BERKUALITAS

Dalam rangka mengisi gap tersedianya publikasi ilmiah pada jurnal internasional, maka Bidang Penelitian juga telah melakukan kegiatan : (i) penyelenggaraan workshop penulisan ilmiah, (ii) mengundang narasumber peneliti dari LIPI yang mempunyai banyak publikasi internasional serta (iii) menyediakan anggaran pada RKAKL 2016 biaya untuk publikasi pada jurnal internasional. Dari 8 penelitian di Bidang Penelitian pada tahun 2016, telah direncanakan satu calon KTI yang akan dipublikasikan pada jurnal internasional, yaitu hasil dari penelitian Dinamika Spasial untuk Ketahanan Pangan yang diharapkan akan publikasi pada tahun 2017 (lihat Tabel 1).

QUALIFIED GEOSPATIAL INFORMATION RESEARCH

In order to fill the gap in the availability of scientific publications in international journals, the Field of Research has also undertaken: (i) organizing scientific writing workshops; (ii) inviting resource persons from LIPI who have many international publications; and (iii) providing budget to RKAKL 2016 for publication in international journals. Of the 8 researches in the field of research in 2016, a KTI candidate has been planned to be published in international journals, which is the result of the Spatial Dynamics of Food Security research which is expected to be published in 2017 (see Table 1).

Tabel 3. Calon Karya Ilmiah yang akan masuk jurnal internasional

Table 3. Prospective Scientific Works that will enter international journals

No	Topik Penelitian	Rencana Judul Karya Ilmah	Penulis	Status
1	Dinamika Spasial untuk mendukung Ketahanan Pangan	LIMITING FACTOR BASED INPUT FOR PADDY FIELDS IN INDRAMAYU, WEST JAVA	Wiwin Ambarwulan Widiatmaka Irmadi Nahib Niendyawati Abdul Halim	Draft dalam bahasa Inggris

Rasio penelitian yang sejalan dengan agenda prioritas nasional dibanding total penelitian yang dilakukan pada tahun berjalan

Pada TA 2016 telah dilaksanakan 8 kegiatan penelitian, 6 diantaranya dilakukan penelitian yang disesuaikan dengan agenda prioritas nasional yaitu:

The ratio of research is in line with the national priority agenda compared to the total research conducted in the current year

In TA 2016, 8 research activities were conducted, 6 of which were conducted in accordance with the national priority agenda, namely:

Tabel 4. Kegiatan penelitian yang sesuai dengan prioritas nasional

Table 4. Research activities that meet national priorities

No	Kegiatan	Program Priotas Nasional
1	Penelitian Dinamika Spasial Penggunaan Lahan untuk Mendukung Ketahanan Pangan	dimensi pembangunan sektor unggulan: Pembangunan Kedaulatan Pangan

2	Penelitian Marin Habitat danKualitas air laut menggunakan citra satelit	dimensi pembangunan sektor unggulan: Pembangunan kedaulatan pangan; Kemaritiman dan Kelautan
3	Penelitian Pemetaan Desa Terpencil/tertinggal (Peta Desa)	dimensi pemerataan dan kewilayahan: Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan
4	Penelitian kesesuaian RTRW pada potensi daerah dan realisasinya	Dimensi pembangunan pemerataan dan kewilayahan, prioritas nasional Tata Ruang dan Pertanahan
5	Penelitian Gambut	Dimensi pembangunan pemerataan dan kewilayahan: Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan / Pembangunan Kawasan Khusus
6	Pengembangan geodesi kelautan dan kadaster kelautan	dimensi pembangunan sektor unggulan: Pembangunan Kemaritiman dan Kelautan







FOTO KEGIATAN 2016





Informasi Geospasial Dasar
Informasi Geospasial Tematik
Infrastruktur Informasi Geospasial
Sekretaris Utama
Acara BIG



Penyelenggaraan kegiatan Manajemen SDM mulai dari mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan SDM di BIG. Pada kegiatan ini juga dilakukan pengembangan sistem yang dikerjakan bersama Pusat Penyebarluasan Informasi Geospasial untuk mendukung kegiatan operasional Bagian Kepegawaian dan Organisasi.

Kegiatan Manajemen PNS BIG didasarkan pada UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Di dalam UU ASN Disebutkan bahwa manajemen PNS meliputi: a. penyusunan dan penetapan kebutuhan; b. pengadaan; c. pangkat dan jabatan;d. pengembangan, pengembangan karier, pola karier; promosi; mutasi; penilaian kinerja; penggajian dan tunjangan; penghargaan; disiplin; pemberhentian; m.jaminan pensiun dan jaminan hari tua; dan n. perlindungan.

Dalam dokumen road-map reformasi birokrasi 2015-2019, disebutkan isu strategis dalam penataan SDM Aparatur yaitu: akselerasi implementasi UU ASN secara konsisten, penetapan formasi CASN secara ketat, sistem rekrutmen CASN yang berbasis kompetensi, sistem promosi terbuka, penempatan dalam jabatan berbasis kompetensi, sistem remunerasi berbasis kinerja, penguatan reward dan punishment secara fair, penyempurnaan jaminan sosial (kesehatan dan ketenagakerjaan), penguatan sistem informasi kepegawaian, dengan hasil akhir yang ingin dicapai adalah meningkatnya profesionalisme aparatur.

Jumlah keseluruhan SDM BIG pada tahun 2016 adalah 734 orang. Berdasarkan data jenis kelamin, diperoleh 67% PNS BIG adalah laki-laki dan 33% adalah perempuan. Hal ini masih sesuai dengan jenis pekerjaan lapangan yang masih mendominasi proses bisnis utama di BIG. Meskipun di masa depan, dengan adanya kemajuan teknologi di bidang informasi geospasial, maka komposisi jenis kelamin tidak akan lagi menjadi kendala.

The organization of HR Management activities consists of planning, implementation, monitoring and evaluation of HR management in BIG. It also develops a system undertaken with Geospatial Information Dissemination Centre to support operational activities of the Personnel and Organization Section.

BIG Civil Servant (PNS) Management Activities is based on Law No. 5 of 2014 on State Civil Apparatus. In the ASN Law is stated that the management of civil servants include: a. preparation and determination of needs; b. procurement; c. rank and position; d. development, career development, career patterns; promotion; mutation; performance assessment; payroll and benefits; appreciation; discipline; dismissal; m. pension guarantee and retirement; and n. protection.

In the 2015-2019 bureaucratic reform road-map document is stated that strategic issues in the structuring of HR apparatuses include: accelerating the implementation of ASN Law consistently, determining strict formation of candidates for State Civil Apparatus (CASN), competency-based CASN recruitment system, open promotion system, placement in positions based on competency, performance based remuneration system, strengthening a fair reward and punishment, completing social security (health and employment), strengthening personnel information system, with the final result to be achieved is the enhancement of apparatus professionalism.

The total number of BIG HR in 2016 was 734 people. It consists of 67% male and 33% female. It corresponds to the type of fieldwork that still dominates the main business processes at BIG. Although in the future, with technological advances in the field of geospatial information, the sex composition will no longer be an obstacle.

Berdasarkan tahun kelahiran, pegawai BIG terdiri menjadi 3 generasi. Didominasi oleh Generasi Y (Gen Y), yaitu generasi yang lahir diatas tahun 1980. Diikuti oleh Gen X yang lahir antara tahun 1965 hingga 1980. Terakhir adalah Baby Boomers yang lahir sebelum tahun 1965. Multi-generasi tentu mempunyai cara pandang dan cara berpikir yang berbeda pula dalam menyikapi sesuatu. Merupakan sebuah tantangan tersendiri untuk menjembatani perbedaan generasi tersebut.

According to the year of birth, BIG employees consist of 3 generations. The dominant generation is Generation Y (Gen Y) who born after 1980. It is followed by Gen X who born between 1965 and 1980. The last generation is Baby Boomers who born before 1965. Every generation has different ways of looking and thinking in addressing things. This is a challenge to bridge the gap between the generations.

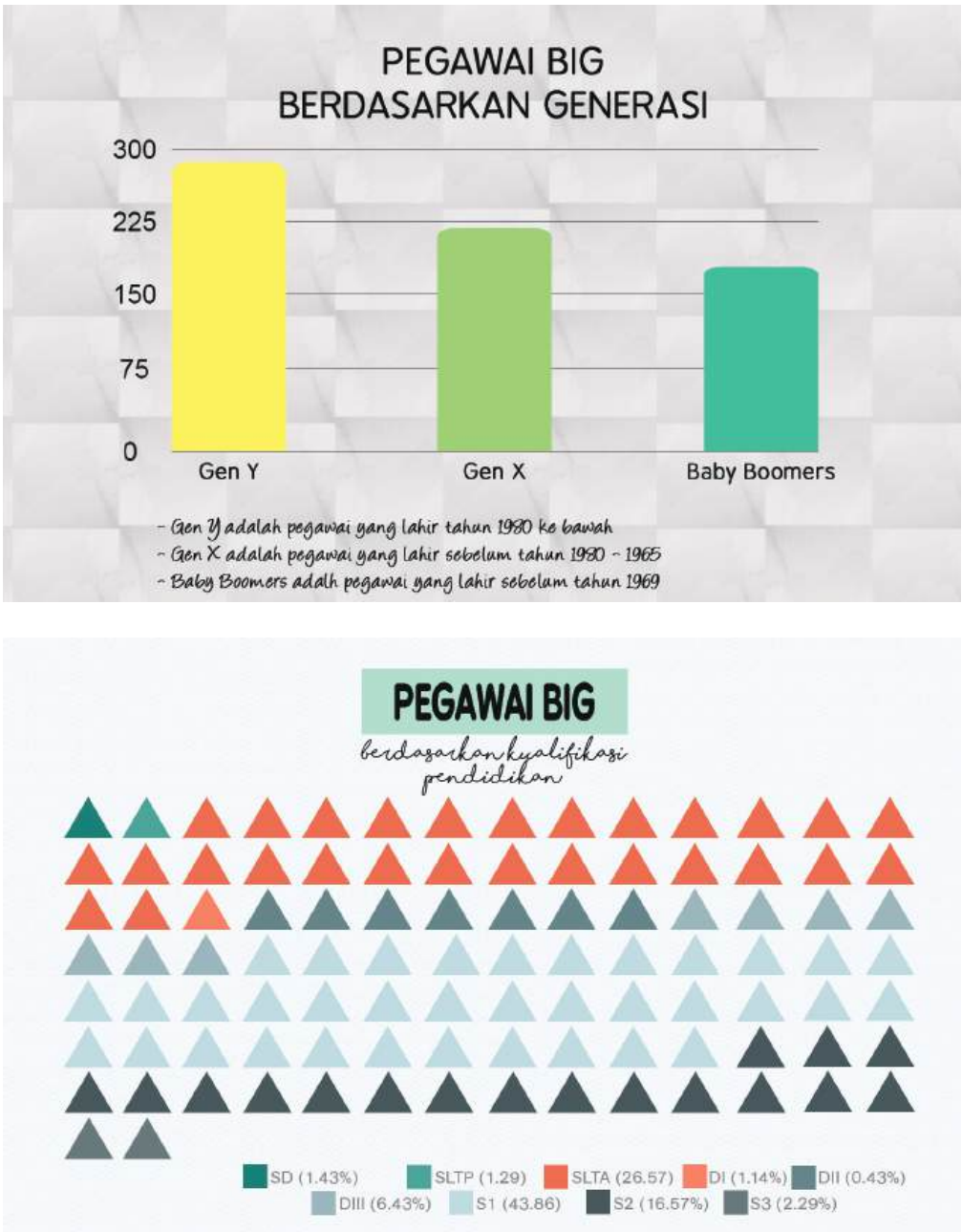


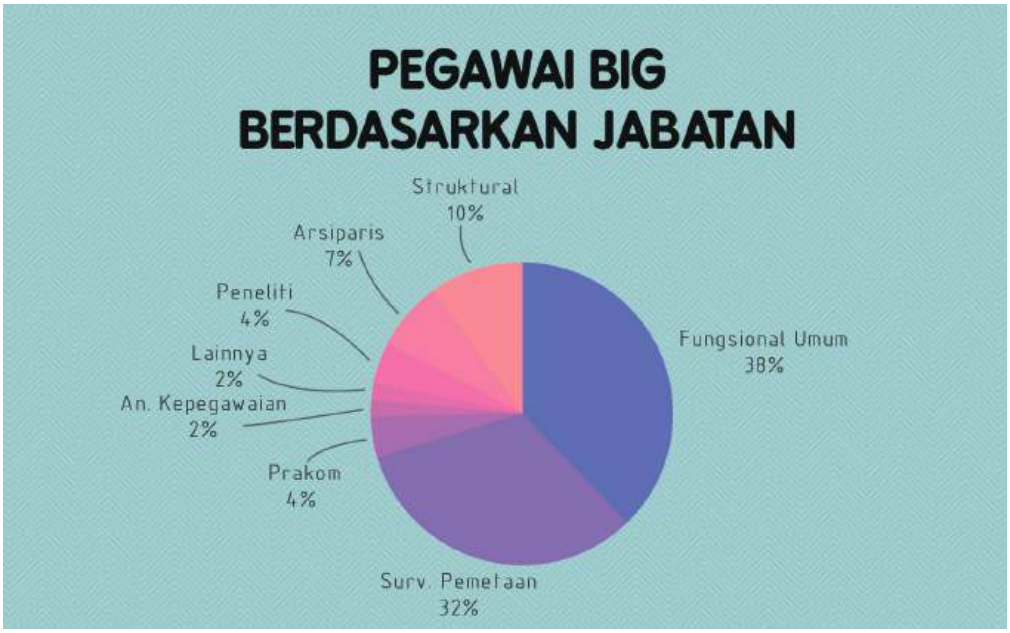
Figure 1 The Generation of BIG Employees

Pegawai BIG berasal dari berbagai macam latar Pendidikan yang sebagian besar merupakan lulusan S1 (43,86%). Secara rinci komposisi Pendidikan pegawai BIG dapat dilihat pada gambar 2.

Berdasarkan persebaran jabatan, diperoleh jumlah Jabatan Fungsional Umum (JFU) masih mendominasi. Komposisi JFU terbanyak, terutama di pengelola keungan dan bidang administrasi pendukung kegiatan lainnya. Dengan adanya pengelolaan SDM berbasis kompetensi diharapkan JFU ini juga tetap dikelola dengan baik, sehingga dapat dinilai sesuai kompetensinya.

BIG employees have various educational backgrounds where the most are bachelor degree (43.86%). Details of the composition of BIG employees by education can be seen in Figure 2.

According to distribution of positions, General Functional Position (JFU) remains dominant. Sections with most JFU composition are financial managers and other supporting administration activities. The enforcement of competency-based human resources management is expected to keep managing and assessing JFU in accordance with its competence.





Pegawai BIG terdistribusi dalam 12 Pusat/Biro dan 1 Unit Eselon I. 12 Pusat/Biro tersebut antara lain Biro PKH, Biro UK, Inspektorat, PPKS, PJKGG, PPRT, PPKLP, PPBW, PPIT, PTRA, PPIG dan PSKIG.

Berdasarkan golongan, penerimaan CPNS formasi tahun 2013 dan 2014 sebanyak 151 orang lulusan S1 membuat komposisi PNS berdasarkan golongan didominasi oleh pegawai gol. III/a. Dan berdasarkan usia, usia diatas 50 tahun (kurang dari 9 tahun pensiun) harus diperhatikan karena merupakan komposisi terbesar, 36% dari total pegawai. Hal ini membuat pengelola SDM harus menyiapkan proses regenerasi dengan baik.

BIG employees are distributed in 12 Centers / Bureaus and 1 Echelon I Unit. 12 The Center / Bureau includes Bureau of PKH, UK Bureau, Inspectorate, PPKS, PJKGG, PPRT, PPKLP, PPBW, PPIT, PTRA, PPIG and PSKIG.

According to the level, the acceptance of CPNS formation in 2013 and 2014 as many as 151 bachelors make the composition of BIG employees is dominated by level III/a. According to the age, employees with the age above 50 years (less than 9 years before retirement) must be considered as the largest composition, 36% of the total employees. This makes HR managers must prepare the regeneration process well.







FOTO KEGIATAN 2016





LAYANAN HUKUM

Selama periode tahun anggaran 2016, Bagian Hukum Badan Informasi Geospasial, sesuai dengan tugas dan fungsinya, telah melaksanakan pelayanan hukum berupa:

A. PENYUSUNAN DOKUMEN HUKUM

Di tahun 2016 Bagian Hukum mengeluarkan 1.263 dokumen hukum, yang terdiri dari:

1. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial dengan jumlah 14 peraturan yang beberapa diantaranya adalah:
   a. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 10 Tahun 2016 yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan penilaian kesesuaian di bidang informasi geospasial;
   b. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 5 Tahun 2016, Nomor 6 Tahun 2016, Nomor 7 Tahun 2016, Nomor 8 Tahun 2016, dan Nomor 9 Tahun 2016 yang menjadi dasar hukum sejumlah program pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan Badan Informasi Geospasial;
   c. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 13 Tahun 2016 yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian penyedia jasa di bidang informasi geospasial dan Peraturan Kepala Badan Informasi geospasial Nomor 14 Tahun 2013 yang menjadi landasan dalam pelaksanaan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian tenaga profesional di bidang informasi geospasial; dan
   d. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2016 yang menjadi pedoman dalam penyajian peta desa.
2. Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial dengan jumlah 60 keputusan.
3. Keputusan Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial dengan jumlah 459 keputusan.

During the fiscal year of 2016, the Legal Department of Geospatial Information Agency (BIG), in accordance with its duties and functions, has carried out legal services in the form of:

A. PREPARATION OF LEGAL DOCUMENTS

In 2016, the Legal Department issued 1.263 legal documents consisting of:

1. *Regulations of BIG Chairman as many as 14 regulations, among others are:*
   a. BIG Chairman Regulation No. 1 of 2016 as amended by BIG Chairman Regulation No. 10 of 2016 which becomes the legal basis in the implementation of conformity assessment in the field of geospatial information;
   b. BIG Chairman Regulation No. 5 of 2016, No. 6 of 2016, No. 7 of 2016, No. 8 of 2016, and No. 9 of 2016 which becomes the legal basis of a number of corruption prevention programs within the Geospatial Information Agency;
   c. BIG Chairman Regulation No. 13 of 2016 which becomes the legal basis in the implementation of accreditation of conformity assessment bodies of service providers in the field of geospatial information and BIG Chairman Regulation No. 14 of 2013 which becomes the foundation in the implementation of accreditation of conformity assessment bodies for professionals in the field of geospatial information; and
   d. BIG Chairman Regulation No. 3 of 2016 that becomes a guide in the presentation of village maps.
2. *Decrees of BIG Chairman as many as 60 decrees.*
3. *Decrees of BIG Main Secretary as many as 459 decrees.*

4. Keputusan Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial Badan Informasi Geospasial dengan jumlah 38 keputusan.
5. Keputusan Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar Badan Informasi Geospasial dengan jumlah 73 keputusan.
6. Keputusan Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik Badan Informasi Geospasial dengan jumlah 45 keputusan.
7. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Utama Badan Informasi Geospasial dengan jumlah 574 keputusan.

Semua dokumen hukum tersebut dapat diakses secara luring di Gedung C Lantai 2 Badan Informasi Geospasial dan secara daring melalui situs web: *jdih.big.go.id*

B. LAYANAN DOKUMEN HUKUM SECARA ELEKTRONIK

Layanan dokumen hukum secara elektronik merupakan salah satu inovasi yang diinisiasi oleh Bagian Hukum Badan Informasi Geospasial untuk memudahkan pemberian layanan hukum. Program ini juga untuk mendukung pelaksanaan *e-government* di Badan Informasi Geospasial. Layanan dokumen hukum secara elektronik ini terdiri atas:

a. Aplikasi Penyusunan Dokumen Hukum Badan Informasi Geospasial Secara Elektronik
   Aplikasi ini merupakan layanan yang dibuat untuk mengakomodasi penyusunan dokumen hukum di Badan Informasi Geospasial secara *paperless*. AplikTasi ini dibuat untuk mempercepat alur penyusunan dokumen hukum di Badan Informasi Geospasial. Aplikasi ini diakses di situs web: https://edraft.big.go.id

b. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Informasi Geospasial
   Aplikasi ini merupakan sarana publikasi seluruh dokumen hukum di Badan Informasi Geospasial yang telah disahkan atau ditetapkan. Aplikasi ini akan memudahkan pengguna untuk menelusuri seluruh dokumen hukum di Badan Informasi Geospasial. Aplikasi ini dapat diakses di situs web: https://jdih.big.go.id

C. DISEMINASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Diseminasi Peraturan Perundang-Undangan merupakan salah satu kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Bagian Hukum Badan Informasi Geospasial. Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan informasi geospasial. Pada tahun 2016, Diseminasi Peraturan Perundang-undangan terkait Informasi Geospasial dilaksanakan dua kali yaitu di:

a. Kota Jayapura dengan sasaran Kepolisian Daerah, Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat serta pemerintah kabupaten/kota yang berada di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat; dan
b. Kota Pontianak dengan sasaran Kepolisian Daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah serta pemerintah kabupaten/kota yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah.

4. *Decrees of BIG Deputy of Geospatial Information Infrastructure Division as many as 38 decrees.*
5. *Decrees of BIG Deputy of Basic Geospatial Information Division as many as 73 decrees.*
6. *Decrees of BIG Deputy of Thematic Geospatial Information Division as many as 45 decrees.*
7. *Decisions of the Budget Manager of BIG Main Secretariat Unit as many as 574 decisions.*

All legal documents can be accessed offline in 2nd Floor Building C Geospatial Information Agency and online via the website: jdih.big.go.id.

B. ELECTRONIC LEGAL DOCUMENT SERVICES

The electronic legal document service is one of innovations initiated by the Legal Department of the Geospatial Information Agency to facilitate the provision of legal services. The program is also to support the implementation of e-government in the Geospatial Information Agency. This electronic legal document service consists of:

a. *Application of Electronic Legal Document of Geospatial Information Agency*
   This application is a service designed to accommodate the preparation of paperless legal documents in the Geospatial Information Agency. This app is created to accelerate the flow of legal documents in the Geospatial Information Agency. This app is accessed on the website: https://edraft.big.go.id

b. *Legal Documentation and Information Network of Geospatial Information Agency*
   This application is a means of publication of all legal documents in the Geospatial Information Agency that has been authorized or established. This app will make it easier for users to browse through all legal documents in the Geospatial Information Agency. This app can be accessed on the website: https://jdih.big.go.id

C. DISSEMINATION OF LAWS AND REGULATIONS

Dissemination of Laws and Regulations is one of the routine activities carried out by the Legal Department of the Geospatial Information Agency. This activity aims to disseminate the laws and regulations related to the implementation of geospatial information. In 2016, the Dissemination of Laws and Regulations related to Geospatial Information is conducted twice, namely:

a. *Jayapura City with the target of Regional Police, Provincial Government of Papua and West Papua as well as regency/city governments located in Papua and West Papua Provinces; and*

b. *Pontianak City with the target of the Regional Police, the Provincial Governments of West Kalimantan, East Kalimantan, North Kalimantan, South Kalimantan, and Central Kalimantan, as well as district/city governments located in West Kalimantan, East Kalimantan, North Kalimantan, South Kalimantan, and Central Kalimantan.*

Untuk melengkapi kegiatan tersebut, maka selama diseminasi berlangsung, dibuka juga **Klinik Informasi Geospasial** yang merupakan media untuk berkonsultasi secara teknis di bidang informasi geospasial. Klinik tersebut terdiri atas:

- Klinik Pemetaan Tata Ruang
- Klinik Pemetaan Batas Wilayah
- Klinik Jasa dan Produk Geospasial
- Klinik Pendidikan dan Pelatihan Geospasial
- Klinik Jabatan Fungsional Survei dan Pemetaan
- Klinik Pemetaan Informasi Geospasial Dasar

Geospatial Information Clinic *is opened during the dissemination to complete the above activities. This clinic becomes a medium for technical consultation in the field of geospatial information. The clinic consists of:*

- *Spatial Mapping Clinic*
- *District Boundary Mapping Clinic*
- *Geospatial Services and Products Clinic*
- *Geospatial Education and Training Clinic*
- *Survey and Mapping Functional Position Clinic*
- *Basic Geospatial Information Mapping Clinic*

D. PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pada periode tahun 2016, Pemberian Bantuan Hukum sebagian besar dilaksanakan dengan pelaksanaan konsultasi hukum. Pelaksanaan konsultasi hukum ini tidak hanya dilakukan oleh Pegawai Badan informasi Geospasial melainkan juga oleh seluruh pemangku kepentingan terkait informasi geospasial. Selain melalui konsultasi hukum, pemberian bantuan hukum juga dilaksanakan dengan penyusunan *legal opinion* dalam bentuk telahaan staf dan penelahaan rancangan dokumen kerja sama seperti, Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, Nota Kesepahaman, atau Perjanjian Kerja Sama.

D. PROVISION OF LEGAL ASSISTANCE

In the period of 2016, the provision of Legal Assistance was largely carried out with the implementation of legal consultations. Implementation of this legal consultation is not only conducted by Geospatial Information Agency employees but also by all stakeholders related to geospatial information. In addition to legal consultations, legal aid is also provided with legal opinion formulation in the form of review of staff and drafting of cooperation documents such as Memorandums of Understanding (MoUs), Goods/ Services Procurement Contracts, or Cooperation Agreements.







FOTO KEGIATAN 2016
















SOSIALISASI
Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial
Terkait Program Penguatan Pengawasan

Informasi Geospasial Dasar
Informasi Geospasial Tematik
Infrastruktur Informasi Geospasial
Sekretaris Utama
Acara BIG



UMUM DAN KEUANGAN

Dalam struktur organisasi Badan Informasi Geospasial, Biro Umum dan Keuangan mempunyai peran strategis mendukung terwujudnya Visi dan Misi Badan Informasi Geospasial. Peran strategis itu dilakukan melalui Penyelenggaraan Pembinaan, Koordinasi dan Pelayanan administrasi ketatausahaan dan kearsipan, perlengkapan dan kerumah-tanggaan serta keprotokolan, pengelolaan keuangan (APBN) dan pengelolaan Barang Milik Negara serta pembinaan dan pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa yang telah dikoordinasikan Unit Pelayanan Pengadaan.

Pada tahun 2016 Biro Umum dan Keuangan telah melaksanakan kegiatan startegis dalam pengelolaan administrasi dan pelayanan umum antara lain :

BAGIAN UMUM

Untuk mewujudkan kinerja BIG yang akurat dan untuk mengelola bahan pertanggungjawaban harus dimulai dari penyelenggaraan persuratan dan kearsipan yang efektif dan efisien, maka dala rangka mewujudkan hal tersebut Unit Kearsipan BIG dalam tahun 2016 melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

A. Ketatausahaan dan Persuratan

Ketatausahaan dan persuratan adalah kegiatan pengurusan surat kedinasan yang meliputi proses penerimaan, pencatatan / penginputan sampai dengan pendistribusian surat tersebut kepada tertuju. Jumlah pengelolaan surat selama tahun 2016 sebanyak 3.682 surat masuk dan 3761 surat keluar.

Sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dan dalam rangka mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi, BIG telah mengembangkan sistem pengelolaan persuratan secara terintegrasi dengan jaringan dan data pegawai. Aplikasi tersbeut sudah dapat diakses dari luar kantor sehingga proses administrasi pemerintahan dapat diselesaikan secara cepat, tepat, efektif dan efisien. Aplikasi tersebut dapat diakses di website big dengan alamat : egov.big.go.id

In the organizational structure of the Geospatial Information Agency (BIG), the General Affairs and Financial Bureau has a strategic role to support the realization of the Vision and Mission of the BIG. The strategic role is carried out through Coaching, Coordination and Services of office administration and archives, equipment and housekeeping, protocol, financial management (APBN), State Property management, and the Procurement of Goods and Services that has been coordinated by the Procurement Services Unit.

In 2016, the General Affairs and Financial Bureau has carried out strategic activities in the management of office administration and public services, among others:

GENERAL AFFAIRS DIVISION

Efforts to achieve accurate BIG performance and manage materials for accountability, must begin with the organization of effective and efficient mail administration and archives. In order to achieve it, the BIG Archive Unit, in 2016, carried out the following activities:

A. Office and Mail Administration

Office and mail administration is the activities of official letter administration covering the process of admission, recording/ inputting, and distribution of the letters. The number of managed letter in 2016 is 3,682 incoming mails and 3,761 outgoing mails.

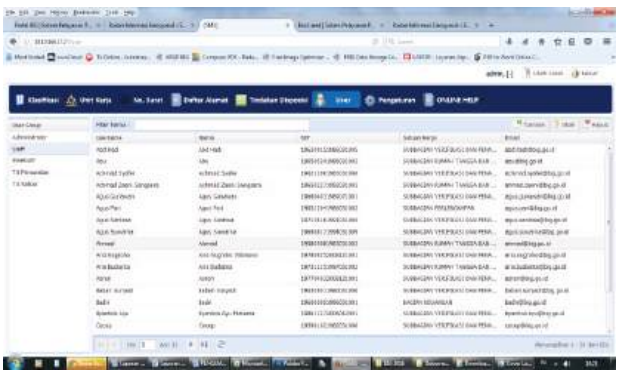
In accordance with the development of information and communication technology and in order to support the implementation of Bureaucratic Reform, BIG develops an integrated mail management system with employee network and data. The application is accessible from outside the office so that the administrative process can be completed quickly, accurately, effectively and efficiently. The application can be accessed at BIG website at: egov.big.go.id

Berikut adalah tampilan dari aplikasi persuratan :









1. Penyelamatan dan Pelestarian Arsip

Dalam rangka penyelamatan dan pelestarian arsip telah dilakukan pengolahan arsip tidak teratur dan kacau sebanyak 3.431 berkas dengan hasil kategori simpan dan 913 berkas kategori musnah. Disamping itu telah dilakukan penataan dari pemindahan asip inaktif unit kerja sebanyak 10.400 berkas.

2. Menyediakan Informasi untuk Pelayanan Publik

Adapun layanan terhadap publik pada tahun 2016 anatra lain memberikan layanan permintaan/ peminjaman arsip baik internal maupun eksternal serta melayani kunjungan dari kementerian/ lembaga.

3. Penilaian dan Penyusutan Arsip Inaktif

Jumlah arsip yang dinilai yang telah habis masa retensinya adalah sebanyak 12.470 berkas dengan hasil diusulkan untuk musnah sebanyak 10.277 dan dsimpan kembali sebanyak 2.193 berkas.

4. Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas SDM Kearsipan

Untuk dapat meningkatkan pemahaman tentang arsip dan pengelolaannya, telah dilaksakaan sosialisasi Pengelolaan Arsip Dinamis dan Standar Kualitas Hasil Kerja Pejabat Fungsional Arsiparis, Bimbingan Teknis Pemberkasan Arsip, Sosialisasi tentang Pengawasan Kearsipan dengan menghadirkan nara sumber yang kompeten di bidangnya, serta melakukan arsiparis dan unit pengolah di lingkungan BIG dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembinaan yang telah dilakukan serta implementasi dari berbagai kegiatan bimbingan teknis yang sudah dilaksanakan.

Here is display of the mail application:

1. Archive Rescue and Preservation

Efforts to save and preserve the archives is conducted through the process of irregular and chaotic archives. Results of the process shows that 3,431 files are categorized saved and 913 files are categorized destroyed. In addition, 10,400 inactive archives of the working units that have been transferred is also arranged.

2. Provide Information for Public Services

The activities of public services in 2016, among others, provides services for archives requests/borrowing, both internal and external, and serving visits from ministries/agencies.

3. Inactive Archives Assessment and Depreciation

The assessment of the archives that have passed through their retention periods is carried out on 12,470 files with 10,277 files are proposed to be destroyed and 2,193 files are saved.4

4. Development and Improvement of Archive Human Resource Capacity

Several activities have been undertaken to improve the understanding and management of archives, namely the dissemination of Dynamic Archive Management and Quality Standards of Archive Functional Officials, Technical Guidance of Recording Archives, and Dissemination of Archival Supervision. The resource persons presented are those who are competent in their fields. In addition, archivists and processing units at BIG are also implemented in order to determine the success rate of coaching and implement various technical guidance activities.

Dokumentasi Pemberian Penghargaan Arsiparis dan Unit Pengolah Arsip Terbaik Tahun 2016

Documentation of Awards Submission for Best Archivists and Best Archive Processing Units 2016





E. Peran serta dalam Lomba Kearsipan Tingkat Nasional

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan arsip di Lingkungan BIG, maka Unit Kearsipan turut mengikuti penyelenggaraan lomba kearsipan tingkat nasional dan berdasarkan hasil sil penilaian, BIG dinyatakan sebagai Unit Kearsipan Terbaik ke 3 untuk kategori Unit Kearsipan Lembaga Non Kementerian dan atas keberhasilan tersebut BIG mendapatkan sertifikat penghargaan yang disampaikan oleh Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi.

5. Participation in National Archive Competition

In order to improve the archive management of BIG, the Archive Unit participates in national archive competition. Based on the assessment results, BIG is declared as the 3rd Best Archive Unit for the category of Archive Unit of Non-Ministry Institutions. BIG receives the award certificate presented by the Ministry of PAN and Bureaucracy Reform.





F. Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana

Gedung dan bangunan di Badan Informasi Geospasial merupakan aset yang dimiliki sejak berdirinya kantor BAKOSURTANAL di Cibinong . Kondisi gedung dan bangunan yang telah berumur 36 tahun tersebut memerlukan pemeliharaan dan renovasi seiring dengan berkembangnya organisasi. Pemeliharaan dan peningkatan kualitas gedung dan bangunan dapat mempengaruhi kenyamanan dan kinerja para pihak yang menggunakan gedung dan bangunan tersebut.

Pada tahun 2016 Biro Umum dan Keuangan telah melakukan renovasi dan pemeliharaan gedung antara lain Gedung Balai Diklat (T), Renovasi Rumah Dinas Pimpinan, Pengadaan AC Central Gedung A, Renovasi Atap Selasar, Renovasi atap Gedung PBW dan Gedung PTRA, Pemasangan Grounding, Pemasangan Penangkal Petir pada tiap gedung, pemeliharaan jaringan Sound system.

F. Improvement and Maintenance of Facilities and Infrastructures

The buildings of the Geospatial Information Agency are assets owned since the establishment of the BAKOSURTANAL office in Cibinong. The condition of the buildings that has been aged for 36 years old requires maintenance and renovation in line with the development of the organization. Maintenance and improvement of the quality of buildings affects the convenience and performance of the users.

In 2016, the General Affairs and Financial Bureau renovates and maintains several buildings, among others, Education and Training Center Building (T), Revonation of Official Residences, Procurement of Central AC for Building A, Renovation of Hallway Roof, Renovation of PBW and PTRA Building Roofs, Grounding Installation, Lightning Rod Installment in every building, and Sound system network maintenance.

G. Kepuasan Layanan Bagian Umum

Untuk mengetahui sejauhmana layanan yang diberikan dan sekaligus meningkatkan layanan Bagian Umum terhadap seluruh pimpinan dan karyawan BIG, pada Tahun 2016 telah dilakukan Survei Persepsi Internal terhadap PNS/ASN BIG pada layanan yang diberikan oleh Bagian Umum. Survei tersebut dengan menggunakan skala 5 (1 : Sangat Kurang, 2 : Kurang Baik, 3 : Cukup, 4 : Baik, 5 : Sangat Baik). Target yang ingin dicapai oleh Biro Umum dan Keuangan adalah "Baik". Dari Responden 119 orang dengan jumlah layanan 10, maka diperoleh hasil sbb :

Layanan persuratan dengan indeks 3,62, Ruang Rapat dengan indeks 3,84, Peminjaman Kendaraan dinas dengan indeks 3,64, Perawatan / BBM kendaraan dinas 3,51, Pengurusan dokumen kendaraan dias 3,70, pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor 3,26, perbaikan inventaris kantor 3,39, pengurusan dokumen perjalanan dinas luar negeri 3,64, keamanan 3,75, dan kerumah tanggaan 3,57. Adapun secara rata-rata indeks layanan bagian umum sebesar 3,59, artinya melebihi cukup dan hamper BAIK dalam berbagai layanan.

H. Layanan Kebersihan

Biro Umum dan Keuangan sangat perhatian Kebersihan lingkungan karena layanan ini merupakan layanan yang paling vital. Pada Tahun 2016, untuk layanan kebersihan ini meliputi Layanan halaman kantor, Kebersihan gedung, Kebersihan jalan, ruang kerja, ruang dapur dan toilet/wc.

BAGIAN KEUANGAN

A. Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual BIG Tahun Anggaran 2016

Perubahan kebijakan akuntansi pemerintah dari Cash Toward Accrual (CTA) menuju murni akuntansi berbasis akrual ditargetkan sudah diterapkan oleh semua Kementerian/Lembaga Pemerintah dalam Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2015. Hal ini sesuai dengan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tahun Anggaran 2016 merupakan tahun kedua Badan Informasi Geospasial menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan BIG. Sesuai SAP, Laporan Keuangan BIG menyajikan unsur-unsur laporan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2016. Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2016 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp39.653.762.632,00 atau 400.34 persen. Sedangkan Realisasi Belanja Negara pada 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp611.228.714.408,00 atau mencapai 89.20 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp685.231.100.000,-.

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2016. Nilai Aset per 31 Desember 2016 dicatat dan disajikan sebesar Rp2.294.173.288.530,-. yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp132.863.148.549,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp377.976.864.324,00; Piutang Jangka Panjang

G. Satisfaction Rate of General Affairs Services

In 2016, the General Affairs Division undertakes an Internal Perception Survey of the PNS/ASN of BIG regarding the services provided by the General Affairs Division. This survey aims to determine the quality of service and improve the service of the General Affairs Division to all BIG leaders and employees. The survey used 5 a scales (1: Very Bad, 2: Bad, 3: Fair, 4: Good, 5: Very Good). The target of the General Affairs and Financial Bureau is "Good". There are 119 surveyed respondents with 10 type of services and the results are:

Index for Mail Administration Service is 3.62, Meeting Room 3.84, Official Vehicle Lending 3.64, Official Vehicle Maintenance/Fuel 3.51, Official Vehicle Document Handling 3.70, Office Equipment Maintenance and Repair 3.26, Office Inventory Repair 3.39, overseas travel document arrangement 3.64, security 3.75, and housekeeping 3.57. On average, the service index of the General Affairs Division is 3.59 which means it exceeds the scale of fair and approaches the scale of GOOD in various services.

H. Cleaning Services

The General Affairs and Financial Bureau is very concerned about environmental hygiene because this service is the most vital service. In 2016, cleaning services is performed in the area of office yards, buildings, roads, work space, kitchen, and toilets.

FINANCIAL DIVISION

A. Preparation of BIG Accrual-Based Financial Statements of Fiscal Year 2016

Changes in government accounting policies from Cash Toward Accrual (CTA) to pure accrual-based accounting are targeted to have been implemented by all Governmental Ministries/Agencies in the Financial Statements of Fiscal Year 2015. This is in accordance with the mandate of Government Regulation No. 71 of 2010 on Government Accounting Standards.

Fiscal Year 2016 is the second year for the BIG applying the accrual basis in preparing and presenting the BIG Financial Statements. According to SAP, BIG Financial Report presents elements of the report consisting of Budget Realization Report, Balance Sheet, Operational Report, Statement of Changes in Equity, and Notes to Financial Statements.

The Budget Realization Report describes the comparison between the budget and its realization, which includes Revenue-LRA and Expenditure elements during the period of 1 January through 31 December 2016. The realization of State Revenues in FY 2016 is non-tax state revenues of Rp39,653,762,632.00 or 400.34 percent. Meanwhile, the realization of State Expenditure on 31 December 2016 is Rp611,228,714,408.00 or reaches 89.20 percent of the budget allocation of Rp685,231,100,000.00.

The balance sheet describes the financial position of the entity on assets, liabilities and equity as of 31 December 2016. Asset Value per 31 December 2016 is recorded and presented at Rp2,294,173,288,530.00 consisting of: Current Assets of Rp132,863,148,549.00; Fixed Assets (net) of Rp377,976,864,324.00;

(neto) sebesar Rp19.016.440,00 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp1.783.314.259.217,00. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp660.546.638,00 dan Rp2.293.512.741.892,00

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp9.506.870.583,00 sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp434.515.998.158,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp-425.009.127.575,00. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp5.646.469.171,00 dan Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-419.362.658.404,00.

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2016 adalah sebesar Rp2.207.908.247.543,00 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp-419.362.658.404,00 kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp-111.129.386.890,00 dan transaksi antar entitas senilai total Rp616.096.539.643,00, sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2016 adalah senilai Rp2.293.512.741.892,00.

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2016 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

B. BIG Terbaik Kedua Pada Penghargaan Kinerja Pelaksanaan Anggaran TA 2016

Pada acara tahunan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pelaksanaan Anggaran K/L yang dihadiri Menteri dan Wakil Menteri Keuangan, Sri Mulyani dan Marwanto Harjowiryono, disampaikan apresiasi berupa sebuah penghargaan pada K/L yang memiliki kinerja pelaksanaan anggaran yang baik pada Tahun Anggaran 2016.

Dari hasil penilaian yang dilakukan Kementerian Keuangan, didapatkan beberapa Kementerian dan Lembaga yang mampu mengelola anggaran sepanjang 2016 dengan sangat baik. Atas pencapaian tersebut, Kementerian Keuangan memberikan penghargaan yang merupakan bentuk apresiasi pemerintah kepada K/L yang efektif dalam pengelolaan anggaran 2016.

Berdasarkan penilaian untuk kategori pagu kecil yaitu anggaran Rp2,5 triliun kebawah, Badan Informasi Geospasial mendapat apresiasi sebagai K/L Terbaik Kedua pada Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2016. Sedangkan Terbaik Pertama diberikan kepada Badan Tenaga Nuklir Nasional.

Long-term Receivables (net) is Rp19,016,440.00 and Other Assets (net) of Rp 1,783,314,259,217.00. The Values of Liabilities and Equity are Rp660,546,638.00 and Rp2,293,512,741,892.00, respectively.

The Operational Report presents various elements of income-LO, expenses, surplus/deficit from operational activities, surplus/deficit from non-operational activities, surplus/deficit before extraordinary items, extraordinary items, and surplus/deficit-LO, required for reasonable presentation. Income-LO for the period up to 31 December 2016 is Rp9,506,870,583.00, while the total expense is Rp434,515,998,158.00, resulting in a Deficit of Operational Activities is Rp-425,009,127,575.00, Non-Operational Activities and Extraordinary Items are Rp5,646,469,171.00 and Rp0.00, respectively, resulting in the deficit-LO of the entity is Rp-419,362,658,404.00.

The Statement of Changes in Equity provides information on the increase or decrease in the equity of the reporting year compared to the previous year. The equity as of 1 January 2016 is Rp2,207,908,247,543.00 minus the deficit-LO of Rp-419,362,658,404.00 then added with corrections of Rp-111,129,386,890.00 and transactions between entities totaling Rp616,096,539,643.00, so the equity of the entity as of 31 December 2016 is valued at Rp2,293,512,741,892.00.

The Notes to the Financial Statements (CaLK) provide information on detailed explanations or lists or an analysis of the value of a post presented in the Budget Realization Report, Balance Sheet, Operational Report, and Statement of Changes in Equity. The CaLK also presents information required and recommended by the Government Accounting Standards and other disclosures necessary for a fair presentation of financial statements.

The presentation of the Budget Realization Report for the periods ends on 31 December 2016 is prepared and presented on a cash basis. The Balance Sheet, Operational Report, and Statement of Changes in Equity for the Year 2016 are prepared and presented on an accrual basis.

B. BIG Wins Second Best Achievement at the Budget Performance Appraisal of FY 2016

In the annual event of the National Coordination Meeting (Rakornas) of K/L Budget Implementation attended by Minister and Vice Minister of Finance, Sri Mulyani and Marwanto Harjowiryono, the appreciation is given to K/L with good budget implementation performance in Fiscal Year 2016.

The assessment conducted by the Ministry of Finance results several Ministries and Agencies with very good budget management throughout 2016. The Ministry of Finance rewards the K/L with effective management of the 2016 budget as the appreciation of the government.

Based on the assessment for the small category (under Rp2.5 trillion) of budget, the Geospatial Information Agency receives appreciation as the Second Best K/L in the 2016 Budget Performance, while the First Best is awarded to the National Nuclear Energy Agency.

C. Pelaksanaan Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Milik Negara di BIG

Biro Umum dan Keuangan terus meningkatkan pengelolaan BMN yang berada dalam kewenangannya terutama mengingat kompleksnya pengelolaan BMN, terbitnya berbagai kebijakan baru terkait BMN, dan tuntutan inovasi dalam sistem aplikasi BMN seiring perkembangan teknologi yang semakin pesat. Berbagai upaya telah dilakukan BIG dalam mengelola dan menatausahakan BMN-nya untuk memastikan BMN telah dikelola sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Selama Tahun Anggaran 2016, berbagai kegiatan pengelolaan Barang Milik Negara telah dilakukan yaitu Perencanaan Kebutuhan dan Anggaran, Pengadaan, Penggunaan, Pemindahtanganan, Penghapusan, Penatausahaan, dan Pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

D. Pelaksanaan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara (RK BMN)

Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan Barang Milik Negara untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang. RK BMN secara nasional baru dimulai tahun 2016 sehingga RK BMN BIG Tahun 2016 merupakan tahun pertama penerapan RK BMN.

E. Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Negara

Pengadaan Barang Milik Negara dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Khusus di lingkungan BIG, mulai tahun 2016 setiap pengadaan BMN harus didukung oleh dokumen Analisa Kebutuhan BMN yang menjadi dasar diperbolehkan atau tidaknya pengadaan BMN tersebut.

F. Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara

Dalam penggunaan BMN BIG harus dilakukan Penetapan Status Penggunaan BMN sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku, yaitu terhadap BMN selain tanah dan/atau bangunan, yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan, dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/ satuan ditetapkan oleh Pengguna Barang, dengan didahului oleh permohonan dari Kuasa Pengguna Barang.

Selain itu, ada beberapa BMN BIG yang dialihstatuskan ke Pengguna Barang lainnya. Pelaksanaan Alih Status BMN pada BIG Tahun 2016 dilakukan dengan Instansi Pusat (Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi), antara lain: Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin; Universitas Udayana, Bali; Universitas Hasanuddin, Makassar; Universitas Halu Oleo, Kendari; Universitas Negeri Malang, Universitas Negeri Lampung, dan Universitas Sam Ratulangi, Manado.

G. Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara

Pelaksanaan Pemindahtanganan BMN pada BIG dilakukan dengan Penjualan dan Hibah BMN. Penjualan BMN dilakukan dengan Lelang BMN atas BMN-BMN yang secara ketentuan telah memenuhi syarat untuk dilakukan penghapusan BMN. Sedangkan untuk Pelaksanaan Hibah BMN pada BIG Tahun 2016 antara lain dilakukan dari BIG kepada MTs. Nur Lahat Sumatra Selatan, BAPPEDA Prop. Jawa Timur, BAPPEDA Prop. Sumatra Barat, BAPPEDA Prop. Jawa Barat, dan BAPPEDA Prop. NTB.

C. State Property (BMN) Management and Administration at BIG

The General Affairs and Financial Bureau continues to improve the management of BMN under its authority, especially considering the complexity of the management of BMN, the issuance of new policies related to BMN, and the demands of innovation in BMN application system in line with the rapid development of technology. Various efforts are conducted by BIG in managing and administering its BMN to ensure that BMN is managed according to prevailing rules and regulations.

During the Fiscal Year 2016, various activity related to State Property Management is undertaken, namely Requirement and Budget Planning, Procurement, Utilisation, Transfer, Removal, Administration, and Development, Supervision and Control.

D. State Property Requirement Planning (RK BMN)

Requirement Planning is an activity to formulate the details of the needs of the State Property to link the past procurement of goods to the ongoing circumstances as a basis for taking action in the future. RK BMN nationally is started in 2016 so RK BMN of BIG Year 2016 is the first year of RK BMN implementation.

E. State Property Procurement

Procurement of State Property shall be carried out on the basis of efficient, effective, transparent and open, competing, fair, and accountable principles. In the BIG, starting in 2016, every BMN procurement must be supported by the BMN Requirement Analysis document as the basis of the BMN procurement to be allowed or not.

F. State Property Utilisation

The mechanism of BMN utilisation in BIG must be conducted through the Determination of BMN Utilisation Status as stipulated in the prevailing provisions. BMN other than land and/or building with no ownership documents and the acquisition value up to Rp100,000,000.00 (one hundred million rupiah) per unit, is stipulated by the User of the Goods, preceded by a request from the State Goods Managers.

In addition, there are some BMNs of BIG that are converted to other Users. The implementation of BMN Status Transfer in BIG 2016 is conducted with the National Agencies (Ministry of Research, Technology and Higher Education), among others: Lambung Mangkurat University, Banjarmasin; Udayana University, Bali; Hasanuddin University, Makassar; Halu Oleo University, Kendari; Malang State University, Lampung State University, and Sam Ratulangi University, Manado.

G. State Property Transfer

The implementation of the BMN transfer of BIG is conducted with BMN Sales and Grants. The sale of BMN shall be conducted by BMN Auction on BMN which has provisionally fulfill the requirement for the elimination of BMN. In 2016, the BMN Grants of BIG is conducted from BIG to MTs. Nur Lahat in South Sumatra, BAPPEDA of East Java Province, BAPPEDA of West Sumatra Province, BAPPEDA of West Java Province, and BAPPEDA of NTB province.

H. Pelaksanaan Penghapusan BMN pada BIG

Penghapusan BMN pada BIG Tahun 2016 antara lain Penghapusan BMN Paket 1 Tahun 2016, Penghapusan BMN berupa Peta Rusak, Penghapusan BMN berupa Pos Satpam, dan Penghapusan Kendaraan Bermotor. Termasuk melaksanakan penghapusan BMN-BMN yang telah dipindahtangankan dan dialihstatuskan penggunaannya.

I. Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Negara

Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. BIG telah manatausahakan BMN dalam kewenangannya menggunakan Aplikasi SIMAK-BMN. Output yang dihasilkan dalam pelaksanaan Penatausahaan BMN adalah Laporan BMN.

J. Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian BMN

Pengawasan dan Pengendalian BMN ini merupakan penerapan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara. Pada tingkat Pengguna Barang, pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian BMN meliputi kegiatan pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan BMN lingkup satuan kerja. Output dari kegiatan ini adalah Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN yang harus disampaikan setiap Bulan Maret.

H. BMN Removal at BIG

The elimination of BMN in BIG in 2016 includes the elimination of BMN Package 1 of 2016, the elimination of BMN in the form of Damaged Maps, the Elimination of BMN in the form of Security Office, the Removal of Motor Vehicles, and the removal of BMNs that have been transferred and converted.

I. State Property Administration

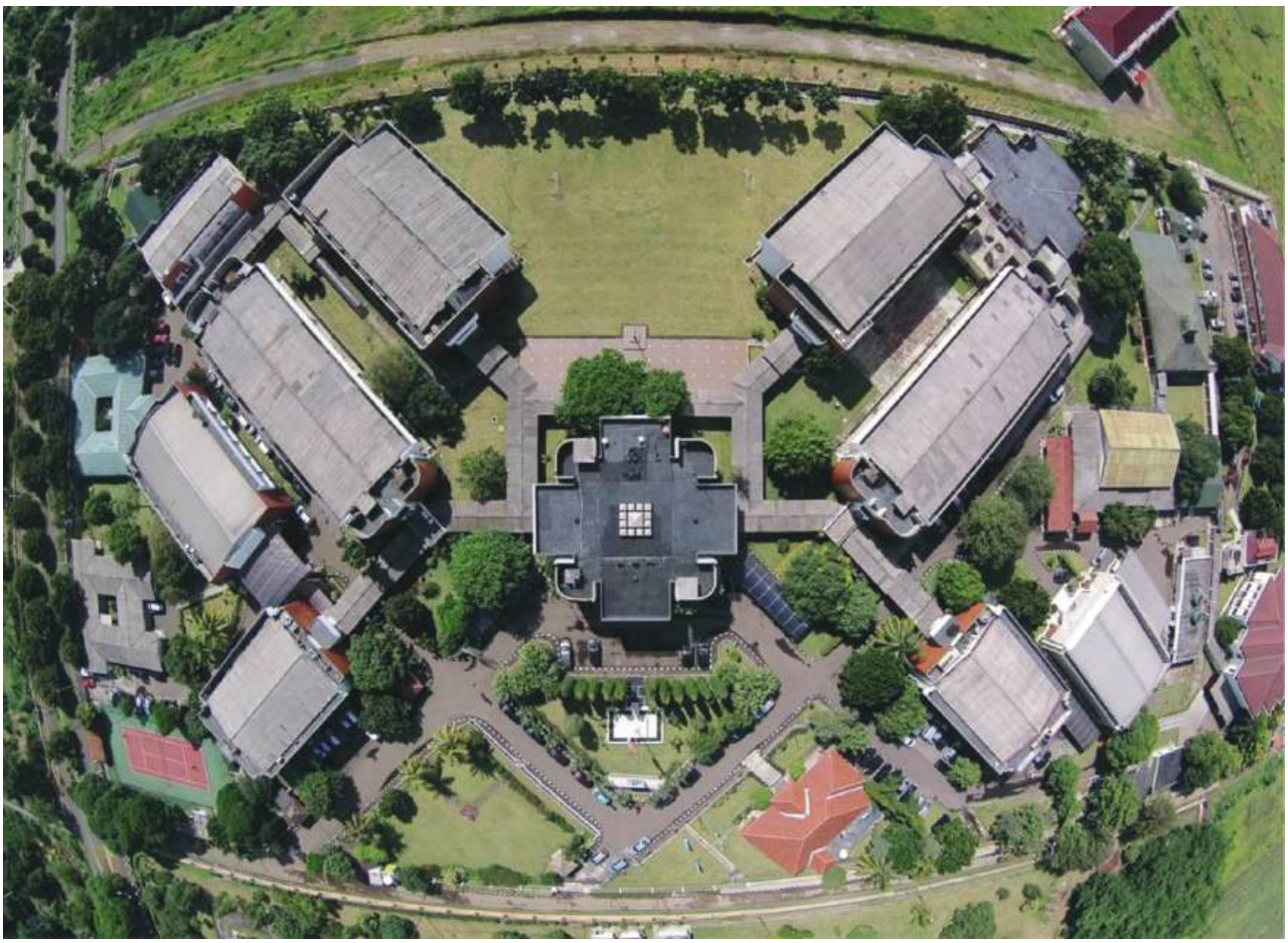
Administration is a series of activities covering bookkeeping, inventory, and reporting of State Property in accordance with the provisions of the Laws and Regulations. BIG administers BMN in its authority using the SIMAK-BMN Application. The output generated in the implementation of BMN Administration is the BMN Report.

J. Coaching, Supervision, and Control of BMN

Supervision and Control of BMN is the application of Minister of Finance Regulation No. 244/PMK.06/2012 on Procedures of Supervision and Control of State Property. At the Level of Users of Goods, the implementation of Supervision and Control of BMN includes monitoring and controlling activities on the utilisation, transfer, administration, maintenance, and security of BMN in the scope of work units. The output of this activity is the BMN Supervision and Control Report which must be submitted every March.




BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL



Informasi Geospasial Dasar
Informasi Geospasial Tematik
Infrastruktur Informasi Geospasial
Sekretaris Utama
Acara BIG



LAYANAN DIKLAT

LAYANAN DIKLAT GEOSPASIAL

Peran Sumber Daya Manusia (SDM) dan industri geospasial sangat vital dalam mengelola kekayaan alam Indonesia. Namun, sampai sejauh mana kemampuan dan kompetensi SDM, serta industri geospasial yang berkecimpung di bidang geospasial di Indonesia ini masih perlu diperhatikan dan dikaji. Saat ini ada kebutuhan mendasar bagi Indonesia untuk segera mempercepat pembangunan SDM khususnya di bidang Informasi Geospasial.

Menurut UU No. 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial, Badan Informasi Geospasial mempunyai tanggung jawab dalam peningkatan sumber daya manusia di bidang informasi Geospasial. Salah satu upaya dalam peningkatan SDM Informasi Geospasial, BIG mengadakan diklat yang berkaitan dengan informasi geospasial melalui Balai Diklat Informasi Geospasial.

SUMBER PEMBIAYAAN DIKLAT

Sesuai dengan RKAKL 2016 Balai Diklat Geospasial mempunyai target tenaga terdidik baik melalui diklat teknis maupun fungsional pada tahun 2016 adalah 390 orang, dengan rincian 215 tenaga terdidik nelalui pembiayaan APBN dan 175 tenaga terdidik melalui pembiayaan PNBP. Tetapi pada pelaksanaannya terdapat empat skema pembiayaan, yaitu :

1. APBN BIG
2. Berbagi Anggaran (sebagian APBN BIG dan sebagaian dari instansi terkait)
3. PNBP (sesuai dgn PP Jenis dan Tarif PNBP BIG No. 64 Tahun 2014)
4. Swakelola, biaya sepenuhnya dari instasi yang bersangkutan

GEOSPASIAL EDUCATION AND TRAINING SERVICES

The role of geospasial Human Resources (HR) and industry is vital in managing the natural wealth of Indonesia. However, the capability and competency of geospatial human resources and industries in Indonesia still need to be noticed and reviewed. Currently, there is a fundamental need for Indonesia to immediately accelerate human resource development, especially in the field of Geospatial Information.

According to Law No. 4/2011 on Geospatial Information, Geospatial Information Agency (BIG) responsible for improving human resources in the field of Geospatial information. One of the efforts undertaken by BIG to improve Geospatial Information HR is conducting education and training related to geospatial information through Geospatial Information Training Center

EDUCATION AND TRAINING FUND SOURCES

In accordance with RKAKL 2016, the Geospatial Education and Training Center targets the number of trained personnel, both through technical and functional training, by 2016 is 390 people consisting of 215 trained personnel through financing of APBN and 175 trained personnel through PNBP financing. But in the implementation, there are four financing schemes, namely:

1. *BIG State Budget (APBN)*
2. *Sharing the Budget (partly BIG State Budget and partly from related agencies)*
3. *Non-Tax State Revenue/PNBP (in accordance with GR Type and Tariff of PNBP for BIG No. 64/2014)*
4. *Self-management budget, the cost is fully borne by the concerned institution*

PELAKSANAAN DIKLAT DI TAHUN 2016

Pada Tahun 2016 terkait kegiatan diklat teknis dan fungsional mendukung prioritas nasional, secara umum dapat terlaksanan dengan sangat baik, yaitu telah terdidik 697 orang dimana melebihi target yang direncanakan, yaitu 390 orang. Pada laporan ini disajikan kegiatan diklat geospasial yang telah dilaksanakan dengan sumber dana APBN dan PNBP.

THE IMPLEMENTATION OF EDUCATION AND TRAINING IN 2016

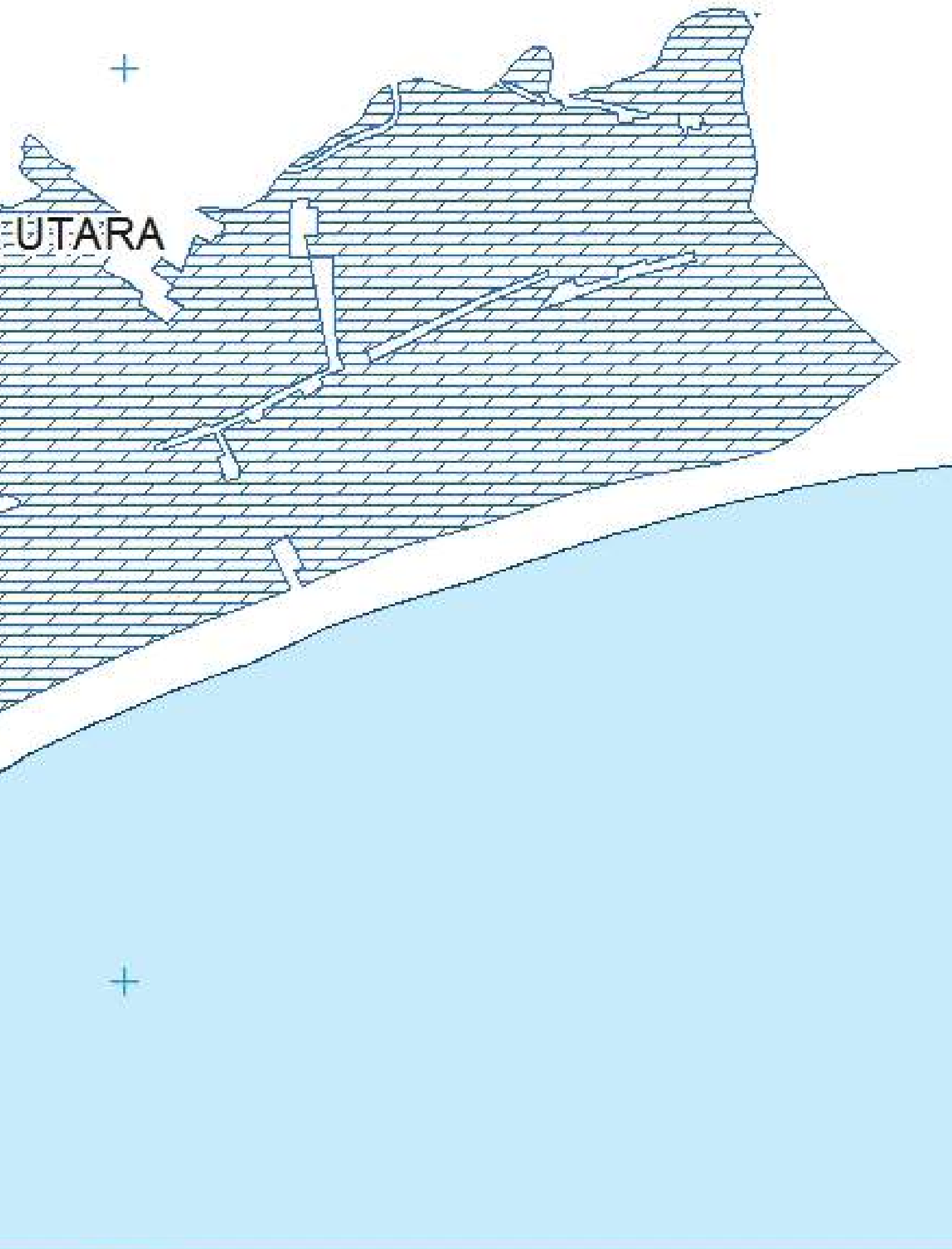
By 2016, technical and functional training activities to support national priorities, in general, can be conducted very well. The number of trained personnel generated exceeds the set target of 697 people from the target of 390 people. This report presents geospatial education and training activities that have been implemented with funding sources from APBN (State Budget) and PNBP (Non-Tav Sate Revenue).



FOTO KEGIATAN 2016






UTARA

INFORMASI GEOSPASIAL DASAR

BASIC GEOSPATIAL INFORMATION



Penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar (IGD) meliputi Pembangunan Kerangka Kontrol Geodesi dan Geodinamika, Survei dan Pemetaan Rupabumi dan Toponim, Survei dan Pemetaan Dasar Kelautan dan Lingkungan Pantai, dan Pemetaan Batas Wilayah.

The implementation of Basic Geospatial Information (IGD) includes the developing of Geodetic and Geodynamic Control Frameworks, Basic Topographic and Toponym, Surveying and Mapping, Basic Marine and Coastal Surveying and Mapping, and Administrative Boundary Mapping.

Informasi Geospasial Dasar
Informasi Geospasial Tematik
Infrastruktur Informasi Geospasial
Sekretaris Utama
Acara BIG



PEMETAAN RUPABUMI DAN TOPONIM

PEMETAAN RBI SKALA BESAR

Penyelenggaraan kegiatan pemetaan rupabumi indonesia skala 1:5.000 bertujuan untuk menyediakan data dasar untuk Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kota dan kawasan industri. Total volume pemetaan rupabumi indonesia skala 1:5.000 tahun 2016 sebanyak 846 NLP. Berikut merupakan rincian wilayah, volume dan data dasar yang digunakan:

LARGE-SCALE RBI MAPPING

The implementation of 1:5,000 scale Indonesia topographic mapping activities aims to provide basic data for Detailed Spatial Plan (RDTR) of urban and industrial zone. The total volume of Indonesia topographic mapping scale 1:5,000 in 2016 as many as 846 NLPs. Here are the details of the region, volume and basic data used:

Lokasi	Kabupaten	Provinsi	Data Dasar	Volume (NLP)
Kawasan Industri Mandor	Kab. Landak	Kalimantan Barat	Foto Udara dan Lidar	121
Kawasan Industri Tanggamus	Kab. Tanggamus	Lampung	Foto Udara dan Lidar	136
Kawasan Industri Lombok Timur	Kab. Lombok Timur	Nusa Tenggara Barat	Citra Satelit Tegak Resolusi Sangat Tinggi	200
Depok	Kota Depok	Jawa Barat	Foto Udara	58
Bogor	Kab. Bogor	Jawa Barat	Foto Udara	58
Samarinda	Kota Samarinda	Kalimantan Timur	Foto Udara	54
Tarakan	Kota Tarakan	Kalimantan Utara	Foto Udara	46
Tanjung Selor	Kota Tanjung Selor	Kalimantan Utara	Foto Udara	32
Jayapura, Biak	Kota Jayapura, Kab. Biak	Papua	Foto Udara	108
Sofifi	Kota Sofifi	Maluku Utara	Foto Udara	33

Kegiatan penyediaan data IG untuk pemenuhan kebutuhan kegiatan pembuatan unsur rupabumi inodnesia di tahun 2017 diselenggarakan sesuai dengan kegiatan prioritas nasional, yaitu kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus. Total volume data informasi geospasial yang dilaksanakan pada tahun 2016 sebanyak 3761 km^2 . Berikut rincian kegiatan penyediaan data IG yang dilaksanakan tahun 2016:

The provision of IG data for meeting the needs of Indonesia topographic production activities in 2017, is conducted in accordance with national priority activities, namely industrial and special economic zones. The total volume of geospatial information data carried out in 2016 is 3,761 km^2. Here are the details of IG data supply activities implemented in 2016:

Medium Scale RBI Mapping

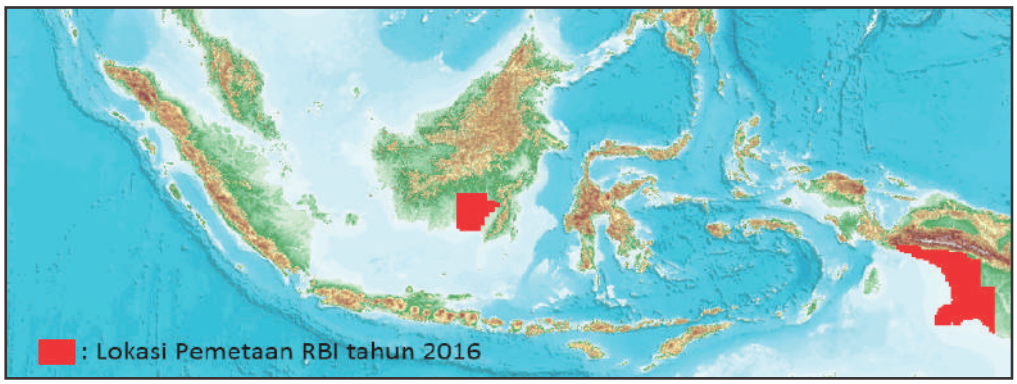
Lokasi	Kabupaten	Provinsi	Volume (Km2)
Banda Aceh, Sabang, Meulaboh	Kota Banda Aceh, Kota Sabang, Kab. Meulaboh	Aceh	490
Tanjung Api-api	Kab. Banyuasin	Sumatera Selatan	1226
Tanjung Lesung	Kab. Pandeglang	Banten	
Sei Mangke	Kab. Batubara	Sumatera Utara	726
Mandalika	Kota Mataram, Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Utara, Kab. Lombok Tengah	Nusa Tenggara Barat	714
Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK)	Kab. Kutai Timur	Klaimantan Timur	605

PEMETAAN RBI SKALA MENENGAH

Kegiatan pemetaan rupabumi skala menengah pada tahun 2016 meliputi pembuatan Peta Rupabumi Indonesia Skala 1:25.000 wilayah Kalimantan Tengah dan Papua bagian Selatan, serta Penyiapan data Rupabumi Skala 1:50.000 seluruh wilayah Indonesia dalam rangka mendukung program Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta. Pembuatan Peta Rupabumi Indonesia skala 1:25.000 wilayah Kalimantan Tengah dan Papua bagian Selatan berdasarkan pada program prioritas nasional yang dipantau langsung oleh Kantor Staf Kepresidenan (KSP) yakni penyediaan Peta Rupabumi Skala 1:25.000 yang telah sesuai standar dan dapat dimanfaatkan dalam perencanaan pemanfaatan lahan, termasuk perencanaan pembukaan lahan persawahan baru di luar Jawa (khususnya Kalimantan dan Papua). Jumlah Peta RBI yang dipetakan pada tahun 2016 sebanyak 774 NLP setara daratan dengan rincian 207 NLP wilayah Kalimantan dan 567 NLP wilayah Papua.

MEDIUM-SCALE TOPOGRAPHIC

Mapping activities in 2016 include the production of Indonesia Topographic Map of Scale 1:25,000 for the regions of Central Kalimantan and Southern part of Papua, as well as the preparation of topographic data of scale 1:50,000 throughout Indonesia in order to support the Accelerated Implementation of One Map Policy. The production of Indonesia Topographic Map of scale 1:25,000 of Central Kalimantan and Southern Papua is based on national priority programs monitored directly by the Office of Presidential Staff (KSP), which provides a standardized Topographic Map of Scale 1:25,000 and can be utilized in land use planning, including planning the opening of new paddy fields outside Java (especially Kalimantan and Papua). The number of RBI maps mapped in 2016 is 774 NLPs land equivalent with details of 207 NLPs of Kalimantan region and 567 NLPs of Papua region.



Lokasi Pemetaan RBI Tahun 2016

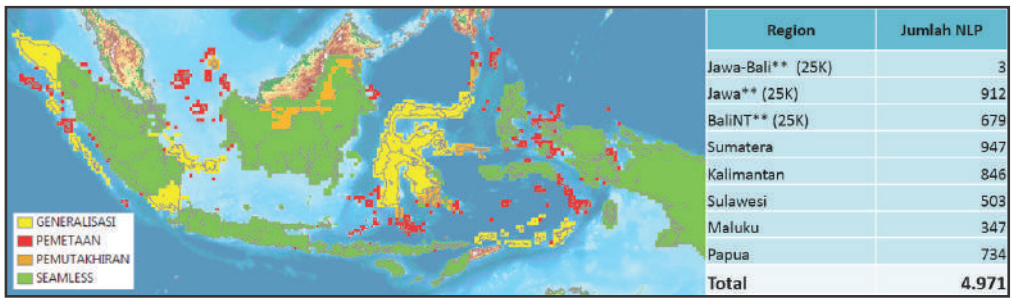
Location of RBI Mapping Year 2016

Perpres No. 9 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Skala 1:50.000 mengamanatkan Badan Informasi Geospasial untuk menyediakan Peta RBI skala 1:50.000 seluruh wilayah Indonesia sebagai peta dasar nasional. Untuk melaksanakan amanat tersebut, dilaksanakan kegiatan Kompilasi Peta RBI yang terdiri atas : Pemetaan, Pemutakhiran, Generalisasi, dan Penyelarasan (*seamless*). Kegiatan pemetaan dilaksanakan untuk wilayah yang belum tersedia datanya yang sebagian besar merupakan wilayah pulau-pulau kecil, kegiatan

Presidential Regulation No. 9 of 2016 on Accelerated Implementation of One-Map Policy At Accuracy Level of Scale 1:50,000 mandates BIG to provide Indonesia Topographic (RBI) Map of scale 1:50,000 throughout Indonesia as a national baseline map. BIG conducts the activity of RBI Map Compilation to carry out the mandate. This activity consists of: Mapping, Updating, Generalizing, and Seamless. Mapping activities are carried out for regions with no available data yet that are mostly the regions of small islands. Updating

pemutakhiran dilaksanakan untuk data-data yang telah berusia lebih dari 10 tahun (tahun pembuatan sebelum 2006) kecuali wilayah Jawa-Bali_Nusatenggara, kegiatan generalisasi dilaksakanan untuk data-data dengan skala lebih besar kecuali wilayah Jawa-Bali_ Nusatenggara, dan kegiatan penyelarasan dilaksanakan untuk keseluruhan data yang terbagi dalam 7 region (Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusatenggara, Maluku, dan Papua). Jumlah Peta RBI hasil kompilasi seluruh wilayah Indonesia adalah 4.971 NLP pada skala 1:50.000 kecuali Jawa, Bali, Nusatenggara pada skala 1:25.000.

activities are carried out for data over the age of 10 years (the production year before 2006) except for Java-Bali-Nusatenggara regions. Generalizing activities are conducted for data with larger scale except for Java-Bali-Nusatenggara regions. Seamless activities are carried out for the entire data divided into 7 regions (Sumatra, Java, Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusatenggara, Maluku, and Papua). The total number of RBI maps compiled for the entire Indonesian territory is 4,971 NLPs on a scale of 1:50,000 except for Java, Bali, and Nusatenggara on a scale of 1: 25,000.



Region	Jumlah NLP
Jawa-Bali** (25K)	3
Jawa** (25K)	912
BaliNT** (25K)	679
Sumatera	947
Kalimantan	846
Sulawesi	503
Maluku	347
Papua	734
Total	**4.971**

Kegiatan Pemutakhiran Tahun 2016

Updating Activity Year 2016

TOPONIM

Kegiatan verifikasi unsur rupabumi buatan tahun 2016 dilaksanakan di 11 provinsi (dari rencana 12 provinsi) yaitu:

Bangka Belitung, Banten, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Kepulauan Riau, DIY, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara (hanya sosialisasi terkait penamaan rupabumi) dan Maluku Utara (tidak dilaksanakan karena pihak provinsi tidak siap).

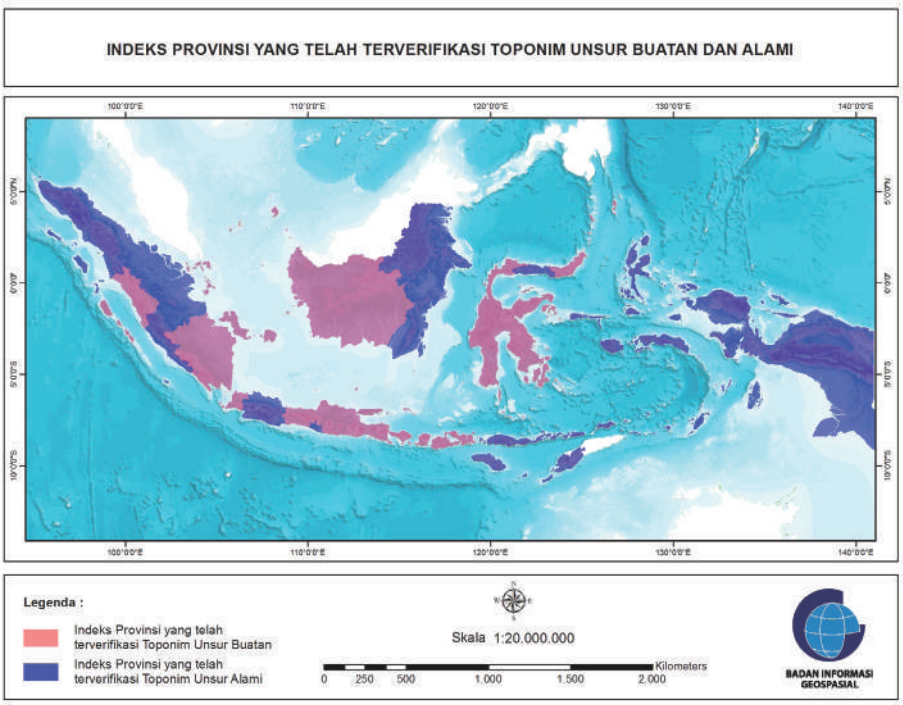
Verifikasi dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan pada data awal yang bersumber dari peta RBI serta datahasil inventarisasi Penitia Pembakuan Nama Rupabumi (PPNR) Kabupaten/Kota. BIG bersama Kemendagri dan PPNR Provinsi melakukan pemeriksaan berupa jumlah data terverifikasi kemudian dituangkan dalam berita acara verifikasi yang ditandatangani oleh peserta yang hadir dalam kegiatan tersebut.

TOPONYM

The verification of topographic elements produced in 2016 is implemented in 11 provinces (from the plan of 12 provinces), namely:

Bangka Belitung, Banten, Southeast Sulawesi, West Sulawesi, West Sumatera, South Sumatera, Central Java, Riau Islands, DIY, West Kalimantan, North Kalimantan (only dissemination on topographic naming) and North Maluku (does not implemented because the province is not ready).

Verification is carried out by checking the initial data sourced from the RBI map and the inventory data of the Committee for Standardization of Topographic Names (PPNR) of Regencies/Cities. BIG in cooperation with the Ministry of Home Affairs and Provincial PPNR conduct examination in the form of the amount of verified data and then included in the verification report signed by the participants who attended the event.



Kegiatan Pemutakhiran Tahun 2016

Updating Activity Year 2016







FOTO KEGIATAN 2016











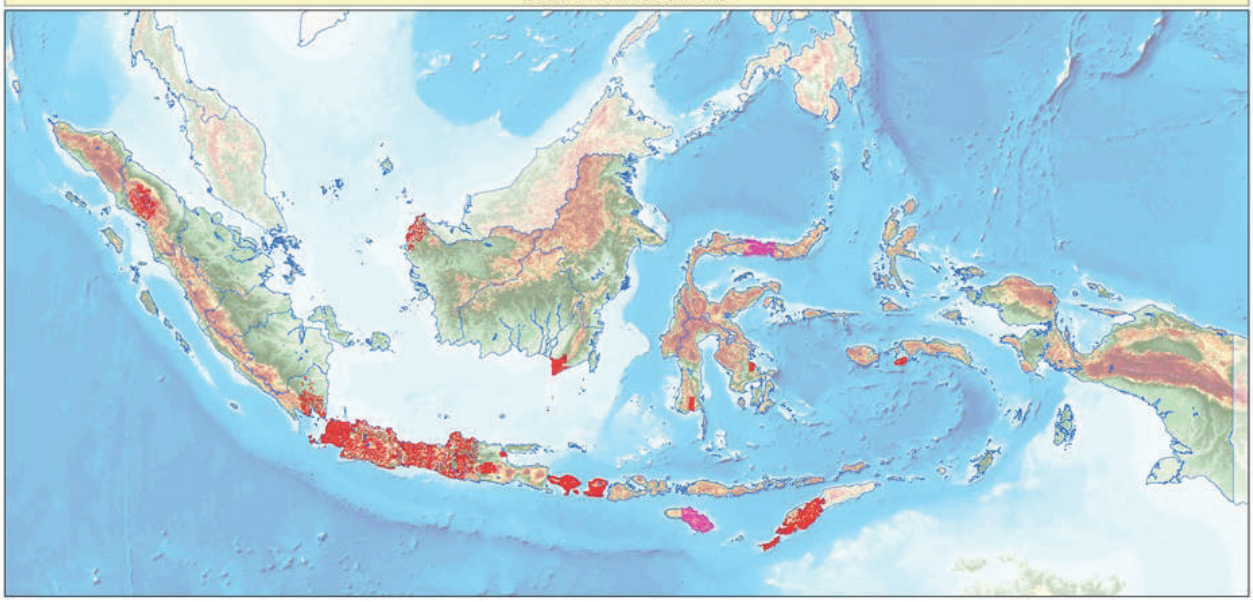

TUGU PEK BARAN INJIL DI TANAH TABI PAPUA
MARET 1910 10 MARET 2010



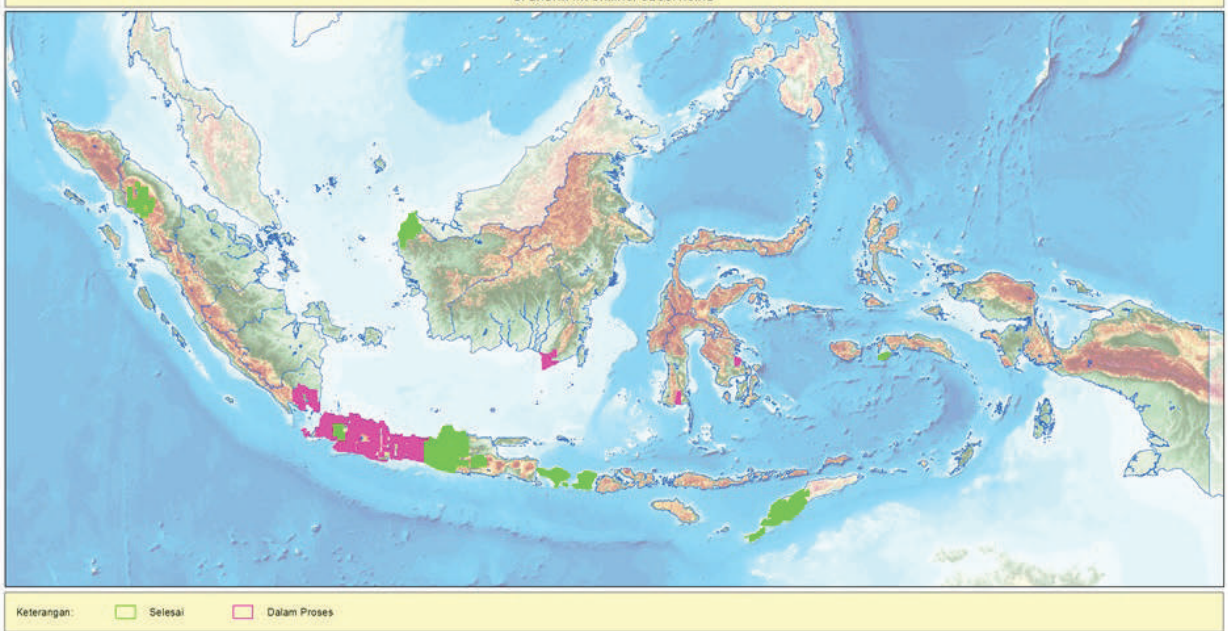



BIMBINGAN TEKNIS TOPONIMI
PADANG, 4 - 8 APRIL 2016
INVENTARISASI DAN VERIFIKASI NAMA RU
UNTUK PANITIA PEMBAKUAN NAMA RUPA
PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

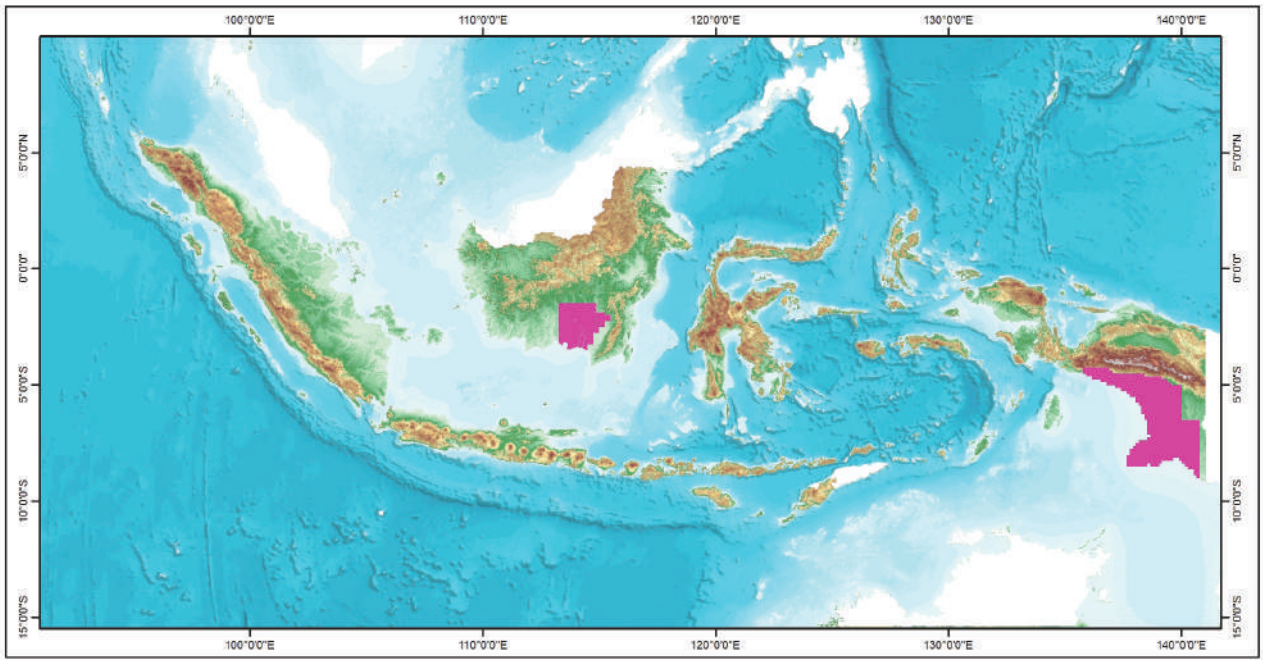
SEBARAN TITIK HASIL PERAPATAN TITIK KONTROL UNTUK ORTHOREKTIFIKASI CITRA SATELIT RESOLUSI SANGAT TINGGI
SD. AKHIR DESEMBER 2016
DI BADAN INFORMASI GEOSPASIAL



CAKUPAN HASIL CITRA TEGAK HASIL ORTHOREKTIFIKASI
SD. AKHIR DESEMBER 2016
DI BADAN INFORMASI GEOSPASIAL



INDEKS PEMETAAN RUPABUMI INDONESIA SKALA 1:25.000
TAHUN ANGGARAN 2016



Legenda :

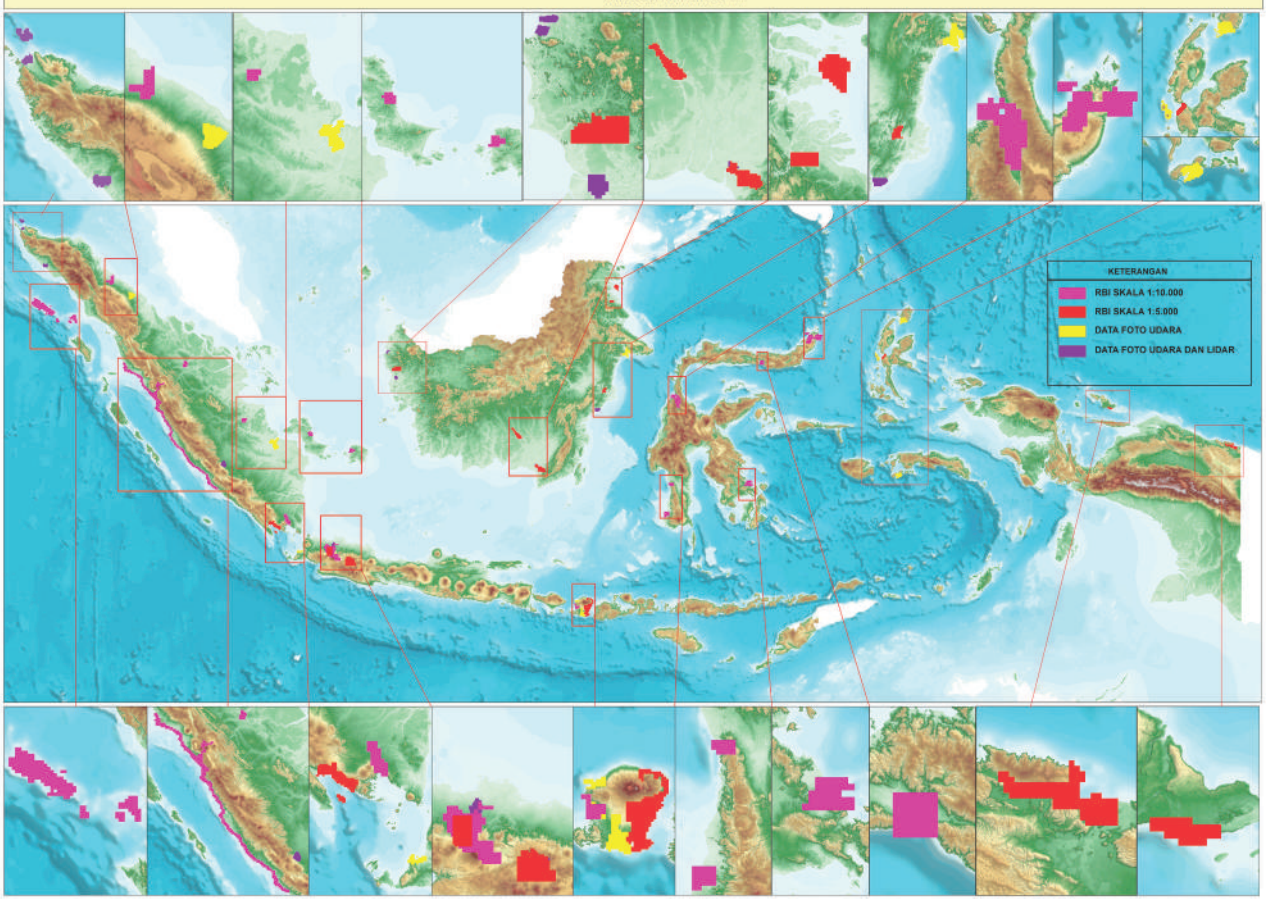
RBI Skala 1:25.000

Skala 1:22,000,000

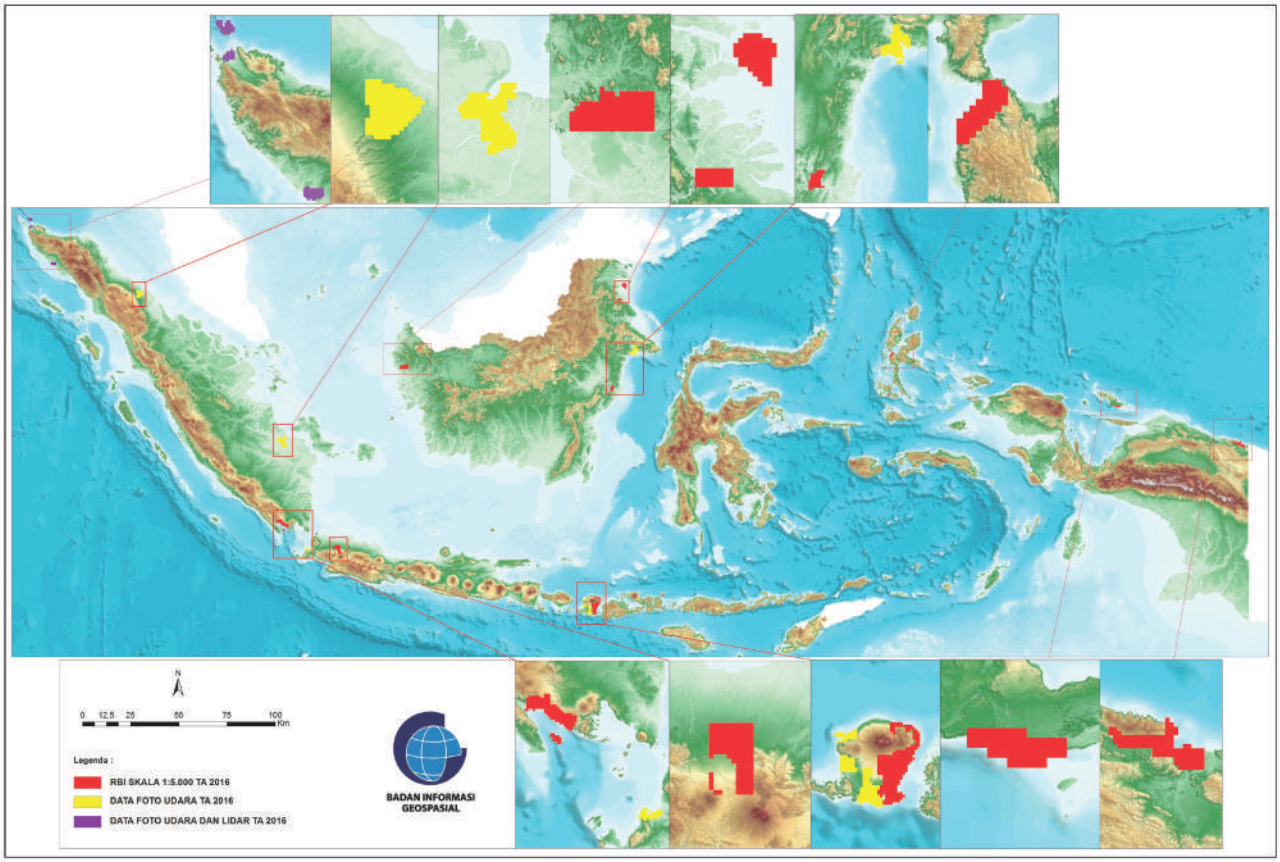
0 250 500 1,000 1,500 2,000 Kilometers

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

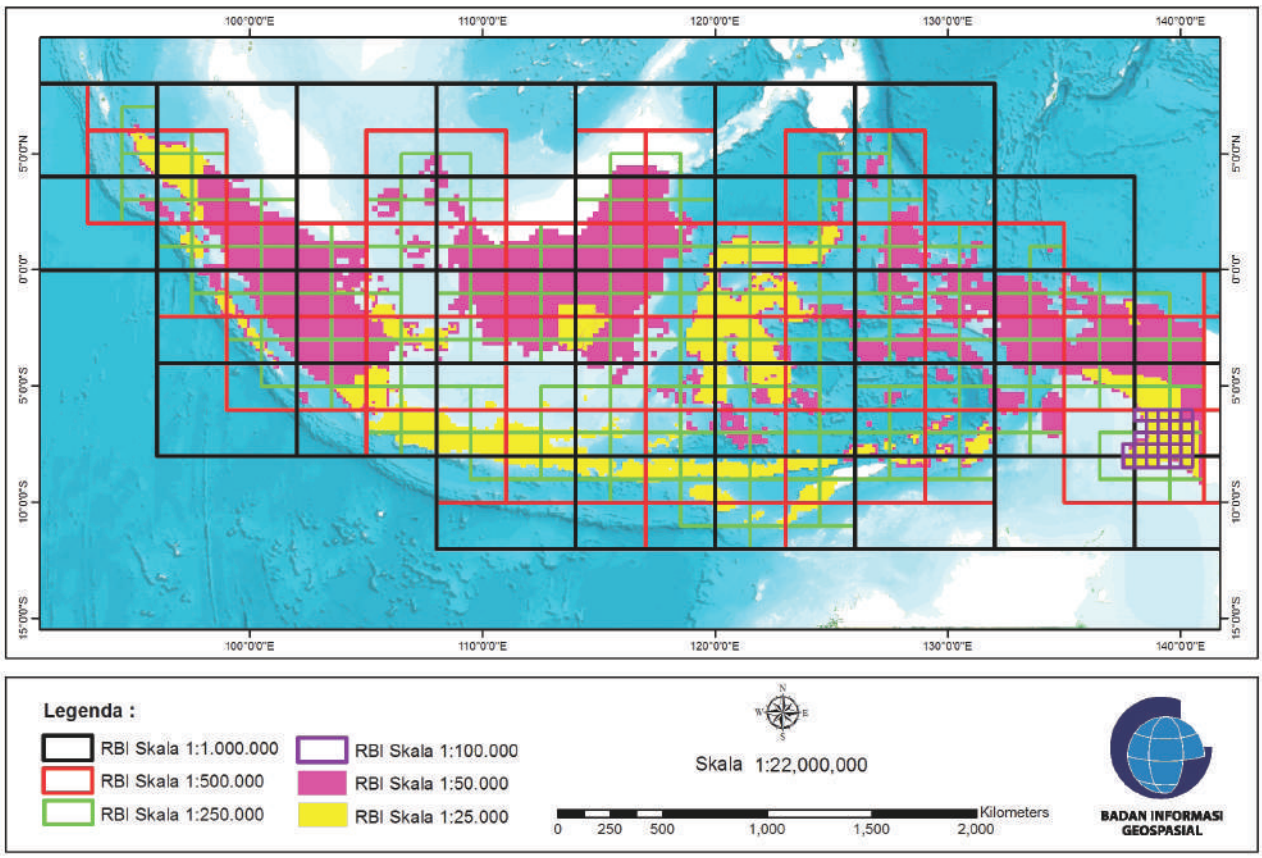
INDEKS KETERSEDIAAN DATA FOTO UDARA, LIDAR DAN PETA RUPABUMI SKALA BESAR HINGGA TAHUN 2016



INDEKS PEKERJAAN AKUISISI FOTO UDARA, LIDAR DAN PEMETAAN RUPABUMI SKALA BESAR TAHUN ANGGARAN 2016



INDEKS KETERSEDIAAN
PETA RUPABUMI INDONESIA SKALA KECIL DAN MENENGAH
HINGGA TAHUN ANGGARAN 2016





JARING KONTROL GEODESI DAN GEODINAMIKA

PENGELOLAAN DAN PEMUTAKHIRAN JARING KONTROL GEODESI DAN GEODINAMIKA

UU No. 4 Tahun 2011 tentang UUIG mengatur tentang adanya pemutakhiran secara periodik terhadap IGD yang meliputi JKHN, JKVN dan JKGN. Berdasarkan hal tersebut maka dilakukanlah kegiatan survei pendahuluan untuk pengelolaan dan pemutakhiran JKG di Pulau Sumatera dan Pulau Sulawesi. Kegiatan ini meliputi melakukan inventarisasi pilar - pilar yang ada dan pengecekan kondisinya, apakah pilar tersebut masih layak untuk digunakan atau sudah hilang. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan terjadi pembaharuan informasi pilar yang ada sehingga pengguna atau user dapat memperoleh informasi pilar paling aktual.

A. Jaring Kontrol Geodesi yang dirawat

Pada tahun anggaran 2016, PJKGG mengadakan kegiatan Pemeliharaan JKG sebanyak 207 titik seperti yang disajikan dalam gambar Sebaran Titik JKG yang Dirawat.

Hasil Kegiatan survei pengelolaan dan pemutakhiran JKG. Output dari pengelolaan dan pemutakhiran JKG adalah data GNSS, data meteo, dokumentasi. Data-data ini untuk memperbaharui data atribut dan memperbaharui nilai koordinat JKG.

Tabel 2. Rekapitulasi JKG yang Dikunjungi

MANAGEMENT AND AN UPDATE ON CONTROL NETWORK FOR GEODESY AND GEODYNAMICS

The Law No 4 of 2011 on UUIG regulates periodic updating of IGD that includes JKHN, JKVN and JKGN.

Based on the regulation, a preliminary survey for the management and update on JKG in Sumatera and Sulawesi Islands was carried out. The activity involved an inventory of the existing pillars and checking their conditions, whether the pillars were still feasible to use or have been lost. The activity was purposed to support updating of the existing pillar information so that users could obtain the most actual pillar information.

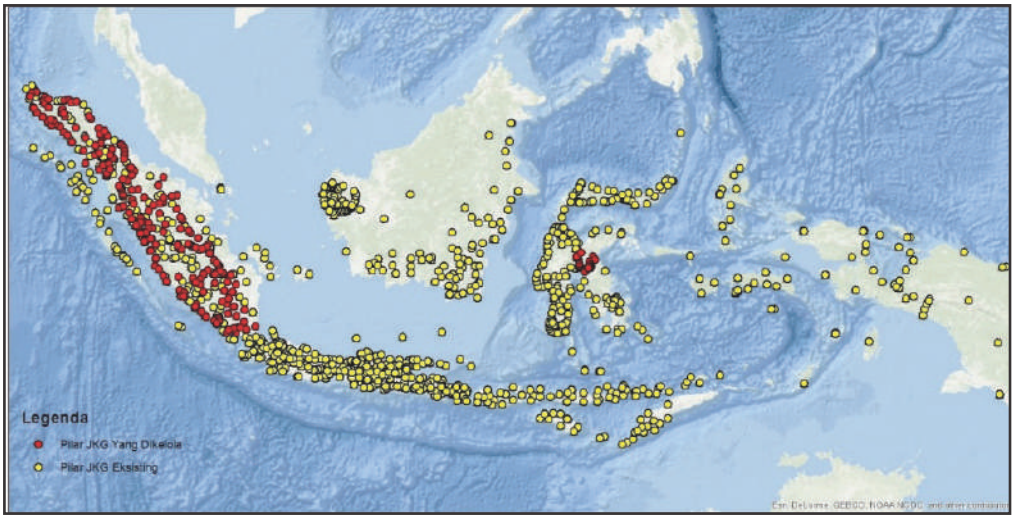
A. Control Network for maintained geodesy

In fiscal year of 2016, PJKGG held JKG maintenance activities of 207 points.

The JKG management and updating survey activities resulted in some outputs. The outputs of the activities were GNSS data, meteo data, as well as documentation. These data were beneficial to update attribute data and JKG coordinates.

Table 2. Recapitulation of the visited JKG

No	Lokasi	Inventarisasi	Baik	Rusak	Hilang
1	Aceh	82	53	8	21
2	Sumatera Utara	121	75	10	36
3	Sumatera Barat	71	41	9	21
4	Riau	38	21	10	7
5	Jambi	46	30	13	3
6	Sumatera Selatan	123	89	5	29
7	Bengkulu	64	51	8	5
8	Lampung	73	48	4	21
Total		618	408	67	143



Sebaran Titik JKG yang Dirawat

B. Stasiun CORS yang dirawat

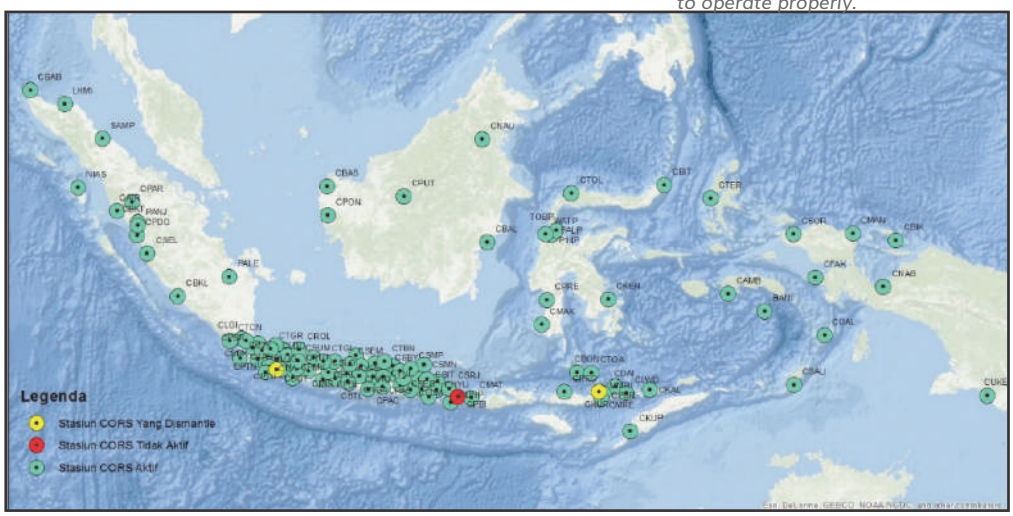
Kegiatan pengelolaan Stasiun *Continuously Operating Reference Station* (CORS) pada tahun 2016 adalah berupa pemeliharaan dan perbaikan stasiun CORS agar tersedia data GPS selama Tahun 2016. Jumlah stasiun CORS yang dirawat adalah sebanyak 124 stasiun.

Kegiatan ini terdiri dari pengoperasian stasiun tetap GPS, pemeliharaan, dan pengolahan data. Kegiatan pengoperasian stasiun terdiri dari pemantauan data yang mengalir dari stasiun CORS ke BIG melalui jaringan komunikasi VPN IP dan internet. Pemeliharaan stasiun CORS terdiri dari perbaikan stasiun CORS yang mengalami kerusakan, *upgrade firmware*, dan pengecekan stasiun yang dilakukan minimal 1 (satu) kali untuk setiap tahunnya agar alat dapat beroperasi dengan baik.

B. Maintained CORS stations

Management of the Continuously Operating Reference Station (CORS) in 2016 covered maintenance and improvement of CORS stations for providing GPS data during 2016. The number of maintained CORS stations was 124.

The activities included the operating of permanent GPS stations, maintenance, and data processing. The operating of the stations covered monitoring the data flowing from the CORS stations to the BIG through the VPN IP and internet communication network. Maintenance of CORS stations included improvement of damaged CORS stations, upgrades firmware, and checking of the station performed at least once per year in order to ensure the equipments to operate properly.



Sebaran Stasiun CORS yang Dirawat

c. Stasiun Pasang Surut yang dirawat

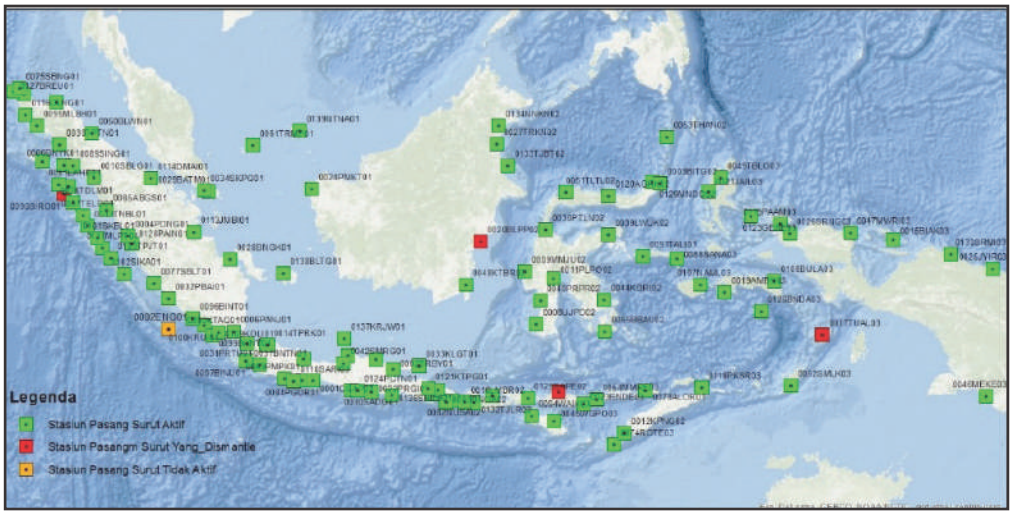
Sebagai pendukung JKVN, data pasang surut yang dihasilkan oleh jaring kontrol stasiun pasang surut menjadi data yang digunakan untuk validasi geoid Indonesia. Bahkan, untuk wilayah yang belum memiliki geoid, data pasang surut dijadikan sebagai acuan tinggi.

Kegiatan perawatan stasiun pasang surut meliputi kegiatan monitoring stasiun pasang surut, perawatan stasiun pasang surut, dan pengolahan data pasang surut yang dilakukan pada 128 sistem stasiun pasang surut online yang sebarannya seperti terlihat pada gambar Sebaran Stasiun Pasang Surut yang Dirawat.

C. Maintained tidal stations

To support JKVN, the tidal data generated by the control network for tidal stations became the data used for validating the Indonesian geoid. In fact, the regions that did not have geoid yet used the tidal data as a high reference.

Maintenance activities of the tidal stations included monitoring, maintenance, and management of tidal data conducted at 128 online tidal station systems as the distribution shown at Figure 3 above.



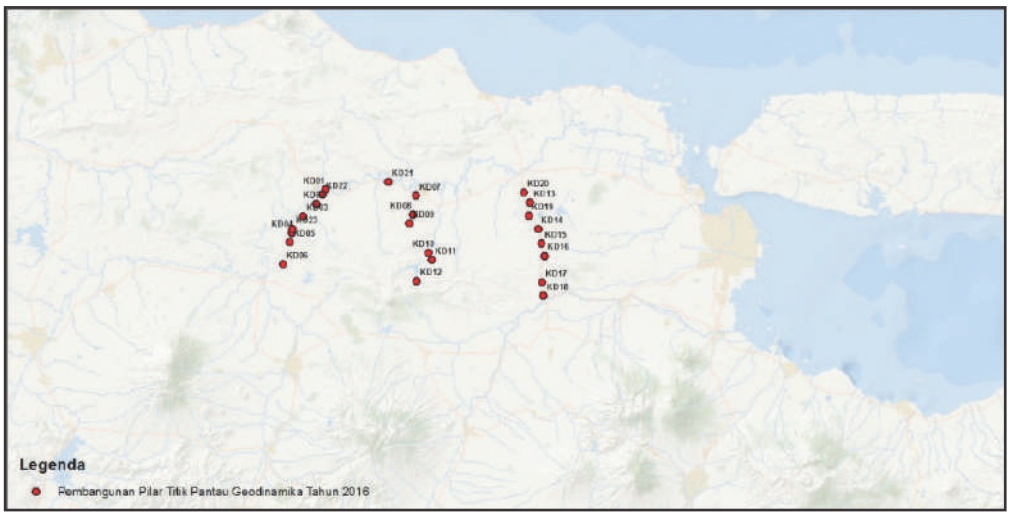
Sebaran Stasiun Pasang Surut yang Dirawat

PEMBANGUNAN JARING KONTROL GEODESI DAN GEODINAMIKA

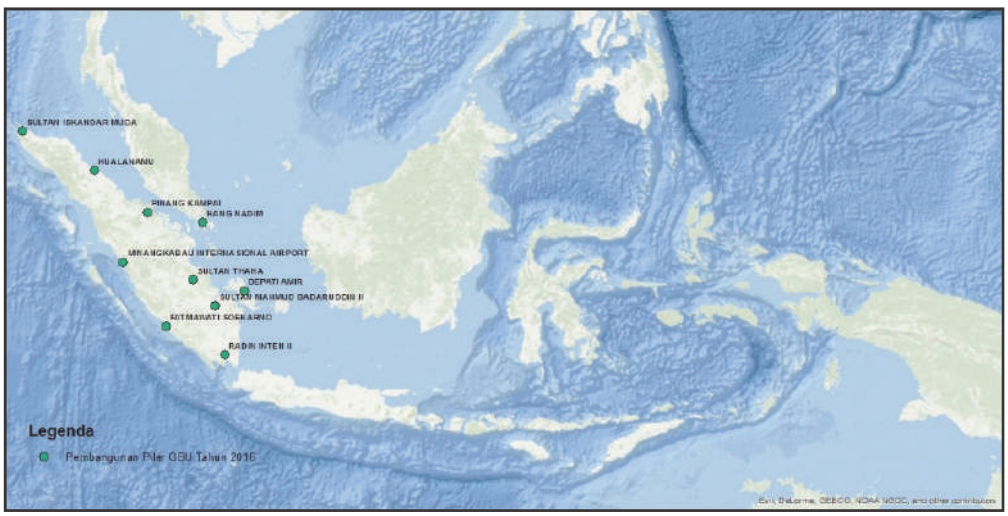
Pada tahun 2016 PJKGG telah melaksanakan pembangunan Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika sebanyak 40 titik. Pembangunan ini bertujuan untuk memperluas cakupan wilayah sebaran Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika yang sudah ada. Pembangunan ini terdiri atas pembangunan 10 pilar Gaya Berat Utama (GBU), 10 pilar Titik Pantau Geodinamika, 10 Stasiun Pasang Surut, dan 10 Stasiun CORS.

DEVELOPMENT OF CONTROL NETWORK FOR GEODESY AND GEODYNAMICS

PJKGG developed 40 points of control network for Geodesy and Geodynamics in 2016. This development was to extend coverage of distribution area of existing control network for Geodesy and Geodinamics. It included construction of 10 main gravity pillars (GBU), 10 Geodynamic monitoring Points, 10 Tidal Stations, and 10 CORS Stations.



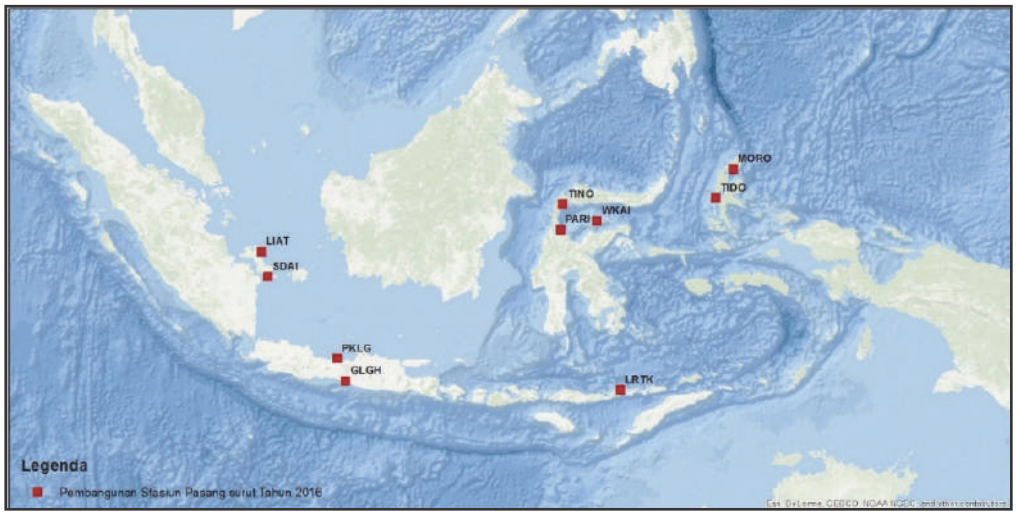
Peta Sebaran Lokasi Pembangunan Pilar Titik pantau Geodinamika Tahun 2016



. Peta Sebaran Lokasi Pembangunan Pilar Gaya Berat Utama (GBU) Tahun 2016

Pilar GBU dibangun dengan tujuan sebagai pendukung kegiatan *Airborne Gravity* yang rencananya akan diselenggarakan oleh PJKGG pada tahun 2016 di Pulau Sumatera. Namun, pada perkembangan selanjutnya, kegiatan *Airborne Gravity* tersebut dibatalkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) BIG akibat adanya pemotongan anggaran BIG.

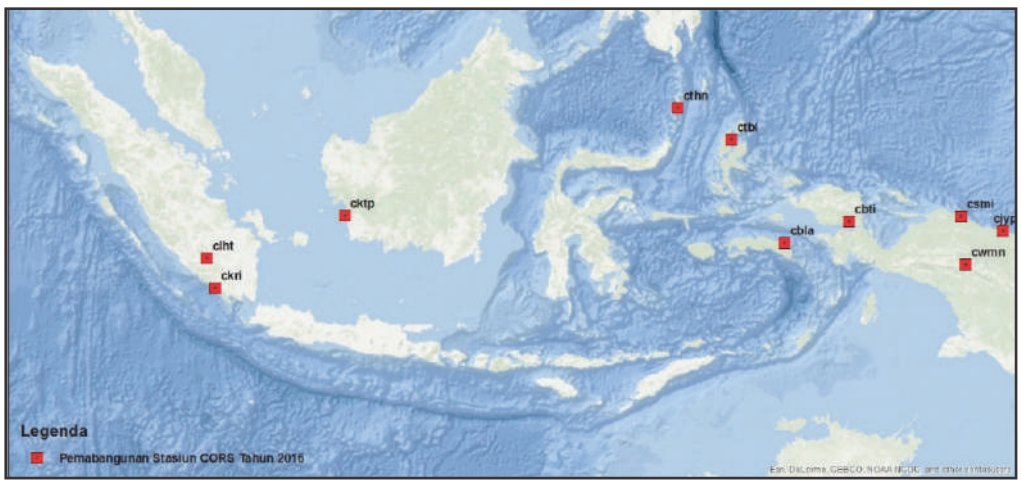
GBU Pillars were constructed to support Airborne Gravity activities that should be held by PJKGG in 2016 in Sumatra. However, the Airborne Gravity activities were canceled further by the Budget User Authority (KPA) of BIG due to BIG budget cuts.



Sebaran Lokasi Pembangunan Stasiun Pasang Surut Tahun 2016

Jaring Stasiun Pasang Surut Nasional merupakan salah satu titik kontrol acuan pemetaan garis pantai pada pemetaan skala besar. Berdasarkan hasil kuantifikasi pasang surut dari perhitungan dengan menggunakan model laut dan data satelit altimeter, didapatkan bahwa kebutuhan Jaring Stasiun Pasang Surut Nasional realtime sebanyak 400 stasiun. Sedangkan, jumlah bangunan stasiun pasang surut yang terbangun sampai tahun 2016 sebanyak 128 stasiun. Oleh karena itu, pada tahun 2016 dilakukan pembangunan 10 stasiun pasang surut baru.

The Network of National Tidal stations was one of the reference control points for coastline mapping at large scale mapping. The calculation of tidal quantification from the calculation using marine model and altimeter satellite data showed that around 400 realtime national tidal stations were still needed to be developed. Meanwhile, the number of constructed tidal stations up to early 2016 was 128. Therefore, 10 new tidal stations were constructed during the fiscal year of 2016.



. Sebaran Lokasi Pembangunan Stasiun CORS Tahun 2016

Pembangunan Stasiun CORS 2016 ditujukan untuk mendukung pemetaan wilayah dan pengamatan deformasi kerak bumi, oleh karena itu penempatan dari stasiun CORS yang dibangun ini dilakukan disekitar daerah yang mendekati wilayah yang belum tersedia / jauh dari jaringan stasiun CORS yang sudah ada dan juga di lempeng kerak bumi dengan kriteria mengikuti SNI prosedur pembangunan stasiun CORS. Jumlah stasiun CORS yang dibangun

The construction of CORS Stations in 2016 was to support area mapping and the observation of the earth's crust deformation, therefore constructed CORS stations were placed in around areas that were distant from or did not have yet a constructed CORS station, or in the crustal plates, in accordance with the Indonesian National Stndard (SNI) for CORS station development procedure. There were 10 CORS stations constructed. All stations started to be

sebanyak 10 stasiun CORS. Semua stasiun mulai terkoneksi melalui VPN IP. Setelah stasiun terkoneksi melalui VPN, masing-masing stasiun CORS di daftar di SPIDER *software* untuk memonitor kualitas data yang terkirim (streaming).

PEMUTAKHIRAN SISTEM REFERENSI GEOSPASIAL NASIONAL (SRGN)

Pada tahun 2016 dalam rangka mendukung kegiatan agenda prioritas nasional (Nawa Cita), PJKGG miliki kewajiban dalam hal perwujudan sistem referensi geospasial nasional sebagai titik acuan dalam rangka kegiatan pemetaan. Salah satu agenda kegiatan Nawa Cita yang paling utama ialah dalam bidang kemaritiman. Dalam rangka mendukung kegiatan tersebut, PJKGG menyediakan data dalam bentuk data pasang surut dan juga data stasiun tetap GPS (CORS).

Kegiatan ini terdiri atas SRGN untuk Datum Horizontal, Datum Vertikal, dan Datum Pasang Surut seberti berikut :

a. Sistem Referensi Geospasial Nasioanal untuk Datum Horizontal yang Dimutakhirkan, berupa : koordinat (X,Y,Z) dan velocity rate (Vx, Vy, Vz).
b. Sistem Referensi Geospasial Nasioanal untuk Datum Vertikal yang Dimutakhirkan, berupa : validasi nilai geoid Indonesia di Pulau Kalimantan dan Sulawesi.
c. Sistem Referensi Geospasial Nasioanal untuk Datum Pasang Surut yang Dimutakhirkan, berupa : komponen harmonik pasang surut, dan nilai MSL, HAT, dan LAT.

connected each other via VPN IP. Once the station was connected through the VPN, each CORS station was listed in the SPIDER software to monitor the quality of the sent data (streaming).

AN UPDATE ON NATIONAL GEOSPATIAL REFERENCE SYSTEM (SRGN)

In order to support the activities of the national priority agenda (Nawa Cita), PJKGG, in 2016, was responsible for establishing national geospatial reference system as a mapping reference point. One of Nawa Cita's most important activity agenda was in a maritime sector. In order to support these activities furthermore, PJKGG provided tidal data as well as permanent station GPS data (CORS).

These activities covered SRGN for horizontal Datum, Vertical Datum, and Tidal Datum as follows:

a. *A National Geospatial Reference System for updated Horizontal Datum was in the form of coordinates (X, Y, Z) and velocity rate (Vx, Vy, Vz).*
b. *National Geospatial Reference System for Updated Vertical Datum was in the form of validation of Indonesia geoid in Kalimantan and Sulawesi islands.*
c. *National Geospatial Reference System for Updated tidal Datum was in the form of harmonic components of the tide, and values of MSL, HAT, as well as LAT.*







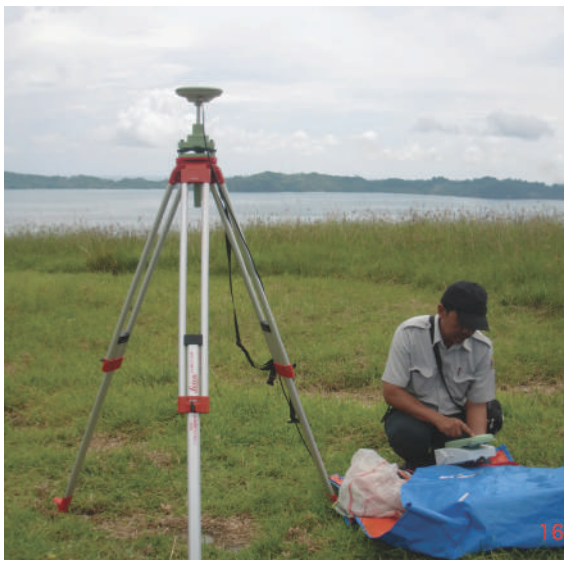
FOTO KEGIATAN 2016






NI 3097
UTARA


TTG 1542




TTGOPLR
BARAT





PEMETAAN BATAS WILAYAH

PEMETAAN BATAS WILAYAH

Penyelenggaraan pemetaan batas wilayah mencakup pemetaan batas negara dan batas wilayah administrasi. Tahun 2016 kegiatan batas negara pada meliputi pemetaan batas maritim dan batas negara darat. Kegiatan tersebut mencakup perundingan batas maritim dan batas darat serta survei dan pemetaan untuk mendukung perundingan batas maritim dan darat. Sedangkan untuk kegiatan batas wilayah administrasi meliputi pemetaan batas provinsi, kabupaten/ kota serta kecamatan dan desa/ kelurahan.

A. Penyelenggaraan Pemetaan Batas Negara

1. Penyelenggaraan Pemetaan Batas Maritim

Badan Informasi Geospasial (BIG) menjadi anggota tim teknis dan ketua *Technical Working Group* (TWG) perundingan batas maritim. Pada tahun 2016 perundingan batas maritim tahun 2016 telah dilaksanakan sebanyak 7 perundingan teknis yang melibatkan 3 negara tetangga yaitu Malaysia (4 perundingan), Filipina (1 perundingan) dan Vietnam (2 perundingan). Ilustrasi batas maritim Indonesia dengan 3 (tiga) negara tersebut tersaji dalam gambar berikut.

a. Indonesia- Malaysia

Segmen batas berada di Selat Malaka, Selat Singapura, Laut China Selatan dan Laut Sulawesi. Batas Laut Teritorial/ Wilayah (LT) sebagian segmen telah disepakati tahun 1970 dengan panjang segmen 174,41 mil laut dan 76,01 mil laut belum ada kesepakatan. Batas LK sebagian segmen telah disepakati tahun 1969 dan 1971 dengan panjang segmen 973,25 mil laut dan 144,89 mil laut belum ada kesepakatan. Batas ZEE dengan panjang 974,58 mil laut belum ada kesepakatan.

BOUNDARY MAPPING

Implementation of the boundary mapping comprised mapping of state boundaries and administrative boundaries. Activities of the state boundary mapping in 2016 covered mapping of maritime and terrestrial boundaries. The activities also included negotiation on maritime and terrestrial boundaries as well as survey and mapping in order to serve the negotiation on the maritime and terrestrial boundaries. Meanwhile, administrative boundary mapping comprised mapping of provinces, districts/cities, sub-districts, and village boundaries.

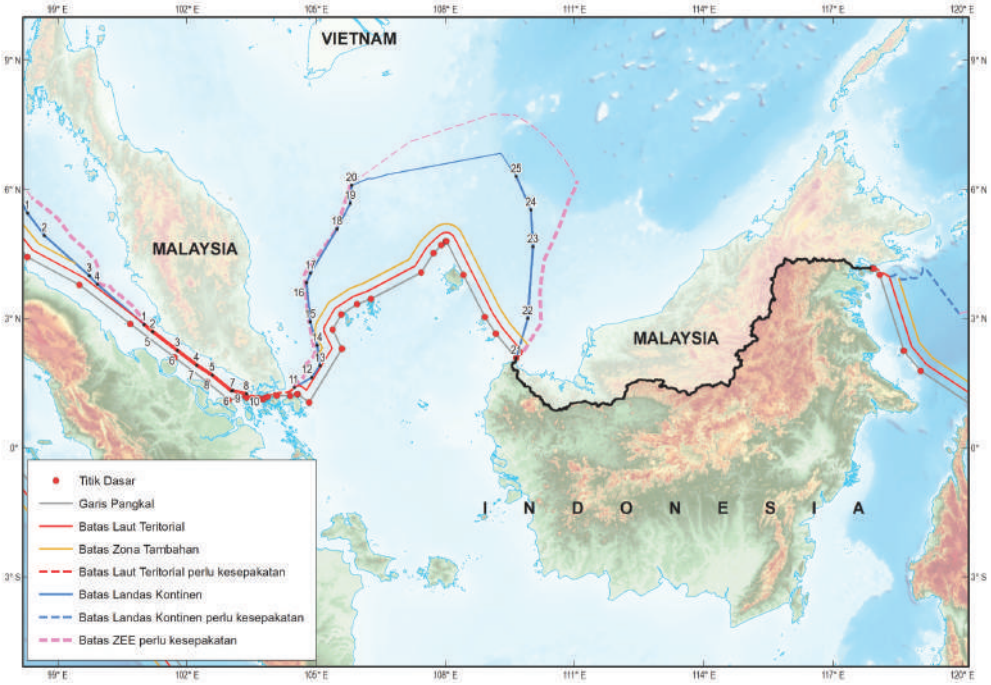
A. Implementation of state boundary mapping

1. Implementation of maritime boundary mapping

The Geospatial Information Agency (BIG) was a member of the technical team and the chairman of the Technical Working Group (TWG) for maritime boundary negotiation. In 2016, negotiations on maritime boundaries were carried out as many as 7 times, involving 3 neighboring countries namely Malaysia (4 negotiations), Philippines (1 negotiation) and Vietnam (2 negotiations). Illustration of Indonesia's maritime boundaries with the three countries was presented in the following figure.

a. Indonesia – Malyasia

Boundary segments were located in Malaka strait, Singapura strait, South China Sea, and Sulawesi Sea. Teritorial / regional sea boundaries (TL) of the partial segment have been agreed since 1970 with the segment length being 174.41 nautical miles, while around 76.01 nautical miles of that have not been agreed. LK boundaries of the partial segment have been agreed since 1969 and 1971 with the segment length being 973.25 nautical miles, while about 144.89 nautical miles of that have not been agreed. About 974.58 nautical miles of ZEE boundaries have not been agreed as well.



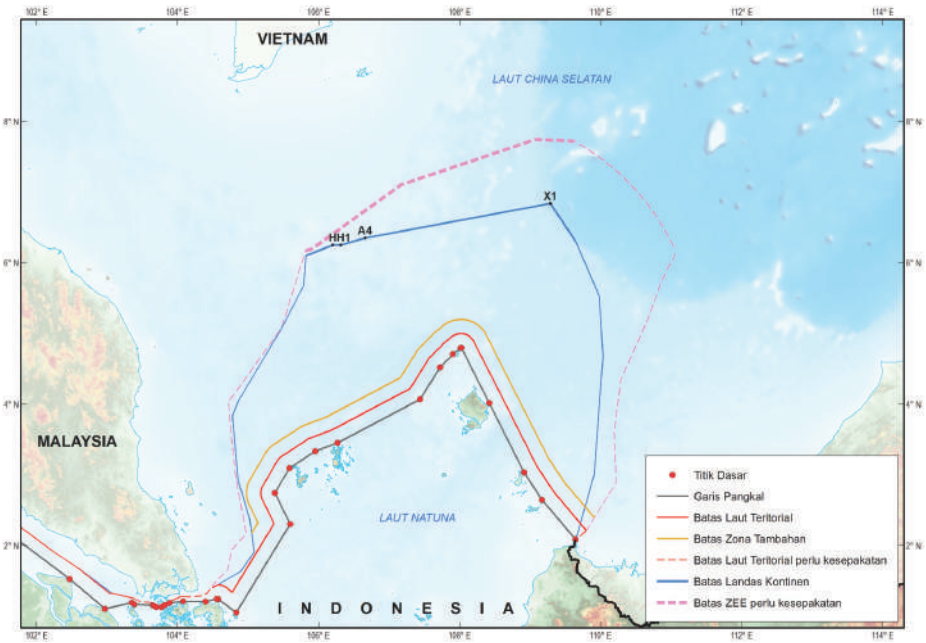
Ilustrasi segmen batas maritim Indonesia- Malaysia.

b. Indonesia- Vietnam

Segmen batas berada di Laut China Selatan. Batas LK telah disepakati tahun 2003 dengan panjang segmen 250,71 mil laut. Sedangkan batas ZEE belum ada kesepakatan dengan panjang segmen 251,30 mil laut. Tahun 2016 telah dilakukan 2 perundingan batas ZEE (perundingan teknis ke-8 dan ke-9).

b. Indonesia – Vietnam

The boundary segment was located in South China Sea. The LK Boundaries have been agreed since 2003 with the segment length of 250.71 nautical miles. Meanwhile, the ZEE boundaries that were about 251.30 nautical miles of the segment length have not been agreed. In 2016, two negotiations on ZEE boundaries were conducted which were 8th and 9th technical negotiations.



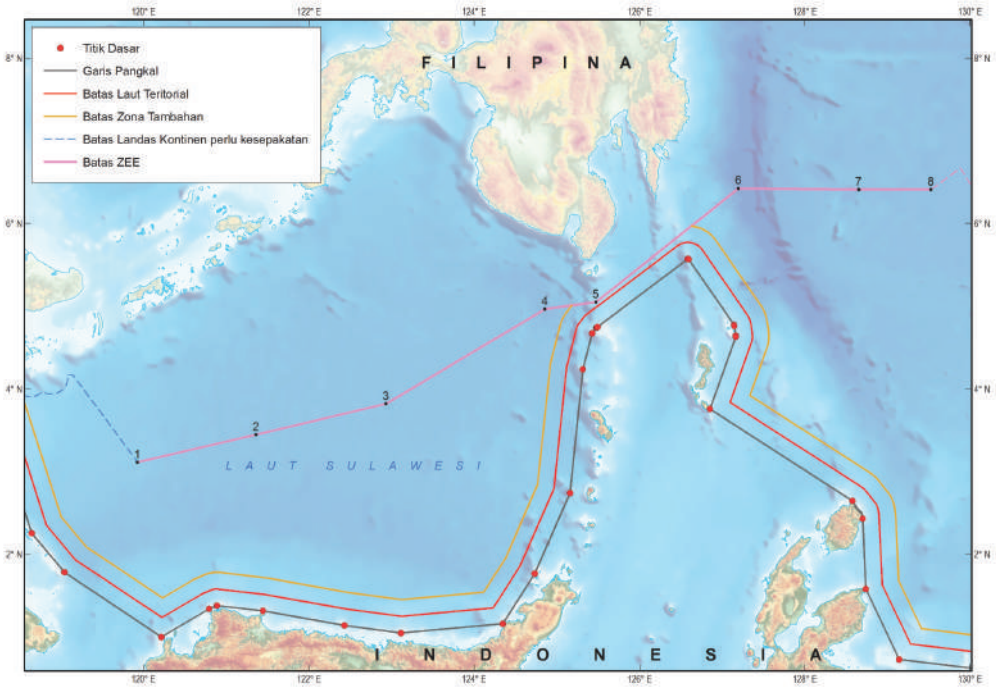
Ilustrasi segmen batas Indonesia- Vietnam.

c. Indonesia- Filipina

Segmen batas berada di Laut Sulawesi dan Samudera Pasifik. Batas LK belum ada kesepakatan dengan panjang segmen 258,64 mil laut. Batas ZEE telah disepekati tahun 2014 dengan panjang segmen 627,50 mil laut. Tahun 2016 telah dilakukan 1 perundingan (perundingan teknis ke-9).

c. Indonesia-Philippines

The boundary segments were located in Sulawesi Sea and Pacific Ocean. The LK Boundaries, about 258.64 nautical miles of the segment length, have not been agreed. Meanwhile, the ZEE boundaries have been agreed since 2014 with the segment length of 627.50 nautical miles. In 2016, a negotiation on ZEE boundaries was conducted which was the ninth technical negotiation.



Ilustrasi segmen batas maritim Indonesia- Filipina.

2 Penyelenggaraan Pemetaan Batas Darat

Dalam pelaksanaan perundingan batas darat BIG berperan sebagai focal point dalam teknis survei dan pemetaan. sebagai ketua dan anggota dalam pertemuan *Special Discussion for the Joint Border Mapping (JBM) Project*, *Special Discussion for the Common Border Datum Reference Frame (CBDRF) Project* serta *Joint Working Group (JWG) for CBDRF and JBM*. Perundingan batas darat pada tahun 2016 telah dilaksanakan sebanyak 11 perundingan dengan negara Malaysia (6 perundingan) dan Papua Nugini (5 perundingan).

a. **Indonesia- Malaysia**

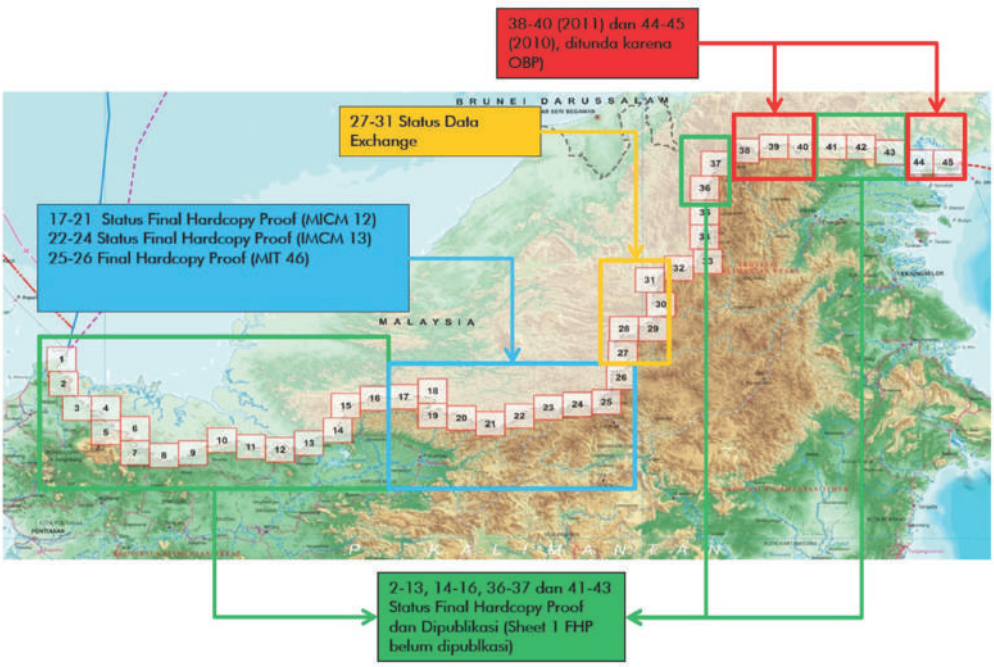
Pembuatan Peta Joint Border Mapping (JBM) dilaksanakan pada Skala 1:50.000 yang mencakup koridor 5 Km wilayah Indonesia dan Malaysia. Dari 45 Nomor Lembar Peta (NLP) yang direncanakan oleh kedua negara, sampai saat ini telah diselesaikan 31 NLP.

2. Implementation of terrestrial boundary mapping

During the negotiation on the terrestrial boundary, BIG served as a focal point for technical surveys and mapping. BIG was as a chair and a member of the Special Discussion for the Joint Border Mapping (JBM) Project, the Special Discussion for the Common Border Datum Reference Frame (CBDRF) Project and the Joint Working Group (JWG) for CBDRF and JBM. The negotiation on the terrestrial boundary during 2016 was carried out as many as 11 negotiations including with Malaysia (6 negotiations) and Papua New Guinea (5 negotiations).

a. Indonesia – Malaysia

Development of the Joint Border Mapping (JBM) Map was conducted on a scale of 1: 50,000 covering the 5 Km corridors of Indonesia and Malaysia. Of the 45 Number of Map Sheets (NLP) that were planned by both countries, they accomplished only 31 NLPs.



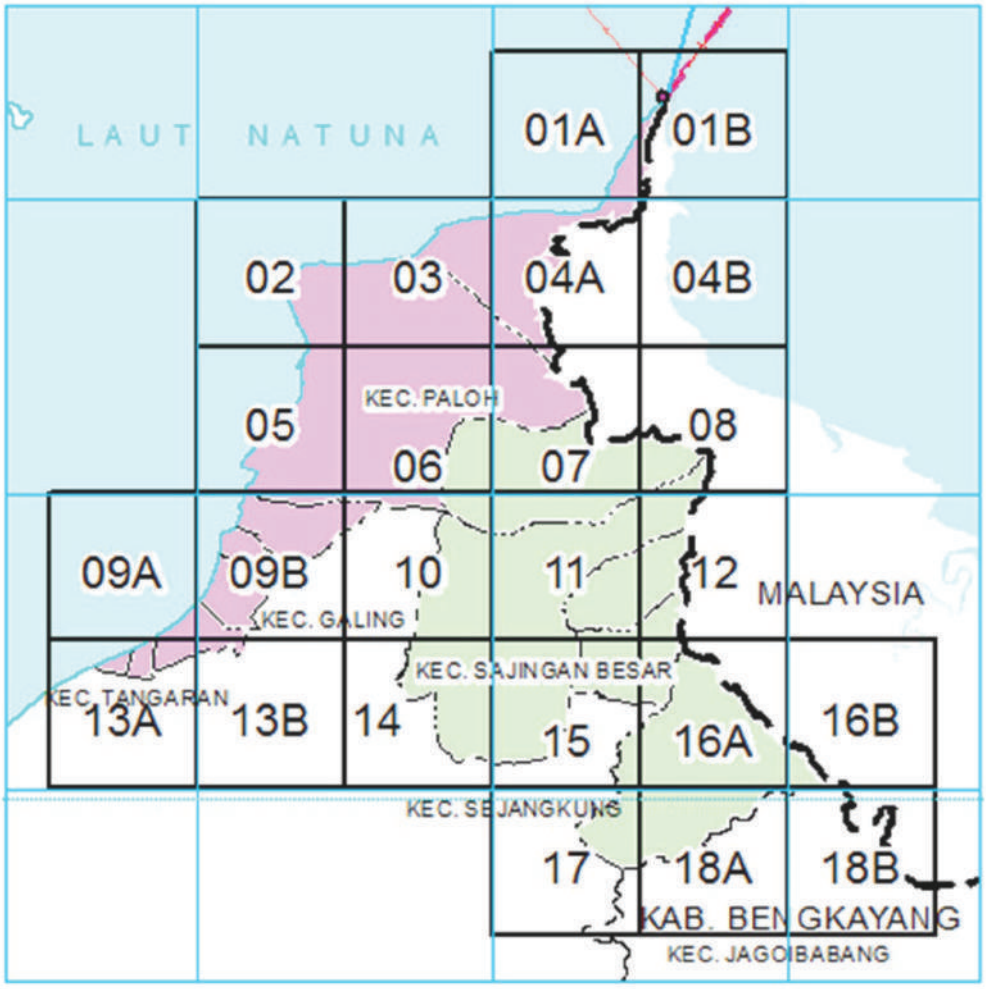
Indeks pembuatan JBM Indonesia-Malaysia.



Lokasi kegiatan survei CBDRF Indonesia- Malaysia.

Kegiatan CBDRF dilaksanakan dalam rangka untuk mendapatkan satu datum Bersama antara kedua negara. Pada tahun 2016 kedua negara telah sepakat untuk melaksanakan Joint Survei GNSSdi sepanjang garis batas pada segmen I001 sampai J001 sebanyak16 pilar. Namun tidak dapat terlaksana Karena Malaysia melakukan penundaan dikarenakan masalah anggaran di pihak Malaysia.

CBDRF activities were conducted in order to obtain a Joint datum between the two countries. In 2016 the two countries agreed to implement the GNSS Joint Survey along the border of from the segment I001 to the segment J001 as many as16 pillars. Nevertheless, it could not be conducted as Malaysia delayed it due to its budgetary issue.



Indeks peta kecamatan di wilayah perbatasan Indonesia- Malaysia

Peta kecamatan di kawasan perbatasan Indonesia- Malaysia dibuat dalam 2 layout yaitu sheet-wise dan area-wise. Peta dengan layout sheet-wise dibuat dengan skala 1: 50.000, sedangkan peta dengan layout area-wise dibuat dengan skala bervariasi. Sampai saat ini telah tersedia peta kecamatan di kawasan perbatasan sebanyak 159 NLP sheet-wise dan 21 NLP area-wise. Tahun 2016 dilakukan pemutakhiran melalui pendetilan menggunakan citra resolusi tinggi untuk Kecamatan Paloh dan Kecamatan Sajingan Besar di Kabupaten Sambas.

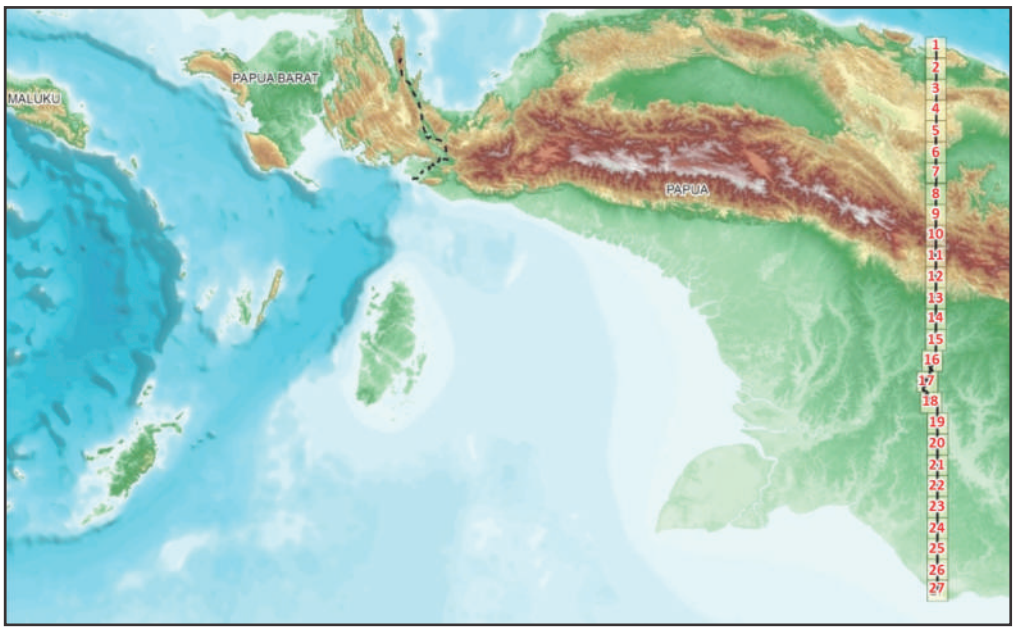
The sub-district maps for Indonesia-Malaysia border areas were made in 2 layouts, namely sheet-wise and area-wise. The sheet-wise layout Maps were made on a scale of 1: 50,000, while area-wise layout maps were made at varying scales. To date, there have been 159 NLP sheet-wise and 21 NLP area-wise. Updating was conducted in 2016 using high resolution satellite imagery in more detail manner for Paloh and Sajingan Besar sub-districts in the Sambas District.

b. **Indonesia- Papua Nugini**

b. Indonesia – Papua New Guinea

Pembuatan Peta Joint Border Mapping (JBM) Skala 1:50.000 yang mencakup koridor 10 Km wilayah Indonesia dan PNG. Saat ini telah diselesaikan keseluruhan 27 NLP Peta JBM RI-PNG.

Development of the Joint Border Mapping (JBM) Map was counducted on a scale of 1: 50,000 covering the 10 Km corridors of Indonesia and Papua New Guinea. Currently, the overall 27 NLP maps of JBM RI-PNG have been completed.



Indeks JBM Indonesia-Papua Nugini.

Sesuai dengan hasil pertemuan *Joint Border Committee* (JBC) Indonesia – PNG ke 31 pada tanggal 15 Agustus 2014 di Port Moresby telah disepakati *Terms of Reference* (TOR) dan *Standard Operation Procedure* (SOP) untuk kegiatan perawatan, monitoring dan densifikasi batas negara antar Indonesia-PNG. Dengan adanya TOR densifikasi tersebut maka pada tahun 2015 telah dilaksanakan kegiatan Densifikasi dan Pengukuran Pilar Batas RI-PNG sebanyak 10 pilar perapatan di antara MM 13.0 – MM 13.1. Melanjutkan kegiatan sebelumnya, pada tahun 2016 dilaksanakan kegiatan Densifikasi dan Pengukuran Pilar Batas RI-PNG sebanyak 15 pilar perapatan di antara MM 13.1 – MM 13.2. Pelaksanaan pekerjaan ini dilakukan diantara MM 13.1 sampai dengan MM 13.2 dengan memasang 15 pilar densifikasi. Dari 15 pilar tersebut, 1 pilar merupakan tipe A dan 14 pilar tipe B.

The 31th Joint Border Committee (JBC) Indonesia - PNG meeting on 15th August 2014 in Port Moresby agreed the Terms of Reference (TOR) and the Standard Operation Procedure (SOP) for the maintenance, monitoring and densification activities of the border between Indonesia- PNG. Based on the TOR for densification then in 2015 activities of Densification and Measurement of Pillar Boundaries of RI-PNG were carried out as many as 10 "perapatan" pillars within MM 13.0 - MM 13.1. Following the previous activities, in 2016, Densification and Measurement of pillar boundaries of RI-PNG were conducted as many as 15 "parapatan" pillars within MM 13.1 - MM 13.2. This work was implemented within from MM 13.1 to MM 13.2 by installing 15 densification pillars. Of the 15 pillars, 1 pillar was type A and 14 pillars were type B.



Lokasi densifikasi pilar batas Indonesia- Papua Nugini.

B. Penyelenggaraan Pemetaan Batas Wilayah Administrasi

Wilayah administrasi Indonesia sampai dengan tahun 2016 terbagi menjadi 34 provinsi, 416 kabupaten, dan 98 kota. Wilayah administrasi tersebut terdiri atas segmen batas batas Provinsi sebanyak 966 segmen. Segmen batas administrasi baik provinsi maupun Provinsi sudah dilakukan penegasan sebanyak 263 segmen dari keseluruhan segmen, dengan demikian baru 27 % segmen batas yang sudah ditegaskan, atau dengan kata lain segmen batas definitif.

1. Delineasi Batas Provinsi Secara Kartometrik

Delineasi batas secara kartometrik pada 2 segmen yaitu antara Provinsi Kalimantan Barat dengan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Barat dengan Provinsi Kalimantan Tengah.

Tabel 1. Daftar segmen batas provinsi.

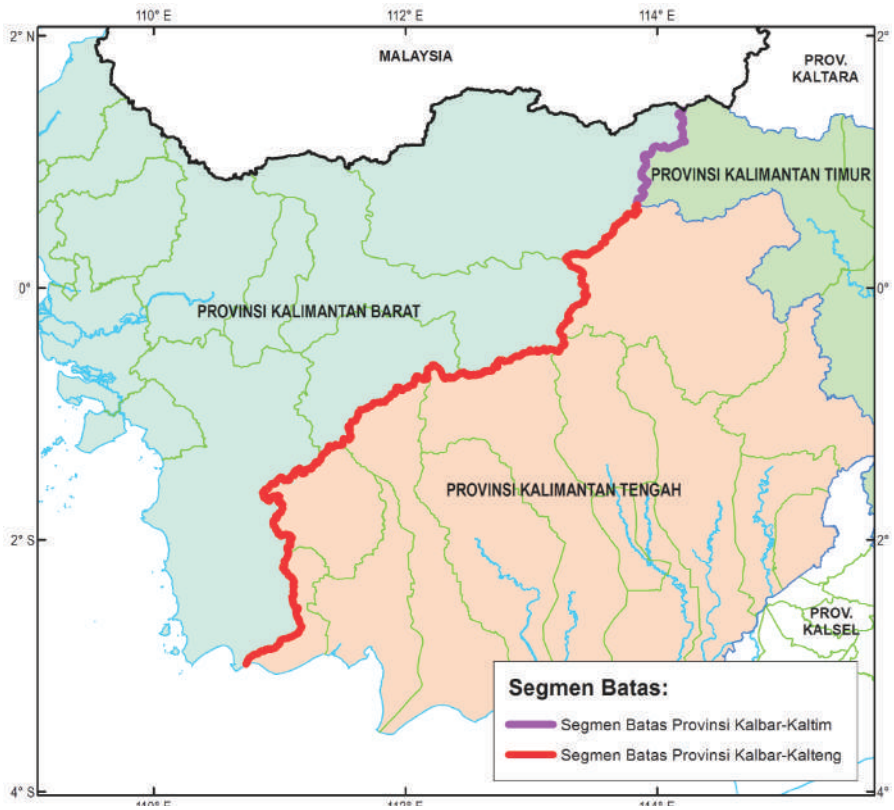
No	Provinsi/ Kabupaten		
I	Provinsi Kalimantan Barat		Provinsi Kalimantan Timur
	1	Kabupaten Kapuas Hulu	Kabupaten Mahakam Ulu
II	Provinsi Kalimantan Barat		Provinsi Kalimantan Tengah
	1	Kabupaten Kapuas Hulu	Kabupaten Murung Raya
	2	Kabupaten Sintang	Kabupaten Murung Raya
	3	Kabupaten Sintang	Kabupaten Gunungmas
	4	Kabupaten Sintang	Kabupaten Katingan
	5	Kabupaten Melawi	Kabupaten Seruyan
	6	Kabupaten Melawi	Kabupaten Lamandau
	7	Kabupaten Ketapang	Kabupaten Lamandau
	8	Kabupaten Ketapang	Kabupaten Kotawaringin Barat

B. Implementation of administrative Boundary Mapping

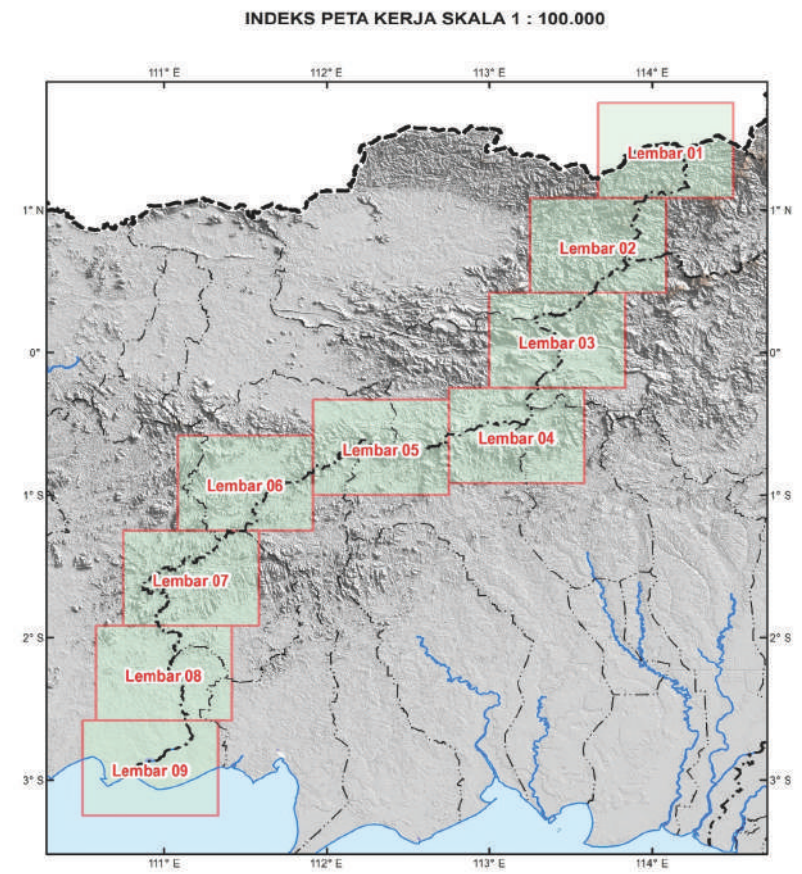
The administrative areas of Indonesia had been divided into 34 provinces, 416 districts and 98 cities until 2016. The administrative areas consisted of 966 provincial boundary segments. The administrative boundary segments of both provinces and districts have been affirmed as many as 263 segments of the overall segments, in other word only 27% of the boundary segments have been confirmed or called definitive boundary segments.

1. Provincial boundary Delineation on a Cartometrical basis

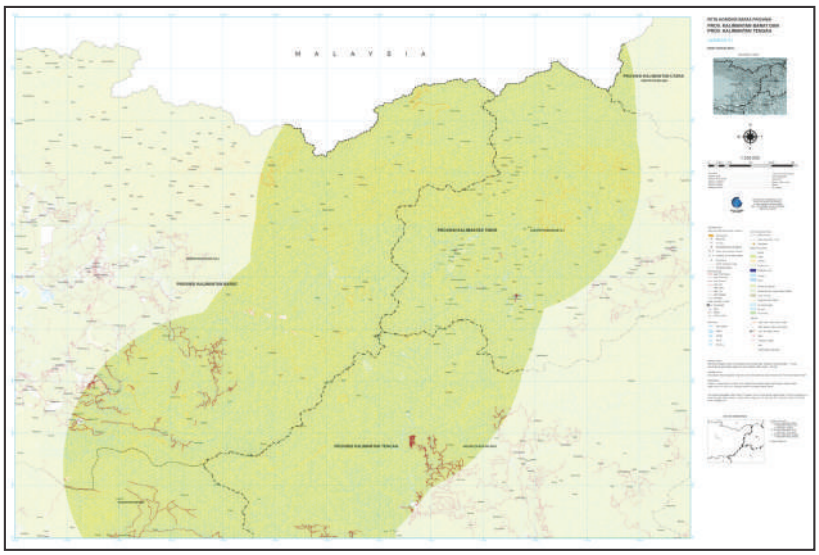
The boundary delineation on a cartometrical basis was done at 2 segments namely between West Kalimantan Province and East Kalimantan Province, as well as between West Kalimantan Province and Central Kalimantan Province.



Segmen dan indeks delineasi batas provinsi secara kartometrik



Indeks peta koridor batas provinsi.



Peta koridor batas provinsi hasil delineasi secara kartometrik.

2. Delineasi Batas Kabupaten/ Kota Secara Kartometrik

Delineasi batas secara kartometrik ini bertujuan untuk menyediakan segmen batas daerah yang di delineasi secara kartometrik sebanyak 19 segmen di Provinsi Kalimantan Barat dan 4 segmen di Provinsi Kalimantan Utara, guna mendukung proses percepatan penegasan batas daerah di Pulau Kalimantan.

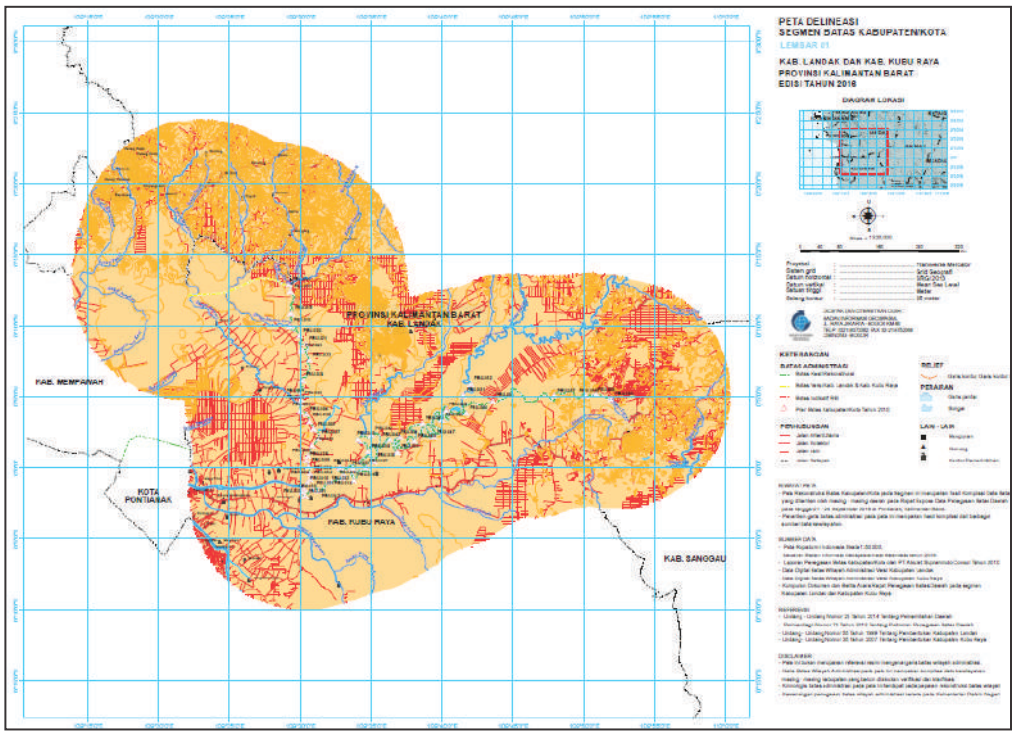
2. District / City Boundary Delineation on a Cartometric basis

The boundary delineation on a cartometrical basis aimed to provide 19 regional boundary segments cartometrically delineated in West Kalimantan Province and about 4 regional boundary segments in North Kalimantan province, in order to accelerate boundary determination in the Borneo island.

Tabel 2. Daftar segmen batas kabupaten/ kota.

No	Segmen Batas Kabupaten		Provinsi
1	Malinau	Bulungan	Kalimantan Utara
2	Malinau	Nunukan	Kalimantan Utara

3	Malinau	Tana Tidung	Kalimantan Utara
4	Nunukan	Tana Tidung	Kalimantan Utara
5	Ketapang	Melawi	Kalimantan Barat
6	Ketapang	Sekadau	Kalimantan Barat
7	Ketapang	Sanggau	Kalimantan Barat
8	Ketapang	Kayong Utara	Kalimantan Barat
9	Ketapang	Sintang	Kalimantan Barat
10	Sintang	Sekadau	Kalimantan Barat
11	Sintang	Melawi	Kalimantan Barat
12	Sintang	Sanggau	Kalimantan Barat
13	Sekadau	Sanggau	Kalimantan Barat
14	Landak	Sanggau	Kalimantan Barat
15	Landak	Mempawah	Kalimantan Barat
16	Landak	Bengkayang	Kalimantan Barat
17	Landak	Kuburaya	Kalimantan Barat
18	Mempawah	Kuburaya	Kalimantan Barat
19	Sanggau	Kuburaya	Kalimantan Barat
20	Bengkayang	Sambas	Kalimantan Barat
21	Bengkayang	Singkawang	Kalimantan Barat
22	Bengkayang	Sanggau	Kalimantan Barat
23	Kuburaya	Kota Pontianak	Kalimantan Barat



3. Delineasi Batas Desa/ Kelurahan Secara Kartometrik

Sebagian besar batas desa/kelurahan di Indonesia masih bersifat Indikatif. Batas desa/kelurahan yang belum ditegaskan berpotensi menyebabkan berbagai masalah administrasi kependudukan dan kewilayahan. Salah satu upaya percepatan penegasan batas

3. Delineation for Village Boundaries on Cartometric Basis

Most of the village / sub village boundaries in Indonesia were still Indicative. The boundaries of villages / sub villages that have not been confirmed yet have the potential to cause various problems of population administration and territoriality. One effort to accelerate

desa/kelurahan adalah menggunakan metode kartometrik. Metode kartometrik mengedepankan delineasi batas desa secara langsung di atas peta kerja menggunakan Citra Satelit Resolusi Tinggi. Metode kartometrik meminimalisir delineasi batas desa di lapangan yang memakan banyak waktu dan biaya. Delineasi batas desa menggunakan CSRT adalah suatu langkah terobosan untuk mendukung percepatan penegasan batas desa/kelurahan. Dalam permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa dijelaskan bahwa batas desa ditegaskan dengan Peraturan Bupati/Walikota. Tujuan dari kegiatan delineasi batas desa adalah untuk menyediakan data batas desa/kelurahan hasil kesepakatan yang siap untuk dijadikan dasar dalam pembuatan Peraturan Bupati/walikota tentang batas desa. Dengan adanya peraturan Bupati/Walikota tentang penegasan batas desa di kabupaten/kota tertentu maka status batas desa yang tadinya indikatif berubah menjadi definitive. Status batas desa yang definitif merupakan modal awal dalam kaitanya dengan pembangunan nasional dari tingkatan yang paling kecil, yaitu desa. Pada tahun 2016 Pusat pemetaan batas wilayah melakukan kegiatan delineasi batas desa pada beberapa lokasi di Indonesia. Pemilihan lokasi dilakukan berdasarkan prioritas nasional, ketersediaan data dan permintaan dari daerah.

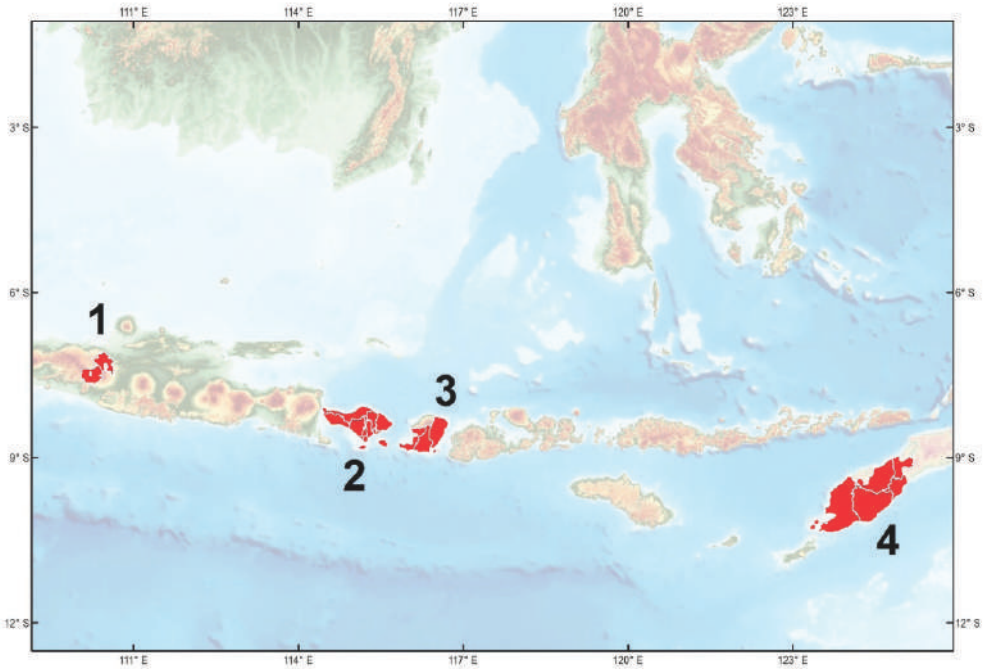
the affirmation of village boundaries is to use the cartometric method. The cartometric method emphasizes the delineation of village boundaries directly over a work map using High Resolution Satellite Imagery. The cartometric method minimizes the delineation of village boundaries in the field which takes a lot of time and cost. Village boundary delineation using CSRT is a breakthrough to support acceleration of village boundary affirmations. The Permendagri No. 45 of 2016 on the Determination and Affirmation of Village Boundaries explains that village boundaries are affirmed by Regents / Mayor Regulations. The objective of the village boundary delineation is to provide village boundary data resulted from an agreement that is ready to be used as the basis for issuing the Regent / Mayor Regulations on village boundaries. Through the regent / mayor regulations concerning the affirmation of village boundaries within certain districts / cities, the previous status of indicative village boundaries is changed to be definitive. The definitive village boundary status is the initial capital in relation to national development from the smallest level, the village. In 2016, the center for boundary mapping delineated village boundaries at several locations in Indonesia. Site selection was based on national priorities, data availability and local government's request.



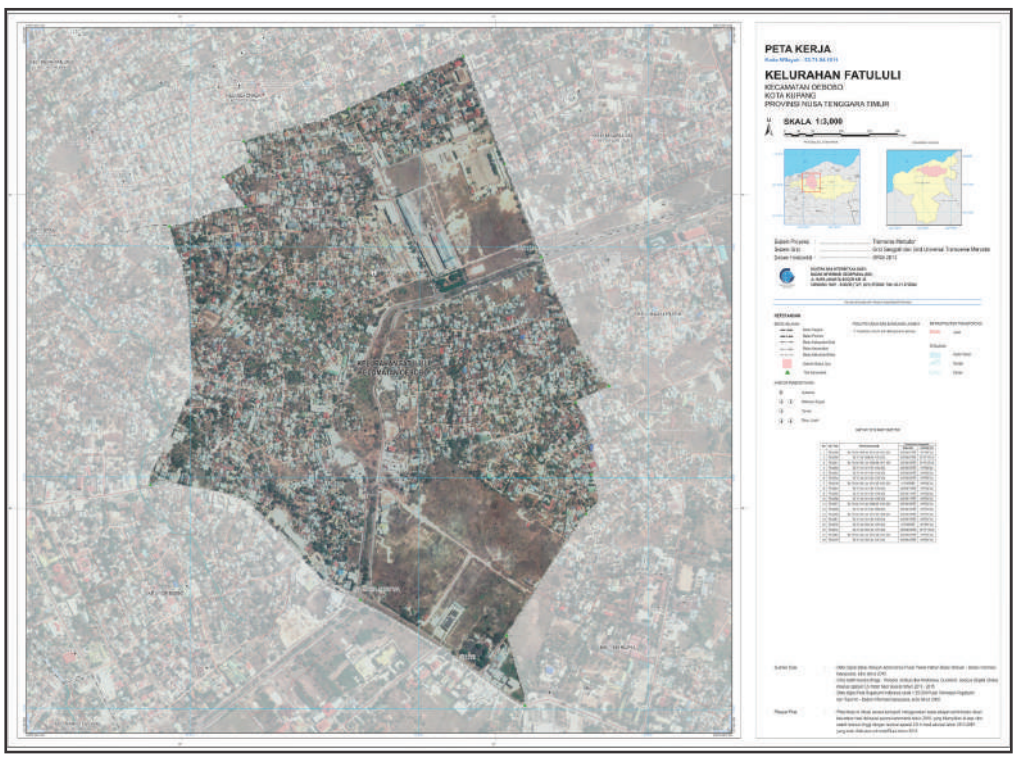
Tabel 3. Daftar kabupaten/ kota yang dilakukan delinesai batas desa/ kelurahan.

No	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan
1	Kab. Magelang	21	372
	Kab. Semarang	19	176
2	Kab. Jembrana	5	51
	Kab. Tabanan	10	133
	Kab. Gianyar	7	70
	Kab. Badung	6	62
	Kota Denpasar	4	43
	Kab. Klungkung	4	59
	Kab.Bangli	4	72
	Kab. Karangasem	8	78
	Kab. Buleleng	9	148
3	Kab. Lombok Barat	10	122
	Kab. Lombok Tengah	12	139
	Kab. Lombok Timur	20	254

4	Kota Kupang	6	51
	Kab. Kupang	24	177
	Kab. Timor Tengah Utara	28	193
	Kab. Belu	12	81
	Kab. Malaka	12	127
	Kab. Timor Tengah Selatan	32	278
	JUMLAH	**253**	**2686**



Peta delineasi batas kabupaten/ kota.



Alur kegiatan delineasi batas desa/ kelurahan secara kartometrik.



Pembagian wilayah pemutakhiran data.

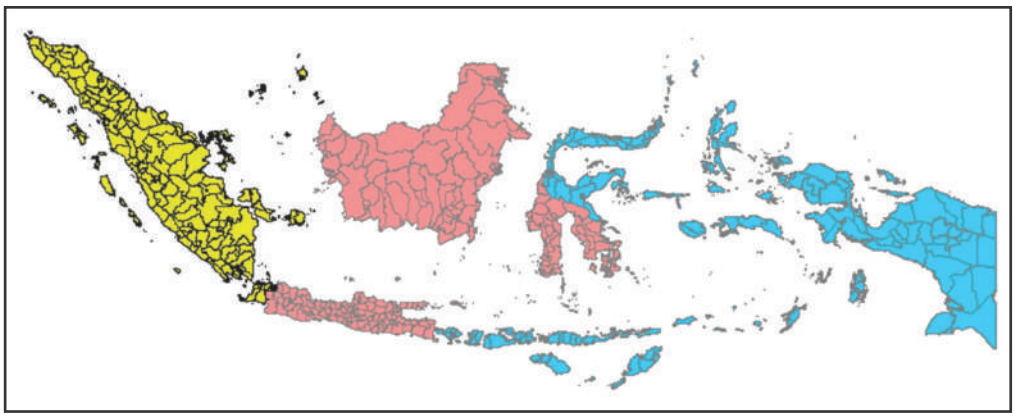
Indeks lokasi delinesai batas desa/ kelurahan.

C. Penyelenggaraan Pemutakhiran Data Batas Wilayah

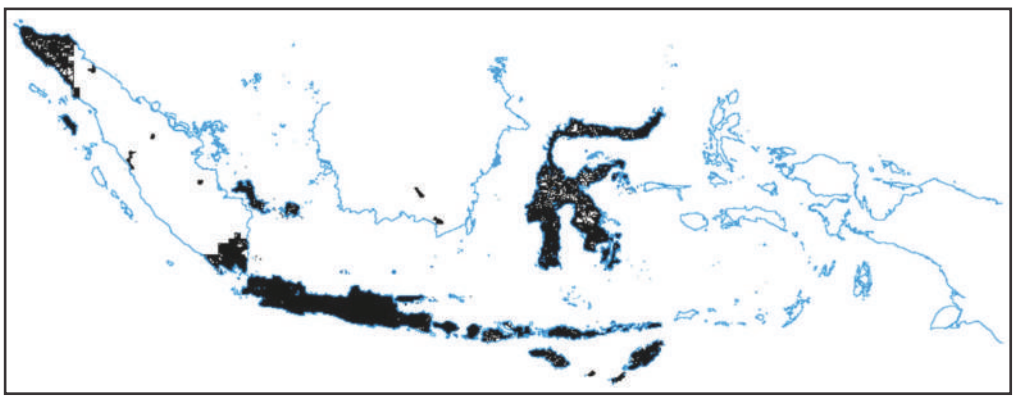
Kegiatan pemutakhiran data batas wilayah adalah untuk melakukan pemutakhiran data-data spasial batas wilayah yang meliputi data batas wilayah administrasi dan data batas negara. Dengan adanya kegiatan pemutakhiran ini diharapkan adanya basis data spasial batas wilayah yang ter-*update* dan siap dibagi pakai dengan berbagai kementrian/lembaga yang membutuhkan. Kegiatan ini diperlukan untuk menunjang kesiapan data-data batas wilayah baik berupa data batas wilayah administrasi dan data batas negara utuk dibagi pakai dalam sistem ina-geoportal sehingga dapat dengan mudah digunakan oleh berbagai kementrian/lembaga yang membutuhkan. Pembagian area kerja batas wilayah dibagi menjadi tiga area, yaitu wilayah 1, wilayah 2 dan wilayah 3. Pembagian wilayah ini disesuaikan dengan pembagian area kerja yang ada berlaku di Kementerian Dalam Negeri, agar memudahkan dalam sinkronisasi data.

C. Implementation of Boundary Data Update

The activity of updating regional boundary data is to update the boundary spatial data including data of administrative boundaries and state boundaries. By updating the data, it is expected to have a spatial database of the boundaries that are continually updated and ready to share to various ministries / institutions in need of. The activity is needed to support the preparedness of available boundary data in the form of both administrative boundary data and state boundary data, to be connected to or to be shared in the ina-geoportal system so that can be easily used by various ministries / institutions in need of. The boundary work areas are divided into three areas, namely area 1, region 2 and region 3. The division of these regions is adjusted to the existing work area divisions applied in the Ministry for Home Affairs, in order to facilitate the data synchronization.



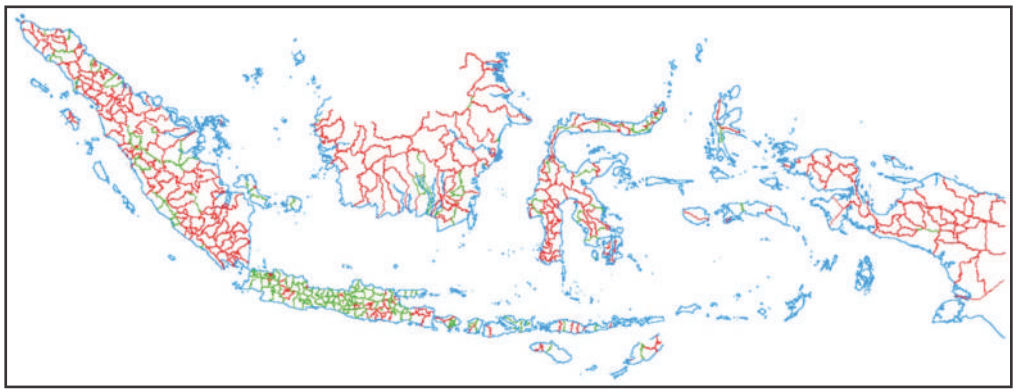
Pembagian wilayah pemutakhiran data.



Pemutakhiran batas administrasi provinsi, kabupaten/ kota, kecamatan dan desa/ kelurahanv

Wilayah administrasi Indonesia sampai dengan tahun 2016 terbagi menjadi 34 provinsi, 416 kabupaten dan 98 kota. Wilayah administrasi tersebut terdiri atas segmen batas batas Provinsi sebanyak 966 segmen. Segmen batas administrasi baik provinsi maupun Provinsi sudah dilakukan penegasan sebanyak 263 segmen dari keseluruhan segmen, dengan demikian baru 27% segmen batas yang sudah ditegaskan, atau dengan kata lain segmen batas definitif.

The administrative regions of Indonesia until 2016 had been divided into 34 provinces, 416 districts and 98 cities. The administrative regions consisted of 966 provincial boundary segments. The administrative boundary segments of both provinces and districts had been affirmed as many as 263 segments of the overall segments, in other words only 27% of the boundary segments had been confirmed, or called definitive boundary segments.



Segmen batas indikatif dan definitif.

D. Penyelenggaraan Kajian Kebijakan Teknis Batas Wilayah

D. Implementation of Policy Review on Boundary Technical Approaches

Indonesia memiliki wilayah administrasi dari tingkat tertinggi provinsi sampai dengan tingkat terkecil yaitu desa dan kelurahan. Jumlah desa dan kelurahan di Indonesia mencapai lebih dari 83 ribu yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Salah satu isu strategis yang saat ini mengemuka adalah batas desa. Dengan hadirnya UU No.6/2014 tentang desa, dimana diatur didalamnya tentang pendanaan untuk desa, informasi batas desa menjadi penting. Hingga saat ini status batas desa di Indonesia sebagian besar belum dilaksanakan penetapan dan penegasan batas desa. Sebagai turunan dari Undang-undang Desa, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.45/2016 tentang pedoman penetapan dan penegasan batas desa menggantikan permendagri No.27/2006 yang mengatur hal yang sama. Dalam permendagri baru terdapat perubahan-perubahan dalam tahapan penetapan dan penegasan batas desa. Permendagri No.45/2016 juga dilengkapi dengan lampiran yang menjelaskan lebih detil batang tubuh. Pusat Pemetaan Batas Wilayah dalam beberapa tahun terakhir melaksanakan delienasi batas desa secara kartometrik di beberapa wilayah dengan jumlah semakin tahun semakin banyak. Berdasarkan pengalaman pelaksanaan pekerjaan dihadapi tantangan dan hambatan baik yang bersifat teknis dan non teknis. Proses delineasi batas desa secara kartometrik sangat bergantung pada kualitas data citra satelit yang digunakan. Disamping itu pula dibutuhkan informasi garis batas desa indikatif guna ditampilkan pada draft peta kerja. Hambatan dan tantangan pelaksanaan delineasi batas desa secara kartometrik membutuhkan solusi sehingga dalam pelaksanaannya mendatang dapat berjalan dengan lebih baik.

Indonesia has administrative areas from the highest level of a province to the smallest level of a village and a sub village. The number of villages and sub villages in Indonesia reaches more than 83 thousand spreading over 34 provinces. One of the current strategic issues is the village boundaries. Through the presence of Law No. 6/2014 on villages, which governs funding for villages, information of village boundaries becomes important. To date the most status of village boundaries in Indonesia have not been determined and affirmed. As a follow up of the Law, the Ministry of Home Affairs issued a Regulation of the Minister (Permendagri) No.45 / 2016 on guidelines for determining and affirming village boundaries in place of permendagri No.27 / 2006 regulating the same theme. In the new permendagri, there are changes in the stages of determining and affirming village boundaries. Permendagri No.45 / 2016 was also completed with an attachment that explained the law substance in more details. The Center for Boundary Mapping in recent years has carried out the delineation of village boundaries on a cartographic basis in several regions with increasing number every year. Based on the experience on the work implementation, there were challenges and obstacles either technical or non technical issues. The process of delineating village boundaries on a cartometric basis highly relied on the quality of satellite imagery data used. In addition, it was also necessary to have information of the indicative village boundary line in order to be shown on the draft work map. The obstacles and challenges of village boundary delineation on a cartometric basis needed to be solved so that could be implemented better in the future.

Tabel 4. Daftar dokumen yang dilakukan kajian.

No	Nama Dokumen	Penjelasan
1	Undang-Undang No.6 tahun 2014 Tentang Desa	Penghitungan ADD salah satunya adalah luas desa yang berhubungan erat dengan aspek batas desa

2	Permendagri No.45 tahun 2016 tentang pedoman penetapan dan penegasan batas desa	Pelaksanaan dengan metode kartometrik sudah diatur namun belum lengkap dan detil
3	Peraturan Kepala BIG No.3 tahun 2016 tentang pedoman teknis penyajian peta desa	Peta Desa berkaitan erat dengan status batas desa
4	RSNI Pelacakan Batas Desa Secara Kartometrik	RSNI dimaksud sudah disusun tahun 2015 oleh PPBW

Saat ini, batas wilayah menjadi isu yang sangat ramai diperbincangkan di Indonesia khususnya dalam konteks pemerintahan. Banyaknya sengketa batas wilayah menjadi salah satu contoh nyata bahwa permasalahan perbatasan (antar negara dan antar wilayah administrasi) masih belum selesai. Banyak penyebab terjadinya sengketa perbatasan salah satu nya adalah belum tegasnya batas – batas wilayahnya. Pada era otonomi daerah, makin banyak permasalahan batas wilayah yang terjadi. Beberapa diantaranya terjadi pasca pemekaran wilayah baru. Penyebab timbulnya permasalahan juga beragam. Ada yang berkaitan dengan sumber daya, luas wilayah, dan lain sebagainya. Dalam konteks pemetaan, kurang memadainya peta lampiran UU Pembentukan Daerah menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi permasalahan batas wilayah. Jumlah daerah sejak era otonom hingga saat ini meningkat drastis yaitu dari yang awalnya 26 provinsi dan 293 kab/kota pada tahun 1999, kini menjadi 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota. Tidak bisa dipungkiri, pemekaran bisa menjadi salah satu kebutuhan untuk mencapai efisiensi pelayanan terhadap masyarakat. Namun jika tidak diimbangi dengan kesiapan dari seluruh stakeholders maka tujuan utama pemekaran tidak akan tercapai. Salah satunya adalah kesiapan dalam bidang informasi geospasial khususnya dalam pembuatan peta wilayah untuk Pembentukan Daerah Persiapan. Untuk mempersiapkan perbaikan dalam tata kelola pembuatan peta DOB, pada tahun 2014 sudah pernah disusun Raperka (Rancangan Perka) BIG tentang Penyusunan Peta DOB. Namun proses itu sempat berhenti karena adanya revisi terhadap dasar hukumnya yaitu dari UU No. 32 tahun 2004 menjadi UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ada perubahan secara konseptual tentang proses pemekaran dengan adanya perubahan tesebut. Diundangkannya UU No 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, harus diikuti dengan peraturan turunan yang hingga saat ini (tahun 2016) masih berupa Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penataan Daerah dan Desartada (Desain Besar Penataan Daerah). Oleh karena untuk menyusun suatu dasar hukum yang operasional dan sesuai dengan aturan terbaru yang berlaku maka diperlukan suatu tindak lanjut dan penyesuaian terhadap Raperka tentang Pembuatan Peta DOB yang ada. Perlu penyesuaian karena secara konseptual, antara proses pembuatan peta DOB saat ini berbeda dengan proses yang sebelumnya. Hal mendasar tersebut yaitu penegasan batas pada era peraturan sebelumnya (PP No. 78 tahun 2007) dilakukan setelah DOB terbentuk dengan jangka waktu maksimal 5 tahun. Sayangnya, banyak DOB yang berusia lebih dari 5 tahun belum juga tegas batas daerahnya. Oleh karena alasan tersebut dalam RPP tentang Penataan Daerah saat ini diatur bahwa penegasan batas diharuskan selesai sebelum DOB terbentuk. Aturan operasional tersebut disajikan dalam bentuk Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK). Sesuai dengan ketentuan di RPP tentang Penataan Daerah, diperlukan NSPK untuk dijadikan sebagai landasan dalam pembuatan peta wilayah untuk Pembentukan Daerah Persiapan.

Currently, territorial boundaries are becoming an important debating issue in Indonesia especially in the context of government. The large number of boundary disputes has become one of the most obvious examples showing that the issues (inter-state and inter-administrative regions) are still unfinished. One of many causes of the boundary disputes is unconfirmed boundaries yet. In the regional autonomy era , boundary disputes often occurred. Some occurred after the expansion of a new territory. The causes were also varied. Some were related to resources, total area, and so forth. In the context of mapping, the inadequate map at the appendix of the Law on new territory establishment was one of the factors leading to the boundary disputes. Since the autonomy era, the number of regions increased dramatically, from 26 provinces and 293 districts / municipalities by 1999 to 34 provinces and 514 districts recently. It was undeniable that new territory establishment could support the public service efficiency. However, the ultimate goal of the new territory establishment would not effectively achieved without readiness of all relevant stakeholders. One of the readiness was in the field of geospatial information, especially in activities of boundary mapping for establishing transition Area. In order to prepare for improvements in the DOB mapping governance, draft Head of BIG regulation on DOB mapping proceeded in 2014. Nevertheless, the process was temporarily ceased since there was revision on the basic legal in which Law No 32 of 2004 was replaced by Law No 23 of 2014 pertaining to local Government. The new law brought a conceptual change in the process of new territory establishment . The enactment of Law No. 23 of 2014 on local government should be followed by technical regulations which until now (in 2016) was still a draft Government Regulation (RPP) on Regional Arrangement and Desartada (Main Design of Regional Arrangement). To establish an operational legal basis that was in accordance with the latest working rules, it was necessary to follow up and adjust to the existing Raperka on DOB Mapping. The adjustment was necessary because the process of new DOB mapping was conceptually different from the previous procedure. The fundamental difference was the affirmation of the boundary on the previous regulatory era (Government Regulation No. 78 of 2007) was carried out after DOB was established with a maximum period of 5 years. Unfortunately, many DOBs over the age of 5 had not have the firmed boundary. For that reason, in the current RPP on Regional Arrangement it is stipulated that boundary affirmation is required to be completed before the DOB was established. The operational rules are presented in the form of Norms, Standards, Procedures and Criteria (NSPK). In accordance with the rules in the RPP on Regional Arrangement, NSPK is required to serve as the foundation to boundary mapping process for the establishment of transition regions.







FOTO KEGIATAN 2016







Informasi Geospasial Dasar
Informasi Geospasial Tematik
Infrastruktur Informasi Geospasial
Sekretaris Utama
Acara BIG



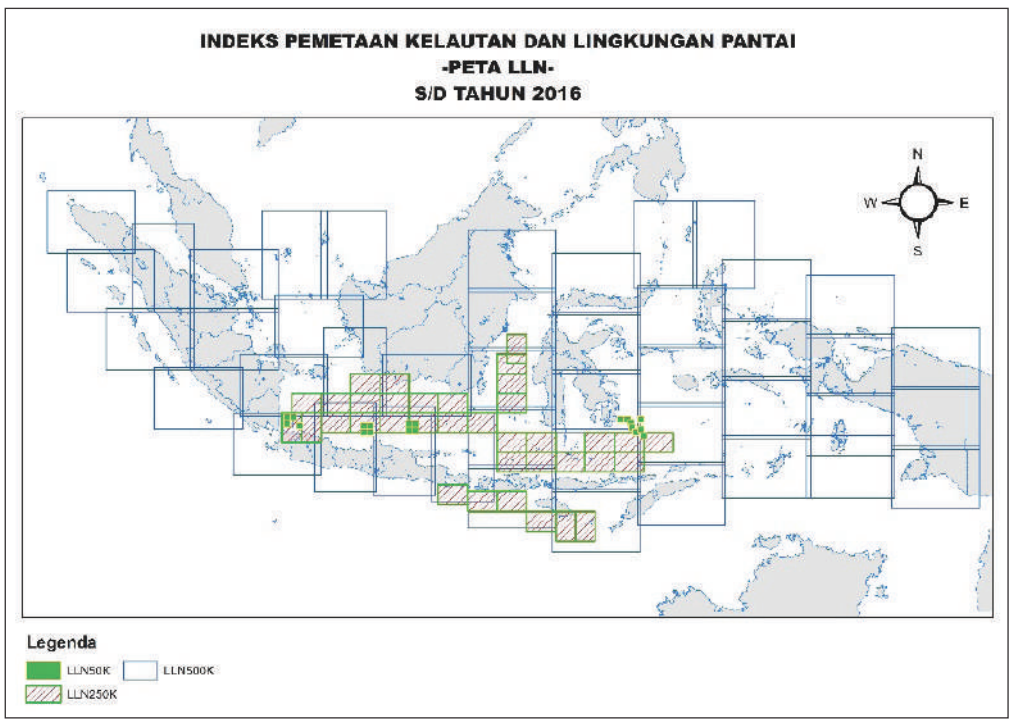
PEMETAAN KELAUTAN DAN LINGKUNGAN PANTAI

PETA LINGKUNGAN LAUT NASIONAL (LLN)

Salah satu amanat UU RI No.4 Tahun 2011, tentang Informasi Geospasial adalah tersedianya peta Lingkungan Laut Nasional (LLN), berupa peta dasar yang memberikan informasi secara khusus untuk wilayah laut. Peta dasar ini diharapkan menjadi informasi geospasial dasar bagi para pengguna yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pengelolaan sumber daya alam laut, penetapan batas wilayah, perencanaan wilayah, dan keperluan tematik lainnya.

NATIONAL MARINE ENVIRONMENT MAP (LLN)

One of the mandates of RI Law No.4 of 2011 concerning to Geospatial Information is the availability of National Marine Environment map (LLN), which is basic map providing information specifically for marine areas. This basic map is expected to be the basic geospatial information for users, and can be used for marine natural resource management, boundary-setting, area planning, and other thematic purposes.



No	Jenis Peta	Jumlah Total	Total	Belum Dipetakan	Persentasi telah dipetakan
		(NLP)	SD 2016 (NLP)	SD 2016 (NLP)	s/d 2016 (%)
1	LLN Skala 50.000	248	12	236	4.84
2	LLN Skala 250.000	145	36	109	24.83
3	LLN Skala 500.000	44	44	0	100.00

Berdasarkan UU IG pasal 18 ayat 2 dan 3, bahwa peta LLN diselenggarakan dalam dalam 3 (tiga) skala, yaitu LLN skala 1:500.000, 1:250.000, dan 1:50.000. Hingga tahun 2010 peta LLN baru tersedia dalam skala 1:500.000 untuk seluruh wilayah Indonesia, dan telah dilakukan pemutakhirannya. Peta LLN skala 1:250.000 baru dimulai penyediaannya pada tahun 2015 sebanyak 10 NLP, dan peta LLN skala 1:50.000 telah dimulai sejak tahun 2013. Peta LLN yang telah tersedia sampai tahun 2016 disajikan pada indeks berikut.

According to the IG Law article 18, paragraph 2 and 3, that LLN maps are created using 3 (three) scales, namely LLN scale of 1: 500,000, 1: 250,000, and 1: 50,000. Until 2010, the LLN map had been available only on a scale of 1: 500,000 for the entire territory of Indonesia, and then it has been updated. It was started to provide a new 1: 250,000 scale LLN map by 2015, as many as 10 NLPs, while a 1: 50,000 scale LLN map has been provided since 2013. The LLN maps available until 2016 are presented in the following index.

PETA LINGKUNGAN PANTAI INDONESIA (LPI)

Penyelenggaraan pemetaan lingkungan pantai merupakan penyediaan peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI). Menurut UU IG, Peta Lingkungan Pantai Indonesia adalah peta dasar yang memberikan informasi secara khusus untuk wilayah pesisir. Diselenggarakan dalam 4 (empat) skala, yaitu LPI skala 1:250.000, 1:50.000, 1:25.000, dan 1:10.000.

INDONESIAN COASTAL ENVIRONMENT MAP (LPI)

The implementation of coastal environmental mapping is the provision of the Indonesian coastal environment map (LPI). According to the IG Law, the Indonesian Coastal Environment Map is a basic map that specifically provides information pertaining to coastal areas. It is organized in 4 (four) scales, namely LPI scale of 1: 250.000, 1: 50.000, 1: 25.000, and 1: 10.000.



Tabel 2. Ketersediaan Peta LPI

No	Jenis Peta	Jumlah Total	Total	Belum Dipetakan	Persentasi telah dipetakan
		(NLP)	SD 2016 (NLP)	SD 2016 (NLP)	s/d 2016 (%)
1	LPI Skala 10.000	300	22	278	7.33
2	LPI Skala 25.000	2536	60	2476	2.37
3	LPI Skala 50.000	1050	521	529	49.62
4	LPI Skala 250.000	212	167	45	78.77

Peta Lingkungan Pantai Indonesia merupakan sumber informasi darat dan laut, khususnya wilayah pantai secara simultan dalam satu lembar peta dengan skala dan sistem proyeksi yang sama. Sehingga pada akhirnya diharapkan bisa lebih optimal dalam perencanaan pembangunan nasional di wilayah pantai/ pesisir pada khususnya.

Indonesian coastal Environment Map becomes a source of terrestrial and marine information, in particular simultaneous information of coastal areas in one sheet map with the same scale and projection system. Therefore, the national development planning is expected to be better in particular for coastal / seashore areas.

SURVEI HIDROGRAFI DAN SURVEI GARIS PANTAI DALAM PENYEDIAAN PETA DASAR KELAUTAN DAN LINGKUNGAN PANTAI

Survei hidrografi dan survei garis pantai merupakan proses akuisisi data dasar dalam pembuatan peta dasar kelautan dan lingkungan pantai (LLN dan LPI). Kegiatan survei hidrografi meliputi pengukuran benchmark (BM), pengukuran pasang surut temporer, pemeruman baik menggunakan *singlebeam* ataupun *multibeam echosounder*, pengukuran sifat fisik air laut, pengukuran arus, pengambilan contoh dasar laut dan pemetaan garis pantai.

Pemetaan garis pantai yang selama ini dilakukan secara terestris dengan menyusuri garis pantai dan deliniasi garis pantai dari citra satelit untuk pantai yang tidak bisa dijangkau dengan cara terestris. Seiring dengan perkembangan teknologi, mulai tahun 2015 telah dikembangkan pemetaan garis pantai menggunakan metode pemotretan udara dengan wahana *Unmanned Aerial Vehicle (UAV)*.

Kegiatan survei hidrografi, survei garis pantai serta pemetaan LLN dan LPI telah mengacu pada standar nasional maupun internasional, diantaranya adalah *Special Publication No.44* yang diterbitkan oleh IHO, SNI Survei hidrografi menggunakan *singlebeam echosounder*, SNI Survei batimetri menggunakan *multibeam echosounder*, SNI Spesifikasi penyajian peta LPI dan SNI Spesifikasi penyajian peta RBI.

HYDROGRAPHIC AND COASTLINE SURVEYS IN PROVIDING A BASIC MAP OF MARINE AND COASTAL ENVIRONMENT

Hydrographic and coastline surveys are basic data acquisition processes in the arrangement of marine and coastal basic maps (LLN and LPI). Hydrographic survey activities include benchmark measurements (BM), temporary tidal measurements, sounding using singlebeam or multibeam echosounder, measurement of seawater physical characteristics, seawater flow measurements, seabed sampling and coastline mapping.

Coastal mapping that has been conducted so far is on a terrestrial basis by going through the coastline, while for the coast that cannot be reached on a terrestrial basis refers to coastline delineation based on satellite imagery. Along with technological developments, coastal mapping has been developed since 2015 using the method of aerial photography with the Unmanned Aerial Vehicle tool (UAV).

Activities of Hydrographic survey, coastline surveys and LLN and LPI mapping have been referring to both national and international standards, such as Special Publication No.44 issued by IHO, SNI for Hydrographic survey using singlebeam echosounder, SNI for Batimetric survey using multibeam echosounder, SNI for LPI map presentation specification and SNI for RBI map presentation specification.

SURVEI INVENTARISASI PULAU

Amanat RPJMN 2015 – 2019 mentargetkan jumlah pulau Indonesia sejumlah 17.466 pulau. Hingga saat ini, jumlah pulau Indonesia yang tercatat dalam gasetir nasional dan telah dilaporkan ke PBB adalah sejumlah 13.466 pulau. Artinya masih ada 4.000 pulau yang belum diketahui keberadaannya.

Dari citra satelit, teridentifikasi adanya 2.889 objek yang diduga sebagai pulau di luar yang telah tercatat dalam gasetir. Sesuai pasal 121 UNCLOS 1982, kriteria pulau adalah daratan yang terbentuk secara alami, tidak tenggelam saat pasang tertinggi dan pada saat surut tidak bergabung dengan daratan lain. Untuk memastikan objek yang teridentifikasi dari citra tersebut merupakan pulau atau bukan, maka perlu dilakukan survei (validasi) di lapangan. Pada tahun 2016, BIG melakukan validasi terhadap 268 titik survei di 3 lokasi. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.

ISLAND INVENTORY SURVEY

The mandate of the RPJMN 2015 - 2019 targets to include 17,466 islands in Indonesia. To date, the number of Indonesian islands that has been recorded in the national gasetir (Gazetteer) and has been reported to the UN is 13,466. This means there are still 4,000 islands that have not been known to exist.

Satellite imagery shows that there are 2,889 objects that are suspected to be the outer islands that have been recorded in the gasetir. According to article 121 of UNCLOS 1982, the criteria for an island are the land that is naturally formed, not sinking at the highest tide, and not joining other land during low tide. To ensure whether or not the object identified from the image is an island, it is necessary to conduct ground check survey (validation). During 2016, BIG had validated 268 survey points in 3 locations. The Detail points are presented at Table 3.

Tabel 3. Hasil kegiatan verifikasi pulau tahun 2016

Table 3. The result of Island Verification Activities During 2016

No.	Provinsi	Titik Survei	Hasil Survei		
			Pulau	**Bukan Pulau**	**Periode Survei**
1	Lombok, Nusa Tenggara Timur	107	101	6	13 – 30 April 2016
	Tambahan dari DKP Lombok Timur	-	-	-	Tidak disurvei

2	Kalimantan Timur	117	53	64	26 Oktober – 18 November 2016
3	Kalimantan Barat	44	16	28	28 Oktober – 11 November 2016
		268	170	98	

Hasil survei ditindaklanjuti kegiatan verifikasi dan pembakuan nama pulau yang dihadiri oleh BIG, Kemendagri, KKP, Kemenko Maritim, Pushidrosal, LAPAN serta Pemerintah daerah terkait. Tujuannya adalah membakukan secara nasional nama, arti nama, sejarah serta koordinat unsur pulau di Indonesia dalam bentuk gasetir nasional.

Kegiatan validasi dan verifikasi selama periode tahun 2015 - 2016 menghasilkan tambahan sebanyak 1.106 pulau yang telah diverifikasi namanya. Sehingga data pulau Indonesia saat ini menjadi 14.572 pulau bernama dan berkoordinat.

The survey results were followed up by verification and standardization of island names (toponimi) attended by BIG, Ministry of Home Affairs, Ministry of Marine and Fishery, Coordinating Ministry for Maritime, Pushidrosal, LAPAN and related local governments. The goal was to nationally determine names, meaning of names, history and coordinates of island elements in Indonesia in the form of a national gasetir.

Validation and verification activities during the period of 2015 - 2016 resulted in an additional 1,106 islands that had been verified by name. Therefore the current data shows that Indonesian named and coordinated islands are 14,572.





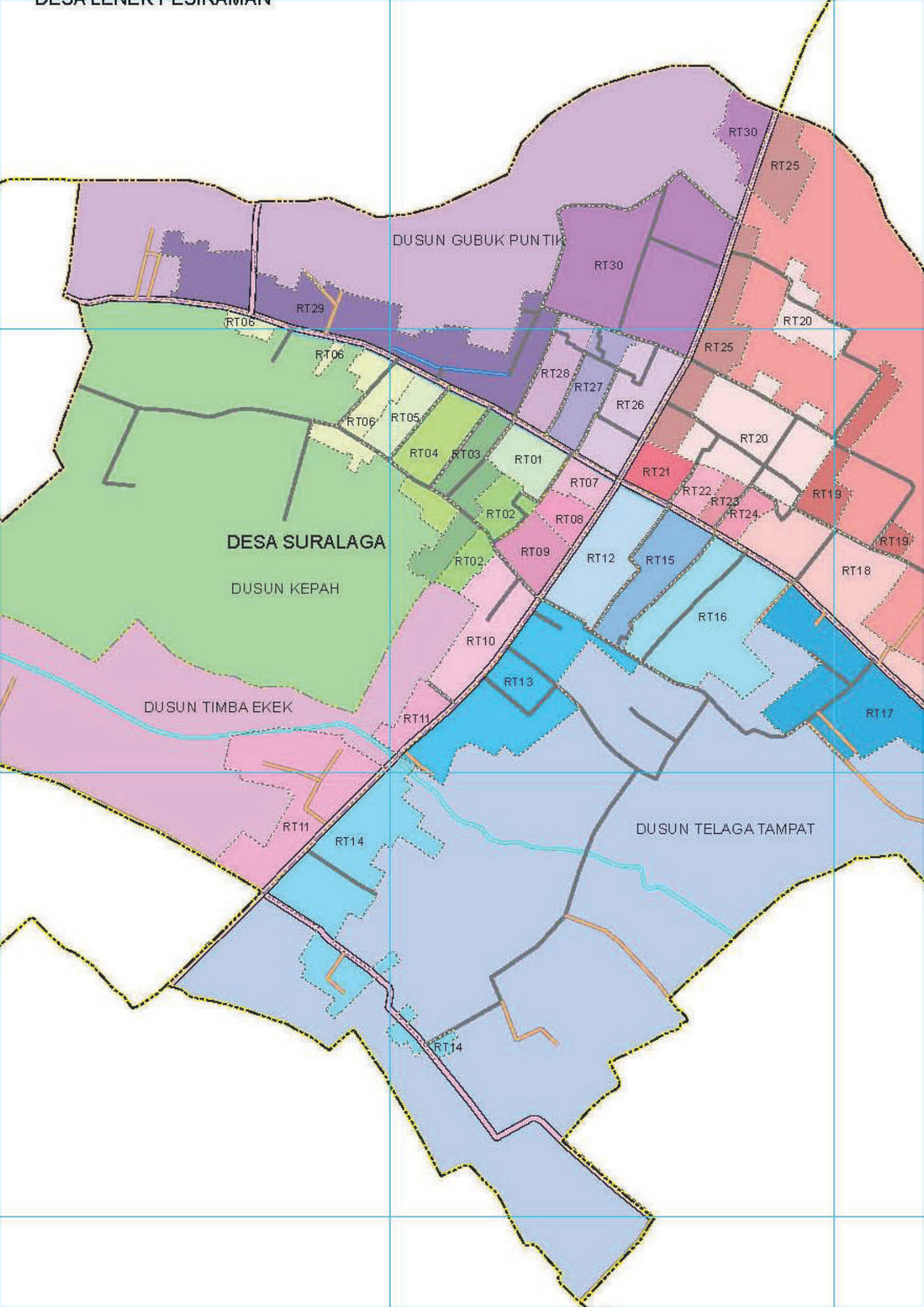




FOTO KEGIATAN 2016






DESA LENEK PESIRAMAN
DUSUN GUBUK PUNTIK
RT30
RT25
RT29
RT06
RT20
RT28
RT27
RT26
RT05
RT04
RT03
RT01
RT21
RT07
RT22
RT23
RT24
RT19
RT02
RT08
RT09
RT12
RT15
RT18
DESA SURALAGA
DUSUN KEPAH
RT10
RT16
RT13
RT17
DUSUN TIMBA EKEK
RT11
RT14
DUSUN TELAGA TAMPAT

INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK

THEMATIC GEOSPATIAL INFORMATION





PEMETAAN INTEGRASI TEMATIK

Penyelenggaraan kegiatan Pemetaan dan Integrasi Tematik pada tahun 2016 dapat dibagi dalam 4 kegiatan, yaitu:

A. Pembinaan dan Pengendalian Penyelenggaraan IGT Antar Sektor
B. Rumusan Kebijakan Teknis dan Pembinaan Penyelenggaraan IGT Darat, IGT Kelautan, dan IGT Kebencanaan dan Perubahan Iklim
C. Pemetaan Integrasi Tematik Darat, Laut, serta Kebencanaan dan Perubahan Iklim
D. Pemetaan Strategis Tematik Darat dan Laut

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN IGT ANTAR SEKTOR

Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Penyelenggaraan IGT dilaksanakan dalam rangka mengawal kebijakan Satu Peta. Inisiasi pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (KSP) didasari oleh lahirnya Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 yang bertujuan untuk mewujudkan satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal. Perpres tersebut menetapkan Rencana Aksi Pelaksanaan Percepatan Kebijakan Satu Peta (KSP) dengan melibatkan 19 Kementerian/Lembaga yang berwenang dalam penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik (IGT). Rencana Aksi KSP mencakup 85 tema IGT pada 34 provinsi yang dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu IGT Status, IGT Perencanaan Ruang, dan IGT Potensi. Kelompok IGT Status merupakan IGT yang mempunyai aspek hukum penguasaan lahan, sedangkan Kelompok IGT Perencanaan Ruang memuat aspek perencanaan pemanfaatan ruang. Kelompok IGT Potensi merupakan kelompok IGT yang memuat informasi mengenai transportasi dan utilitas, lingkungan, serta potensi kawasan.

Mapping and Thematic Integration activities in 2016 was divided into 4, namely:

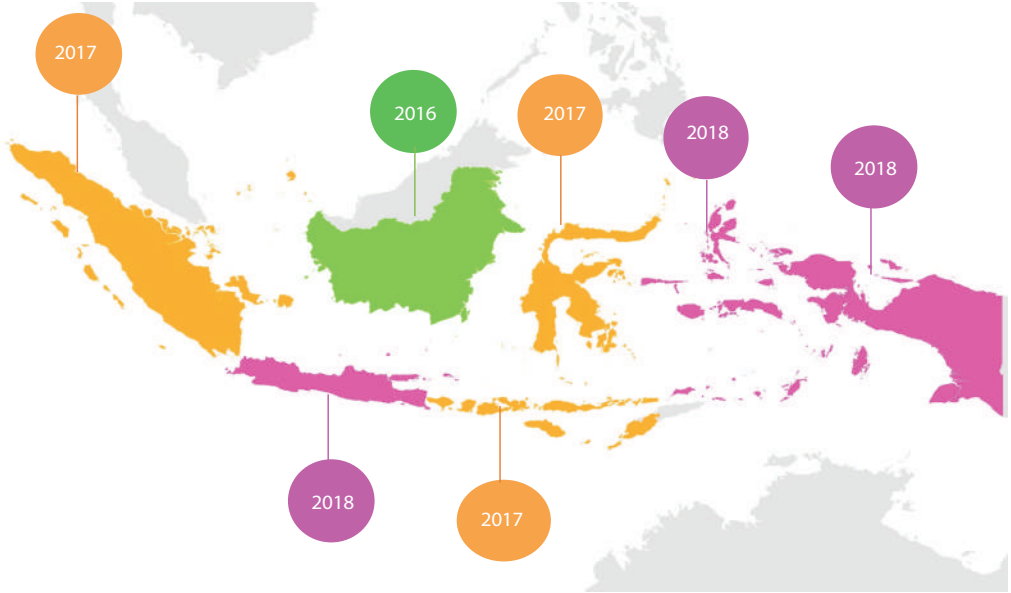
A. Mentoring and Control of inter-sector IGT operation
B. Technical Policy arrangement and mentoring of the operation of terrestrial IGT, Marine IGT, and Disaster and Climate Change IGT
C. Mapping of Thematic Integration of Land, Sea, as well as Disaster and Climate Change
D. Mapping of thematic Strategy of land and sea

MENTORING AND CONTROL OF INTER-SECTOR IGT OPERATION

Mentoring and Controlling Activities for inter-sector IGT were carried out in order to align one Map policy. One Map Policy (KSP) was basically initiated by the Presidential Regulation No 9 Year 2016 on Accelerating the Implementation of One Map Policy at Level of Map Scale Accuracy of 1: 50.000. The policy was purposed to create a map referring to one geospatial reference, one standard, one database, and one geoportal. The Presidential Regulation stipulated the Action Plan for the Acceleration of One-Map Policy (KSP) by involving 19 ministries / institutions authorized in organizing Thematic Geospatial Information (IGT). The KSP Action Plan included 85 IGT themes in 34 provinces categorized into 3 (three) groups: Status IGT, Spatial Planning IGT, and Potential IGT. The group of the status IGT was the IGT that addressed legal aspects of land tenure, while the group of Spatial Planning IGT dealt with space utilization planning. The group of Potential IGT dealt with information pertaining to transportation and utilities, environment, and the potential of regions.

Memperhatikan beberapa permasalahan terkait konflik pemanfaatan ruang yang terjadi di Kalimantan, Presiden mengamanatkan agar pelaksanaan Perpres 9/2016 didahulukan di Kalimantan, dengan pertimbangan untuk dapat dijadikan contoh (pilot project). Arahan Presiden ini disampaikan pada Sidang Kabinet Terbatas tanggal 7 April 2016. Menindaklanjuti arahan Presiden tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada Rapat Koordinasi Tingkat Menteri untuk Percepatan KSP pada tanggal 10 Juni 2016 menegaskan kembali prioritas pengerjaan Kalimantan untuk tahun 2016. Lingkup kegiatan KSP tahun 2016 hingga 2018 meliputi 3 (tiga) tahapan kerja utama yaitu Kompilasi, Integrasi, dan Sinkronisasi. Tahun 2016 jumlah IGT yang telah dikompilasi di wilayah Kalimantan sebanyak 78 tema. Dari jumlah tersebut, 63 IGT telah terintegrasi dan 15 IGT belum terintegrasi di tahun 2016.

The President mandated that the implementation of the presidential regulation (Perpres) No 9 of 2016 should take precedence in Kalimantan, taking into account several issues related to conflict on spatial use that occurred there. It could be then considered to be a pilot project. The Presidential Directive was presented at a special Cabinet Meeting on April 7, 2016. Following the President's directive, the Coordinating Minister for Economic Affairs reaffirmed a priority for the Kalimantan's work at the Ministerial Coordination Meeting for the Acceleration of KSP on June 10, 2016. The scope of KSP activities from 2016 to 2018 includes 3 (three) main stages of Compilation, Integration, and Synchronization. Meanwhile, the number of IGTs compiled in the Borneo island in 2016 was 78 themes. Of these, in 2016, as many as 63 IGTs were already integrated while 15 IGTs were not yet.



RUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMBINAAN PENYELENGGARAAN IGT DARAT, IGT KELAUTAN, DAN IGT KEBENCANAAN DAN PERUBAHAN IKLIM

Pada tahun 2016 Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik menghasilkan 9 (sembilan) rumusan kebijakan teknis pemetaan dan integrasi tematik yang terdiri dari 2 (dua) Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI), 5 (lima) Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), 1 (satu) Standar Operasional Prosedur (SOP), dan 1 (satu) Pedoman Teknis. 9 (sembilan) rumusan kebijakan teknis tersebut disusun untuk memenuhi kebutuhan dalam rujukan penyelenggaraan informasi geospasial tematik

Adapun rumusan kebijakan teknis yang dihasilkan adalah sebagai berikut :

A. RSNI Habitat Perairan Laut Dangkal
B. RSNI-3 Klasifikasi Penutup Lahan Skala Besar
C. NSPK Pemetaan Potensi Pengembangan Lahan (RDA)
D. NSPK Karakteristik Oseonografi Perairan Dangkal
E. NSPK Pemetaan Multirawan Bencana Skala 1:50.000
F. NSPK Pemetaan Potensi Pembakaran Hutan dan Lahan Skala 1:250.000
G. NSPK Verifikasi Lahan Baku Sawah

ARRANGEMENT OF TECHNICAL POLICIES AND MENTORING OF THE TERRESTRIAL, MARINE, AS WELL AS DISASTER AND CLIMATE CHANGE IGTS OPERATION

The Center for Mapping and Thematic Integration in 2016 issued 9 (nine) technical policies on mapping and thematic integration in the form of 2 (two) Draft Indonesian National Standards (RSNI), 5 (five) Norms, Standards, Procedures and Criteria (NSPK), 1 (one) Standard Operating Procedure (SOP), and 1 (one) Technical Guideline. The technical policies were arranged to meet the needs in the reference for the arrangement of thematic geospatial information.

The technical policies issued were as follows:

A. RSNI on Habitat of shallow Sea Waters
B. RSNI-3 on Classification of Large-Scale Land Cover
C. NSPK for Mapping of Land Development Potential (RDA)
D. NSPK for Oseonografi Characteristics of Shallow Waters
E. NSPK for Mapping Multi-vulnerable Disaster at the scale of 1: 50,000
F. NSPK for Mapping the Potential of Forest and Land Burning at the Scale of 1: 250,000
G. NSPK for Wetland Rice Field Verification

H. SOP Penyelenggaraan IG
I. Pedoman Teknis Kompilasi, Integrasi dan Sinkronisasi IGT

PEMETAAN INTEGRASI TEMATIK DARAT, LAUT, SERTA KEBENCANAAN DAN PERUBAHAN IKLIM

A. Peta Potensi Pengembangan Lahan (Recommended Development Area- Rda) Pangan

Maraknya pembangunan kawasan industri dan zona industri di Indonesia, telah mengakibatkan berkurangnya lahan pertanian. Hal ini disebabkan karena lahan kawasan industri dan zona industri menggunakan lahan pertanian. Pola pikir masyarakat juga mengalami perubahan dalam memperoleh penghasilan. Untuk mengatasi masalah tersebut perlunya koordinasi antara eksekutif dan legistatif dalam mempertahankan lahan pertanian. Lahan pertanian yang dimaksud adalah lahan hijau yang berada dalam peta Rancangan Umum Tata Ruang (RUTR) atau sekitar 30.000 ha lahan abadi untuk pertanian untuk menunjang program kedaulatan pangan nasional. Pemetaan Potensi Lahan Untuk Kedaulatan Pangan Tahun 2016 diselenggarakan di wilayah Papua. Pertimbangan pemilihan lokasi dikarenakan Papua belum banyak dirambah aktivitas manusia dan kaya akan sumber daya alam yang menyajikan peluang untuk berbisnis dan berkembang. Tanahnya yang luas dipenuhi oleh hutan, laut dan keaneka ragaman biotanya dan berjuta-juta tanahnya yang cocok untuk tanah pertanian. Didalam buminya, Papua juga menyimpan gas alam, minyak dan aneka bahan tambang lainnya yang siap menunggu untuk diolah.

B. IGT Perdesaan

IGT Perdesaan dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pembangunan. Dengan adanya IGT Perdesaan maka lokasi dan sasaran kegiatan pembangunan dapat ditunjukkan dengan lebih akurat. Bagi pemerintah daerah, IGT perdesaan membantu kegiatan membangun desa, sedangkan bagi pemerintah desa, IGT desa membantu kegiatan desa membangun. Dalam kegiatan desa membangun, penunjukkan lokasi kegiatan yang memanfaatkan IGT desa dicantumkan dalam RPJMDes. Pada Tahun 2016 dilaksanakan penyediaan IGT Perdesaan sebagai prototype dipilih 10 desa di wilayah Nusa Tenggara Barat. Informasi Geospasial Tematik Perdesaan meliputi data dan informasi geospasial tematik karateristik wilayah perdesaan serta data dan informasi geospasial tematik karateristik sosial. Data dan informasi geospasial tematik karateristik wilayah perdesaan terdiri dari, Peta Penutup Lahan Perdesaan Skala 1:10.000 atau skala 1:5.000, Peta Infrastruktur Perdesaan Skala 1 : 10.000 atau 1 : 5.000 dan Peta Aset Perdesaan Skala 1 : 10.000 atau 1 : 5.000. Sedangkan yang dimaksud dengan data dan informasi geospasial tematik karateristik sosial adalah Peta Kepadatan Penduduk Perdesaan Skala 1:10.000 atau 1:5.000.

C. Peta Ekosistem Pesisir

Karakteristik atau proses geomorfologi Indonesia yang berada di wilayah tropis menjadikan tipe pesisir didominasi oleh dataran aluvial dan marin. Dari kedua tipe bentuk lahan inilah interaksi antara darat dan laut membentuk suatu ekosistem khas disebut ekosistem mangrove. Sebagai ekosistem pesisir yang memegang

H. SOP on IG Operation
I. Technical Guidelines for Compilation, Integration and Synchronization of IGT

MAPPING OF THEMATIC INTEGRATION FOR LAND, SEA, AS WELL AS DISASTER AND CLIMATE CHANGE

A Map of the potential of food land development (Recommended Development Area- Rda)

An increase in industrial estate and industrial zone development in Indonesia has resulted in reduced agricultural land. The agricultural land is used for meeting the need in land for the industrial estate and industrial zone expansion. People's mindset also has been changing in livelihood. Coordination between the executive and the legislative in maintaining agricultural land is significantly required in order to deal with the issues. The aforementioned agricultural land is a green land included on the map of the General Design for Spatial Plan (RUTR) or about 30,000 ha of perennial land purposed for agriculture to support the national food sovereignty program. Mapping of the Land Potential for Food Sovereignty in 2016 was held in Papua. Papua was selected as it was not much encroached yet by human activities and was rich in natural resources, which provided good opportunity for business and other development. It still had large forests, extensive marine area, and enormous biodiversity; also it had extensive land suitable for agriculture. Furthermore, it had enourmous resources on natural gas, oil and other minerals ready to further process.

B. IGT for rural area

IGT for rural areas is used to serve activities of planning, implementing and monitoring development. The IGT for rural area provides direction for selecting locations and setting target of the development in more accurate manner. For local government, IGT for rural area supports implementation of rural development program, while for village government it supports program of "desa membangun" (village to develop). The program of "desa membangun" is supposed to determine the selected locations for the development using the IGT for Rural area in RPJMDes (Village medium-term development plan). In 2016, a prototype of IGT for rural area was developed in 10 villages in West Nusa Tenggara province. Thematic geospatial information for rural area covers thematic geospatial data and information on rural area characteristics including social characteristics. The thematic geospatial data and information on rural area characteristics includes village land cover map at the scale of 1:10.000 or 1:5.000, village infrastructure map at the scale of 1:10.000 or 1:5.000, and village asset map at the scale of 1:10.000 or 1:5.000. Meanwhile, The thematic geospatial data and information on social characteristics provides village population density map at the scale of 1:10.000 or 1:5.000

C. Coastal Ecosystem Maps

Characteristics and geomorphology process of Indonesia located in tropical area cause most coastal ecosystem in Indonesia to be alluvial land and marine. Of those ecosystems, interaction between land and sea shapes a unique ecosystem which is mangrove. As a coastal ecosystem playing significant role in environment balance,

peranan penting dalam keseimbangan lingkungan, mangrove kini memiliki porsi khusus dalam pembangunan wilayah. Isu perubahan iklim, cadangan karbon, keberlangsungan ekosistem, dan ketahanan pangan bersinggungan langsung dengan peran ekosistem mangrove. Mangrove yang memberikan banyak jasa ekosistem justru menjadi bagian yang mendapat ancaman akibat perubahan pemanfaatan lahan pesisir. Tahun 2016 Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik menyelenggarakan Pemetaan Ekosistem Pesisir (Mangrove) Skala 1:25.000 untuk wilayah Bali dan Nusa Tenggara. Hal ini dikarenakan kondisi ekosistem mangrove di wilayah Bali dan Nusa Tenggara sebagai bagian dari koridor mangrove nasional belum terpetakan pada skala menengah.

D. Peta Karakteristik Oseanografi Perairan Dangkal

Penyelenggaraan informasi goespasial tematik karakteristik oseanografi perairan dangkal ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi geospasial terkait dengan data oseanografi. Data tersebut bermanfaat untuk perencanaan baik yang diselenggarakan oleh para pemangku kepentingan dalam bidang perencanaan, pengelolaan lingkungan hidup di level nasional mapun daerah khususnya institusi pemerintah terkait seperti Kementrian Kelautan dan Perikanan, Pemerintah daerah. Informasi geospasial tematik karakteristik oseanografi perairan dangkal yang dihasilkan meliputi 10 (sepuluh) parameter yang mengacu pada kebutuhan dataset oseanografi dalam penyusunan dokumen RZWP3K.

E. Pemetaan Multirawan Bencana Skala 1:50.000

Peta multirawan berisi mengenai jenis bencana yang terjadi di suatu wilayah berdasarkan hasil kajian kerawanan bencana dan inventarisasi bencana dalam bentuk data ataupun peta. Pemetaan multirawan bencana di Indonesia sudah mulai dilakukan dengan berbagai skala pemetaan demi mendukung arahan kebijakan dan juga sebagai sarana preventif terhadap kejadian bencana tingkat nasional hingga daerah. Tahun 2016 Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik menyelenggarakan Pemetaan multirawan bencana di Aceh. Potensi bencana yang dikaji adalah potensi tanah longsor, banjir, tsunami, gempabumi, gunung api dan kekeringanInformasi geospasial tematik (IGT) Multirawan Bencana yang terintegrasi dapat mendukung kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana dan acuan dalam perencanaan tata ruang berbasis kebencanaan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan seluruh masyarakat Indonesia.

F. Pemetaan Rawan Kebakaran Hutan Dan Lahan Skala 1:250.000

Salah satu indikator adanya perubahan iklim yaitu naiknya suhu rata-rata atmosfer permukaan bumi pada akhir-akhir ini. Dampak perubahan iklim mempengaruhi kehidupan manusia maupun makhluk hidup lainnya. Salah satu yang menjadi fokus perhatian setiap tahunnya adalah kebakaran hutan dan lahan. Dilihat dari faktor penyebab kebakaran hutan dan lahan, faktor alam tampaknya hanya memegang peranan kecil, sedangkan faktor manusia menyebabkan hampir 100 dari kejadian kebakaran hutan dan lahan, baik sengaja maupun tidak. Peta Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan Skala 1:250.000 dapat digunakan sebagai peta tematik dasar penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang memberikan informasi mengenai persebaran daerah yang berpotensi terjadinya kebakaran yang disebabkan oleh kegiatan manusia di Provinsi Sumatera Selatan. Peta Rawan Kebakaran

mangrove has been significantly considered in regional development. Issues of climate change, carbon stock, ecosystem sustainability, and food security are directly related to the role of mangrove ecosystem. Mangrove that provides abundant ecosystem services has been threatened due to a change in the use of coastal area instead. The center for mapping and thematic integration, in 2016, mapped coastal ecosystem (mangrove) of Bali and Nusa Tenggara at the scale of 1:25.000. The condition in which the mangrove ecosystem of Bali and Nusa Tenggara, a part of national mangrove corridor, was not mapped at medium scale yet, triggered the mapping of the ecosystem in 2016.

D Map of shallow water oceanographic characteristics

The operation of thematic geospatial information of shallow water oceanographic characteristics shall be carried out in order to meet the needs of oceanographic data - related geospatial information. The data is beneficial for arranging appropriate planning organized by the environmental planning and management - related stakeholders at the national and sub national level such as the Ministry of Marine Affairs and Fisheries and local government. The thematic geospatial information of shallow water oceanographic characteristics generated included 10 (ten) parameters referring to the needs of the oceanographic dataset in the arrangement of a RZWP3K document.

E. Mapping of Multi-vulnerable Disaster at the scale of 1: 50,000

A Multi-vulnerable disaster map determines the types of disasters occurring in a region based on the disaster risk assessment and disaster inventory in the form of data or maps. Mapping of Multi-vulnerable disaster in Indonesia has been carried out at various scales to support objectives of the policy and to play as a disaster preventive tool at from national to local level. The Center for Mapping and Thematic Integration in 2016 carried out mapping of multi-vulnerable disaster in Aceh. Potential disasters that were identified were the potential of landslide, flood, tsunami, earthquake, volcano and drought. The integrated thematic geospatial information (IGT) of multi-vulnerable disasters can support preparedness in promptly addressing disaster and can be a reference for central Government, Local Government, NGOs, and the entire Indonesian community in arranging disaster-based spatial planning.

F. Mapping of Forest and Land fire Vulnerability at the Scale of 1: 250,000

One indicator of climate change is the rise in average temperature of the earth's surface atmosphere in recent years. Climate change affects the lives of humans and other creatures. Forest and land fire is one of the main focuses every year. While natural factors are considered to play little role, human factors account for nearly 100 of forest and land fire incidents, either by design or by chance. The map of Forest and Land fire vulnerability at the scale of 1: 250,000 is beneficial as a basic thematic map for forest and land fire prevention that provides information on distribution of the area vulnerable to fire caused by human activities in South Sumatera Province. The Map of Forest and Land fire vulnerability can be used by relevant stakeholders in environmental planning and management at the national and local level such as Ministry of Environment and Forestry, National Development Planning Agency, Kementsean, Ministry of

Hutan dan Lahan yang dihasilkan dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan dalam bidang perencanaan, pengelolaan lingkungan hidup di level nasional mapun daerah khususnya institusi pemerintah terkait seperti KLHK, Bappenas, Kementsean, Kemen PU-PR, BAPPEDA, BPBD, akademisi dan masyarakat pada umumnya.

G. Pemetaan Rawan Banjir Skala 1:50.000

Penanggulangan Bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yaitu serangkaian kegiatan penanggulangan bencana sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana meliputi : kesiapsiagaan, peringatan dini dan mitigasi bencana.

Kesiapsiagaan bertujuan untuk memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian bencana. Kesiapsiagaan dilakukan melalui penyusunan data dan informasi yang akurat, pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana dan penyiapan lokasi evakuasi. Salah satu implementasi kesiapsiagaan adalah Penyiapan Peta Rawan Banjir sebagai acuan pengurangan risiko bencana. Pemetaan Rawan Banjir Tahun 2016 diselenggarakan pada 50 Kabupaten /Kota yang tersebar di 11 Provinsi di Indonesia, meliputi :

1. Sumatera Utara : Kabupaten Batubara, Asahan, Labuan Batu Utara, Labuan Batu, Labuan Batu Selatan, dan Kota Tanjung balai
2. Bengkulu : Kabupaten Bengkulu Selatan, Bengkulu Tengah, Bengkulu Utara, Seluma dan Kota Bengkulu
3. Jawa Barat : Kabupaten Tasikmalaya, Ciamis, Garut, Kota Tasikmalaya dan Kota Banjar
4. Nusa Tenggara Barat : Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa dan Sumbawa Barat
5. Kalimantan Barat : Kabupaten Ketapang, Kayong Utara, Bengkayang, Kubu Raya, dan Kota Singkawang
6. Kalimantan Selatan : Kabupaten Banjar, Barito Kuala, Hulu Sungai Utara, Tanah Bumbu, dan Tanah Laut
7. Sulawesi Tenggara : Kabupaten Bombana, Muna, Buton Utara, Buton dan Kota Baubau
8. Gorontalo : Kabupaten Boalemo, Gorontalo, Gorontalo Utara, dan Pahuwato
9. Sulawesi Selatan : Kabupaten Buukumba, Enrekang, Luwu, Sopeng dan Kota Palopo
10. Maluku : Kabupaten Maluku Tengah, Seram Bagian Barat dan Seram Bagian Timur
11. Maluku Utara : Kabupaten Halahera Utara dan Pulau Morotai

H. IGT Perijinan Sektoral

Fokus area kegiatan Gerakan Nasional Penyelamatan Sumberdaya Alam (GNPSDA) Sektor Kehutanan Dan Perkebunan salah satunya adalah menitikberatkan pada penataan perizinan perkebunan dan kehutanan. Khusus pada fokus area ini Badan Informasi Geospasial (BIG) mempunyai peran yang cukup vital dengan mengadopsi tata laksana kebijakan satu peta untuk menyusun database spasial data perijinan (sistem informasi perijinan) sektor perkebunan.

Kegiatan ini dilaksanakan di 12 Provinsi selama tahun 2016, BIG secara aktif terlibat dalam kegiatan lapangan maupun pertemuan korsup yang diadakan di semua daerah tersebut. Sesuai dengan target penyelesaian lokus kebijakan satu peta tahun 2016, seluruh

Public work and housing, local development planning agency, BPBD, academics, and community.

G. Mapping of Flood Vulnerability at the scale of 1:50.000

Disaster Management, a concern in the national development, is a series of disaster management activities conducted before, during and after the disaster occurance. Disaster management, when it is considered to likely occur, includes activities of preparedness, early warning system and disaster mitigation.

Preparedness to disaster aims to ensure quick and precise actions to deal with catastrophic disasters. It is done through arrangement of accurate data and information, update of disaster emergency response procedures and preparation of evacuation sites. One of its implementation is arrangement of Flood vulnerability Map as a reference for disaster risk mitigation. Flood vulnerability Mapping in 2016 was carried out in 50 districts / cities spreading across 11 Provinces in Indonesia:

1. *North Sumatera : Districts of Batubara, Asahan, Labuan Batu Utara, Labuan Batu, Labuan Batu Selatan, and Tanjung balai city*
2. *Bengkulu : Districts of Bengkulu Selatan, Bengkulu Tengah, Bengkulu Utara, Seluma and Bengkulu city*
3. *West Java : Districts of Tasikmalaya, Ciamis, Garut, as well as cities of Tasikmalaya and Banjar*
4. *West Nusa Tenggara : Districts of Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa and Sumbawa Barat*
5. *West Kalimantan : Districts of Ketapang, Kayong Utara, Bengkayang, Kubu Raya, and Singkawang city*
6. *South Kalimantan : Districts of Banjar, Barito Kuala, Hulu Sungai Utara, Tanah Bumbu, and Tanah Laut*
7. *Southeast Sulawesi : Districts of Bombana, Muna, Buton Utara, Buton and Baubau City*
8. *Gorontalo : Districts of Boalemo, Gorontalo, Gorontalo Utara, and Pahuwato*
9. *South Sulawesi : Districts of Bulukumba, Enrekang, Luwu, Sopeng and Palopo city*
10. *Maluku : Districts of Maluku Tengah, Western Seram dan Eastern Seram*
11. *Maluku Utara : Districts of Halahera Utara dan Morotai Island*

H. IGT for sectoral Licensing

One of the focus areas of the National Movement of natural resource Rescue (GNPSDA) in the Forestry and Plantation sectors is the licensing management. Specific to the focus of this area, the Geospatial Information Agency (BIG) plays an important role by adopting the one-map policy to provide spatial database of licensing information system in the plantation sector.

The activity was conducted in 12 Provinces during 2016, by which BIG got actively involved in both field activities and supervision coordination (korsup) held in all these provinces. All provinces in Kalimantan but South Kallimantan were included in the activity as

provinsi di Kalimantan tercover dalam kegiatan ini kecuali Provinsi Kalimantan Selatan. Sampai dengan saat ini telah dilaksanakan kegiatan korsup di 11 Provinsi. Sampai dengan akhir tahun telah diselesaikan tahapan verifikasi di Provinsi Kalimantan Tengah.

PEMETAAN STRATEGIS TEMATIK DARAT DAN LAUT

A. Pemetaan Sistem Lahan 1:50.000

Kebutuhan peta tematik pada skala menengah sudah menjadi tuntutan dan keharusan, terutama untuk mendukung penyusunan maupun evaluasi tata ruang. oleh karena itu penyediaan Peta Sistem Lahan pada skala 1:50.000 menjadi proritas. Selain itu penyediaan Peta Sistem Lahan skala 1:50.000 sebagai peta tematik dasar/ utama dapat juga digunakan untuk perencanaan, kebencanaan, pengelolaan lingkungan hidup, evaluasi sumberdaya alam, dan lain sebagainya. Pada tahun 2016 Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik menyelenggarakan pemetaan Sistem Lahan Skala 1:50.000 untuk wilayah Kalimantan Selatan. Pemilihan Lokasi Pulau Kalimantan berdasarkan arahan Presiden untuk memprioritaskan pengerjaan peta wilayah Kalimantan nuntuk mendukung kegiatan percepatan Kebijakan Satu Peta.

B. Pemetaan Penutup Lahan Skala 1:50.000

Salah satu data dan informasi spasial yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan adalah data penutup lahan. Manfaat data dan informasi penutup lahan ini antara lain sebagai pendukung dalam penataan ruang sehingga terwujud ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Data dan informasi rencana penataan ruang ini kemudian digunakan untuk mendukung pembangunan di perdesaan dan kawasan strategis. Selain itu data penutup lahan juga dapat dimanfaatkan untuk monitoring dan pengendalian pemanfaatan ruang guna mengetahui kesesuaian antara rencana dengan pelaksanaan penataan ruang. Sesuai Agenda Nawacita dan mengacu Perpres No. 9 Tahun 2016 Pekerjaan Pembaruan Peta Penutup Lahan ini dilakukan di 3 provinsi di Pulau Kalimantan yaitu Provinsi Kalimantan Timur kecuali Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Kalimantan Barat atau setara 672 NLP.

Pemetaan Penutup Lahan Skala 1:50.000 wilayah terpilih di Pulau Kalimantan untuk mendukung kegiatan perencanaan pembangunan di Kalimantan, khususnya dalam menentukan arahan kebijakan maupun pengambilan keputusan terkait penataan ruang oleh para pemangku kepentingan dalam bidang perencanaan, pengelolaan lingkungan hidup dilevel nasional mapun daerah khususnya institusi pemerintah terkait seperti Kementrian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pertanian, Pemerintah daerah, serta akademisi/ masyarakat yang membutuhkan data dan informasi penutup lahan.

C. Pemetaan Morfometri Bentang Lahan Skala 1:50.000

Informasi kemiringan lereng sebagai salah satu data tematik strategis sangat dibutuhkan di beberapa sektor pembangunan. Hingga saat ini, ketersediaan data kemiringan lereng secara nasional baru tersedia pada skala 1:250.000 dan baru sebagian kecil wilayah telah terpetakan pada skala 1: 25.000 dan 1: 50.000. Pemetaan Morfometri Bentang Lahan yang diselenggarakan pada tahun 2016 oleh Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik meliputi

they were targeted as the locus of the one-map policy in 2016. To date, supervision coordination has been conducted in 11 provinces. Until the end of 2016, verification stage was done in Central Kalimantan Province.

TERRESTRIAL AND COASTAL THEMATIC STRATEGIC MAPPING

A. Mapping of Land system at the scale of 1:50,000

The need for thematic maps at the medium scale has become a requirement and necessity, especially to support arrangement and evaluation of spatial planning. Therefore the provision of a Land System Map at the scale of 1: 50,000 becomes a priority. In addition, the provision of the 1: 50,000 Land System map as the main thematic map can be used for planning, disaster management, environmental management, natural resource evaluation, and so forth. In 2016 the Center for Mapping and Thematic Integration organized mapping of the 1: 50,000 Land Systems for South Kalimantan. South Kalimantan was selected in accordance with the President's directive to prioritize the mapping work in Kalimantan as acceleration of One Map Policy implementation.

B. Mapping of Land Cover at the scale of 1:50,000

One of the spatial data and information required in development planning is land cover data. The benefit of the data and information is but not limited to support in spatial arrangement process so that can develop the national territory area which is safe, comfortable, productive and sustainable. These data and information on spatial arrangement planning is futher used to support the development in rural and strategic areas. In addition, the land cover data can be used for monitoring and control of spatial utilization in order to determine the compliance between the plan and the implementation of spatial planning. According to Nawacita Agenda and Presidential Regulation no. 9 of 2016, updating of the Land cover Map was conducted in 3 provinces in Borneo Island, namely East Kalimantan Province except for Berau District, Central Kalimantan Province and West Kalimantan Province, or equivalent to 672 NLP.

Land Cover Mapping at the scale of 1: 50,000 s in the Borneo island was to support development planning of Kalimantan, particularly in determining policy direction and decision making process related to spatial planning made by the relevant stakeholders in environmental planning and management at the national and local levels. These are particularly related government institutions such as Ministry of Environment and Forestry, ATR/BPN, Ministry of Public work and housing, Ministry of Agriculture, local government, and academics or community in need of land cover data and information.

C. Mapping of landscape Morphometry at the Scale of 1: 50,000

Slope information as one of the strategic thematic data is highly needed in several development sectors. To date, national slope data has been only available at a scale of 1: 250,000; and only a small portion of the national territory has been mapped at a scale of 1: 25,000 and 1: 50,000. Mapping of landscape morphometry held in 2016 by the Center for Mapping and thematic Integration covered the provinces of West Kalimantan, Central Kalimantan, and East

Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Provinsi Kalimantan Timur pada skala 1:50.000. Informasi geospasial tematik morfometri bentang lahan dapat mendukung kegiatan perencanaan pembangunan, kajian kewilayahan dan kebumian. Data IGT Morfometri bentang lahan dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan dalam bidang perencanaan, pengelolaan lingkungan hidup dilevel nasional mapun daerah khususnya institusi pemerintah terkait seperti Kementrian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pertanian, Pemerintah daerah, serta akademisi/ masyarakat yang membutuhkan informasi kemiringan lereng.

D. Pemetaan Sumber Daya Alam Pulau Kecil Skala 1:10.000

Informasi geospasial pulau kecil berisi informasi dasar yang berguna untuk perencanaan dan pengambilan keputusan strategis dalam rangka mendukung program pemerintah mewujudkan nawacita. Penyajian informasi geospasial pulau-pulau kecil tersebut ke dalam suatu peta memberikan deskripsi visual tentang kondisi bio-geo-fisik ekosistem darat dan laut. Gambaran tersebut dapat digunakan untuk mengindentifikasi potensi sumber daya yang terdapat pada pulau tersebut dan sekaligus mengidentifikasi kerentanan yang mungkin terjadi.

Pada Tahun 2016 Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik menyelenggarakan pemetaan pulau kecil Kepulauan Karimata, Provinsi Kalimantan Barat. Pemilihan lokasi tersebut dengan pertimbangan bahwa Selat Karimata sebagai jalur pelayaran memiliki banyak potensi yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Namun, kawasan tersebut juga rentan terhadap gangguan baik karena sebab alami maupun aktivitas manusia. Kecelakaan pelayaran dan tumpahan minyak potensial terjadi pada kawasan tersebut. Ketersedian data dan informasi geospasial mutlak diperlukan untuk mendukung pembangunan dan antisipasi terhadap bencana yang mengancam. Informasi geospasial sumber daya pulau kecil di Selat Karimata dipandang sangat strategis untuk mendukung perencanaan pembangunan dan pengelolaan berkelanjutan.

Kalimantan at a scale of 1: 50,000. Thematic geospatial information of landscape morphometry can support development planning arrangement, as well as regional and earth studies. Furthermore, IGT data for landscape morphometry can be used by relevant stakeholders in environmental planning and management at the national and local levels. These are particularly relevant government institutions such as Ministry of Environment and Forestry, ATR/ BPN, Ministry of Public work and housing, Ministry of Agriculture, local government, and academics or community in need of slope information.

D. Mapping of Natural Resources of Small Islands at the Scale of 1: 10,000

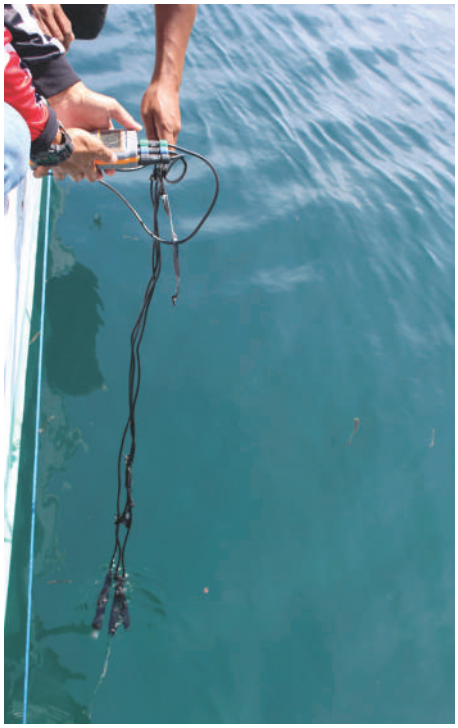
The geospatial information of small islands contains basic information beneficial for strategic planning and decision making process in order to support realization of the government program, nawacita. The presentation of geospatial information of these small islands into a map visually describes the bio-geo-physical condition of terrestrial and marine ecosystems. The description can be used to identify potential resources on the islands and to identify potential vulnerabilities.

The Center for Mapping and Thematic Integration in 2016 organized mapping of the small islands of Karimata, West Kalimantan Province. The island was selected due to consideration that the Karimata Strait as a shipping lane had many potentials that could be utilized to improve the community welfare. However, the area was also susceptible to disturbance either due to natural or anthropogenic causes. Cruise crash and oil spills were most likely to occur in the area. The availability of geospatial data and information was absolutely necessary to support the development and anticipation of threatening disasters. The geospatial information of small island resources in the Karimata Strait is considered to be very strategic to support sustainable development planning and management.



FOTO KEGIATAN 2016









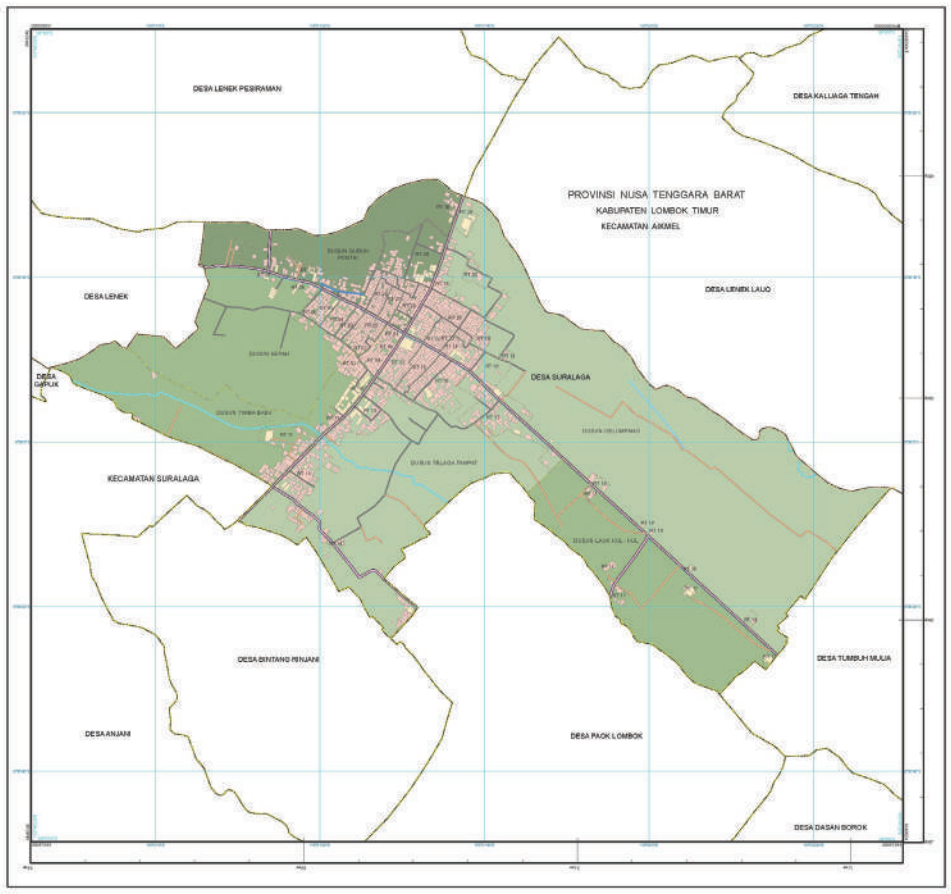






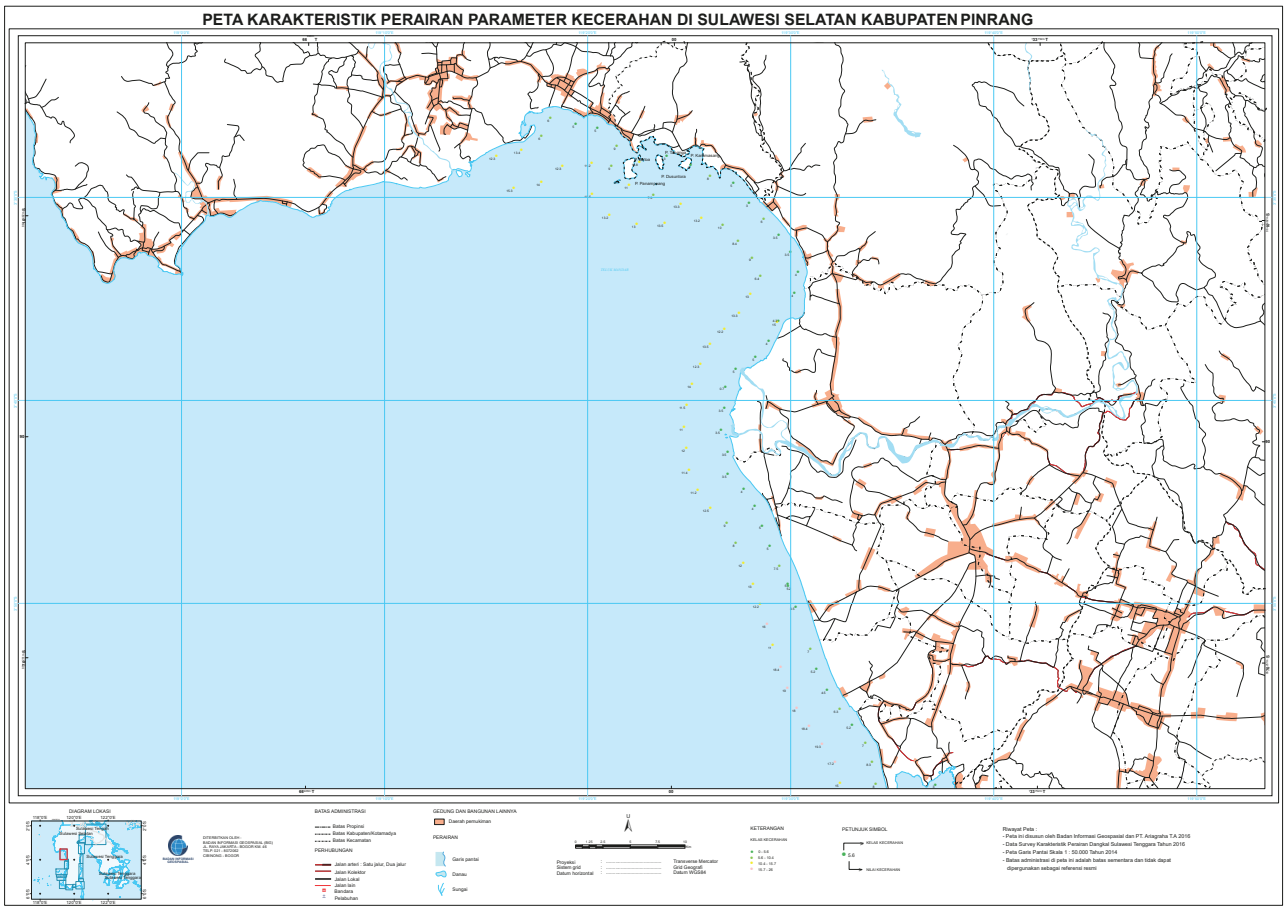


Contoh Peta IGT Perdesaan Desa Suralaga

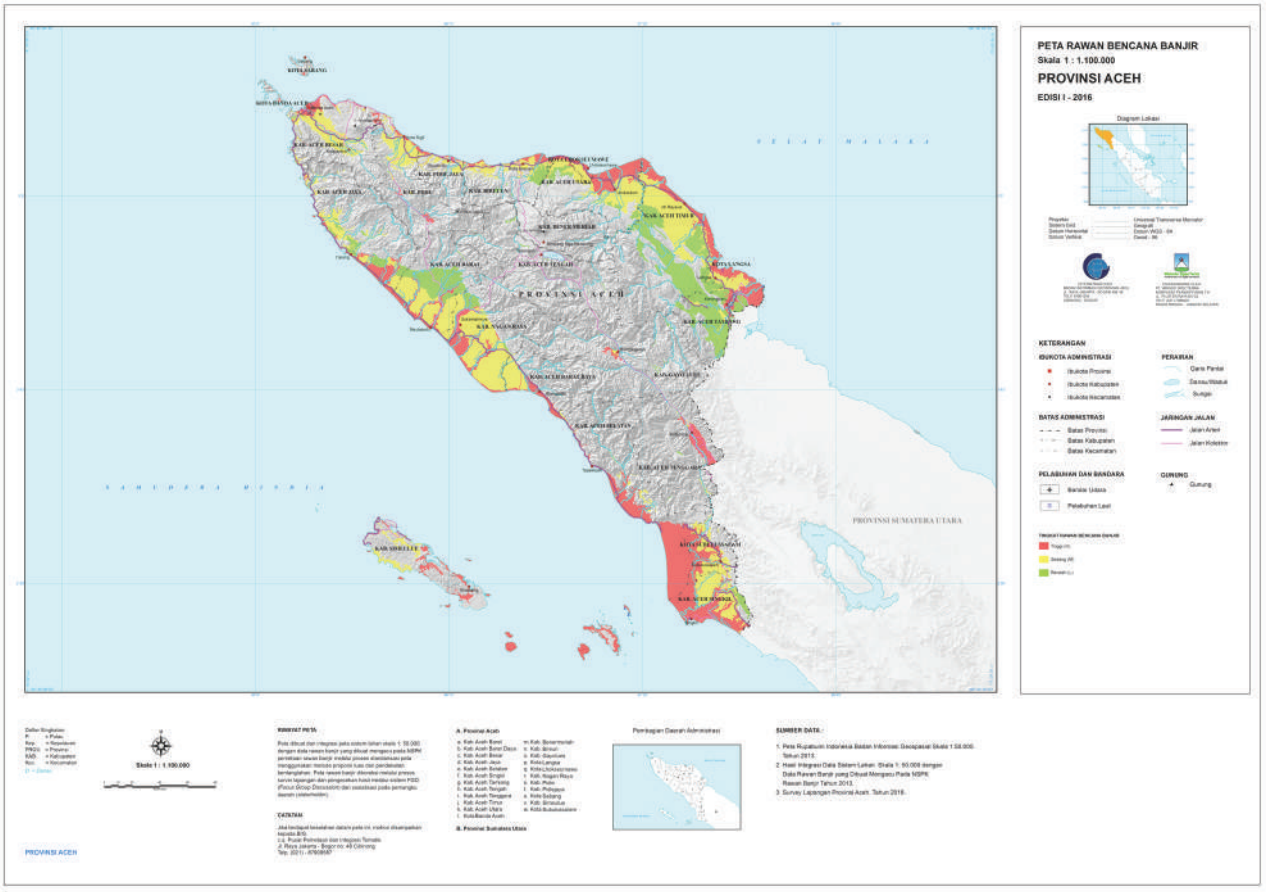




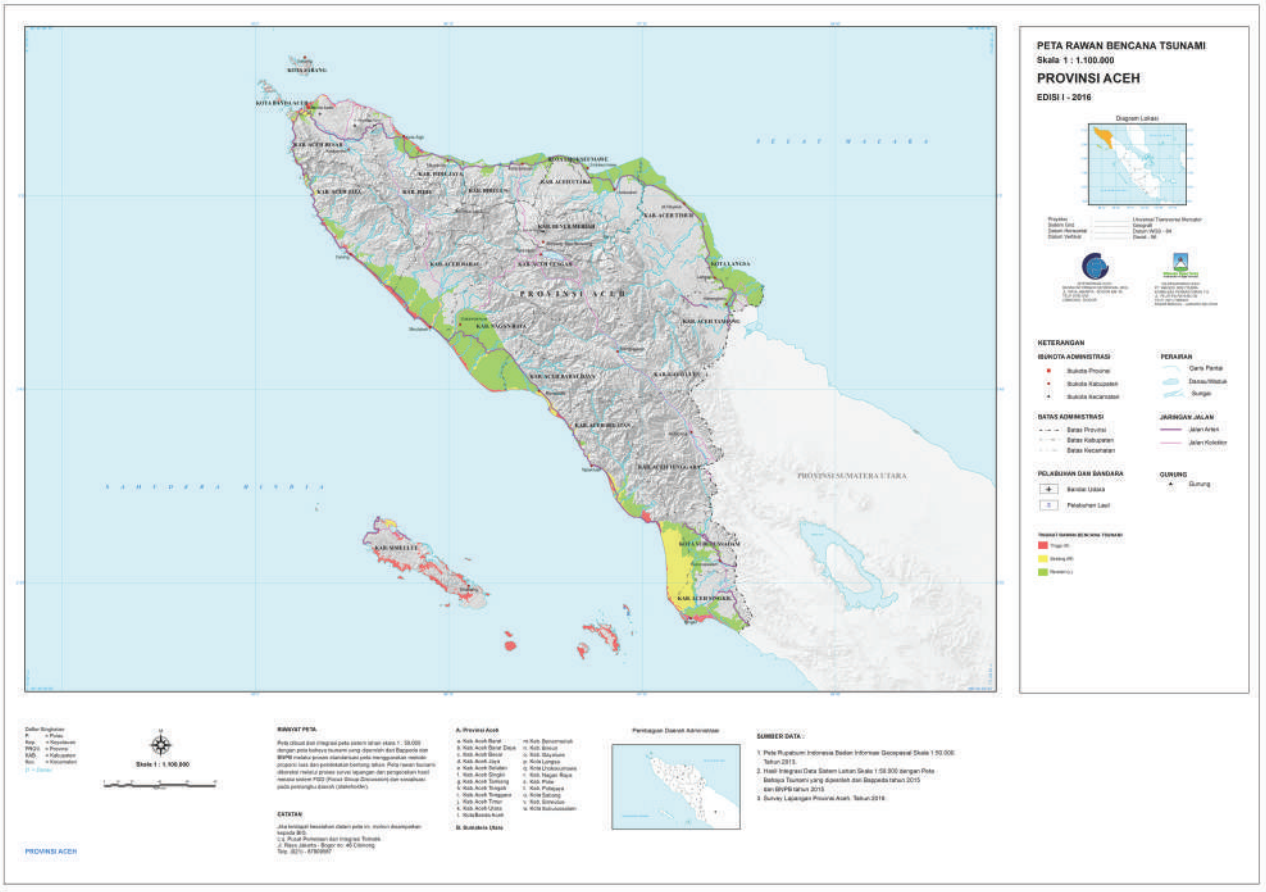
Contoh Karakteristik Oseanografi



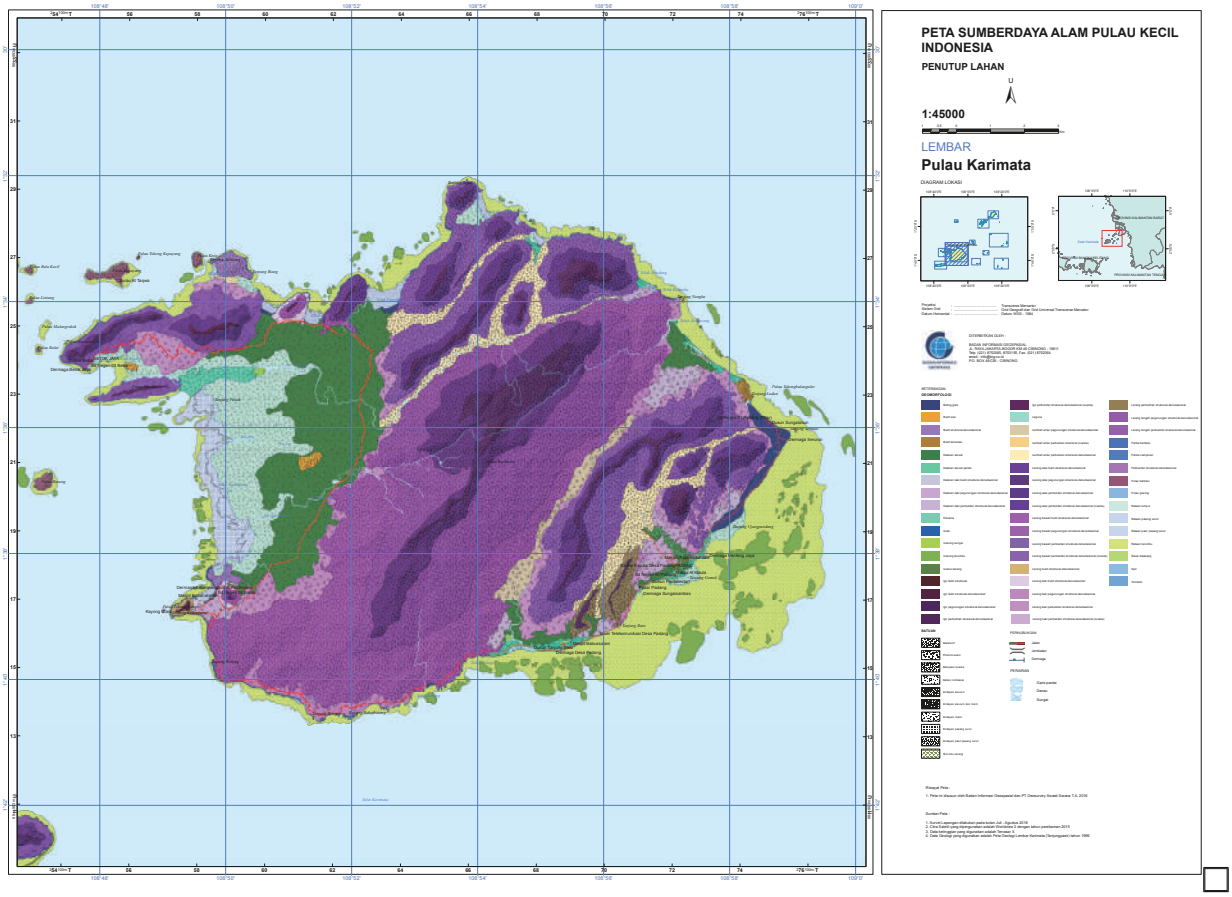
Contoh Multirawan Bencana Banjir, Provinsi Aceh



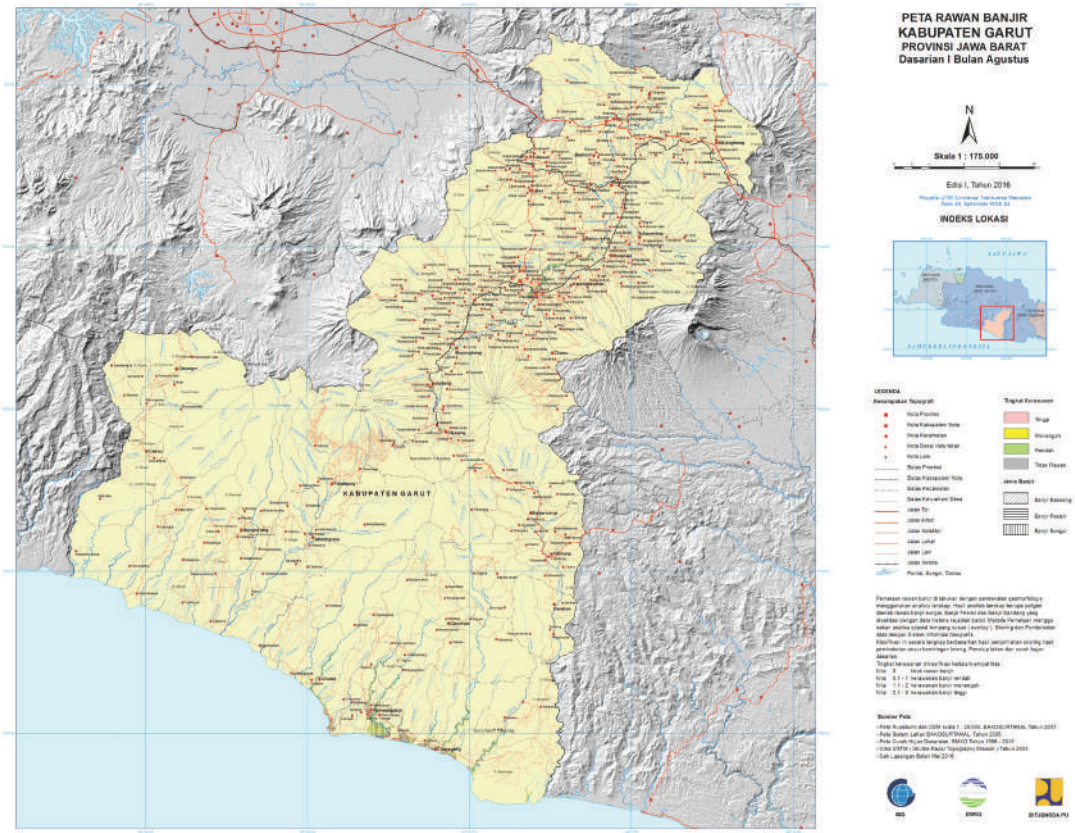
Contoh Multirawan Bencana Tsunami, Provinsi Aceh



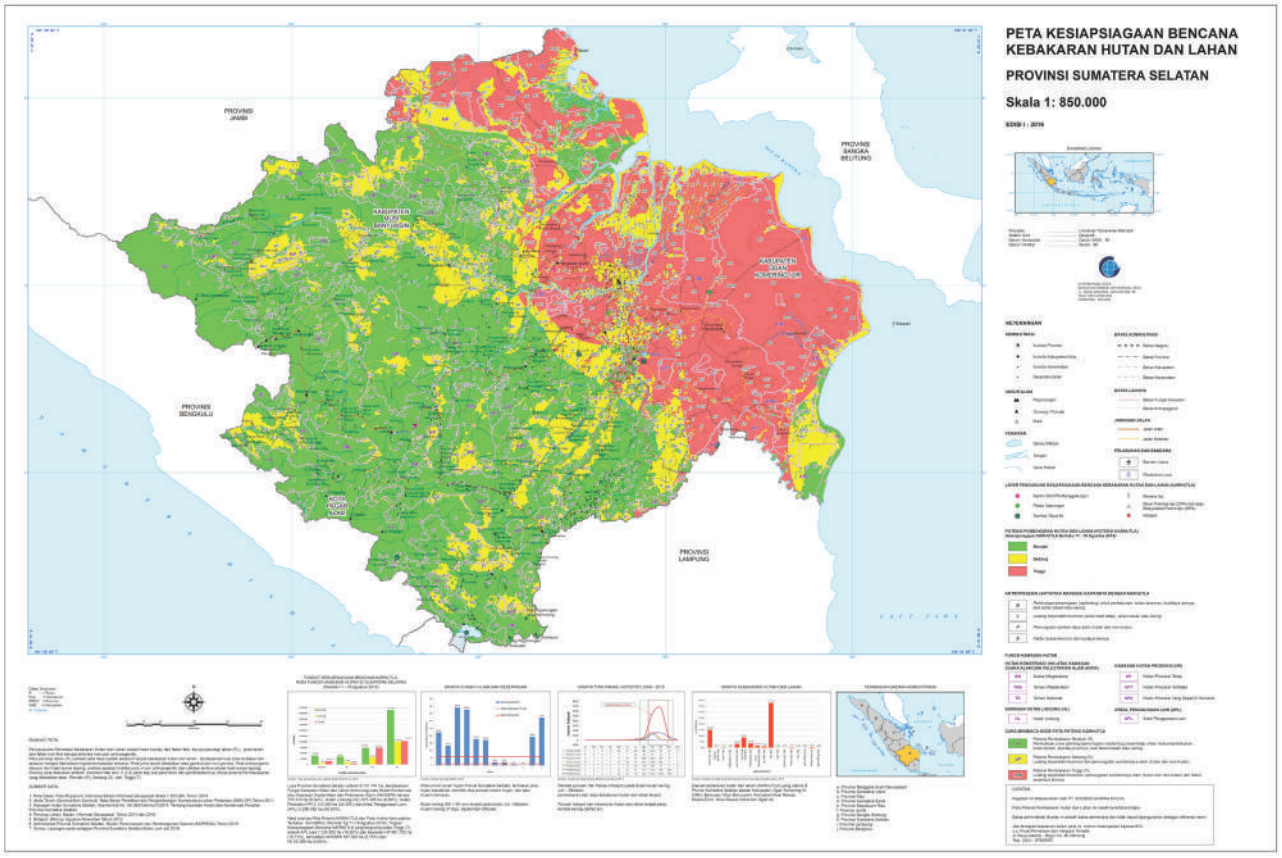
Contoh Peta Sumberdaya Alam Pulau Kecil Indonesia



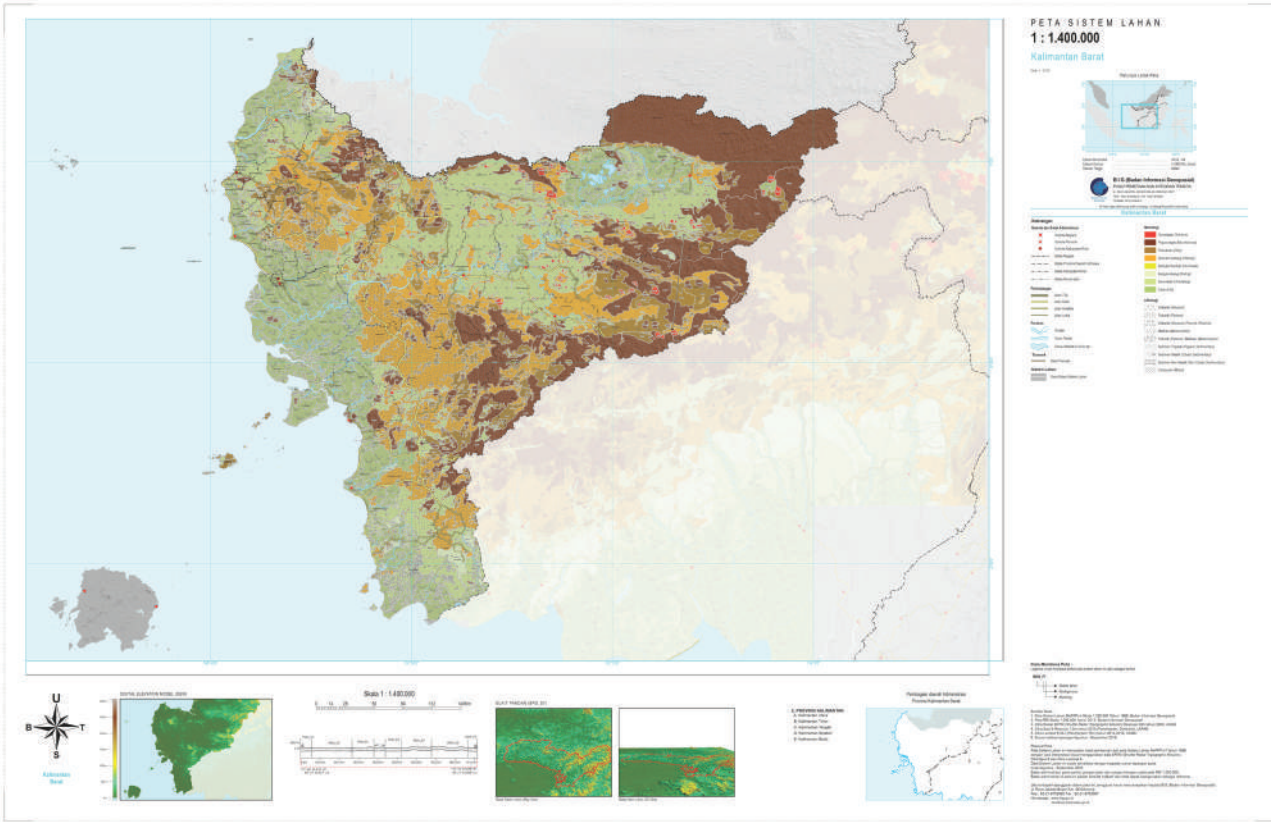
Contoh Peta Rawan Banjir Garut



Contoh Peta Kesiapsiagaan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan



Contoh Peta Sistem Lahan Kalimantan Barat



Informasi Geospasial Dasar
Informasi Geospasial Tematik
Infrastruktur Informasi Geospasial
Sekretaris Utama
Acara BIG



PEMETAAN TATA RUANG DAN ATLAS

PEMANFAATAN ATLAS TAKTUAL INDONESIA UNTUK PENYANDANG DISABILITAS TUNANETRA

Hak untuk memperoleh informasi wilayah Indonesia menjadi kewajiban negara kepada setiap penduduknya, baik yang mempunyai penglihatan normal maupun bagi warga berkebutuhan khusus. BIG sebagai lembaga yang bergerak pada penyediaan informasi geospasial turut serta memberikan informasi wilayah Indonesia dalam bentuk Atlas Taktual. Pada tahun 2016 ini bertema sebaran obyek wisata. Atlas Taktual merupakan kumpulan peta taktual tematik yang dibuat pada media plastik/kertas dalam bentuk tiga dimensi. Peta ini menyajikan informasi keruangan khusus untuk tuna netra atau orang yang mempunyai kendala penglihatan. Penyampaian informasi atlas kepada siswa dan guru tunanetra melalui uji keterbacaan Atlas Taktual.

MAPPING OF INDONESIA TACTUAL ATLAS FOR THE BLIND

The state is obligatory to provide information pertaining to indonesian territory to every resident having both normal vision and blindness. BIG as an institution engaged in the provision of geospatial information participates to provide the information on the Indonesian territory in the form of tactual atlas. The theme of the activity in 2016 was tourism object distribution. The Taktual Atlas is a collection of thematic tactual maps created on plastic / paper media in three dimensional forms. The maps present specific spatial information for the blind or the people with visual impairments. Conveying of the atlas information to students with visual impairments and their teachers is done through the tactual atlas legibility test.

Tabel 1 Lokasi Ujicoba Keterbacaan Atlas Taktual

Table 1. Location of the tactual atlas legibility test

No	Tempat	Pembinaan
1	Panti Rehabilitasi Sosial Disabilitas Netra, Kudus	Uji Keterbacaan
2	Panti Sosial Bina Netra (PSBN) Tan Miyat, Bekasi	Uji Keterbacaan
3	SLB ABCD Muhammadiyah Palu	Uji Keterbacaan
4	SD/SMP LB Sorong	Sosialisasi Atlas Taktual
5	SLB Bina Insani Lampung	Sosialisasi Atlas Taktual

Kegiatan uji keterbacaan Atlas Taktual sebagai bagian penting dalam pembinaan informasi geospasial tematik menjadi ajang interaktif antara pihak BIG dan para tunanetra. Ada proses pembelajaran bersama untuk mengenal wilayah Indonesia. Pada tahun 2016 ini kegiatan pembinaan di lakukan di 5 lokasi sesuai tabel di atas berupa uji keterbacaan di 3 lokasi dan sosialisasi Atlas

A tactual atlas legibility test activity as an important part in developing thematic geospatial information becomes an interactive event between the BIG and the blind. There is a shared learning process to understand the territory of Indonesia. The assistance activities in 2016 were carried out in 5 locations, according to the table above, through test legibility implementation in 3 locations and awereness arising activities concerning to tactual atlas in 2 locations. The activities were expected

Taktual di 2 lokasi. Melalui kegiatan pembinaan diharapkan dapat memberi pemahaman kepada siswa dan guru tunanetra.

to be able to increase understanding of the students with visual impairments and their teachers on Indonesia territory.



Uji Keterbacaan
Atlas Taktual

Output kegiatan ini adalah tersedianya 1 (satu) dokumen Atlas Taktual tema sebaran obyek wisata. Sedangkan *outcome* kegiatan penyusunan Atlas Taktual diharapkan para tuna netra dapat memperoleh informasi geospasial, sehingga tuna netra dapat meningkatkan pengetahuan tentang kondisi dan letak suatu wilayah serta segala sumber daya yang ada dalam ruang suatu wilayah. Dengan demikian, para tuna netra akan memiliki kemampuan orietasi serta mobilisasi menuju wilayah yang diinginkan untuk dapat memanfaatkan segala sumberdaya yang ada di wilayah tersebut.

The activity is purposed to produce the output of 1 (one) tactual atlas document with the theme of tourism object distribution. Meanwhile the expected outcome of Tactual Atlas arrangement is assistance to the blind to be able to obtain geospatial information, so that the blind can increase their knowledge about the condition and location of an area and all the resourcess inside. Therefore, the blind will have the ability of orientation and mobilization toward the desired location and be able to take advantage of all the existing resourcess there.

PEMANFAATAN IG UNTUK MENDUKUNG SINERGI PENGEMBANGAN SISTEM KONEKTIVITAS TRANSPORTASI LAUT DENGAN SKENARIO PENGEMBANGAN WILAYAH

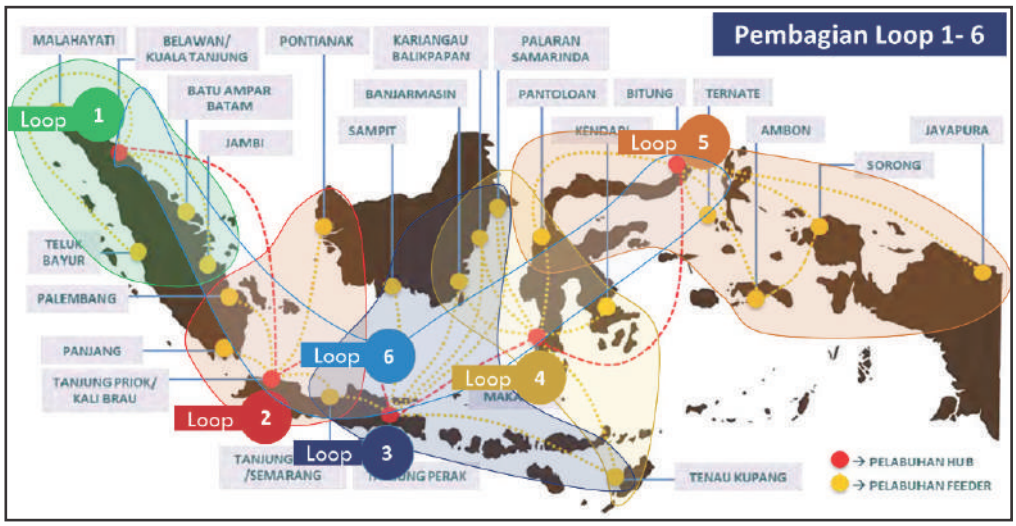
Dalam RPJMN 2015-2019, pembangunan sistem transportasi laut menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional. Salah satu program pembangunan sistem transportasi laut tersebut adalah membangun "Tol Laut" dari wilayah barat hingga ke wilayah timur Indonesia. Transportasi laut diharapkan dapat menghilangkan isolasi dan memberi stimulan ke arah perkembangan di berbagai bidang kehidupan, baik perdagangan, industri maupun sektor lainnya di daerah yang akan menurunkan biaya logistik. Transportasi laut mempunyai fungsi sebagai penggerak, pendorong, dan penunjang aktivitas sosial, ekonomi dan budaya, bahkan penunjang aspek pertahanan keamanan dan politik serta pengembangan wilayah.

Dalam hal ini peran pemerintah sebagai motor penciptaan konektivitas antar wilayah melalui laut perlu diwujudkan dalam bentuk realisasi sistem yang terintegrasi antara logistik nasional, sistem transportasi nasional, pengembangan wilayah dan sistem komunikasi dan informasi.

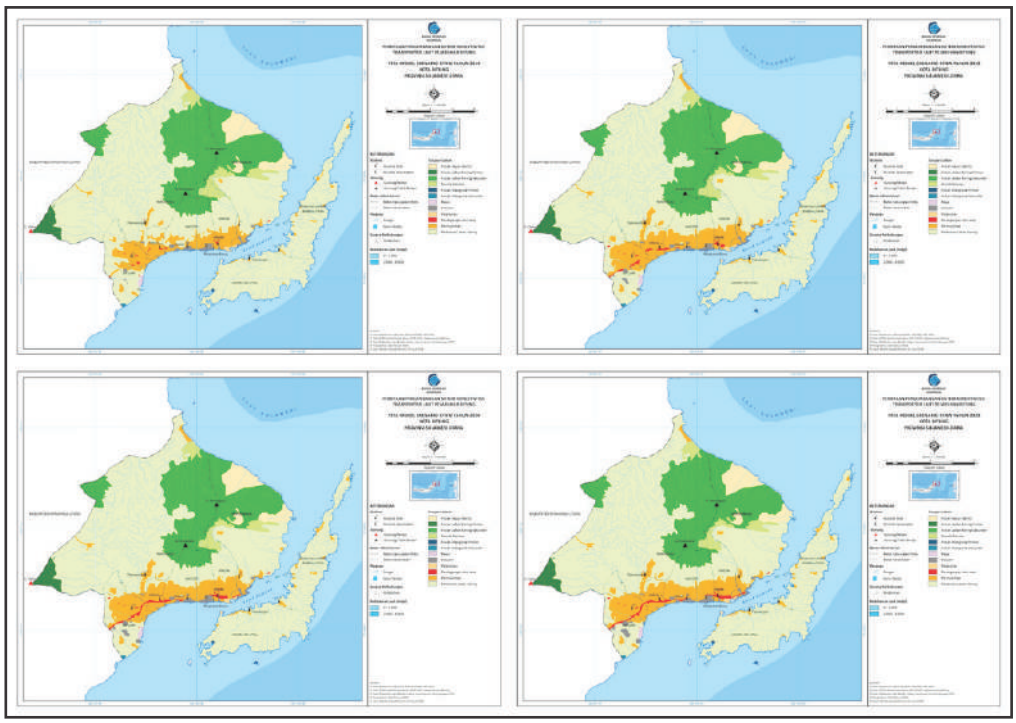
UTILIZATION OF IG TO SUPPORT SYNERGY FOR CONNECTIVITY SYSTEM DEVELOPMENT BETWEEN SEA TRANSPORTATION WITH REGIONAL DEVELOPMENT SCENARIO

The development of sea transportation system is prioritized in the National Medium-term Development Plan (RPJMN) 2015-2019. One of the sea transportation system development programs is development of "Sea Toll" from west to east of Indonesia. Sea transportation is expected to eliminate isolation and to stimulate development in various sectors such as trade, industry or other sectors in regional level as well as being able to reduce logistics costs. Sea transportation plays significant roles in stimulating, driving, and supporting social, economic and cultural activities, including support to defense and security aspects, politics, and regional development.

Role of the government as the driver of region connectivity by sea, in this case, needs to be implemented in the form of an integrated system between a national logistic system, a national transportation system, regional development as well as a communication and information system.



Pelabuhan Strategis Pendukung Tol Laut



Pemodelan Spasial Kota Bitung Tahun 2014, 2019, 2024 dan 2029

Secara umum RPJMN 2015-2019 telah menetapkan 24 pelabuhan sebagai lingkup pengembangan tol laut. 24 pelabuhan tersebut terdiri dari 5 pelabuhan utana (hub) dan 19 Pelabuhan pengumpan (feeder).

Kegiatan ini ditujukan untuk menyediakan dan memanfaatkan informasi geospasial untuk mendukung perumusan skenario pembangunan terintegrasi antara pembangunan transportasi laut dan pengembangan wilayah dalam kerangka pengembangan tol laut nasional. Pemanfaatan model dinamika spasial sebagai sistem pendukung kebijakan tersebut dapat memberikan arahan dalam membangun sinergi kebijakan bidang informasi geospasial dengan bidang Transportasi Laut.

Output pemanfaatan IGT strategis ini adalah basis data dan model aplikasi pemanfaatan informasi geospasial tematik (IGT) untuk mendukung sinergi pembangunan tol laut dengan pengembangan wilayah. *Outcome* pemanfaatan IGT strategis ini adalah terumuskannya skenario pengembangan wilayah yang terintegrasi dengan konektivitas transportasi laut Selain itu *outcome* kegiatan ini adalah terlaksanannya peningkatan kapasitas (*capacity building*)

In general, the RPJMN 2015-2019 has determined 24 ports as the scope of sea toll development. The 24 ports includes 5 main ports (hubs) and 19 feeder ports.

This activity is aimed at providing and utilizing geospatial information to support the arrangement of integrated development scenarios between sea transportation development and regional development within the framework of developing national sea toll transportation system. Utilization of spatial dynamic model as a policy support system can provide direction in developing policy synergies between geospatial and Sea Transportation sectors.

Utilization of strategic ICT produces the database and application model for utilization of thematic geospatial information (IGT) to support the synergy of sea toll development with regional development. Meanwhile, the outcome of the strategic IGT utilization is the formulation of regional development scenario integrated with sea transportation connectivity. The other outcome of this activity is the the capacity building for planning work – rekated stakeholders

aparat perencanan di Kabupaten dan kota dalam memanfaatkan IGT untuk perencanaan pembangunan di wilayahnya.

PEMANFAATAN IGT STRATEGIS UNTUK MONITORING DINAMIKA KAWASAN STRATEGIS PERKOTAAN

Badan Informasi Geospasial mengintegrasikan dan memanfaatkan Informasi Geospasial Tematik untuk menganalisis dan melakukan kajian analisis spasial wilayah urban. Pemetaan dinamika sumberdaya kawasan perkotaan Mamminasata memiliki nilai strategis bagi pengembangan dan perencanaan penataan ruang wilayah urban. Dinamika sumberdaya kawasan perkotaan Mamminasata, selain memetakan alih fungsi lahan (*land use change*), juga menganalisis korelasi sumberdaya strategis lainnya terhadap laju konversi, arah perubahan (*urban sprawl*), kompetisi lahan, kesesuaian rencana tata ruang, perubahan daya dukung lingkungan, distribusi dan tingkat pelayanan sarana dasar dan infrastruktur, distribusi dan kapasitas sdm dan ketahanan pangan.

Kegiatan pemetaan dinamika sumberdaya wilayah urban merupakan salah satu bentuk kegiatan pemanfaatan IG yang selanjutnya dikembangkan untuk kajian pengembangan wilayah perkotaan. *Output* dari kegiatan pemetaan dinamika sumberdaya kawasan perkotaan Mamminasata adalah tersedianya basis data dan informasi geospasial tematik 1 (satu) wilayah perkotaan Mamminasata. Selain itu kegiatan ini juga memiliki *output* ersedianya dokumen hasil kajian pemetaan dinamika sumber daya alam wilayah perkotaan sebagai hasil pemanfatan model berbasis data dan informasi geospasial yang dikembangkan dalam bentuk Buku Populer.

in districts and cities to be able to optimize IGT for their regional development planning.

UTILIZATION OF STRATEGIC IGT FOR MONITORING DYNAMICS OF URBAN STRATEGIC AREAS

The Geospatial Information Agency integrates and uses Thematic Geospatial Information to review and conduct an urban areas spatial analysis. Mapping of resources dynamics of Mamminasata urban area has strategic value for the development and planning of urban spatial arrangement. The monitoring of resources dynamics of the Mamminasata urban area, in addition to mapping the land use change, also investigates the correlation of other strategic resources to the conversion rate, the direction of urban sprawl, the land competition, the spatial plan compliance, the changes in environmental carrying capacity, the distribution and the level services of basic facilities and infrastructure, distribution and human resources capacity as well as food security.

The activity of urban area resources dynamics mapping is one of IG utilization which is further developed to support study of urban area development. Resources dynamics mapping of Mamminasata Urban area produces a database and thematic geospatial information for one Mamminasata urban area. Moreover, this activity also has produced a document resulted from the study of urban natural resources dynamics mapping using a data and geospatial information – based model, developed in the form of Popular Book



Dinamika Sumberdaya Kawasan Perkotaan Mamminasata

Outcome dari kegiatan pemetaan dinamika sumberdaya kawasan perkotaan Mamminasata adalah kegiatan ini dapat menjadi masukan bagi *stakeholders* bidang perencanaan wilayah untuk dapat memprediksi perubahan lahan yang terjadi apabila suatu kebijakan tertentu diterapkan sehingga hasil dari suatu kebijakan tersebut dapat dirumuskan dan diformulasikan sesuai dengan dinamika lahan yang terjadi.

The outcome of resources dynamics mapping of Mamminasata urban area is that the activity can be an input for regional planning – related stakeholders, so they are able to predict land changes that occur when a certain policy is implemented. Therefore results of the policy can be arranged and formulated in accordance with the existing land dynamics.

INTEGRASI IGT

A. Peta NKRI dan Kewilayahan

Peta NKRI yang menggambarkan wilayah kedaulatan NKRI selalu dilakukan evaluasi setiap tahunnya. Pada tahun 2016 telah dilaksanakan evaluasi bahwa belum ada perubahan batas negara dan tidak ada pemekaran wilayah administrasi. Perubahan batas negara sedang diusulkan dan dibahas pada akhir 2016 sehingga pada tahun 2016 disepakati tidak ada *launching* Peta NKRI. Kegiatan penyusunan Peta NKRI pada tahun 2016 dilaksanakan dengan koordinasi teknis dengan K/L terkait, pengumpulan data perubahan batas wilayah administrasi untuk basis data, dan editing penyajian kartografi dari Peta NKRI yang telah dilakukan evaluasi perlu untuk diedit.

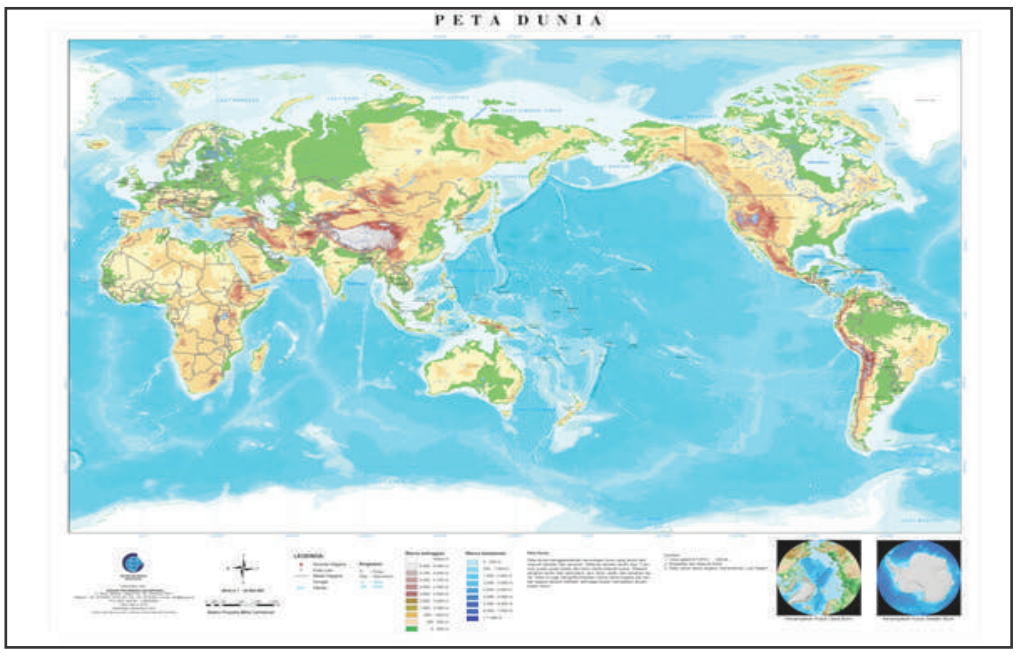
IGT INTEGRATION

A. The Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI) and its territory Map

The NKRI map determining the territory of the Republic of Indonesia's sovereignty is always evaluated every year. An evaluation was done in 2016, showing no change of state boundary and no expansion of administrative territory. The state boundary change was being proposed and discussed at the end of 2016, therefore it was agreed not to launch the NKRI Map in 2016. The preparation of the NKRI Map arrangement in 2016 was carried out through technical coordination with related K / L, data collection of administrative boundaries changes for a database, and cartographic presentation editing of NKRI Maps in need of editing according to a conducted evaluation.



Peta NKRI



Peta Dunia

Peta Kewilayahan yang dibuat pada tahun 2016 adalah Peta Dunia dan Peta Wisata Lombok. Pada Peta Dunia digambarkan posisi strategis Indonesia di tengah dunia. Peta Dunia diharapkan dapat membantu materi alat peraga dalam dunia pendidikan dan menambah wawasan masyarakat umum tentang wilayah dunia. Peta Kewilayahan dengan tema pariwisata dibuat dengan mempertimbangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata yang sedang dikembangkan. Wilayah yang dipetakah adalah Lombok karena terdapat KEK Mandalika dan Lombok sedang dikembangkan untuk kawasan wisata halal. Dengan adanya Peta Wisata Lombok diharapkan potensi wisata yang terdapat di Lombok semakin dikenal oleh masyarakat luas.

B. Atlas Bentanglahan

Pembangunan wilayah kawasan timur Indonesia gencar dilakukan oleh pemerintah. Untuk mendukungnya maka perlu ketersediaan data geospasial yang menyajikan secara komprehensif. Atlas Bentang Lahan Pulau Papua hadir bertujuan sebagai sarana informasi geospasial tematik kawasan timur yang berisi informasi bentang alam dan bentang budaya Papua. Bentang alam Papua mulai dari kepala burung, leher burung, bagian pegunungan tengah, dan wilayah pesisir utara serta pesisir selatan, tersaji dengan baik dikombinasikan dengan bentang budaya tanah Papua. Kombinasi atau integrasi data spasial tematik tersebut terwujud (*output*) dalam bentuk Atlas Bentang Lahan Pulau Papua.

Dikaitkan dengan ketersediaan data geospasial tematik wilayah Papua yang relatif minim, kehadiran Atlas Bentang Lahan Pulau Papua dapat menjadi referensi dalam rangka mempercepat penyelesaian data geospasial kawasan timur. Secara tidak langsung, hal ini juga untuk mendukung percepatan kebijakan satu peta. Bagi perencanaan pembangunan, informasi dalam atlas ini bermanfaat sebagai salah satu bahan masukan pertimbangan pengembangan daerah berbasis lingkungan. *Outcome* lebih lanjut, Atlas Bentang Lahan Pulau Papua merupakan salah satu referensi bagi kalangan pendidikan yang mempelajari ilmu kebumian terutama bumi Papua.

C. Peta Dinamika SD Terpadu Wilayah Sungai

Tekait dengan pengelolaan Sumberdaya Alam Wilayah Sungai (WS) S terpadu sebagai indikator dari baik atau tidaknya manajemen WS, maka penyediaan informasi geospasial SDA Terpadu hulu-tengah-hilir dalam rentang waktu tertentu dapat digunakan sebagai parameter untuk mengukur baik tidaknya manajemen tersebut. Informasi Geospasial SDA terpadu tersebut juga dapat digunakan sebagai analisis penataan ruang. Neraca SDA terpadu menerapkan konsep analisis komprehensif dari perubahan fungsi ruang selama rentang waktu tertentu yang ditujukan untuk mengetahui laju konversi lahan dari setiap fungsi baik secara kualitatif maupun kuantitatifnya. Perubahan fungsi ruang, yang biasanya hanya mencakup satu jenis indikator seperti hutan atau hutan mangrove saja, tidak dapat memberikan implikasi pada pengelolaan WS Terpadu sehingga perlu dilakukan suatu penilaiann terhadap perubahan fungsi penggunaan lahan. Kontinuitas kegiatan seperti ini akan memberikan dampak positif bagi pengelolaan WS bagi seluruh pemangku kepentingan.

Pemetaan Dinamika Sumberdaya Terpadu 4 Wilayah Sungai bertujuan untuk memperoleh informasi geospasial dinamika sumberdaya alam terpadu (hutan/lahan/air/mineral) di 4 Wilayah Sungai dalam kurun waktu 5 tahun. Pemetaan dinamika sumberdaya alam terpadu yang dimaksud adalah memandang elemen sumberdaya alam

The territorial map created in 2016 was the World Map and the Lombok Tourism Map. The World Map illustrated Indonesia's strategic position in the world. The World Map was expected to be a teaching tool in the education world and be able to raise community's awereness about the world's territory. The boundary map with the theme of tourism was created by considering Special Economic Zone (KEK) of the tourism areas under development. The mapped area was Lombok since there were Mandalika KEK and halal tourism area. The Lombok Tourism Map is expected to offer tourism potential in Lombok increasingly known by the public.

B. Landscape Atlas

The development of the eastern Indonesia has been intensively carried out by the government. To support it, the availability of comprehensive geospatial data has been significantly required. Landscape atlas of Papua island is proposed to provide a thematic geospatial information means of eastern Indonesia that contains information of Papuan cultural and landscape. The landscape of Papua ranging from birds' head, birds' necks, mountains at the center, and coastal areas at the north and south, is well presented in combination with Papua's cultural landscape. The combination or integration of thematic spatial data results in landscape atlas of the Papua Island.

Considering that the availability of thematic geospatial data for Papua region is relatively limited, the existing landscape atlas of the Papua Island can be a reference in order to accelerate the completion of geospatial data of the eastern regions. Indirectly, it is also to support the acceleration of one map policy imlementation. In term of development planning, the information in the atlas is also useful as one of the consideration for environment - based regional development. Further outcome is that landscape atlas of Papua Island becomes one of the references for academics which study earth science especially Papua.

C. Integrated Resources Dynamic Map for Catchment Area

In relation to the integrated natural resources management for Catchment Area (WS) as an indicator of appropriateness of WS management, the provision of integrated natural resources (SDA) geospatial information for Up- middle – down stream within a certain period can be used as a parameter to measure appropriateness of the management. Moreover, the integrated natural resources (SDA) geospatial information can be used as a spatial analysis. The integrated SDA balance applies the concept of a comprehensive assesment on the change in spatial function over a period to identify the land conversion rate of each function both qualitatively and quantitatively. Changes in spatial function, which typically cover only an indicator such as forest or mangrove forests, will not affect the integrated WS management; so it is necessary to make an assessment on the changes in land use function. Continuity of such activities will have a positive impact on the WS management for all stakeholders. Mapping of Integrated Resources Dynamics for 4 catchments is purposed to obtain geospatial information on the integrated natural resources dynamics (forest / land / water / minerals) in 4 catchmnets within 5 years. Mapping the integrated natural resourcess dynamics is to include natural resourcess elements as an integrated entity; the activity, therefore, technically

sebagai kesatuan yang terintegrasi, jadi secara teknis kegiatan ini merupakan gabungan pemetaan neraca sumberdaya alam yang meliputi elemen hutan, lahan, air dan mineral.

Tujuan dari kegiatan ini adalah melakukan pemetaan pemetaan neraca sumberdaya alam yang meliputi elemen hutan, lahan, air dan mineral pada seluruh kawasan Wilayah Sungai dalam kurun waktu 5 tahun terakhir mulai tahun 2009-2014. Serta melakukan analisis spasial dinamika sumberdaya alam terpadu tersebut untuk melihat hubungan per elemen sumberdaya serta terkait dengan fungsi ruang yang tertuang dalam dokumen tata ruang wilayah dalam Wilayah Sungai tersebut.

Output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah spatial dataset sumberdaya alam terpadu di 4 (empat) Wilayah Sungai waktu analisis dan citra satelit, peta dinamika sumberdaya alam terpadu dalam bentuk softcopy dan hardcopy, Album Peta Dinamika Sumberdaya Terpadu Wilayah Sungai, dan Buku Pemetaan dinamika sumberdaya alam terpadu wilayah sungai. Outcome kegiatan ini antara lain tersedianya Informasi Geospasial sumberdaya alam elemen hutan, lahan, air dan mineral pada kurun waktu 2009-2014 dalam Wilayah Sungai.

D. Integrasi Informasi Geospasial RTRW Untuk Implementasi Program Nawacita

Kegiatan Integrasi Informasi Geospasial RTRW untuk Implementasi Program Nawacita bertujuan untuk mengintegrasikan Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi seluruh Indonesia dalam satu file *geodatabase* yang sama dan disajikan secara *seamless* seluruh Indonesia, kemudian melihat sinkronisasinya dengan rencana program Nawacita dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPMN) secara spasial, terkait pada lokasi, sebaran dan jumlah yang diintegrasikan dengan IG RTRW Provinsi tersebut.

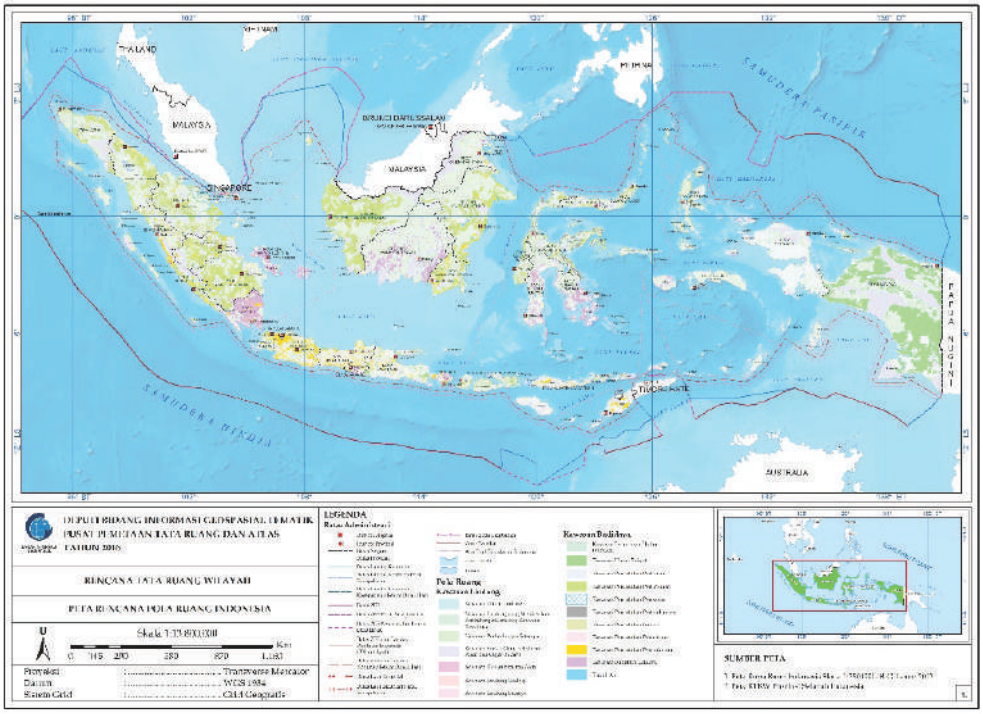
is a combination of natural resources balance mapping covering elements of forest, land, water and minerals.

The activity was to mapping natural resources balance covering elements of forest, land, water and minerals in all areas of the catchments in the last 5 years from 2009-2014. Furthermore, it was to perform spatial analysis upon the integrated natural resources dynamics in order to determine the relationship of each element of the resources; and to identify spatial function within the catchments as stated in the document of regional spatial arrangement.

The expected outputs of the activity were the spatial dataset of integrated natural resources for the 4 (four) catchments over the analysis and satellite imagery period, integrated softcopy and hardcopy natural resources dynamics maps, a map album of integrated resources dynamics of catchments, as well as a book of integrated natural resources mapping of catchments. Meanwhile, outcomes of the activity included Geospatial Information of natural resources within the catchments covering forest, land, water and minerals in the period 2009-2014.

D. Geospatial Information Integration of Regional Spatial Planning (RTRW) for the Implementation of the Nawacita Program

The Geospatial Information Integration of RTRW for the Implementation of the Nawacita Program is to integrate the Provincial Spatial Planning Maps throughout Indonesia into a common geodatabase file that is presented seamlessly throughout Indonesia; then it is spatially synchronized with the Nawacita program plan in the National Medium Term Development Plan (RPMN), concerning on the location, distribution and quantity integrated with RTRW geospatial information of the Provinces



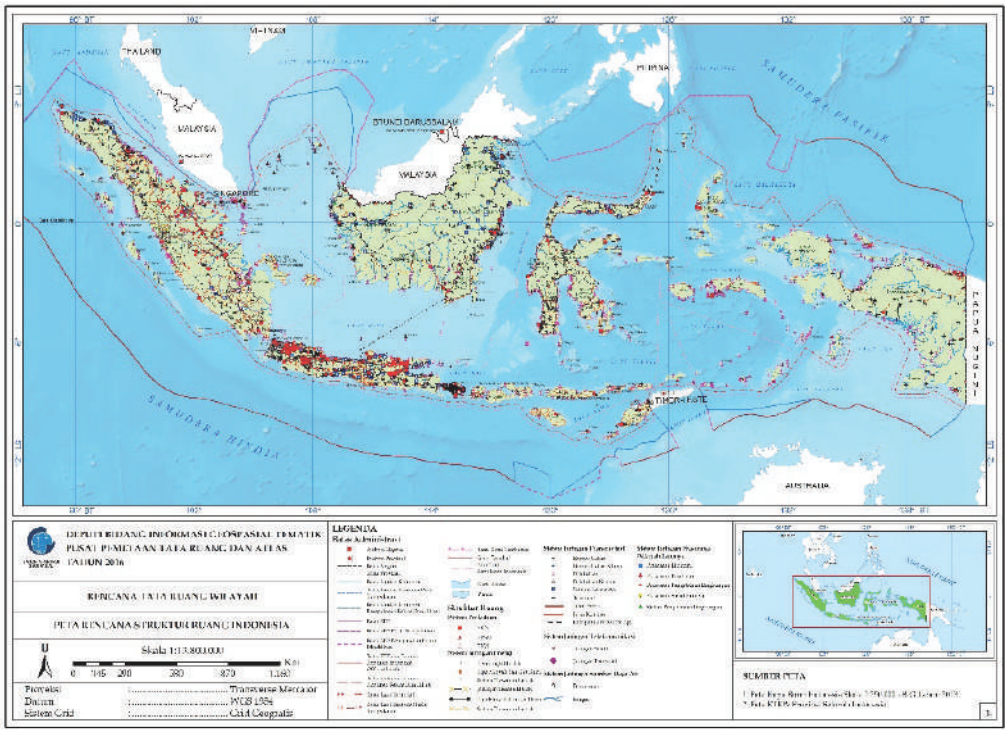
Peta Rencana Struktur Ruang RTRW Provinsi Secara Nasional

Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan masukan terkait penerapan Program Nawacita kedalam Rencana Pembangunan Nasional dengan pendekatan spasial. Pemanfaatan ruang provinsi yang saling terintegrasi akan mewujudkan penataan ruang yang

The activity is expected to provide recommendation on how to include the Nawacita Program into the National Development Plan using a spatial approach. Utilization of the integrated provincial area will support an intact spatial arrangement and provide legal

utuh dan memberikan kepastian hukum. Lebih jauh integrasi RTRW dengan Nawacita dapat memberi gambaran utuh terhadap implementasi program Nawacita per wilayah.

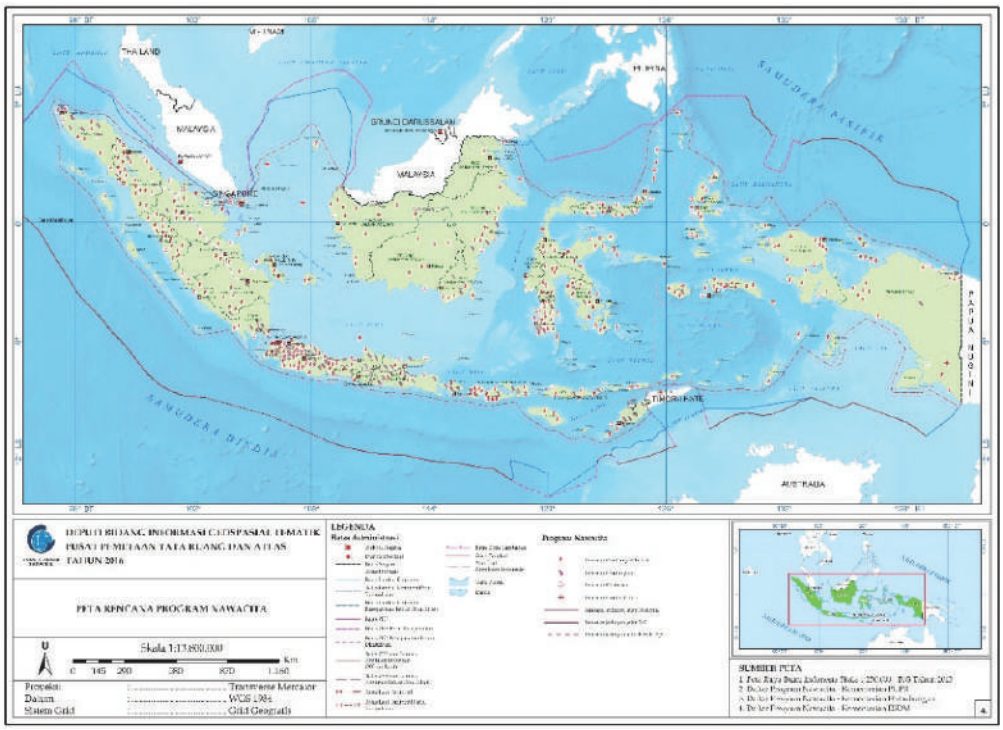
certainty. Furthermore, integration of the RTRW with Nawacita can completely determine implementation of the Nawacita program in each area.



Peta Rencana Program Nawacita

Output kegiatan ini berupa 2 (dua) dokumen antara lain peta RTRW Provinsi seamless seluruh Indonesia dan plotting proyek prioritas nasional (Nawacita) yang terdiri dari 6 data infrastruktur yaitu pembangkit listrik, jalan nasional, jaringan jalur kereta api, waduk, bandar udara dan pelabuhan. Dengan adanya data yang *seamless* untuk RTRW Provinsi seluruh Indonesia maka permasalahan gap dan overlap perencanaan antar wilayah provinsi dapat dilihat lebih komperhensif secara spasial.

The activity produced 2 (two) documents, namely, the seamless provincial RTRW map throughout Indonesia and the plotting of the national priority project (Nawacita) consisting of 6 data on infrastructure covering power plants, national roads, railway networks, reservoirs, airports and ports. The seamless data for provincial RTRW throughout Indonesia were able to spatially investigate the issues of gap and overlap of planning within provinces in more comprehensive way.



Peta Rencana Program Nawacita

Outcome kegiatan ini adalah tersedianya instrumen Informasi Geospasial tata ruang dan program Nawacita untuk pengambilan keputusan. Sebaran data Nawacita (infrastruktur pendukung nawacita) berguna untuk melihat sebaran dan jenis infrastruktur tersebut pada setiap wilayah provinsi sehingga dapat dilihat dan dianalisis sinkronisasinya dengan RTRW Provinsi yang bersangkutan dan rencana pembangunan pada umumnya.

Penyusunan Atlas Overview Sumberdaya dan Lingkungan bertujuan untuk menyajikan potensi fisik, ekonomi, sosial, dan budaya, wilayah Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua dan Papua Barat. Penyajian potensi wilayah dalam bentuk atlas digunakan sebagai jendela bagi masyarakat awam untuk mengenali potensi wilayah indonesia timur indonesia secara lengkap. Kombinasi peta, foto, info grafis dan juga narasi memberikan informasi lengkap sekaligus dengan distribusi spasialnya. Isu-isu strategis juga diangkat untuk kemudian dianalisis lebih lanjutsejauh mana kelemahan yang dimiliki masing-masing provinsi untuk memenuhi rencana pembangunan jangka menengah dari pemerintah pusat. Ada 3 *output* utama yang dihasilkan berupa Buku Atlas Overview Sumberdaya dan Lingkungan edisi Bali-Nusatenggara, Buku Atlas Overview Sumberdaya dan Lingkungan edisi Papua, dan Buku Kajian Atlas Overview Sumberdaya dan lingkungan.

INTEGRASI NERACA SUMBERDAYA ALAM

Informasi geospasial memegang peranan penting dalam monitoring dan evaluasi hulu-hilir pengelolaan lingkungan hidup dan penyelenggaraan penataan ruang. Disisi lain, kegiatan penyelenggaraan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup pada umumnya, memerlukan instrumen spasial sebagai evalusi pelaksanaan kegiatan tersebut. Salah satu instrumen yang dapat digunakan adalah penyelenggaraan (pemetaan) neraca sumberdaya alam yang diatur penyelenggaraannya melalui Peraturan Kepala BIG Nomor 3 Tahun 2013 yang selanjutnya dilimpahkan tugas dan fungsinya pada Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas Bidang Pemetaan Dinamika Sumberdaya.

Neraca Sumberdaya Alam adalah neraca yang disusun untuk mengetahui kuantitas awal sumberdaya yang dinyatakan dalam aktiva dan pemanfaatannya yang dinyatakan dalam pasiva dan saldo akhir cadangan sumberdaya dalam jangka waktu tertentu. Dengan NSDA, dapat diketahui potensi, pemanfaatan, serta seberapa banyak saldo sumberdaya yang belum termanfaatkan. Komponen neraca sumberdaya alam ini terdiri atas neraca spasial sumberdaya lahan, neraca spasial sumberdaya air, neraca spasial sumberdaya hutan, dan neraca spasial sumberdaya mineral dan batubara.

Kegiatan integrasi neraca sumber daya alam bertujuan untuk menyajikan informasi geospasial tematik neraca empat komponen sumberdaya alam dan integrasi antar komponen yang disajikan dalam bentuk analisis keterkaitan antar komponen dimaksud. Kegiatan ini dilaksanakan secara kontraktual dengan cakupan wilayah Pulau Kalimantan dan Sulawesi.

Output kegiatan ini adalah tersedianya infomasi geospasial tematik neraca empat komponen sumberdaya dan analisa keterkaitan antar sumberdaya yang menampilkan deskripsi fenomena hubungan serta rekomendasi kebijakan menghadapi fenomena dimaksud pada 2 (dua) wilayah yakni Pulau Kalimantan dan Sulawesi. *Outcome* dari kegiatan ini adalah sebagai masukan kepada pemerintah pusat dan

The activity resulted in a geospatial Information instrument for spatial arrangement and for Nawacita program, as an outcome, beneficial for decision making process. Nawacita data distribution (nawacita supporting infrastructure) was useful to determine the distribution and type of infrastructure in each province so they can be analyzed and synchronized with the relevant provincial RTRW and general development plan.

Arrangement of Atlas of Resources and Environment Overview aims to present the physical, economic, social and cultural potentials of Bali, West Nusa Tenggara, East Nusa Tenggara, Papua and West Papua. The presentation of the potential of the provinces in the atlas is used as a window for the common community to recognize the complete potential of the eastern Indonesia. The combination of maps, photos, graphics info as well as narration provides complete information including its spatial distribution. The strategic issues are also raised for further analysis on the weaknesses of each province to meet the medium-term development plans of the central government. There are 3 main outputs produced namely Atlas Book of Resourcess and Environment Overview covering Bali-Nusatenggara edition, Papua edition, and Atlas Review Book upon resources and environment

INTEGRATION OF NATURAL RESOURCES BALANCE

Geospatial information plays an important role in the monitoring and evaluation of upstream-downstream environmental management and spatial planning. On the other hand, the activities of spatial planning and environmental management in general, require spatial instruments to evaluate the implementation of such activities. One of the instruments that can be used is the mapping of natural resources balance which is regulated by the regulation of BIG director No. 3 of 2013 in which the role and the function are further delegated to the center for Spatial mapping and Atlas of Resources Dynamics mapping.

Natural Resources balance (NSDA) is created to determine the initial potentials of resources expressed in assets and their use expressed in the liabilities and the ending balance of the resources reserves over a certain period. Using NSDA, it is possible to identify the potentials, utilization, and the balance of unused resources. These natural resources accounting components consist of the spatial balance of land resources, the spatial balance of water resources, the spatial balance of forest resources, and the spatial balance of mineral and coal resources.

The integration of natural resources balance aims to present thematic geospatial information on the balance sheet of four components of natural resources, and to integrate within components presented in the relationship analysis. This activity is carried out contractually over area of Kalimantan and Sulawesi islands.

The activity produced thematic geospatial information on the four components of resources balance sheet, and the analysis of the interrelationship between the resources describing the phenomenon of the relationship and the policy recommendation to address the phenomenon in 2 (two) regions namely Kalimantan and Sulawesi Islands. The outcome resulted from the activity was

daerah dalam pengambilan kebijakan terkait pengelolaan sumber daya alam. Dengan demikian, upaya monitoring dan evaluasi pengelolaan lingkungan dapat terlaksana dengan baik.

PEMBINAAN IGT

A. Asistensi dan Supervisi Tata Ruang

BIG berperan serta secara aktif dalam penyelesaian permasalahan penataan ruang. Permasalahan yang dihadapi saat ini umumnyas adalah penyusunan RDTR serta petanya. Selain itu daerah juga sudah mulai melakukan review terhadap RTRW nya.

Selain itu masalah terkait pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang juga memerlukan perhatian serius. Setiap permasalahan penataan ruang akan terkait pada aspek spasial yang bermuara pada peta. Untuk itu diperlukan kegiatan koordinasi, asistensi dan supervise dalam penyelesaian perpetaan dalam tata ruang.

Sasaran kegiatan adalah penyelesaian permasalahan penataan ruang, baik penyelesaian review RTRW, penyelesaian RDTR serta konflik penataan ruang. Ruang lingkup kegiatan penataan ruang di pusat berupa penyusunan RTR KSN serta reviewnya, penyusunan dan review RTRW Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta penyusunan RDTR seluruh Indonesia. Koordinasi, asistensi dan supervisi yang dilakukan pada aspek perpetaannya.

Output kegiatan berupa 26 dokumen laporan hasil asistensi dan supervisi pemetaan tata ruang. Selama tahun 2016, PPTRA membantu beberapa pemerintah daerah yang terbagi dalam beberapa region dalam penyelesaian dalam pembuatan peta dasar untuk pembuatan Peta RDTR. Bantuan itu dilaksanakan untuk 12 BWP (Bagian wilayah Perencanaan) yang tersebar di beberapa Kab/ Kota di Indonesia, yaitu :

1. Kabupaten Tebo (2 BWP), 2 scene citra satelit
2. Kabupaten Barito Kuala (3 BWP), 1 scene citra satelit
3. Kota Pekalongan (4 BWP), 1 scene citra satelit
4. Kabupaten Bima (2 BWP), 2 scene citra satelit
5. Kabupaten Wakatobi (1 BWP),1 scene citra satelit

an input for the central and local governments in making a natural resources management policy. Thus, monitoring and evaluation on environmental management could be implemented well.

IGT MENTORING

A. Assistance and Supervision of Spatial Arrangement

BIG participates actively in addressing spatial planning challenges. The today's challenges are generally the arrangement of the RDTR and its map. In addition, the region has also started to review the RTRW.

Furthermore, the challenges related to space utilization and spatial control also require intense attention. Each spatial challenge will be related to the spatial aspect that originally comes from a map. Coordination, assistance and supervision therefore are required to deal with the spatial mapping challenges.

The targets of the activity are completion of the spatial planning issues including completion of RTRW review, RDTR, and spatial planning conflicts. The scope of the spatial planning activities in national level is arrangement of RTR KSN and its review, arrangement and review of provincial, district and city RTRW, and the preparation of RDTR throughout Indonesia. Coordination, assistance and supervision are done on the mapping aspect.

The activity produced 26 documents of assistance report and 16 documents of the supervision result on spatial mapping. During the year of 2016, PPTRA assisted several local governments that were divided into several regions in creating a basic map for a RDTR Map. The assistance was done in 12 BWP (Section of Planning) spreading out in several districts / cities in Indonesia, namely:

1. Tebo District (2 BWP), 2 satellite image scenes

2. Barito Kuala District (3 BWP), 1 satellite image scene

3. Pekalongan City (4 BWP), 1 satellite image scene

4. Bima District (2 BWP), 2 satellite image scenes

5. Wakatobi District (1 BWP), 1 satellite image scene



Survei GCP dan Uji Akurasi Peta RDTR

Pada tahun 2016, PPTRA telah melakukan sosialisasi terkait mekanisme penyusunan peta RDTR untuk seluruh wilayah Indonesia yang dibagi dalam 5 region utama yaitu :

PPTRA in 2016 conducted awereness raising activities concerning on the mechanism of RDTR map formulation for all regions in Indonesia which was divided into 5 main regions:

1. Region Sumatera dilaksanakan di Medan
2. Region Jawa Bali dan Nusa tenggara dilaksanakan di Kota Malang
3. Region Kalimantan dilaksanakan di Kota Balikpapan
4. Region Sulawesi Dilaksanakan di Kota Manado
5. Region Maluku dan Papua dilaksanakan di Kota Ambon

1. The Sumatra Region, conducted in Medan
2. Java Bali and Nusa Tenggara Region, conducted in Malang City
3. Kalimantan Region, conducted in Balikpapan City
4. Sulawesi Region, conducted in Manado City
5. Maluku and Papua region, conducted in Ambon City

Pleno untuk RDTR dan RTRW di PPTRA tahun 2016 antara lain :

Plenaries for RDTR and RTRW at PPTRA in 2016 were as follows:

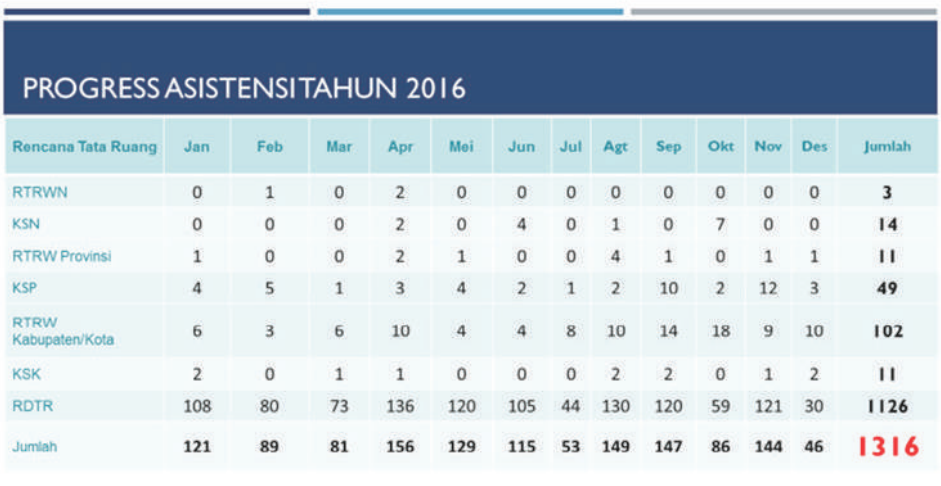
No	Lokasi	Waktu
1	RDTR Banyuwang dan KSK Pelabuhan Ketapang	13 Januari 2016
2	RTR KSP Kawasan Industri Gelang	16 Februari 2016
3	RTR KSP Kawasan Pertumbuhan Segitiga Emas	16 Februari 2016
4	RTRW Kabupaten Kepulauan Sitaro	12 April 2016
5	RTRW Kabupaten Muaro Jambi	13 April 2016
6	Revisi RTR Kabupaten Bogor	13 April 2016
7	RDTR Klambu	22 November 2016
8	RDTR Ngaringan	22 November 2016
9	RDTR Watulimo	9 Desember 2016
10	RDTR Trenggalek	9 Desember 2016
11	RTRW Provinsi Kalimantan Utara	8 Desember 2016
12	RDTR Gapura, Talango, Kalianget	18 Desember 2016
13	RTRW Provinsi Kepulauan Riau	19 Desember 2016
14	RTR KSP Agropolitan Ijen	28 Desember 2016
15	RTR KSP Agropolitan Madura	28 Desember 2016

Sampai bulan desember 2016, PPTRA telah melakukan asistensi sejumlah 1316 kali pertemuan sepanjang tahun 2016. Dari pertemuan tersebut dihasilkan sejumlah 1316 berita acara pemeriksaan setiap asistensi. Dari Proses tersebut, pada tahun 2016 dihasilkan sejumlah 45 berita acara rekomendasi perpetaan RDTR yang menyatakan bahwa sejumlah 45 area Perencanaan RDTR dari beberapa kabupaten di Indonesia sudah memenuhi kaidah perpetaan yang ditentukan oleh BIG.

Outcome kegiatan ini adalah untuk Kabupaten/Kota memenuhi kaidah sesuai standar yang ditetapkan BIG untuk peta tata ruang dan sebagai salah satu bentuk supervisi pemetaan tata ruang untuk mengetahui informasi geospasial yang digunakan oleh daerah sudah memenuhi standar pemetaan.

PPTRA, until December of 2016, conducted assistance activities through 1316 meetings throughout the year of 2016. These meetings resulted in 1316 investigation reports for the each assistance. The meetings also resulted in 45 recommendation reports on RDTR mapping in 2016, confirming that about 45 of RDTR plannings of several districts in Indonesia already met the mapping standard determined by BIG.

The outcome of the activity was to support regencies / cities to meet the standard of a spatial map set by BIG, and provided supervision on spatial mapping in order to investigate whether or not the geospatial information used by local government already met the mapping standards.



PROGRESS ASISTENSI TAHUN 2016

Rencana Tata Ruang	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Jumlah
RTRWN	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3
KSN	0	0	0	2	0	4	0	1	0	7	0	0	14
RTRW Provinsi	1	0	0	2	1	0	0	4	1	0	1	1	11
KSP	4	5	1	3	4	2	1	2	10	2	12	3	49
RTRW Kabupaten/Kota	6	3	6	10	4	4	8	10	14	18	9	10	102
KSK	2	0	1	1	0	0	0	2	2	0	1	2	11
RDTR	108	80	73	136	120	105	44	130	120	59	121	30	1126
Jumlah	121	89	81	156	129	115	53	149	147	86	144	46	1316

Asistensi dan Supervisi Pemetaan Tata Ruang Tahun 2016

TAHAPAN KONSULTASI
(ASISTENSI DAN SUPERVISI)
PETA RENCANA TATA RUANG

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

PP No 8 Tahun 2013 (Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang)
Perka BIG No 6 Tahun 2014 (Tata Cara Konsultasi Penyusunan Peta Rencana Tata Ruang)

PERMOHONAN KONSULTASI

Secara tertulis dapat dilakukan melalui fax, pos, kurir, atau email.
Ditujukan kepada **Kepala Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas BIG**, dikirimkan oleh pimpinan lembaga/institusi pemohon.
Sebaiknya dilakukan di **awal tahun pekerjaan** penyusunan, hindari mulai melakukan konsultasi setelah pekerjaan telah berlangsung/selesai.

Pada tiap pertemuan akan diberikan **Berita Acara** yang berisikan catatan dan masukan mengenai perbaikan dan hal yang harus diselesaikan untuk ditunjukkan dalam pertemuan selanjutnya.

VERIFIKASI STATUS PERDA

- Dilakukan verifikasi apakah Rencana Tata Ruang pada hirarki di atasnya telah ditetapkan sebagai Peraturan Daerah.
- Hal ini dimaksudkan untuk menjaga konsistensi Pola dan Struktur ruang antar hirarki perencanaan.

PEMERIKSAAN SUMBER DATA

- Sumber Data yang dimaksud adalah RBI / Citra / Foto Udara.
- Dipastikan memakai peta Rupabumi Indonesia sebagai dasar.
- Jika diperlukan *updating* RBI atau jika RBI belum tersedia, maka diperlukan citra / foto udara yang sesuai spesifikasi dan standar pengolahan dari BIG.

PEMERIKSAAN PETA DASAR

Dilakukan verifikasi sesuai dengan ketentuan dan spesifikasi pembuatan / penggambaran Peta Dasar, yang meliputi masing-masing unsur:
Jaringan Jalan, Bangunan, Penutup Lahan, Tubuh Perairan, Garis Pantai, Kontur, Batas Wilayah, Nama Unsur Rupabumi / Toponim.

PEMERIKSAAN PETA TEMATIK

- Dilakukan verifikasi mengenai kesesuaiannya dengan Peta Dasar.
- Sesuai dengan ketentuan dan spesifikasi pembuatan Peta Tematik terkait.
- Cek kelengkapan Peta Tematik yang sesuai dengan peraturan perundangan.

PEMERIKSAAN PETA RENCANA

- Dilakukan verifikasi mengenai kesesuaiannya dengan peta dasar.
- Klasifikasi pola ruang harus sesuai peraturan perundangan.
- Aspek perencanaan harus tertuang dalam pola ruang dan struktur ruang.
- Terpenuhinya kepentingan stakeholder dalam perencanaan.
- Sesuai dengan ketentuan pemetaan dalam peraturan perundangan.

PEMERIKSAAN KESESUAIAN PETA RENCANA & RAPERDA

Peta Rencana dan naskah dalam Peraturan Daerah adalah satu kesatuan, harus sinkron antar keduanya.

PEMERIKSAAN LAYOUT PETA

Dilakukan verifikasi mengenai:
- Aspek kartografis simbolisasi dan pewarnaan sesuai ketentuan.
- Tata letak peta sesuai standar dan ketentuan.

PENERBITAN SURAT REKOMENDASI

Sebelum Rapat Pleno dilangsungkan, dipastikan semua peta telah terverifikasi, dan data spasial sudah terstruktur secara rapi.
Rapat Pleno merupakan pemberian **Surat Rekomendasi** aspek perpetaan dihadiri oleh BIG dan Pemerintah Daerah sebagai pemohon Konsultasi.
Surat Rekomendasi diterbitkan oleh **Kepala Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas BIG.**

KONSULTASI TATAP MUKA

- Mengunjungi Pusat PTRA BIG setelah terjadi kesepakatan penjadwalan.
- Pemohon akan diterima dalam sebuah ruangan konsultasi.

PROSES INTERAKSI DALAM SISTEM KONSULTASI TATAP MUKA :
Pemberian data, asistensi dan supervisi

Akan diterbitkan **Berita Acara** setelah konsultasi dilaksanakan sesuai progres & catatan-catatan perbaikan yang harus dikerjakan.

KONSULTASI ONLINE

- Melakukan pendaftaran Akun, akan diverifikasi berdasarkan surat permohonan
- Login ke dalam Sistem Konsultasi Online vikontarung.big.go.id
- Pemohon melakukan penjadwalan

PROSES INTERAKSI DALAM SISTEM KONSULTASI ONLINE :
Upload Data, Video call* & *Chat, dan Share screen* dalam proses asistensi & supervisi
*(share screen adalah fitur untuk dapat melihat layar komputer antar kedua pihak, BIG dan Pemda)

Akan diterbitkan **Berita Acara** dan **Report** setelah konsultasi dilaksanakan sesuai progres & catatan-catatan perbaikan yang harus dikerjakan.

PEMANFAATAN INFORMASI GEOSPASIAL UNTUK PENGEMBANGAN WILAYAH



Regulasi, Koordinasi, Produksi, Distribusi, Penyimpanan, Kelembagaan, SDM, Pembiayaan, dll

1. Sistem Referensi Spasial
   - Kerangka Dasar H/V
   - Data Gaya Berat
   - Pasang Surut Laut
2. Standar, Norma, Prosedur, Mekanisme
3. SDM Bersertifikat

Metode Akuisisi Data/Survei
- Survey Teresterial
- Penginderaan Jauh
- Foto Udara
- Citra Satelit Orthorektifikasi
- Survey Multiteam
- dll

PETA DASAR
- Peta RBI
- Peta Topografi
- Ortho Image
- Peta Bathimetri
- Peta Oseanografi
- Peta Pertanahan
- dll

PETA TEMATIK

Lereng, Geologi, Sistem Lahan, Tanah, DAS dan SubDAS, Sumberdaya Air, Zona Agroklimat, Penggunaan Lahan. Kesesuaian/ kemampuan Lahan, Kebencanaan, Pesisir dan Laut, Ekoregion, Status Lahan, Demografi, PLP2B, Neraca SDA , DLL

PEMANFAATAN IG

ANALISIS PENGEMBANGAN WILAYAH

PENGEMBANGAN WILAYAH

MENJAGA MOMENTUM PERTUMBUHAN WILAYAH

MENINGKATKAN KINERJA PUSAT- PUSAT PERTUMBUHAN WILAYAH

PENGEMBANGAN WILAYAH DIARAHKAN UNTUK MENCIPTAKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKELANJUTAN DAN INKLUSIF

ORIENTASI PENGEMBANGAN WILAYAH DIARAHKAN PADA PENINGKATAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT DI SELURUH WILAYAH

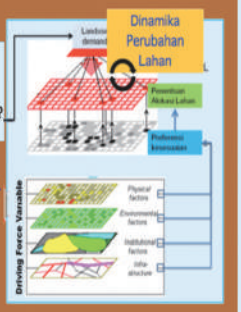
PENDEKATAN SISTEM DINAMIKA

LINGKUNGAN

SOSIAL EKONOMI

SEBERAPA LUAS KEBUTUHAN EKSPANSI LAHAN POTENSIAL?

DIMANA LOKASI EKSPANSI LAHAN POTENSIAL?



PETA RTRW

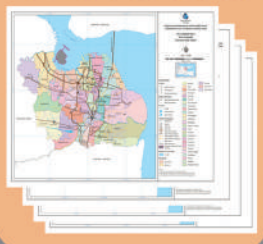


MODEL DINAMIKA SPASIAL

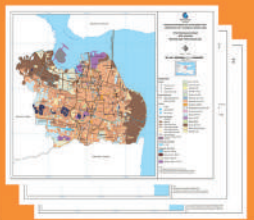
DAMPAK TERHADAP NILAI-NILAI SOSIAL DAN EKONOMI SERTA PADA JASA LINGKUNGAN

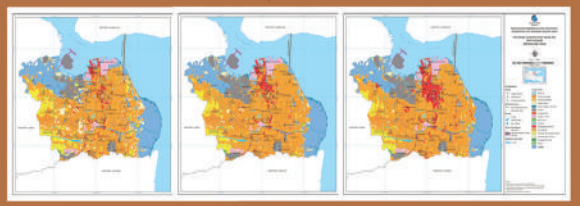
PENDEKATAN MODEL SPASIAL

PETA DASAR



PETA TEMATIK





SKENARIO SPASIAL PENGEMBANGAN WILAYAH DARI PEMBANGUNAN PELABUHAN TELUK LAMONG

ATLAS

Media Kecerdasan Spasial Lintas Generasi

ATLAS merupakan media informasi geospasial yang digunakan untuk memahami wilayah nasional, regional, dan dunia.



Pemahaman ATLAS

ATLAS adalah kombinasi data geospasial yang disusun secara sistematik dan koheren yang menampilkan area khusus dengan satu atau lebih tema geografis, berdasarkan tujuan khusus dengan disertai narasi dan info grafis terkait



Manfaat ATLAS

kita mendapatkan pemahaman terkait lokasi, jarak, luas, dan interkoneksi dari berbagai objek atau fenomena sehingga akan terbentuk kecerdasan spasial dalam memahami ruang muka bumi.

Keunikan Penyajian ATLAS

ATLAS mempunyai keunikan dalam penyajiannya karena dilengkapi dengan narasi, foto, video, dan animasi

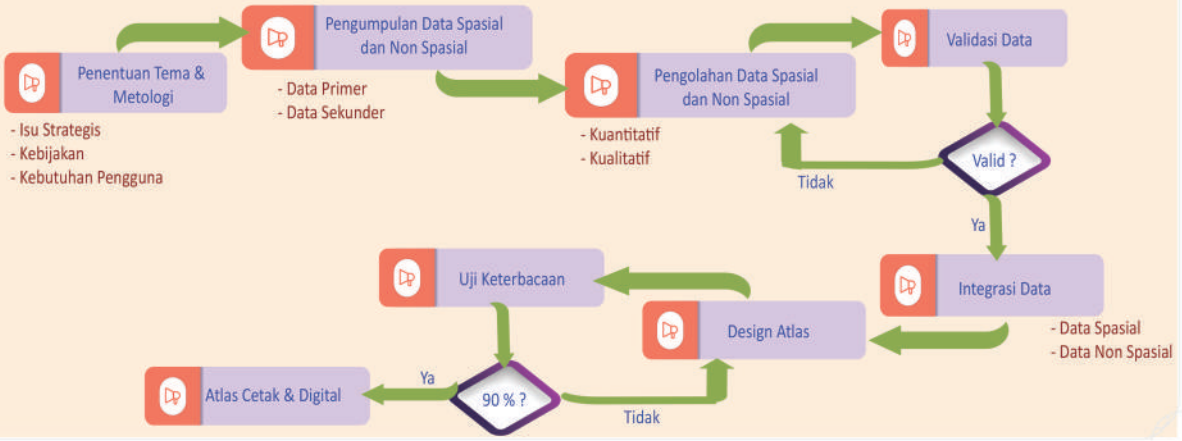
ATLAS dapat berupa atlas cetak dan atlas digital. Media ini mudah diperoleh dan dibaca oleh lintas generasi dari berbagai kalangan, mulai dari usia dini sampai dewasa, bahkan untuk kalangan disabilitas netra

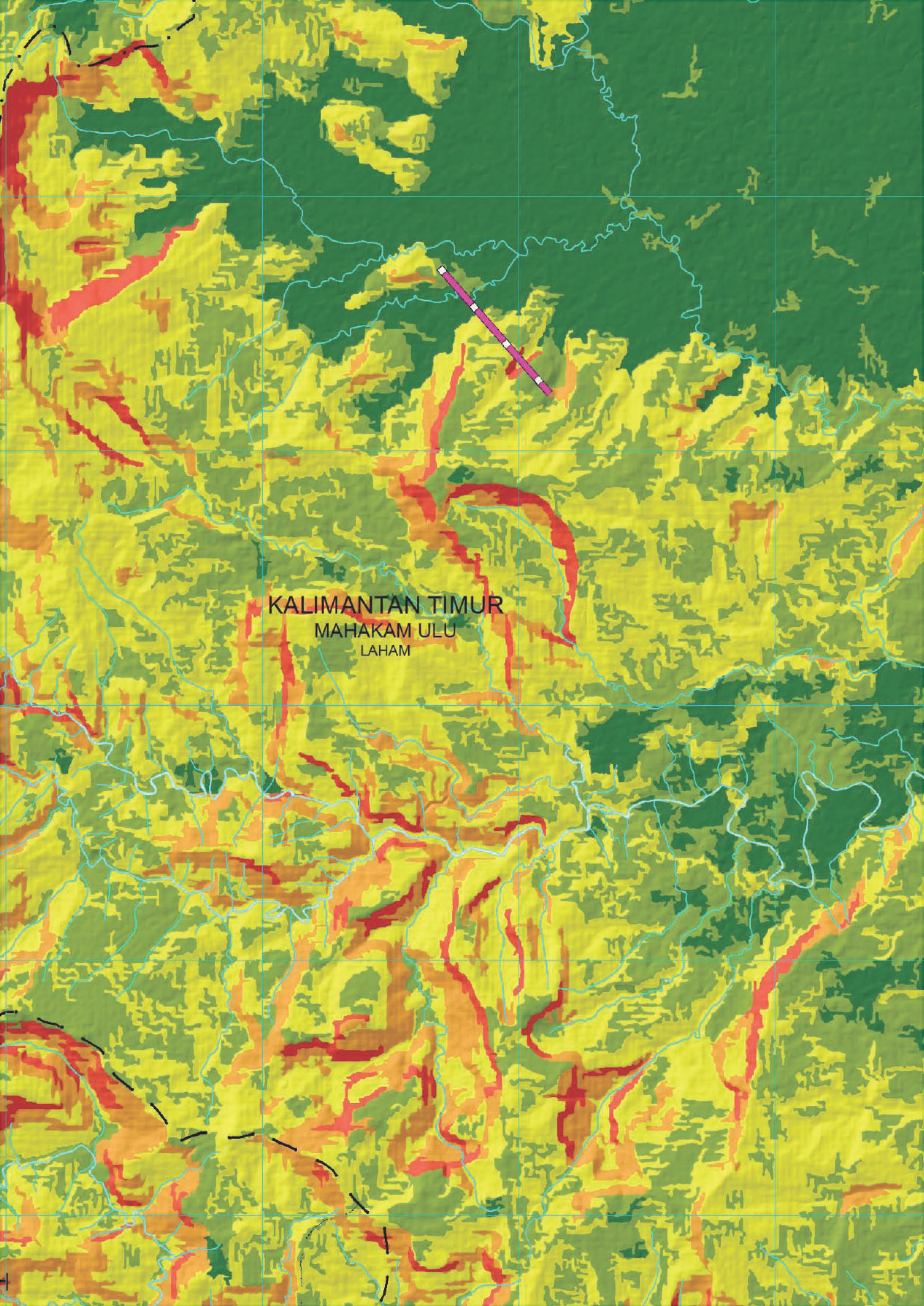
Dasar Hukum Pembuatan ATLAS

UU No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (IG) mengamanatkan bahwa salah satu bentuk penyajian IG adalah A T L A S



Langkah-Langkah Pembuatan ATLAS




KALIMANTAN TIMUR
MAHAKAM ULU
LAHAM

INFRASTRUKTUR INFORMASI GEOSPASIAL

INFRASTRUCTURE GEOSPATIAL INFORMATION



Penyelenggaraan infrastruktur informasi geospasial meliputi pembinaan simpul jaringan di kabubaten/kota, pembangunan dan pengembangan PPIDS, pembangunan metadata simpul jaringan pusat, provinsi, kabupaten/ kota, Data Center BIG menuju ISO 27001:2005, pembangunan GSCC, dan Rancangan Standar Nasional Indonesia.

The implementation of geospatial information infrastructure includes the coaching of network nodes in the districts/municipalities, Development PPIDS programs, the development of network node metadata on the level of national, provincial, and district/municipality, BIG data center toward ISO 27001: 2005, the GSCC development, and the Draft of Indonesia National Standards.

Informasi Geospasial Dasar
Informasi Geospasial Tematik
Infrastruktur Informasi Geospasial
Sekretaris Utama
Acara BIG



PENGELOLAAN DAN PENYEBARLUASAN INFORMASI GEOSPASIAL

Hasil Penyelenggaraan Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial meliputi kegiatan penyimpanan, pengamanan, penyebarluasan data dan informasi, serta penggunaan informasi geospasial. Pada tahun 2016 kegiatan ini diwujudkan dalam 10 kegiatan, yaitu:

A. Penyediaan Leased Line – VPN (Virtual Private Network)

Tujuan dari kegiatan ini adalah menyediakan layanan komunikasi dan pengelolaan data yang mumpuni untuk mendukung fungsi BIG sebagai Simpul Jaringan Data Spasial maupun Penghubung Simpul Jaringan Data Spasial Nasional, sesuai amanat UU Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial dan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN).

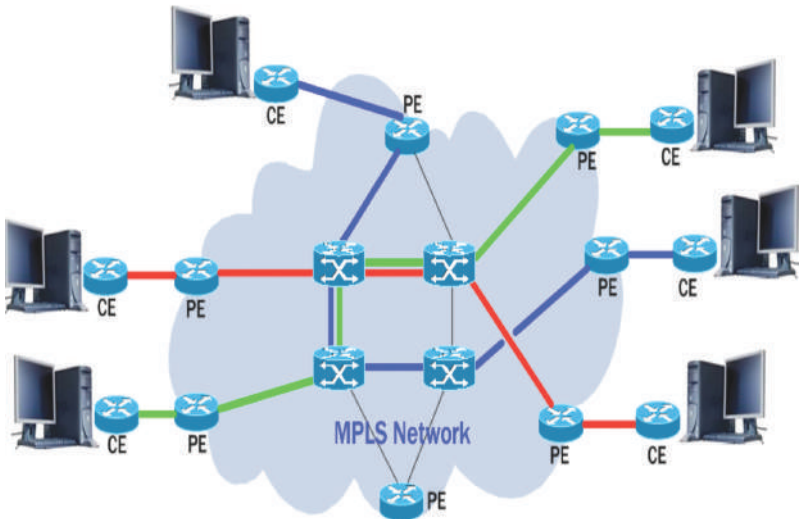
Sebagai solusi untuk menciptakan jalur komunikasi yang aman, Badan Informasi Geospasial menggunakan metode VPN (*Virtual Private Network)* dimana jalur koneksi antar node simpul jaringan geospasial termasuk ke penghubung simpul jaringan akan melalui jalur komunikasi yang telah terenkapsulasi dan pengadaan koneksi internet dilakukan melalui sewa jasa *leased line (dedicated)*.

The results of the Management and Distribution of Geospatial Information include the activities of storage, security, dissemination of data and information, and the use of geospatial information. In 2016 this activity is realized in 10 activities, namely:

A. Provision of Leased Line - VPN (Virtual Private Network)

The purpose of this activity is to provide a powerful data communication and management service to support BIG function as Spatial Data Network Node and Node Spatial Data Network Connector, as mandated by Law Number 4 Year 2011 on Geospatial Information and Presidential Regulation Number 27 Year 2014 about Information Network National Geospatial (JIGN).

As a solution to create a secure communication path, the Geospatial Information Agency uses the VPN (Virtual Private Network) method where the connection path between the node nodes of the geospatial network including to the network node connector will be through the encapsulated communication path and the procurement of internet connection is done through leased line lease (dedicated).



B. Peningkatan Kapasitas Perangkat Penyimpan Data (Storage)

Dalam rangka meningkatkan fungsi layanan dan operasionalisasi kegiatan IG Terpadu dan Cloud Computing terkait kesediaan storage/server serta menjawab kebutuhan akan akses data dan informasi geospasial yang tersimpan di Data Center BIG, maka dilakukan peningkatan kapasitas perangkat storage. Kegiatan ini dilakukan agar Data Center BIG memiliki sistem storage yang handal, aman, terpercaya dan dapat mendukung tugas pokok PPIG di samping kegiatan IG Terpadu dan Cloud Computing.

C. Cloud Computing

Cloud Computing bertujuan untuk menyediakan infrastruktur teknologi dan komunikasi informasi geospasial dalam bentuk service. Hal ini diharapkan dapat membantu Simpul Jaringan Data Spasial yang belum mempunyai infrastruktur yang memadai, sehingga tetap dapat melakukan pengelolaan dan penyebarluasan informasi geospasial.

B. Capacity Building of Storage Devices

In order to improve the service function and operationalization of Integrated IG and Cloud Computing activities related to the availability of storage / server and to answer the need for access to geospatial data and data stored in BIG Data Center, the capacity of storage devices is increased. This activity is carried out for BIG Data Center to have a reliable, secure, reliable storage system and can support the main task of PPIG in addition to Integrated IG and Cloud Computing activities.

C. Cloud Computing

Cloud Computing aims to provide the infrastructure of geospatial information technology and communications in the form of service. This is expected to help the Spatial Data Network Nodes that do not have adequate infrastructure, so they can still manage and disseminate geospatial information.



D. Penyusunan Cetak Biru dan Roadmap Sistem Informasi dan Teknologi Informasi Penyelenggaraan IG tahun 2016-2021

Tujuan utama dari penyusunan dokumen ini adalah tersedianya dokumen sebagai pedoman untuk Identifikasi Kebutuhan Bisnis, Teknologi dan Best practice, Tren Teknologi, Analisis Kesenjangan terhadap Data Center Facility, Network, Security, Server, Storage, Sumber Daya Manusia (SDM), Organisasi, Pemetaan Data Center dan Inisatif Pekerjaan Tahun 2017-2021.

E. Web e-Ticketing

Pembangunan Web E-Ticketing layanan Helpdesk yang meliputi kajian tata kelola manajemen layanan teknologi Informasi serta pengembangan aplikasi Helpdesk sebagai upaya peningkatan layanan publik, pengelolaan insiden dan permasalahan, serta layanan TI baik di internal BIG maupun dalam National Spatial Data Infrastructure (NSDI).

F. Sistem Informasi Geospasial Terpadu (Sistem IG Terpadu)

Sistem IG Terpadu adalah suatu sistem tata kelola penyelenggaraan IG dimana dapat memfasilitasi pengumpulan data, pengolahan data, pengelolaan data, penyebarluasan data dan informasi serta penggunaan IG pada berbagai bidang dan fungsi. Arsitektur Sistem IG Terpadu memenuhi prinsip manajemen data, manajemen produksi data & informasi, manajemen publikasi data dan informasi serta manajemen geodatabase untuk pengelolaan data. Informasi

D. Preparation of Blueprint and Roadmap Information Systems and Information Technology IG Performance 2016-2021

The main objectives of this document are the availability of documents as a guideline for the Identification of Business Needs, Technology and Best Practices, Technology Trends, Gap Analysis of Data Center Facility, Network, Security, Server, Storage, Human Resources (SDM), Organization, Data Mapping Center and Employment Initiative Year 2017-2021.

E. Web e-Ticketing

Web Development E-Ticketing Helpdesk services covering governance management of information technology services management and development of Helpdesk applications as an effort to improve public services, incident and problem management, and IT services both in BIG internal and in National Spatial Data Infrastructure (NSDI).

F. Integrated Geospatial Information System (Integrated IG System)

Integrated IG System is an IG governance system where it can facilitate data collection, data processing, data management, dissemination of data and information and the use of IG in various fields and functions. Integrated IG System Architecture meets the principles of data management, data & information production management, data and information publication management and geodatabase management for data management. The information

yang dihasilkan dari sistem tersebut harus dapat digunakan oleh semua level dan tipe pengguna IG, mulai dari pengguna mobile, desktop, aplikasi yang menggunakan web services IG, portal sebagai media kolaborasi informasi dan cataloging informasi, web services sebagai konten informasi serta peta kertas maupun digital sebagai produk informasi peta.

Kajian basisdata 3D skala besar telah dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan banyak pengguna akan data dan IG yang bersifat 3D. Basisdata ini dibangun dari skema-skema yang mengacu pada ISO 19107:2003 – Spatial Schema. ISO 19107 menggambarkan skema untuk geometri dan topologi hingga 3D.

G. Penyimpanan dan Pengamanan Data dan Informasi Geospasial

BIG memiliki visi untuk mewujudkan penyelenggaraan IG yang andal, terintegrasi dan mudah dimanfaatkan pada tahun 2025. Penyelenggaraan IG yang andal harus dilengkapi dengan sistem pengamanan yang kuat agar data yang tersimpan tidak hilang, tidak rusak dan tidak disalahgunakan. Salah satu kegiatan dalam penyelenggaraan IG yang diperlukan untuk mewujudkan hal ini adalah kegiatan penyimpanan dan pengamanan data dan informasi geospasial. Kegiatan tersebut berupa cara menempatkan data dan informasi geospasial pada tempat yang aman dan tidak rusak atau hilang untuk menjamin ketersediaan IG.

Kegiatan penyimpanan dan pengamanan data ini meliputi kegiatan pemeliharaan data foto udara, alih media data analog menjadi data digital, dan pembuatan sistem watermarking data dan informasi geospasial. Pembuatan sistem watermarking dengan kontrol kriptografi pada data dan informasi geospasial sangat dibutuhkan untuk mendukung UU Nomor 4 tahun 2011 tentang kebijakan One Map Policy, sehingga data dasar yang diberikan memiliki nilai kepercayaan untuk konsumen dalam menggunakan data.

generated from the system should be able to be used by all levels and types of IG users, ranging from mobile users, desktops, applications using IG web services, portals as collaborative media information and cataloging information, web services as information content as well as paper and digital maps as a map information product.

Large-scale 3D database review has been implemented to meet the needs of many users of 3D data and IG. This database is built from schemes that refer to ISO 19107: 2003 - Spatial Schema. ISO 19107 illustrates schematics for geometry and topology up to 3D.

G. Storage and Security of Geospatial Data and Information

BIG has a vision to realize a reliable, integrated and easy to use IG in 2025. Reliable IG implementation must be equipped with a strong security system to keep the data from being lost, undamaged and not misused. One of the activities in the implementation of IG necessary to realize this is the storage and security of data and geospatial information. The activity is a way of placing geospatial data and information in a safe place and not damaged or lost to ensure the availability of IG.

Data storage and security activities include the maintenance of aerial photography data, over analog data media into digital data, and the manufacture of watermarking system data and geospatial information. The creation of a watermarking system with cryptographic controls on geospatial data and information is needed to support Law No. 4 of 2011 on the One Map Policy policy, so that the given basic data has a trust value for the consumer.



FOTO KEGIATAN Kegiatan Penyelenggaraan Evaluasi Kualitas Informasi Geospasial

Hasil kegiatan ini meliputi :

- Sensus data peta dasar sebanyak 26.382 lembar, sedangkan untuk peta tematik seluruhnya 4.484 lembar.
- Sensus foto udara sebanyak 127.628 lembar meliputi 86.245 lembar, dan 41.383 lembar diaspositif .

Kegiatan alih media untuk diaspositif, telah dilakukan pemulihan terhadap 1884 ekspos, scanning sebanyak 4090 ekspos, mozaik 2206 ekspos, dan koreksi geometric 2180 ekspos

Dalam penyusunan kajian pengamananan data dan informasi geospasial digunakan metodologi atas 4 langkah utama, yaitu Studi literatur, Penilaian resiko dan penentuan kontrol ISO, Analisis Infrastruktur Keamanan TI dan rekomendasi setiap kontrol ISO.

H. Penjaminan Kualitas DG dan IG

Dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial (UU IG) disebutkan bahwa pengguna IG berhak mengetahui kualitas IG yang diperolehnya dan penyelenggara IG wajib memberitahukan kualitas setiap IG yang diselenggarakannya dalam bentuk metadata dan/atau riwayat data. Implikasinya BIG sebagai penyelenggara IG harus melakukan proses penjaminan kualitas agar kualitas IG dapat diketahui dan diberitahukan kepada pengguna IG terkait.

Sebagai bagian dari proses manajemen mutu, Quality Assurance (QA) merupakan salah satu tahapan agar produk yang dihasilkan memiliki nilai tambah baik bagi produsen, maupun penggunanya. Tahap lain dari manajemen mutu ialah Quality Control (QC) dan Quality Evaluation (QE). Penjaminan kualitas dikeluarkan dalam bentuk kesimpulan penjaminan atau Statement Penjaminan. Dalam menentukan kesimpulan penjaminan dan evaluasi kualitas mengacu dapat pada pedoman yang terdapat dalam SNI/ISO 19157;2015.

I. Government Resource Planning (GRP)

Tujuan kegiatan pengembangan GRP tahun 2016 adalah untuk mengembangkan fungsi-fungsi pada Government Resource Planning (GRP) yang terintegrasi dengan database dan aplikasi GRP yang sudah ada sehingga terwujud optimalisasi penggunaan informasi birokrasi yang dapat membantu proses pengambilan keputusan secara tepat dan cepat. Pengembangan yang dimaksud mencakup modul analisis beban kerja, manajemen jabatan dan manajemen talenta.

The results of this activity include:

- *Census data base map as much as 26,382 sheets, while for thematic map all 4,484 sheets.*
- *The aerial census of 127,628 sheets includes 86,245 sheets, and 41,383 sheets are positively inserted.*

Media transfer activity for positives, recovery of 1884 exposures, scanning of 4090 exposures, 2206 exposures mosaic, and geometric correction 2180 exposures

In the preparation of the study of data security and geospatial information, the methodology was used for 4 main steps, namely literature study, risk assessment and ISO control determination, IT Security Infrastructure Analysis and recommendation of each ISO control.

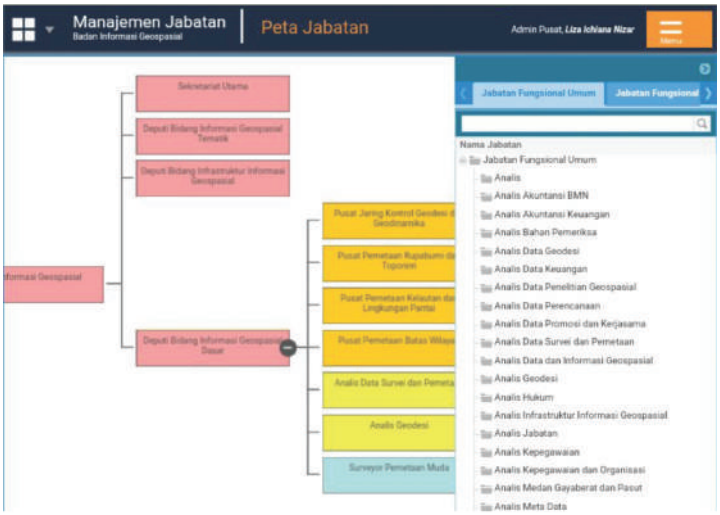
H. Quality Assurance DG and IG

In article 49 of Act No. 4 of 2011 on Geospatial Information (IG Law) it is mentioned that IG users have the right to know the quality of IG they obtain and IG operators are obliged to notify the quality of any IG it conducts in the form of metadata and / or data history. The implication of BIG as IG provider must perform quality assurance process so that IG quality can be known and notified to related IG users.

As part of the quality management process, Quality Assurance (QA) is one of the stages in order that the resulting product has added value for both producers and users. Other stages of quality management are Quality Control (QC) and Quality Evaluation (QE). Quality assurance is issued in the form of guarantee conclusion or Guarantee Statement. In determining the conclusion of guarantee and evaluation of quality refers to the guidance contained in SNI / ISO 19157; 2015.

I. Government Resource Planning (GRP)

The purpose of GRP development activities in 2016 is to develop functions in the Government Resource Planning (GRP) that integrates with existing GRP database and application so as to realize the optimum use of bureaucratic information that can assist the decision making process appropriately and quickly. The development includes workload analysis module, management of position and talent management.



J. PALAPA versi 3

PALAPA v3 merupakan suatu sistem yang dibangun dengan opensource dengan menyesuaikan pedoman SNI dan peraturan perundangan, meliputi fasilitas pengolahan dan penyimpanan data serta penyebarluasan dan penggunaan Informasi Geospasial. PALAPA terintegrasi dan tersinkronisasi dengan Ina-Geoportal yang merupakan portal seluruh Simpul Jaringan Infomasi Geospasial di Indonesia. Kemudahan integrasi ini akan memperkaya portal nasional dengan data/informasi geospasial yang valid dan akurat.

Aplikasi PALAPA versi 3 ini sudah diujicoba untuk 5 (lima) pemerintah daerah yaitu Simpul Jaringan Provinsi Slawesi Utara; Simpul Jaringan Provinsi Jawa Timur; Simpul Jaringan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Simpul Jaringan Kemenkoinfo; dan Simpul Jaringan Kabupaten Buleleng.

J. PALAPA version 3

PALAPA v3 is a system that is built with opensource by adjusting the guidelines of SNI and legislation, covering processing facilities and data storage and dissemination and use of Geospatial Information. PALAPA is integrated and synchronized with Ina-Geoportal which is the portal of the Geospatial Information Network node in Indonesia. The ease of integration will enrich the national portal with valid and accurate geospatial data / information.

This PALAPA version 3 application has been tested for 5 (five) local governments namely Network Nodes of North Sulawesi Province; Network Node East Java Province; West Nusa Tenggara Network Node, Kemenkoinfo Network Node; and Network Node of Buleleng Regency.



K. Konektivitas Simpul Jaringan dengan Penghubung Simpul Jaringan

K. Network Node Connectivity with Network Node Connector

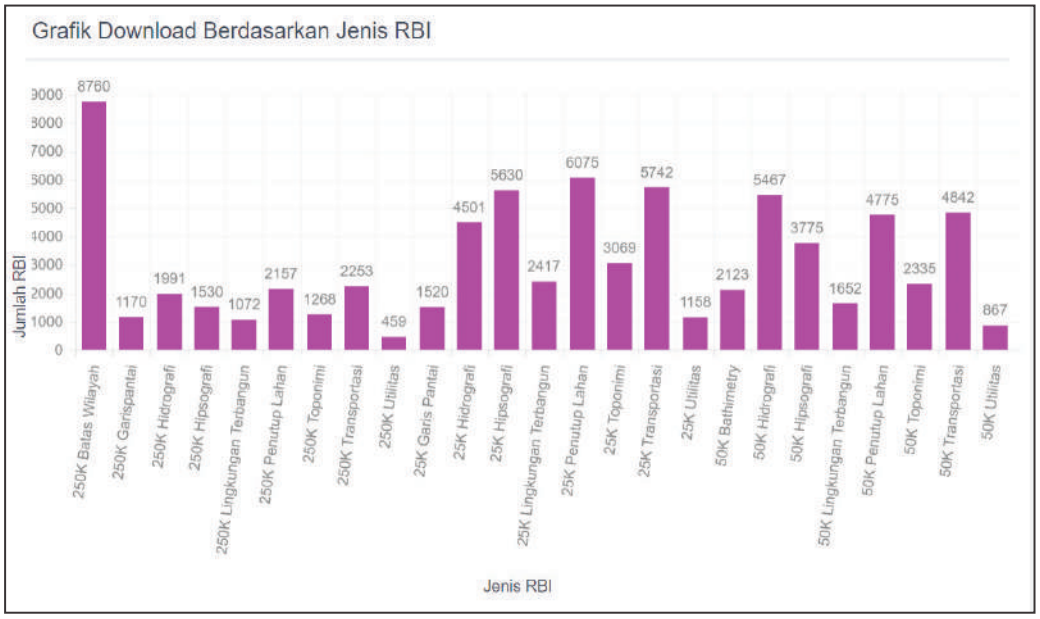
	Target	Connected	To Do	Daftar
Kementerian/ Lembaga	58	28	30	KemParEkraf, Kemhub, KemDagri, LAPAN, Kemtan, KemenPU, KKP, Kemenhut dan LH, Kemen ESDM , BPS, Kemen Agraria dan Tata Ruang, BIG, BNN, Kemen Kes, KemenKomInfo, KemenPerin, DJP–KemenKeu, Kemen PPN, Kemenhan, Kemen PDT, KPU, Polri, Dittop AD, BNPB, Basarnas, BMKG, Kemendiknas, Kemenko Ekonomi
Provinsi	34	21	13	Prov. Sumsel, Prov. Kalsel, Prov. Sulsel, Prov. Jateng, Prov. Bali, Prov. Papua Barat, Prov. Sumut, Prov. Riau, Prov. Lampung, Prov. Banten, Prov. DIY, Prov. Kaltim, Prov. Jabar, Prov. Kalteng, Prov. Sulteng, Prov. Jambi, DKI Jakarta, Prov. Jatim, Prov. NTB, Prov. Aceh, Prov. Sumatera Barat
Kabupaten/ Kota	500	20	480	Kab. Bojonegoro, Kab. Sleman, Kota Depok, Kab.Sumbawa, Kab. Tangerang, Kota Mojokerto, Kab. Sampang, Kab. Parigimoutong, Kab. Banyuwangi, Kab. Kulonprogo, Kab. Pasaman Barat, Kota. Bau-bau, Kab. Lubuklinggau, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Manado, Kota Balikpapan, Kota Bontang, Kab. Lebong, Kab. Aceh Besar

L. Data statistik pelayanan Ina-Geoportal

Data statistic untuk layanan Ina-Geoportal (periode Maret s.d Oktober 2016) menunjukkan data Batas Wilayah skala 1:250.000 merupakan data yang paling banyak didownloa (Gambar 2).

L. Ina-Geoportal service statistical data

Statistical data for Ina-Geoportal services (period March to October 2016) shows 1: 250,000 area boundary data being the most heavily data (Figure 2).

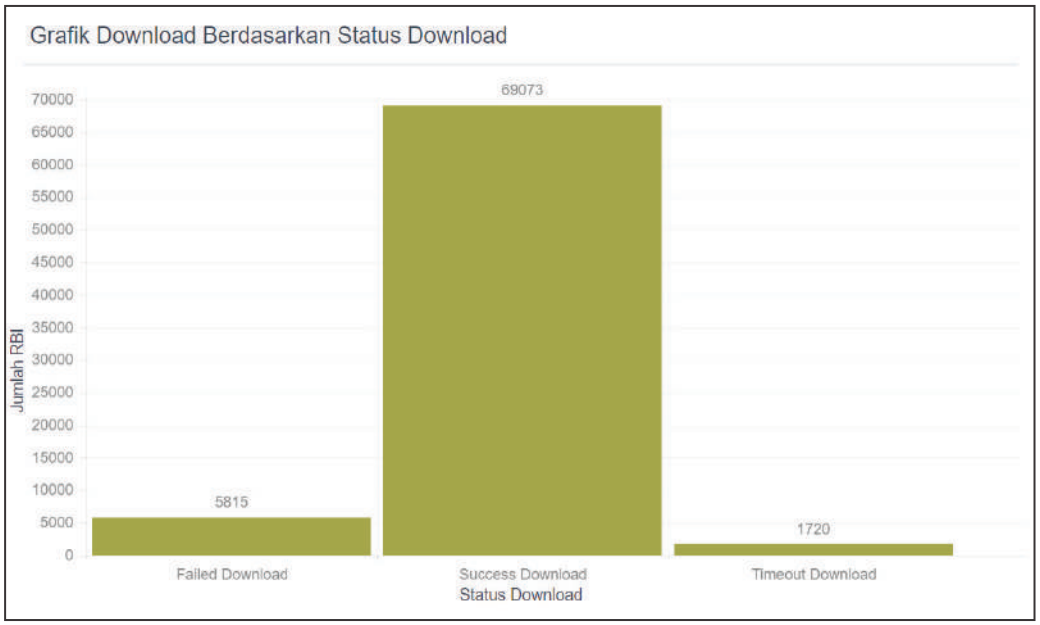


Gambar 2. Grafik jenis data per skala dan jumlah download berdasarkan data Maret s.d Oktober 2016)

Dari data periode Maret s.d Oktober 2016, tingkat kesuksesan download data di Ina-Geoportal adalah 90%, seperti terlihat pada Gambar 3.

From data from March to October 2016, the data download success rate in Ina-Geoportal is 90%, as shown in Figure 3.

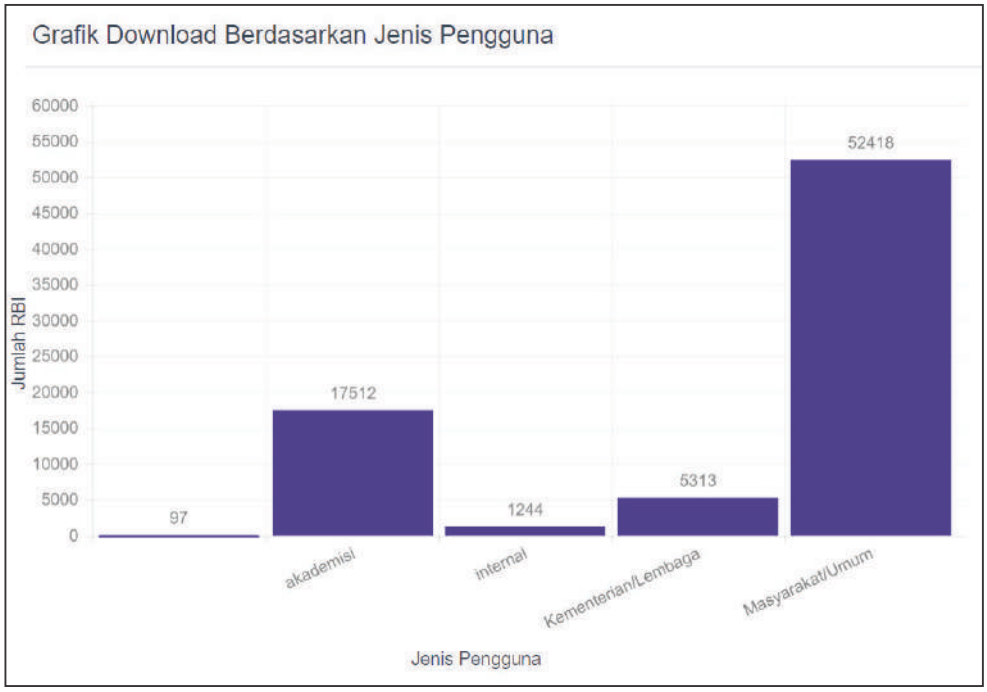
	Jumlah download	Persentase
Failed Download	5.815	8 %
Success Download	69.073	90 %
Timeout Download	1.720	2 %



Gambar 3. Grafik kesuksesan download data di Ina-Geoportal berdasarkan data Maret s.d Oktober 2016

Sedangkan jenis user yang melakukan akses ke Ina-Geoportal dalam periode Maret s.d Oktober 2016, didominasi oleh masyarakat umum dan akademisi (lihat Gambar 4)

While the types of users accessing Ina-Geoportal in the period March to October 2016, are dominated by the general public and academia (see Figure 4)



Gambar 4. Grafik jenis pengguna Ina-Geoportal berdasarkan data Maret s.d Oktober 2016

M. Pelayanan TIK ke K/L dan Pemerintah Daerah

Pelayanan TIK yang sudah dilakukan kepada beberapa K/L dan Pemda yaitu berupa penyediaan layanan VPN, Cloud dan instalasi Palapa

1. Pengguna layanan VPN di tahun 2016, sbb:
2. Kementerian Pertanian
3. Kementerian Pekerjaan Umum
4. Kementerian Kehutanan
5. Kementerian Lingkungan Hidup
6. Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral
7. Kementerian Kelautan dan Perikanan
8. Badan Pusat Statistik
9. Badan Pertanahan Nasional
10. Pemerintah Daerah DKI Jakarta
11. Pemerintah Daerah Jawa Barat

Pengguna layanan Cloud di tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Simpul Jaringan Pemerintah Provinsi Jawa Timur
2. Simpul Jaringan Pemerintah Kabupaten Sampang
3. Simpul Jaringan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat
4. Simpul Jaringan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

Lokasi instalasi Aplikasi PALAPA ver 2 yang dilakukan tim Pusat PPIG pada tahun 2016, yaitu :

M. TIK Services to K / L and Local Government

ICT services that have been done to several K / L and local government in the form of providing VPN services, Cloud and Palapa installation

Users of VPN services in 2016, as follows:

1. *Ministry of Agriculture*
2. *Ministry of Public Works*
3. *Ministry of Forestry*
4. *Ministry of Environment*
5. *Ministry of Energy and Mineral Resources*
6. *Marine and Fisheries Ministry*
7. *Central Bureau of Statistics*
8. *National Land Agency*
9. *Local Government of DKI Jakarta*
10. *Local Government of West Java*

Cloud service users in 2016 are as follows:

1. *Government Network Node East Java*
2. *Government Network Node Sampang District*
3. *Government Network Node Pasaman Barat Regency*
4. *Government Network Node Kulon Progo Regency*

Installation location of PALAPA ver 2 application made by PPIG Center team in 2016, that is:

No	Lokasi Simpul Jaringan	Alamat Akses
1	Provinsi Lampung	http://geospasial.lampungprov.go.id/
2	Provinsi Kalimantan Barat	http://203.24.50.142/palapa/
3	Provinsi Gorontalo	http://103.42.252.26:8080/geoserver
4	Pemerintah Kota Bekasi	http://http://180.250.98.4/
5	Kabupaten Baubau	http://geoportal.baubaukota.go.id/
6	Kabupaten Parigi Moutong	http://geoportal.parigimoutongkab.go.id/
7	Kabupaten Sampang	http://geoportal.sampangkab.go.id/

*) Catatan : status akses tahun 2016







FOTO KEGIATAN 2016









Informasi Geospasial Dasar
Informasi Geospasial Tematik
Infrastruktur Informasi Geospasial
Sekretaris Utama
Acara BIG



STANDARDISASI DAN KELEMBAGAAN INFORMASI GEOSPASIAL

Penyelenggaraan Standardisasi dan Kelembagaan Informasi Geospasial, dibagi menjadi menjadi 3 kegiatan utama yaitu:

A. Standardisasi Penyelenggaraan Informasi Geospasial

1. Penyusunan Standar Nasional Indonesia (SNI)

Standardisasi diperlukan mulai dari tahap pengumpulan atau akuisisi data geospasial sampai dengan tahap penyajian informasi geospasial. Dengan adanya standar ini akan mempermudah pertukaran data dan informasi geospasial antar instansi pemerintah maupun institusi lainnya. Selain itu melalui standar informasi geospasial diharapkan akan menjamin kualitas data dan informasi yang akan digunakan oleh para pemangku kepentingan. Oleh karena itu mengingat pentingnya standardisasi informasi geospasial, pada tahun 2016 ini Pusat PSKIG melanjutkan kegiatan Penyelenggaraan Standardisasi dan Kelembagaan Informasi Geospasial dengan output NSPK dan Dokumen Standar Terkait Penyelenggaraan Informasi Geospasial.

Daftar Dokumen Standar Penyelenggaraan Informasi Geospasial (RSNI 3):

1. RSNI ISO 19152, Informasi geografis – Model Domain Administrasi Pertanahan (Land Administration Domain Model/ LADM)
2. RSNI ISO 19125-1, Informasi geografis – Akses fitur sederhana – Bagian 1: Arsitektur umum
3. RSNI ISO/TS 19159-1, Informasi geografis – Kalibrasi dan validasi sensor dan data citra penginderaan jauh – Bagian 1: Sensor optik
4. RSNI ISO/TS 19101-2, Informasi geografis – Model referensi – Bagian 2: Citra
5. RSNI ISO 19155, Informasi geografis – Arsitektur pengidentifikasi tempat (Place Identifier/PI)

Dokumen RSNI yang masih dalam proses penyusunan (RSNI 1) adalah sebagai berikut :

The implementation of standardization and Institutional Arrangement for Geospatial Information is divided into 3 main activities, namely:

A. Standardization of Geospatial Information

1. Arrangement of Indonesia National Standard (SNI)

Standardization is required from the stage of collecting or acquiring geospatial data to the stage of presentation of geospatial information. A standard will make the exchange of geospatial data and information within and between government agencies and other institutions much easier. In addition, through a geospatial information standard, it is expected to ensure the quality of data and information that will be used by stakeholders. Therefore, in view of the importance of the geospatial information standardization, in 2016 PSKIG Center continued activities of standardization and Institutional arrangement for Geospatial Information resulting in NSPK and Geospatial Information Implementation - related Standard Documents.

A List of Geospatial Information Implementation - related Standard Documents (RSNI 3) :

1. *RSNI ISO 19152, geographic information - Land Administration Domain Model/LADM*
2. *RSNI ISO 19125-1, geographic information- simple Feature Access – Part 1 ; General Architecture*
3. *RSNI ISO/TS 19159-1, geographic information- Calibration and validation of sensors and remote sensing imagery data – part 1 : optical Sensor*
4. *RSNI ISO/TS 19101-2,Geographic Information – reference Model – Part 2 : Imagery*
5. *RSNI ISO 19155, geographic information-place identifying architecture (place identifier / PI)*

RSNI documents that are still in the process of drafting (RSNI 1) are as follows:

1. RSNI Klasifikasi penutup lahan – Bagian 2: Skala besar
2. RSNI ISO/TS 19130-2, Informasi geografis – Model sennsor citra untuk penentuan posisi – Bagian 2: SAR. InSAR, LiDAR, dan sonar
3. RSNI ISO 19153, Informasi Geografis – Model acuan digital Rights Management untuk informasi geospasial (GeoDRM)
4. RSNI ISO/TS 19139, Informasi geografis – Metadata – Penerapan skema XML

B. Pengembangan SDM dan Industri Informasi Geospasial

1. Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Informasi Geospasial

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang IG yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 331 Tahun 2013, terdiri dari 6 sub bidang yaitu Survey Terestris, Hidrografi, Fotogrametri, Penginderaan Jauh, Sistim Informasi Geografis (SIG) dan Kartografi yang terdiri dari 104 unit kompetensi dengan jenjang kualifikasi tersebar dari level 3 - level 9. SKKNI ini disusun berdasarkan tingkat pengetahuan, kemampuan dan sikap kerja seorang tenaga profesional di bidang IG. Pada tahun 2015, telah dilakukan kaji materi SKKNI bidang IG agar sesuai dengan perkembangan iptek, kebijakan pemerintah, kebutuhan industri dan pengguna, tuntutan dunia internasional dan perubahan lingkungan strategis. Selain itu terdapat usulan sub-bidang baru yaitu Geografi. Usulan sub bidang Geografi telah menghasilkan unit-unit kompetensi sampai dengan kriteria unjuk kerja. Namun pada kaji ulang SKKNI IG tahun 2016, disepakati penambahan survei kewilayahan sebagai sub bidang baru.

Harmonisasi SKKNI Bidang IG telah dilakukan di tingkat nasional maupun internasional. Di tingkat nasional, harmonisasi SKKNI IG dilakukan dengan instansi lain yang memiliki SKKNI. Harmonisasi juga dilakukan untuk menjembatani SMK dan Perguruan Tinggi untuk menyelaraskan kurikulum SKKNI IG yang telah dibuat. Harmonisasi SKKNI tingkat internasional dilakukan dengan mengirimkan delegasi ke "Mutual Recognition Agreement (MRA) Trilateral Meeting". Harmonisasi dokumen MRA on Surveying yang telah disusun dilakukan pada pertemuan Coordinating Committee on Services (CCS). Rangkaian pembahasan yang dilakukan dalam CCS diantaranya adalah pertemuan para penganggung jawab surveying di masing-masing Negara anggota ASEAN dimana Indonesia diwakili oleh BIG.

Dalam CCS surveying masuk ke dalam kelompok kerja bisnis bersama dengan keinsinyuran, arsitek dan akuntansi. Pada tahun 2016 telah dilaksanakan 3 kali pertemuan sebagai berikut:

1. The 83th ASEAN Coordinating Committee on Services (CCS) Meeting (Thailand, 24 – 30 Januari 2016)
2. The 84th ASEAN Coordinating Committee on Services (CCS) Meeting (Laos, 16 – 21 Mei 2016)
3. The 85th ASEAN Coordinating Committee on Services (CCS) Meeting (Vietnam, 27 September – 1 Oktober 2016)

1. RSNI on land cover classification – Part 2 : high scale
2. RSNI ISO/TS 19130-2, geographical information – Imagery Sensor model to determine a place –Part 2 : SAR. InSAR, LiDAR, and sonar
3. RSNI ISO 19153, geographical information - Digital Rights management reference model for geospatial information (GeoDRM)
4. RSNI ISO/TS 19139, geographical information – Metadata – XML scheme application

B. Human Resources Development and Geospatial information industry

1. Arrangement of Indonesian National Work Competency Standards (SKKNI) for the Geospatial Information Sector

Indonesian National Work Competency Standards (SKKNI) for the Geospatial information (IG) sector which has been established through the Decree of the Minister for Manpower and Transmigration No. 331 of 2013, consists of 6 sub-sectors namely Terrestrial Survey, Hydrography, Photogrammetry, Remote Sensing, Geographical Information System (GIS) and Cartography, covering 104 units of competence with the level of qualification ranging 3 to 9. The SKKNI is arranged in accordance to the level of knowledge, skills and work attitude of a professional in the IG sector. The SKKNI for the geospatial sector was reviewed in 2015 to adjust to science and technology development, government policy, industry and user needs, international requirements, and strategic environment changes. In addition, Geography was proposed as a new included sub-sector. Inclusion of the geography sub sector resulted in competence units and performance criteria in the SKKNI. Moreover, during the implementation of re-review on SKKNI IG by 2016, it was agreed to include territorial surveys as a new sub-sector.

Harmonization of the SKKNI for the IG sector has been done at national and international level. At the national level, the SKKNI for the IG sector has been harmonized with SKKNI's other institutions. Harmonization is also done to facilitate SMKs and Universities to align the new SKKNI IG curriculum. Harmonization of the SKKNI at international level was done by appointing delegation to the Mutual Recognition Agreement (MRA) Trilateral Meeting. Harmonization of the arranged document of MRA on Surveying was done at the meeting of Coordinating Committee on Services (CCS). The series of discussions undertaken in the CCS were including the meeting of the surveying officers in each ASEAN member country where Indonesia was represented by BIG.

According to CCS, surveying was included into a private working group along with engineering, architects and accounting. During 2016, three meetings had been held as follows:

1. *The 83th ASEAN Coordinating Committee on Services (CCS) Meeting (Thailand, 24 – 30 January 2016)*
2. *The 84th ASEAN Coordinating Committee on Services (CCS) Meeting (Laos, 16 – 21 May 2016)*
3. *The 85th ASEAN Coordinating Committee on Services (CCS) Meeting (Vietnam, 27 September – 1 October 2016)*

C. Penyelenggaraan Akreditasi Bidang Informasi Geospasial

Secara umum, Penilaian Kesesuaian dilaksanakan melalui dua kegiatan yaitu Akreditasi dan Sertifikasi. Pasal 56 Undang-Undang Informasi Geospasial mengamanatkan Badan Informasi Geospasial untuk melaksanakan akreditasi kepada lembaga independen atau lembaga penilaian kesesuaian yang terkait bidang informasi geospasial, sedang untuk kegiatan sertifikasi dilaksanakan oleh lembaga yang telah mendapat sertifikat akreditasi atau ditunjuk oleh Badan Informasi Geospasial.

Untuk melaksanakan amanat tersebut, Badan Informasi Geospasial menetapkan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial (Perka-BIG) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Sistem Penilaian Kesesuaian yang disempurnakan dengan Perka-BIG Nomor 10 Tahun 2016, yang salah satunya menyebutkan bahwa dalam melaksanakan akreditasi, Badan Informasi Geospasial didukung oleh Kelompok Kerja Penilaian Kesesuaian di Bidang Informasi Geospasial yang berisikan perwakilan dari akademisi, dunia usaha, dan instansi pemerintah. Pembentukan kelompok kerja ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kelompok Kerja Penilaian Kesesuaian di Bidang Informasi Geospasial (KKPK IG) yang beranggotakan 13 orang.

Agar akreditasi yang dikeluarkan oleh Badan Informasi Geospasial diakui oleh masyarakat internasional, maka dalam melaksanakan akreditasi, Badan Informasi Geospasial bekerja sama dengan Komite Akreditasi Nasional (KAN). Komite Akreditasi Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, merupakan lembaga non-struktural yang diberi tugas melaksanakan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian. Kerja sama antar dua lembaga ini kemudian diformalkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama antara Badan Informasi Geospasial dengan Komite Akreditasi Nasional Nomor: B-8.1/KA/PK/4/2016 dan Nomor: 008/BSN/MOU/IV/2016 tentang Pelaksanaan Akreditasi di Bidang Informasi Geospasial pada tanggal 8 April 2016.

D. Pengembangan Kelembagaan dan Simpul Jaringan Informasi Geospasial

1. Pendampingan Pembangunan Simpul Jaringan

Pada tahun 2016 dilaksanakan di 3 simpul jaringan K/L/P yaitu Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Kementerian Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi. Pendampingan pembangunan simpul jaringan merupakan rangkaian kegiatan dari Forum Simpul Jaringan, Bimbingan Teknis Simpul Jaringan dan Focus Group Disscussion.

2. Pembinaan Simpul Jaringan

Pada tahun 2016 dilakukan melalui kegiatan Sosialisasi Pembangunan Simpul Jaringan IG, Bimbingan Teknis Simpul Jaringan, dan Diseminasi Pembinaan Simpul Jaringan IG K/L/P. Bimbingan Teknis Simpul Jaringan dilaksanakan di Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Jawa Timur.

3. Penghargaan Simpul Jaringan

Merupakan rangkaian acara dalam Hari Ulang Tahun BIG di tahun 2016. Penghargaan simpul jaringan diberikan secara langsung oleh Menteri PPN/Bappenas Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro yang didampingi oleh Kepala BIG, Priyadi Kardono. Simpul Jaringan

C. Implementation of Geospatial Information Accreditation

In general, Conformity assessment was conducted through two activities: Accreditation and Certification. Article 56 of The Geospatial Information Law mandates the Geospatial Information Agency to apply accreditation done by independent bodies or geospatial information - related Conformity assessment bodies. Meanwhile, certification activities have to be done by an institution that has got an accreditation certificate or been designated by the Geospatial Information Agency.

To implement the mandate, the Geospatial Information agency issued the Regulation of the Head of Geospatial Information Agency (Perka-BIG) No 1 of 2016 on Conformity Assessment System enhanced by Perka-BIG No 10 of 2016. The newest Perka states that in implementing accreditation, Geospatial Information Agency is supported by the Working Group on Conformity Assessment for the Geospatial Information sector which includes representatives from academics, private sectors, and government. The working group was established through the Decree of the Head of Geospatial Information Agency No. 3 of 2016 on the Working Group for Geospatial Conformity Assessment (KKPK IG) with 13 members.

Geospatial Information Agency cooperated with the National Accreditation Committee (KAN) in issuing accreditation, in order to get the accreditation recognized by the international community. The National Accreditation Committee according to the Law No 20 of 2014 on Standardization and Conformity Assessment is a non-structural institution assigned to carry out accreditation upon Conformity assessment bodies. The cooperation between the two institutions was then formalized through the Cooperation Agreement between Geospatial Information Agency and National Accreditation Committee No: B-8.1 / KA / PK / 4/2016 and No: 008 / BSN / MOU / IV / 2016 on Accreditation Implementation in Geospatial Information Sectors on April 8, 2016.

D. Institutional and Geospatial Information Network Node Development

1. Assistance to Network Node Development

The network node development in 2016 was carried out at 3 K / L / P that were in Aceh Province, Papua Province, as well A Ministry of Development of Disadvantaged Villages and Transmigration. Assistance to the network node development was conducted as a series of activities including Network Node Forum, Network Node Technical Assistance and Focus Group Discussion.

2. Network Node Mentoring

Mentoring in 2016 was done through awareness raising activities on IG network node development, Network Node Technical assistance, and outreach of the IG K / L / P Network Node mentoring. The network Node Technical assistance was carried out in West Sumatera and East Java Provinces.

3. Network Node Award

It was a series of events during BIG's Birthday in 2016. The network node award was given directly by the Minister of PPN / National Development Planning Agency (Bappenas), Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, accompanied by head of BIG, Priyadi

IG yang terpilih sebagai pemenang tersebut telah berhasil memproduksi Data Geospasial (DG) dan Informasi Geospasial (IG), membangun mekanisme berbagi pakai DG dan IG dengan baik melalui kebijakan dan peraturan yang ditetapkan, serta membuat aplikasi inovatif yang memanfaatkan DG dan IG untuk mendukung kegiatan operasional harian dan melayani masyarakat. Kerja keras dan inovasi yang telah ditunjukkan meningkatkan rasa optimisme dalam penyelenggaraan DG dan IG sesuai amanat Undang-undang no 4 tahun 2011 tentang Informasi Geospasial. Lebih jauh lagi, akan semakin mendorong terlaksananya Peraturan Presiden nomor 9 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000.

Penghargaan simpul jaringan diberikan kepada 5 (lima) instansi terbaik untuk 4 (empat) kategori dan 2 (dua) instansi untuk simpul jaringan berkembang. Berikut adalah daftar penerima penghargaan simpul jaringan :

Kardono. The IG network node taking the first place succeeded in producing Geospatial Data (DG) and Geospatial Information (IG), in well developing DG and IG sharing mechanisms through established policies and regulations, and in creating innovative applications using DG and IG. They all were to support daily operational activities and serve community. The hard work and innovation that has been shown leads to an increase in the sense of optimism in implementing DG and IG as mandated by Law No. 4 of 2011 on Geospatial Information. Furthermore, geospatial information would further encourage the implementation of Presidential Regulation number 9 of 2016 on Accelerating the Implementation of One Map Policy at Level of Map Accuracy of 1: 50,000.

Network node award was granted to 5 (five) best agencies for 4 (four) categories and to 2 (two) agencies for successfully developed network nodes. The list of the network node award recipients is as follow:

Terbaik	K/L	Provinsi	Kabupaten	Kota	Berkembang
I	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kalimantan Timur	Sampang	Depok	Kalimantan Utara
II	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DKI Jakarta	Pidie Jaya	Banda Aceh	Sragen
III	Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional	Jawa Barat	Kulon Progo	Semarang	
IV	Kementerian Perhubungan	Kalimantan Selatan	Purworejo	Bontang	
V	Lembaga Penerbangan dan Antariksan Nasional	Nusa Tenggara Barat	Bantul	Balikpapan	

4. Pusat Pengembangan Infrastruktur Data Spasial

Pusat Pengembangan Infrastruktur Data Spasial (PPIDS) yang dibentuk berdasarkan kerjasama antara BIG dan Perguruan Tinggi Negeri sampai dengan tahun 2016 adalah sebanyak 15 PPIDS. Berikut daftar Perguruan Tinggi yang memiliki PPIDS :

1. Universitas Syiah Kuala, Aceh
2. Universitas Negeri Padang
3. Universitas Sriwijaya, Palembang
4. Universitas Lampung
5. Institut Teknologi Bandung
6. Universitas Diponegoro, Semarang
7. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
8. Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya
9. Universitas Udayana, Denpasar
10. Universitas Mulawarman, Samarinda
11. Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin
12. Universitas Tanjungpura, Pontianak
13. Universitas Sam Ratulangi, Manado
14. Universitas Halu Oleo, Kendari
15. Universitas Hasanuddin, Makassar

4. Center for Spatial Data Infrastructure Development

The number of the centers for Spatial Data Infrastructure Development (PPIDS) developed under cooperation between BIG and public Universities until 2016 was 15. The list of the universities that equipped by PPIDS is as follow:

1. *Syiah Kuala University, Aceh*
2. *Padang Public University*
3. *Sriwijaya University, Palembang*
4. *Lampung University*
5. *Bandung Technology Institute*
6. *Diponegoro University, Semarang*
7. *Gadjah Mada University, Yogyakarta*
8. *Sepuluh Nopember Institute of Technology, Surabaya*
9. *Udayana University, Denpasar*
10. *Mulawarman University, Samarinda*
11. *Lambung MangkuraUniversity t, Banjarmasin*
12. *Tanjungpura University, Pontianak*
13. *Sam Ratulangi University, Manado*
14. *Halu Oleo University, Kendari*
15. *Hasanuddin University, Makassar*

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

SKKNI
(STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA)

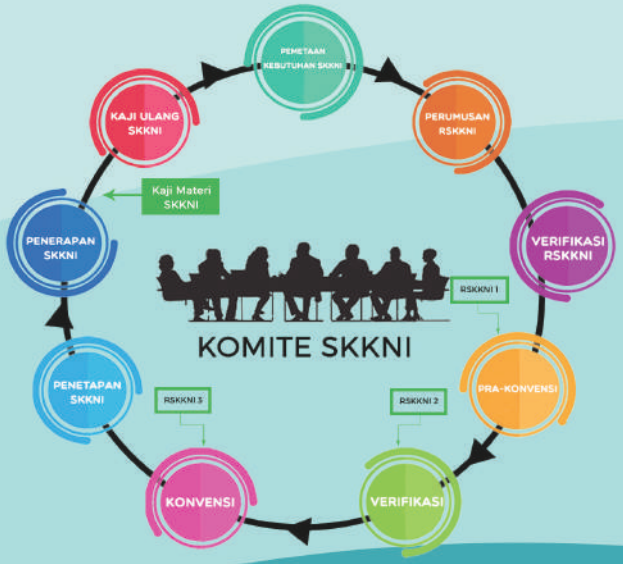
SKKNI
(STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA)

adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.





PROSES PENGEMBANGAN SKKNI



Kualifikasi KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia)

KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia)

Kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan meng-integrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

Jenjang Kualifikasi KKNI terdiri atas :

- Jenjang 1 sampai dengan jenjang 3 dikelompokkan dalam jabatan operator;
- Jenjang 4 sampai dengan jenjang 6 dikelompokkan dalam jabatan teknisi atau analis;
- Jenjang 7 sampai dengan jenjang 9 dikelompokkan dalam jabatan ahli.



DASAR PENYUSUNAN SKKNI

- PERPRES NO. 8 TAHUN 2012 "KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA (KKNI)"
- PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI NOMOR 5 TAHUN 2012 TANGGAL 22 MARET 2012 "SISTEM STANDARDISASI KOMPETENSI KERJA NASIONAL"
- KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 95 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS GOLONGAN POKOK AKTIVITAS ARSITEKTUR DAN KEINSINYURAN; ANALISIS DAN UJI TEKNIS BIDANG INFORMASI GEOSPASIAL

SKKNI-IG terbagi dalam 7 Sub Bidang Informasi Geospasial

- SKKNI IG Sub Bidang Survei Terestris
- SKKNI IG Sub Bidang Hidrografi
- SKKNI IG Sub Bidang Fotogrametri
- SKKNI IG Sub Bidang Penginderaan Jauh (Remote Sensing)
- SKKNI IG Sub Bidang Sistem Informasi Geografis
- SKKNI IG Sub Bidang Kartografi
- SKKNI IG Sub Bidang Survei Kewilayahan

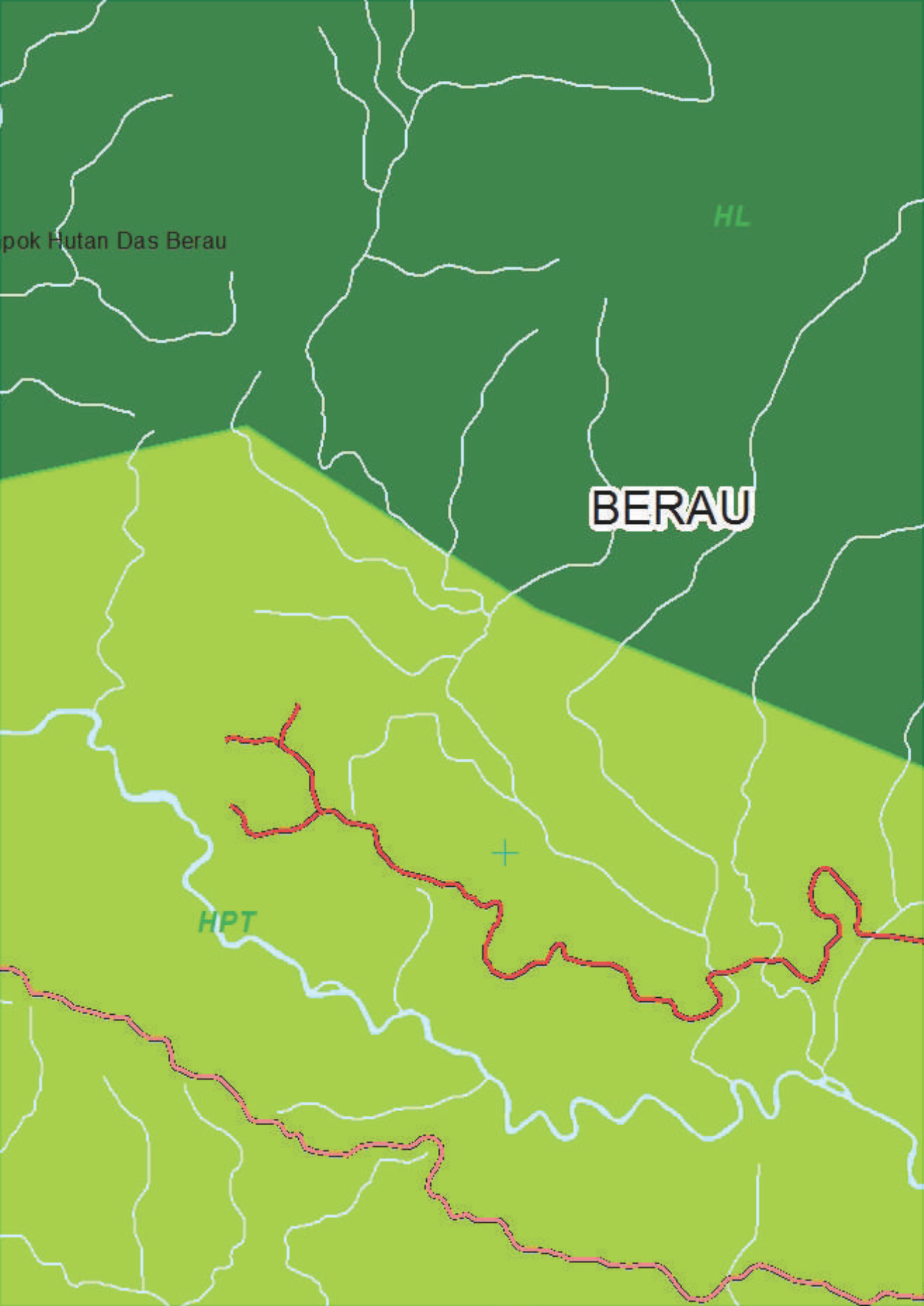
Keputusan Menaker Nomor 95 Tahun 2017




60TH ASEANFLAG COUNCIL MEETING
REGIONAL SEMINAR &
INDUSTRIAL EXHIBITION
ComNav
mysurv
Geotronix


Sub Bidang
Geografi


Chairman


pok Hutan Das Berau
HL
BERAU
HPT

ACARA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

EVENT OF INFORMATION GEOSPATIAL AGENCY



Penyelenggaraan infrastruktur informasi geospasial meliputi pembinaan simpul jaringan di kabubaten/kota, pembangunan dan pengembangan PPIDS, pembangunan metadata simpul jaringan pusat, provinsi, kabupaten/ kota, Data Center BIG menuju ISO 27001:2005, pembangunan GSCC, dan Rancangan Standar Nasional Indonesia.

The implementation of geospatial information infrastructure includes the coaching of network nodes in the districts/municipalities, Development PPIDS programs, the development of network node metadata on the level of national, provincial, and district/municipality, BIG data center toward ISO 27001: 2005, the GSCC development, and the Draft of Indonesia National Standards.

Informasi Geospasial Dasar
Informasi Geospasial Tematik
Infrastruktur Informasi Geospasial
Sekretaris Utama
Acara BIG



WORKSHOP GEOSPASIAL : "PEMBANGUNAN DESA AGAR TERCAPAINYA KEBIJAKAN SATU PETA"

Badan Informasi Geospasial (BIG) bekerjasama dengan Bappeda Kota Sorong, dan Tim Ekspedisi NKRI Koridor Papua Barat mengadakan Workshop Geospasial pada Tanggal 29 Maret 2016 di Swiss-bell Hotel Sorong, dengan tema "Pemetaan desa untuk mendukung kebijakan satu desa". Workshop dihadiri oleh perwakilan dari SKPD kota Sorong, Peserta Ekspedisi NKRI, Mahasiswa dan Perwakilan dari SLBN Kota Sorong. Hal itu dilakukan demi tercapainya cita-cita Presiden Jokowi melalui nawacita, dimana salah satunya adalah memperkuat daerah-daerah dan desa.

Workshop kali ini dibagi menjadi 2 sesi acara, yang dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya oleh seluruh peserta workshop. Sambutan pertama diberikan oleh Bappeda Kota Sorong yang diwakili Sekertaris Bappeda Kota Sorong, Onnesimus Assem. Pada sambutannya Onnesimus menyampikan terima kasih kepada BIG dan para peserta yang telah hadir, "Kami sangat mengharapkan workshop ini dapat menghasilkan satu dokumen yang lebih rinci untuk membantu pelaksanaan kegiatan-kegiatan penting dalam hal pembangunan".

Setelah sambutan dari perwakilan Bappeda Sorong, dilanjutkan dengan paparan sesi pertama oleh Kepala BIG, Priyadi Kardono terkait pemetaan desa untuk mendukung kebijakan satu peta. "Tidak ada lagi perencanaan pembangunan wilayah yang tidak menggunakan peta atau informasi geospasial, Presiden Jokowi juga meminta semua perencanaan pembangunan daerah harus dipetakan dalam satu peta" ungkap Priyadi. Priyadi menjelaskan bahwa Pulau Papua menjadi fokus pembangunan di daerah timur karena pembangunan infrastruktur di Papua masih terbilang sedikit dari daerah yang lain. Apalagi dengan topografi yang sulit, Papua menjadi tantangan pemerintah dalam melakukan pembangunan di daerah perbatasan dan daerah timur Indonesia.

Priyadi juga menjelaskan penyediaan standar pembuatan peta desa akan menghasilkan peta desa dengan skala besar yang berkualitas, sehingga perencanaan pembangunan desa dapat dilaksanakan

The Geospatial Information Agency (BIG) in cooperation with Bappeda Kota Sorong, and Expedition Team of NKRI Corridor West Papua held a Geospatial Workshop on March 29, 2016 at Swiss-bell Hotel Sorong, with the theme "Village mapping to support one village policy". The workshop was attended by representatives from SKPD of Sorong city, Expedition Participant of NKRI, Student and Representative from SLBN of Sorong City. This is done for the achievement of the ideals of President Jokowi through nawacita, where one of them is to strengthen the areas and villages.

The workshop was divided into 2 sessions, which was opened by singing Indonesian Raya songs by all workshop participants. The first speech was given by Bappeda Kota Sorong represented by Secretary of Bappeda Kota Sorong, Onnesimus Assem. On his remarks Onnesimus gave thanks to BIG and the participants who have attended, "We really hope this workshop can produce a more detailed document to assist the implementation of important activities in terms of development".

After remarks from representatives of Bappeda Sorong, followed by the exposure of the first session by the Head of BIG, Priyadi Kardono related village mapping to support the policy of one map. "No more regional development planning that does not use maps or geospatial information, President Jokowi also asked all regional development planning should be mapped in one map" said Priyadi. Priyadi explained that Papua Island became the focus of development in the eastern region because infrastructure development in Papua is still somewhat somewhat from other regions. Especially with the difficult topography, Papua becomes the government's challenge in carrying out development in border areas and eastern Indonesia.

Priyadi also explained that the provision of standard village map-making will produce a large-scale village map of quality, so that village development planning can be implemented appropriately.

dengan tepat. Peta desa yang dibuat terdiri dari peta citra, peta sarana dan prasarana, dan peta penutup lahan dan penggunaan lahan, dan peta tematik lainnya. Kedepannya diharapkan dapat dihasilkan sistem IG pedesaan yang dapat mensinergikan data spasial untuk pembangunan, mulai dari tingkat pusat hingga desa, dan memberikan akses kepada masyarakat pedesaan terhadap data spasial untuk pembangunan desa, sehingga masyarakat pun dapat ikut berpartisipasi dalam pembangunan pedesaan.

Setelah paparan Kepala BIG, dilanjutkan dengan serah terima cinderamata dari BIG kepada Bappeda Kota Sorong dan penyerahan Peta Atlas Taktual kepada Sekolah Luar Biasa Negeri Kabupaten Sorong. Pada sesi kedua dilanjutkan dengan diskusi dan presentasi dari beberapa pusat yang ada di BIG. Pemaparan dilakukan oleh Pusat Pemetaan Batas Wilayah (PPBW), Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial (PPPIG), Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim (PPRT), Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas (PPTRA), Pusat Standardisasi dan Kelembagaan Informasi Geospasial dan perwakilan (PSKIG) dari tim Ekspedisi NKRI koridor Papua Barat.

Presentasi awal pada sesi dua ini dibuka oleh PPRT yang disampaikan oleh Intan Yulia, Intan menjelaskan akan pentingnya Peta Dasar yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. "Peta Dasar yang akurat sangat diperlukan dalam suatu pembangunan daerah karena sudah menjadi amanat perundang-undangan, perencanaan tata ruang". Intan menjelaskan tentang pembuatan peta dasar dengan Citra Satelit Resolusi Sangat Tinggi (CSRST) yang mempunyai tahapan dari penyiapan citra, penyimpanan data Model Tinggi Digital (DEM) sampai dengan pembuatan unsur peta dasar. Alur-alur ini harus dipenuhi agar CSRST yang dihasilkan memiliki standar kualitas yang memenuhi dan dapat dipertanggungjawabkan kedepannya. Dilanjutkan dengan pembahasan batas desa oleh Fahrul Hidayat dari PPBW. Penetapan batas desa didasari oleh Undang-Undang No.6 Tahun 2014 pasal 8/2f dan pasal 17/2 lalu dalam Permendagri No.27 Tahun 2006. "Dalam pemetaan batas desa peran partisipasi masyarakat dalam penetapan dan penegasan batas sangat penting, tetapi pembinaan penyelenggaraan informasi geospasial batas desa tetap harus dilaksanakan agar semua data mengacu pada satu referensi" jelas Fahrul. BIG mendukung percepatan pemetaan batas desa, salah satunya dengan mengembangkan metode kartometrik; yaitu dengan mengekstrak segala informasi yang ada di suatu daerah dengan media peta digital maupun peta cetak. Peta yang digunakan saat ini ialah peta citra yang sudah terkoreksi orto atau sudah ditegakan agar sesuai dengan referensi nasional.

Pemaparan dari PPTRA yang diwakili oleh Satrio Jati menjelaskan tentang peran IG dalam perencanaan tata ruang. Pembangunan tanpa perencanaan dapat menyebabkan pembangunan tersebut menjadi tidak terkendali. Sesuai dengan Undang-Undang No.27 Tahun 2007 pasal 3 tentang tujuan penyelenggaraan penataan ruang yaitu mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. IG yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan mutlak dibutuhkan dalam rangka pengendalian rencana tata ruang untuk mengidentifikasi konflik-konflik spasial. IG juga berpengaruh terhadap kualitas tata ruang, informasi geospasial yang berkualitas dapat menghasilkan produk tata ruang yang berkualitas pula. Oleh karena itu, perlu ditetapkan standar dalam pemetaan rencana tata ruang pada semua jenjang agar dapat terintegerasi secara nasional.

The village maps made consist of image maps, maps of facilities and infrastructure, and land cover and land use maps, and other thematic maps. In the future, it is expected to produce a rural IG system that can synergize spatial data for development, from central to village levels, and provide rural communities access to spatial data for village development, so that communities can participate in rural development.

After exposure of Head of BIG, followed by handover of souvenir from BIG to Bappeda of Sorong City and submission of Atlas Taktual Map to Sorong District Extraordinary School. In the second session continued with discussions and presentations from several centers in BIG. The exposure was conducted by the Center for Mapping of Boundaries (PPBW), Center for Management and Distribution of Geospatial Information (PPPIG), Topographical and Topographical Mapping Centers (PPRT), Center for Spatial and Atlas Mapping (PPTRA), Center for Standardization and Institutional Geospatial Information and representatives (PSKIG) from the expedition team of NKRI West Papua corridor.

The initial presentation at the second session was opened by the PPRT delivered by Intan Yulia, Intan explained the importance of the Accurate and Accountable Basic Map. "Accurate Basic Map is indispensable in a regional development as it is mandated by legislation, spatial planning". Intan explains the basic map making with High Resolution Satellite Imagery (CSRST) which has stages from image setup, High Digital Model data storage (DEM) up to the creation of elemental map elements. These grooves must be met so that the resulting CSRST has a quality standard that meets and can be accounted for in the future. Followed by discussion of village boundaries by Fahrul Hidayat from PPBW. The determination of village boundaries is based on Law No. 6 of 2014, article 8 / 2f and article 17/2 in Permendagri No.27 of 2006. "In village boundary mapping the role of community participation in determining and affirming boundaries is very important, but coaching the implementation the village boundary geospatial information should still be implemented so that all data refer to one reference "explained Fahrul. BIG supports the acceleration of village boundary mapping, one by developing a cartometric method; namely by extracting all the information that exist in an area with digital map media and print maps. The map currently used is an ortho-corrected or already enforced image map to conform to national reference.

The presentation of PPTRA represented by Satrio Jati explains the role of IG in spatial planning. Unplanned development can cause the development to become out of control. In accordance with Law No.27 of 2007 article 3 on the purpose of organizing the spatial arrangement is to realize the national territory space that is safe, comfortable, productive and sustainable. Accurate and accountable IG is absolutely required in the context of spatial plan controls to identify spatial conflicts. IG also affect the quality of spatial, quality geospatial information can produce a quality spatial product as well. Therefore, it is necessary to set standards in the mapping of spatial plans at all levels in order to be nationally integrated.

The event was continued by Lettu (May.) Suyono L. Toruan who

Acara dilanjutkan oleh Lettu (May.) Suyono L. Toruan yang menyampaikan hasil kerja dari tim Ekspedisi NKRI Koridor Papua Barat. "Ekspedisi ini bertujuan untuk agar nantinya bangsa Indonesia lebih mengenal negerinya sendiri, EKspedisi ini juga akan menverifikasi IG yang ada dan melengkapinya. Papua menjadi tujuan Ekspedisi NKRI 2016 ini karena masih banyak kekayaan sumber daya alam yang ada di Papua dan kita harus melestarikannya dan untuk membangun daerah perbatasan seperti yang dicanangkan presiden dalam nawacita", jelas Suyono.

Tim Ekspedisi NKRI menemukan beberapa spot SDA seperti titik bencana, sumber air bersih, dan flora fauna baru yang langka. Hasil dari temuan diambil gambarnya dan disimpan dalam bentuk koordinat dan ditampilkan dalam bentuk metadata pada peta. "BIG ikut berperan besar dalam Ekspedisi NKRI seperti memberikan pelatihan kepada para Ekpedisi dan mengirim personil untuk mendampingi dan memperbaharui informasi geospasial yang ada" ungkap Wiwin selaku kepala pusat promosi dan kerjasama BIG.

Selanjutkan adalah paparan dari Florence Elfriede, dari PSKIG. Florence menjelaskan kebijakan pengembangan SDM dalam mendukung penyelenggaraan IG nasional. Strategi dan kebijakan pengembangan SDM informasi antara lain dengan penambahan kapasitas lembaga pendidikan dan latihan bidang informasi geospasial dan penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dalam bidang IG bertaraf dunia, serta penyusunan sistem sertifikasi SMD dan Industri IG.

Sertifikasi ini dapat diperoleh oleh penyedia jasa yang telah memenuhi syarat dan diberikan oleh lembaga sertifikasi penyedia jasa yang independen yang telah diakreditasi oleh BIG. Dalam penutupnya Florence menjelaskan keberhasilan penyelenggaraan IG nasional memerlukan strastegi dengan memperhatikan kondisi lingkungan strategis yang sangat mempengaruhi tersedianya SDM IG yang cukup jumlahnya dan handal kualitasnya.

Terakhir adalah presentasi dari PPIG yang diwakili oleh Orpa Molama, "Ina-Geoportal (Indonesia-Geospasial Portal) adalah portal geospasial Indonesia yang dibangun dengan pertisipasi berbagai kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah di Indonesia" jelas Orpa. Ina-Geoportal sebagai gerbang utama akses informasi geospasial yang menghubungkan berbagai kementerian, lembaga, provinsi dan daerah yang menjadi mitra penghubung simpul Jaringan Data Spasial Nasional (JDSN). Kementerian dan Lembaga serta Pemerintah Provinsi dan Daerah yang terhubung dalam Ina-Geoportal disebut Simpul Jaringan. Diharapkan dengan adanya Ina-Geoportal ini menjadi jalan untuk keterbukaan Informasi Geospasial demi kemajuan dan pembangunan bangsa.

Melalui berbagai materi yang didapatkan peserta pada workshop geospasial ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan meningkatkan kesadaran peserta akan urgensi dari tersedianya IG yang handal dan dapat dipertanggung jawabkan. Ke depannya daerah Indonesia bagian Timur juga menjadi perhatian utama dalam perencanaan pembangunan nasional, oleh karena itu diperlukan ketersediaan data yang lengkap.

delivered the work of Expedition team of NKRI Corridor West Papua. "This expedition aims to make Indonesia more familiar with its own country, this EKspedisi will also verify the existing IG and complete it. Papua becomes the destination of Expedition NKRI 2016 because there is still a lot of natural resources in Papua and we have to preserve it and to build border area as proclaimed by president in nawacita ", Suyono explained.

The NKRI Expedition Team found several SDA spots such as disaster points, clean water sources, and rare new flora fauna. The results of the findings are drawn and stored in coordinate form and displayed in the form of metadata on the map. "BIG plays a major role in the Expedition NKRI such as providing training to the Expedition and send personnel to assist and update existing geospatial information" said Wiwin as head of BIG promotion and cooperation center.

Next is the presentation of Florence Elfriede, from PSKIG. Florence explains the policy of human resource development in support of national GI implementation. Strategies and policies on human resource development include increasing the capacity of educational institutions and training in the field of geospatial information and the compilation of Indonesian National Work Competence Standards (SKKNI) in the world-class IG, and the preparation of SMD and IG Industry certification system.

This certification may be obtained by qualified service providers and provided by an independent service provider certification body accredited by BIG. In closing Florence describes the success of national IG implementation requires strastegi with attention to strategic environmental conditions that greatly affect the availability of human resources IG is sufficient and reliable quality.

The last is a presentation from PPIG represented by Orpa Molama, "Ina-Geoportal (Indonesia-Geospatial Portal) is an Indonesian geospatial portal built with the participation of various ministries and institutions and local government in Indonesia" Orpa explained. Ina-Geoportal is the main gateway to access geospatial information connecting various ministries, institutions, provinces and regions that are the connecting partners of the National Spatial Data Network (JDSN) link. The Ministries and Agencies as well as the Provincial and Local Governments connected in Ina-Geoportal are called Network Nodes. It is hoped that Ina-Geoportal will be a way for Geospatial Information Openness for the progress and development of the nation.

Through the various materials that participants get in this geospatial workshop is expected to increase knowledge and increase participants awareness of the urgency of the availability of reliable and reliable IG. In the future, the eastern part of Indonesia is also a major concern in national development planning, therefore the availability of complete data is required.

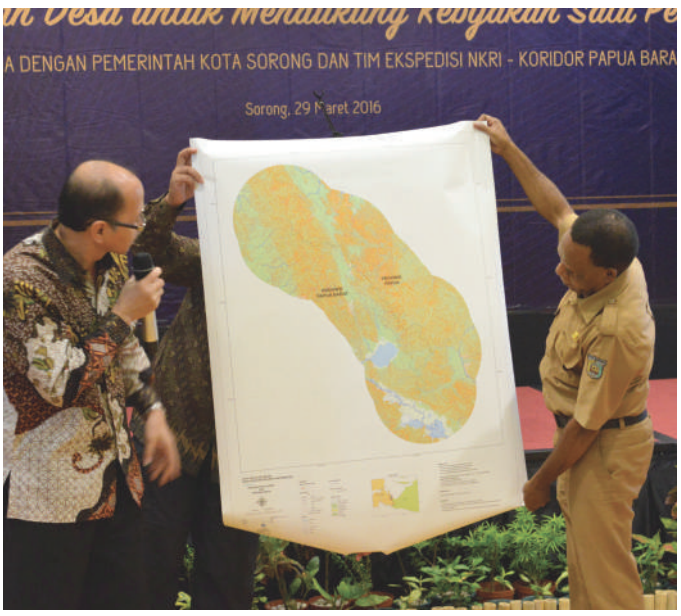



WORKSHOP GEOSPASIAL
'Pemetaan Desa untuk Mendukung Kebijakan Satu Peta'
BIG BEKERJA SAMA DENGAN PEMERINTAH KOTA SORONG DAN TIM EKSPEDISI NKRI - KORIDOR PAPUA BARAT 2016






WORKSHOP GEOSPASIAL
'Pemetaan Desa untuk Mendukung Kebijakan Satu
BIG BEKERJA SAMA DENGAN PEMERI KOTA SORONG DAN TIM EKSPEDISI NKRI - KORIDOR PAPU
Sorong, 29 Maret 2016


A DENGAN PEMERINTAH KOTA SORONG DAN TIM EKSPEDISI NKRI - KORIDOR PAPUA BARA
Sorong, 29 Maret 2016


ORKSHOP GEOSPASIAL
n Desa untuk Mendukung Kebijakan Satu Peta'
DENGAN PEMERINTAH KOTA SORONG
IM EKSPEDISI NKRI - KORIDOR PAPUA BARAT 2016

Informasi Geospasial Dasar
Informasi Geospasial Tematik
Infrastruktur Informasi Geospasial
Sekretaris Utama
Acara BIG



PENGAMBILAN SUMPAH PEGAWAI NEGERI SIPIL BIG UNTUK TERCIPTANYA GOOD GOVERNANCE

Pengambilan Sumpah/Janji PNS merupakan salah satu upaya pembinaan PNS sebagai Aparatur Sipil Negara dan abdi masyarakat dalam mengimplementasikan kesetiaan dan ketaatan terhadap Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah dalam mendukung usaha pemerintah mendorong terciptanya good governance.

Sumpah/Janji PNS merupakan suatu pernyataan kesanggupan dari seorang PNS yang diikrarkan di hadapan Tuhan dan Pejabat Berwenang, bahwa akan menaati segala keharusan dan tidak melakukan segala larangan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dan didalam melaksanakan tugas harus dengan penuh keikhlasan, kejujuran dan tanggung jawab yang tinggi dengan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara di atas kepentingan pribadi dan atau golongan. Sumpah PNS wajib dilakukan oleh setiap CPNS segera setelah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Merujuk pada Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 1975, Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Priyadi Kardono pada Kamis 12 Februari 2014 di Aula Utama BIG Cibinong secara resmi melantik dan mengambil sumpah sebanyak 91 Pegawai Negeri Sipil Badan Informasi Geospasial formasi Tahun 2009-2013. Upacara pengambilan sumpah dilakukan oleh Rohaniawan dari Kementerian Agama. Sebagai saksi penandatanganan Berita Acara Pengambilan Sumpah PNS BIG adalah Kepala Biro Perencanaan, Kepegawaian dan Hukum, Muhtadi Ganda Sutrisna dan Kepala Pusat Penelitian, Promosi dan Kerja Sama, F. Wahyutomo. Pada sambutan pengambilan sumpah, Kepala BIG Priyadi Kardono berpesan kepada PNS yang baru diambil sumpah agar dalam melaksanakan tugas dapat bekerja sebaik-baiknya dengan iklas, jujur dan penuh rasa tanggung jawab sesuai dengan tugas yang diberikan pimpinan masing-masing. Lebih lanjut Priyadi berpesan agar PNS BIG dapat memberikan sumbangsih tenaga dan pikiran dalam mendukung program pemerintah melalui penyediaan data dan informasi geospasial yang andal dan dapat dipertanggungjawabkan serta bermanfaat untuk menunjang pembangunan.

The taking of oath / appointment of civil servant is one of the effort of civil servant development as civil apparatus of state and public servant in implementing loyalty and adherence to Pancasila, 1945 Constitution, State and Government in supporting government effort to encourage the creation of good governance.

The oath / pledge of the civil servant is a statement of the ability of a civil servant pledged before the Lord and the Authorized Officer, that will comply with all necessities and not make any restrictions as provided in the applicable laws and regulations. And in carrying out the task must be full of sincerity, honesty and high responsibility by prioritizing the interests of the Nation and the State above personal interests and / or groups. The civil servant oath must be done by every CPNS immediately after being appointed as Civil Servant.

Referring to Government Regulation No.21 of 1975, Head of Geospatial Information Agency (BIG) Priyadi Kardono on Thursday, February 12, 2014 at the Main Hall of BIG Cibinong officially inaugurated and took an oath of 91 Civil Servants Geospatial Information Agency formation Year 2009-2013. The swearing-in ceremony was conducted by Rohaniawan from the Ministry of Religious Affairs. As witnesses to the signing of the BIG Civil Proceedings Arrangement BIG is the Head of Planning, Personnel and Legal Bureau, Muhtadi Ganda Sutrisna and Head of Research, Promotion and Cooperation Center, F. Wahyutomo. In the swearing-in remarks, BIG Chief Priyadi Kardono advised the civil servants who had just taken the oath so that in carrying out their duties they could work as well as they could, with honesty and full sense of responsibility in accordance with the tasks given by their respective leaders. Priyadi further advised that BIG civil servants can contribute their energy and mind in supporting government programs by providing reliable and reliable data and information of geospatial information to support development.






SAY
NO







Informasi Geospasial Dasar
Informasi Geospasial Tematik
Infrastruktur Informasi Geospasial
Sekretaris Utama
Acara BIG



PERCEPATAN KEBIJAKAN SATU PETA ADALAH KOMITMEN BIG PADA K/L DAN PEMERINTAH DAERAH

Badan Informasi Geospasial (BIG) memiliki peran yang penting dalam perencanaan pembangunan nasional, karena hampir seluruh perencanaan pembangunan membutuhkan data dan Informasi Geospasial (IG). Pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2016 kembali dilaksanakan penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama (NKB) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BIG dengan beberapa Kementerian/Lembaga (K/L), Pemerintah Daerah (Pemda), dan Perguruan Tinggi (PT) terkait. Lewat kerja sama ini diharapkan nantinya IG dapat diimplementasikan untuk mendukung pembangunan di Indonesia, serta memperkuat fungsi PT dalam rangka mendukung tersedianya SDM Geospasial yang handal.

Pada acara penandatanganan yang dihadiri oleh 8 kabupaten, 3 kota, dan 4 perguruan tinggi tersebut hadir pula Kepala BIG, Priyadi Kardono, serta Sekretaris Utama BIG, Titiek Suparwati. Pemerintah melalui BIG yang didukung olehK/L, Pemda, dan PTsetempat melakukan upaya percepatan Kebijakan Satu Peta (KSP) diantaranya dengan cara memberikan data dan informasi geospasial berupa peta Rupabumi Indonesia skala 1 : 50.000 dan percepatan pengadaan Citra Tegak Resolusi Tinggi (CSRT) bagi seluruh wilayah Indonesia. Hal itu merupakan komitmen BIG bagi K/Lserta Pemda dalam penyediaan IG untuk menunjang pembangunan, demikian dikatakan Kepala BIG, Priyadi Kardono pada sambutan PenandatangananNKB dan PKS BIG di Aula Utama BIG, Cibinong.

Selanjutnya Kepala BIG juga mengatakan bahwa kerjasama ini sangat penting bagi pemda dalam rangka percepatan pembangunan wilayahnya. Berkaitan dengan Nawacita, melalui data dan IG maka Rencana Tata Ruang Wilayah dan Peta Desa akan cepat terealisasi, sehingga pembangunan daerah dapat mempercepat pembangunan nasional. Sementara untuk penyediaan, pengolahan, serta pengembangan data dan IG, dibutuhkan SDM IG yang cakap. Dengan demikian dibutuhkan banyak sekali SDM IG didaerah untuk mendukung proses tersebut. "Untuk itulah kerjasama ini sangat penting terutama dalam menyediakan SDM bidang IG, serta dapat

The Geospatial Information Agency (BIG) has an important role in national development planning, since almost all development planning requires data and Geospatial Information (IG). On Friday, 13 May 2016, the signing of Memorandum of Understanding (NKB) and Cooperation Agreement (PKS) between BIG with several Ministries / Institutions (K / L), local government (Pemda) and related universities . Through this cooperation, it is expected that IG can be implemented to support development in Indonesia, and strengthen the function of PT in order to support the availability of reliable human resources Geospatial.

At the signing ceremony attended by 8 districts, 3 cities, and 4 universities attended also BIG Chief, Priyadi Kardono, and BIG Main Secretary, Titiek Suparwati. Government through BIG supported by K / L, local government, and PTSpace make efforts to accelerate One Map Policy (KSP) among others by providing geospatial data and information in the form of map 1.000.000 Indonesia Rupabumi and acceleration procurement Resilience High Image (CSRT) for the whole territory of Indonesia. This is BIG's commitment to K / Lserta Pemda in providing IG to support development, said BIG Chief Priyadi Kardono at the welcoming speech of the NKB and BIG MCC at the BIG Main Hall, Cibinong.

Furthermore, the Head of BIG also said that this cooperation is very important for the regional government in order to accelerate the development of its territory. In relation to Nawacita, through data and IG, the Regional Spatial Plan and Village Map will be quickly realized, so that regional development can accelerate the national development. As for the provision, processing, and development of data and IG, required competent human resources. Thus it takes a lot of IG human resources in the area to support the process. "That is why this cooperation is very important especially in providing human resources in IG field, and can help support local government

membantu mendukung pemerintah daerah dalam percepatan KSP", ungkap Priyadi.

Pada kegiatan tersebut BIG menampilkan para narasumber atau pembicara berkaitan dengan percepatan KSP diantaranya : Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik (IGT) BIG, Nurwajedi dan Kepala Pusat Standarisasi dan Kelembagaan IG (PSKIG) BIG, Suprajaka. Nurwajedi pada paparannya mengatakan bahwa dalam rangka percepatan Kebijakan Satu Peta, BIG sebagai pembina dan penyelenggara IG dalam tahun 2016 ini menyelenggarakan Rapat Koordinasi Teknis Kelompok Kerja Informasi Geospasial Tematik (Rakortek Pokja IGT), Pra Rakornas (Rapat Koordinasi Nasional) IG serta Rakornas IG. Rencana pencapaian target prioritas KSP untuk 85 tema peta tematik.

"Kegiatan yang dilaksanakan terkait KSP ini antara lain adalah kompilasi pengumpulan peta tematik oleh K/L, integrasi peta tematik diatas peta RBI skala 1:50.000, serta sinkronisasi untuk penyelesaian isu terkait tumpang tindih peta", jelas Nurwadjedi. Selanjutnya dijelaskan juga terkait Implementasi KSP, diantaranya sepertiBIG menyerahkan peta RBI seluruh Indonesia kepada K/L, menetapkan walidata IG dan PJ Peta tematik sesuai tugas dan fungsi K/L, menetapkan Kelompok Kerja IGT sebagai media sinergi dan kolaborasi K/L dan Pemerintah Daerah, serta Pendetilan rencana aksi KSP.

Acara dilanjutkan oleh Suprajaka dengan paparannya mengenai Sistem Informasi Desa (SID) Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan. SID tersebut meliputi data desa, sata pembangunan desa, kawasan perdesaan, dan informasi lain yang berkaitan dengan pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan, salah satunya adalah peta desa.

"Sayangnya kondisi peta saat ini tidak dapat digunakan sebagai analisa perhitungan luas, jarak, posisi relatif terhadap wilayah yang lain; tidak dapat digunakan untuk membantu penyelesaian sengketa batas; serta tidak dapat digunakan untuk menyusun SID", jelas Suprajaka. Dikatakan bahwa BIG dengan dukungan K/L dan Pemerintah Daerah sedang membangun Peta Desa berbasis SIG atau SID. SID adalah tanggung jawab pemerintah baik pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah Daerah wajib mengembangkan SID untuk perencanaan pembangunan Desa. Penyediaan CSRT untuk seluruh wilayah Indonesia menjadi salah satu pilihan untuk mendukung pembangunan SID berbasis spasial dalam rangka menuju desa sejahtera dan berdikari.

in accelerating KSP", said Priyadi.

In the event, BIG featured speakers or speakers related to the acceleration of KSP, among others: Deputy of BG's IGT Geographical Information (IGT), Nurwajedi and Head of Center for Standardization and Institutional IG (PSKIG) BIG, Suprajaka. Nurwajedi on his presentation said that in order to accelerate the One Map Policy, BIG as the coach and organizer of IG in 2016 holds Technical Coordination Meeting of Working Group of Geospatial Information of the IGT, Pre Rakornas (IG Coordination Meeting) and Rakornas IG. The plan for achieving KSP priority targets for 85 thematic thematic themes.

"The activities undertaken in relation to this KSP include compilation of thematic map collecting by K / L, integration of thematic map on RBI map scale 1: 50.000, and synchronization to solve issues related to overlapping maps", explained Nurwadjedi. Furthermore, it is also related to KSP Implementation, such as BIG submits RBI maps throughout Indonesia to K / L, establishes IG and PJ maps of thematic based on K / L duties and functions, establishes IGT Working Group as a synergy and collaborative medium for K / L and Local Government, as well as Determining KSP action plan.

The event was continued by Suprajaka with his presentation on Village Information System (SID) of Rural Development and Rural Area. Based on Law Number 6 Year 2014 on the Village mentioned that the Government and Local Government shall develop the Village information system and the development of Rural Area. The SID includes village data, village development sata, rural areas, and other information related to rural development and rural development, one of which is the village map.

"Unfortunately the current state of the map can not be used as an analysis of the calculation of area, distance, position relative to other regions; can not be used to assist in the resolution of boundary disputes; and can not be used to compile SID ", explained Suprajaka. It is said that BIG with the support of K / L and Local Government is building a GIS-based Village Map or SID. SID is the responsibility of both central and local governments. Local governments are required to develop SIDs for village development planning. Provision of CSRT for the entire territory of Indonesia becomes an option to support the development of spatial-based SIDs in order to prosper and prosperous village.




Rapat Koordinasi Teknis
Kelompok Kerja IGT
Tahap II
Penguatan Kerangka Kerja Lembaga
Negara Dalam Percepatan Kebijakan Satu Peta
VIP


Hotel Crowne Plaza Jakarta,




Kelompok Kerja IG-T
Tahap II




Penguatan Kerangka Kerja Lembaga
Negara Dalam Percepatan Kebijakan Satu Peta
Hotel Crowne Plaza Jakarta, 2 Agustus 2016


Rapat Koordina
Kelompok Kerja
Tahap II
Penguatan Kerangka Kerja
Negara Dalam Percepatan K
Hotel Crowne Plaza Jakarta, 2 Agustus



PUNCAK PERINGATAN HARI INFORMASI GEOSPASIAL KE-47

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang P.S. Brojonegoro bersama Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG), Priyadi Kardono; Gubernur Kalimantan Timur, Awang Faroek; Gubernur Kalimantan Utara, Irianto Lambrie; Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar, Dirjen Planologi Hutan dan Tata Lingkungan, San Afri Awang dan Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BNPB, B. Wisnu Widjaja bersama-sama memukul kendang tanda Acara Puncak Peringatan Hari Informasi Geospasial (HIG) ke-47 dibuka, pada Senin, 17 Oktober 2016 yang lalu. Kegiatan yang diselenggarakan di Kantor BIG ini dihadiri oleh para undangan dari K/L, Pemerintah Daerah, Akademisi, Institusi lain, serta para tamu undangan. HIG 2016 telah diselenggarakan sebulan penuh pada bulan Oktober 2016 di BIG dan beberapa wilayah lainnya.

HIG yang juga merupakan hari lahirnya BIG, yang diperingati setiap tanggal 17 Oktober ini merupakan hari lahir Bakosurtanal (Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional) yang resmi berdiri tanggal 17 Oktober 1969, sebagai badan yang bertanggung jawab terhadap koordinasi pemetaan dan survei dasar sumberdaya alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden No. 83 Tahun 1969. Kemudian dengan lahirnya UU No.11 tentang Informasi Geospasial, Bakosurtanal bertransformasi menjadi BIG. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Kepala BIG Nomor 42 Tahun 2015, tanggal 17 Oktober ditetapkan sebagai Hari Informasi Geospasial dan diperingati setiap tahunnya.

Pada sambutan arahannya, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang P.S. Brojonegoro mengatakan, data spasial memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan dan mengintegrasikan lokasi pembangunan. Perubahan pendekatan pembangunan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah 2017 menjadi holistik, tematik, terintegrasi, dan spasial menjadikan data spasial memiliki peranan yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan. Menteri PPN/Kepala Bappenas juga mengapresiasi kinerja BIG yang telah melakukan berbagai terobosan terkait penyelenggaraan IG sejak

Minister of National Development Planning (PPN) / Head of Bappenas, Bambang P.S. Brojonegoro with the Head of Geospatial Information Agency (BIG), Priyadi Kardono; Governor of East Kalimantan, Awang Faroek; Governor of North Kalimantan, Irianto Lambrie; Deputy Governor of West Java, Deddy Mizwar, Director General of Forest and Environmental Planning, San Afri Awang and Deputy of Prevention and Preparedness of BNPB B. Wisnu Widjaja jointly hit the drums of the 47th Anniversary of the 47th Anniversary of Geospatial Information (HIG) on Monday, October 17, 2016 ago. The event held at BIG Office was attended by invited guests from K / L, Local Government, Academics, other Institutions, and invited guests. HIG 2016 has been held for a full month in October 2016 at BIG and other areas.

HIG which is also the birthday of BIG, commemorated every October 17, is the birthday of Bakosurtanal (National Coordinating Agency for Surveys and Mapping) which was officially established on October 17, 1969, as the body responsible for the coordination of mapping and survey of natural resource base based on national Presidential Decree No. 83 Year 1969. Then with the birth of Law No.11 on Geospatial Information, Bakosurtanal transformed into BIG. Furthermore, based on BIG Head Decree Number 42 Year 2015, October 17th is designated as Geospatial Information Day and is commemorated every year.

In his speech, the Minister of PPN / Head of Bappenas, Bambang P.S. Brojonegoro said, spatial data has a very important role in determining and integrating development sites. The change in the development approach in preparing the 2017 Government Work Plan to be holistic, thematic, integrated, and spatial makes spatial data play a very important role in development planning. Minister of PPN / Head of Bappenas also appreciated the performance of BIG which has made various breakthrough related to the implementation of IG since the establishment of BIG, including the initiation of One

terbentuk BIG, diantaranya inisiasi Kebijakan Satu Peta (One Map Policy), menyiapkan Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) dan pemenuhan peta baik dasar dan tematik dalam berbagai skala. Ke depan BIG diharapkan untuk meningkatkan lagi peranannya sebagai Pembina dan Penyelenggara IG di Indonesia.

"Sebagai pembina dan penyelenggara IG, terjadi perubahan besar di BIG, sehingga BIG diharapkan memaksimalkan perannya saat ini dan mendatang, diantaranya turut serta menjaga keutuhan NKRI dengan cara menginventarisir dan menjaga batas wilayah, menyediakan data IG untuk daya saing nasional, Perencanaan Kebijakan Publik, Rencana Detail Tata Ruang Wilayah, serta keikutsertaan BIG dalam berbagai organisasi internasional. Posisi Indonesia sebagai negara kepulauan yang bertetangga dengan 10 negara, untuk itu agar semua titik batas negara agar dipetakan melalui perapatan titik batas", tandasnya.

Agar terwujudnya Kebijakan Satu Peta (KSP) di Indonesia, BIG telah bekerja keras diantaranya; Pertama, mengintegrasikan data spasial yang dimiliki berbagi K/L dan Pemerintah Daerah ke dalam satu referensi, satu database, satu standar, dan satu geoportal (Ina-Geoportal); Kedua, hasil pemantauan dan evaluasi tidak berada dalam sistem yang terintegrasi sehingga pemantauan dan evaluasi tidak dapat dilaksanakan secara realtime dari pusat ke daerah atau sebaliknya; Ketiga, terdapat pulau-pulau informasi yang tidak terhubung selain itu terdapat duplikasi informasi, duplikasi sumberdaya serta sulit menciptakan nilai tambah karena seluruh informasi tidak berada dalam satu sistem yang terintegrasi.

Sementara itu Kepala BIG Priyadi Kardono pada sambutan selamat datangnya mengatakan, tema Hari Informasi Geospasial "BIG Bangkit dan terbarukan", hal ini merujuk Nawacita Pemerintah "Kerja dan Kerja" adalah sebagai momentum menjadi besar. BIG sebagai pembina dan penyelenggara IG yang diamanatkan untuk menyusun dan menyelesaikan program Kebijakan Satu Peta. Pada KSP, hasil yang telah dicapai BIG diantaranya menyelesaikan peta skala 1 : 50.000. Prioritas wilayah tahun ini adalah Kalimantan, total tema peta yang harus diselesaikan adalah sebanyak 85 tema dimana target tahun 2016 sebanyak 17 tema.

Selanjutnya yang menjadi permasalahan BIG adalah keterbatasan SDM IG terutama di daerah. BIG berkomitmen dengan pengembangan SDM daerah, diantaranya dengan bekerjasama dengan Perguruan Tinggi dalam membangun PPIDS (Pusat Pengembangan Infrastruktur Data Spasial). PPIDS adalah kepanjangan tangan BIG bagi pengembangan IG di daerah. Saat ini PPIDS sudah terbangun di 15 PTN Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali dan Sulawesi. Sementara itu untuk wilayah lainnya seperti NTB, NTT, Maluku dan Papua sedang dalam tahap pembangunan. PPIDS dapat berfungsi untuk konsultasi Peta Tata Ruang, Pengelolaan Data dan IG, Pembuatan Peta Desa, SIG Desa serta Sertifikasi SDM IG.

Sementara itu sebelumnya pada sambutannya, Gubernur Kalimantan Timur, Awang Faroek mengatakan, IG sangat diperlukan Pemerintah Provinsi Kaltim. Awang juga mengucapkan terima-kasih kepada BIG yang mensupport dan menyediakan IG untuk pembangunan Kalimantan Timur. Selanjutnya Awang meminta agar BIG selalu mendukung Kaltim dalam menyediakan IG untuk berbagai kegiatan diantaranya migas, batubara dan lain-lain. Kemudian Awang berpesan agar Jaringan Informasi Geospasial Daerah agar lebih maju dan bermanfaat secara optimal untuk kemajuan daerah. Kepada Bappenas Awang mengatakan agar Bappenas dapat mendukung

Map Policy, preparing the National Geospatial Information Network (JIGN) and fulfillment of both basic and thematic maps at various scales . In the future BIG is expected to improve its role as IG Coach and Organizer in Indonesia.

"As a coach and organizer of IG, big changes occur in BIG, so BIG is expected to maximize its current and future roles, including taking care of the integrity of NKRI by way of inventorying and maintaining borders, providing IG data for national competitiveness, Public Policy Planning, Detailed Spatial Planning, as well as BIG participation in various international organizations. The position of Indonesia as an archipelago country adjacent to 10 countries, for it so that all the boundaries of the country to be mapped through the boundary point capture ", he said.

In order to realize the One Map Policy (KSP) in Indonesia, BIG has worked hard among them; First, integrating spatial data shared by K / L and Local Government into one reference, one database, one standard, and one geoportal (Ina-Geoportal); Second, the results of monitoring and evaluation are not in an integrated system so that monitoring and evaluation can not be implemented in realtime from center to region or vice versa; Third, there are islands of information that are not connected in addition there is duplication of information, duplication of resources and difficult to create added value because all information is not in one integrated system.

Meanwhile BIG Chief Priyadi Kardono in his welcome speech said the theme of Geospatial Information Day "BIG Up and Renewable", this refers to the Government's "Work and Work" Nawacita is as a momentum to be great. BIG as the builder and IG organizer mandated to compile and complete the One Map Policy program. In KSP, the results achieved by BIG include completing a 1: 50,000 scale map. The region's priority this year is Kalimantan, the total theme of the map that must be completed is 85 themes where the target of 2016 is 17 themes.

Furthermore, the problem of BIG is the limited human resources of IG especially in the regions. BIG is committed to the development of regional human resources, among others by working with universities in building PPIDS (Spatial Data Infrastructure Development Center). PPIDS is an extension of BIG for the development of IG in the region. Currently PPIDS has been built in 15 PTN Sumatra, Kalimantan, Java, Bali and Sulawesi. Meanwhile, for other regions such as NTB, NTT, Maluku and Papua are under construction. PPIDS can function for consultation of Spatial Map, Data Management and IG, Making of Village Map, GIS Village and IG Human Resource Certification.

Meanwhile, earlier in his speech, East Kalimantan Governor Awang Faroek said, IG is needed by the Provincial Government of East Kalimantan. Awang also thanked BIG for supporting and providing IG for East Kalimantan development. Awang further requested that BIG always support Kaltim in providing IG for various activities such as oil and gas, coal and others. Then Awang advised that the Regional Geospatial Information Network to be more advanced and useful optimally for the progress of the region. To Bappenas Awang said that Bappenas can support cooperation activities with JICA in the development of IG in the region. To all SKPD East Kalimantan,

kegiatan kerja sama dengan JICA dalam pengembangan IG di daerah. Kepada segenap SKPD Kaltim, Gubernur Kaltim berpesan agar SKPD memberikan data yang diperlukan untuk penyelesaian target KSP di Kalimantan Timur. Kemudian, Gubernur Kalimantan Utara, Irianto Lambrie mengucapkan Selamat Hari IG ke-47, harapannya tema BIG Bangkit dan Terbarukan dapat diimplementasikan dengan kerja nyata untuk masyarakat. Selanjutnya, Gubernur Kaltara mengajak semua untuk bekerja bersama dalam membuat perencanaan Tata Ruang yang baik.

Selain penyerahan Bhumandala Award untuk K/L, Pemerintah Daerah, dan institusi lainnya yang telah mengembangkan Simpul JIGN (Jaringan Informasi Geospasial Nasional), pada acara puncak Hari Informasi Geospasial ini juga dilakukan penandatanganan Naskah Kesepahaman Bersama (NKB) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BIG dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi diantaranya Badan Nasional Penanggulangan Bencana(BNPB), Pemprov Bangka Belitung, Pemkab. Tegal, Pemkab. Tojouna-una, Pemkab. Yapen, Pemkot Bekasi, Universitas Mulawarman dan Universitas Cenderawasih Papua.

the Governor of East Kalimantan advised SKPD to provide the necessary data for completion of KSP target in East Kalimantan. Then, the Governor of North Kalimantan, Irianto Lambrie wishes Good Day IG 47, hope BIG Bangkit and Renewable theme can be implemented with real work for the community. Furthermore, the Governor of Kaltara invites all to work together in making a good spatial planning.

In addition to awarding the Bhumandala Award for K / L, Local Government, and other institutions that have developed the JIGN Node (Geospatial Information Network), at the peak of Geospatial Information Day, the signing of the Joint Understanding (NKB) and Cooperation Agreement (PKS) between BIG with Ministries / Institutions, Local Government and Higher Education such as National Disaster Management Agency (BNPB), Provincial Government of Bangka Belitung, Pemkab. Tegal, Pemkab. Tojouna-una, Pemkab. Yapen, Bekasi City Government, Mulawarman University and Cenderawasih University Papua.






JUARA 3
JUARA 2


BIG BANG




BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL
Peringatan
& TERBARUKA

Informasi Geospasial Dasar
Informasi Geospasial Tematik
Infrastruktur Informasi Geospasial
Sekretaris Utama
Acara BIG



"SELAMAT DATANG KEPALA BIG YANG BARU"

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro secara resmi melantik Kepala Badan Informasi Geospasial, Prof. Ir. Hasanuddin Z Abidin, M.Sc. Bertempat di Gedung Bappenas Jakarta pada hari Senin, 5 Desember 2016 acara pelantikan berlangsung dengan dihadiri oleh Bima Haria Wibisana selaku Kepala BKN, Prof. Dr.Ir. Kadarsah Suryadi selaku Rektor ITB, para pimpinan Bappenas dan para pimpinan Badan Informasi Geospasial. Acara yang berlangsung mulai pukul 11.00-13.00 ini dihadiri juga Kepala BIG terdahulu seperti Ir. Rudolf W Matindas, M.Sc. periode tahun 2002 hingga 2010, Dr. Asep Karsidi, M.Sc. periode tahun 2010 hingga 2014, dan Dr. Priyadi Kardono, M.Sc. periode tahun 2014 hingga 2016.

Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 122/TPA Tahun 2016 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dalam jabatan pimpinan tinggi utama lingkungan Kementerian PPN/ Bappenas. Dalam sambutannya Menteri PPN/Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengatakan "Banyak orang yang belum memahami mengenai Badan Informasi Geospasial, karena itu salah satu tugas Kepala BIG adalah dengan terus memperkenalkan BIG kepada masyakarat baik masyarakan umum maupun masyarakat yang memang pengguna produk-produk yang dihasilkan BIG". Kata Bambang.

Beliau juga berpesan dengan merujuk dari kebijakan Bapak Presiden dengan One Map Policy (Kebijakan Satu Peta) peran BIG menjadi sangat sentral dan penting. BIG bertugas dalam hal pemetaan dasar meskipun Kementerian dan Lembaga lain juga melaksanakan tugas pemetaan tetapi mereka mengerjakan berdasarkan kebutuhan masing-masing. Yang terpenting adalah tugas BIG yang membuat peta dasarnya harus memiliki sinkronisasi antara peta-peta yang telah dihasilkan Kementerian dan Lembaga lain tersebut. Maka BIG harus menjadi konsolidator yang menciptakan sinkronisasi sehingga dalam pembangunan menjadi lebih baik dimulai dari peta yang kita miliki harus akurat dan tidak hanyak cukup detail tetapi sinkronisasi tersebut juga patut diperhatikan.

Minister of National Development Planning (PPN) / Head of Bappenas, Bambang Brodjonegoro officially inaugurated the Head of Geospatial Information Agency, Prof. Ir. Hasanuddin Z Abidin, M.Sc. Located at the Bappenas Building Jakarta on Monday, December 5, 2016, the inauguration ceremony took place with Bima Haria Wibisana as the Head of BKN, Prof. Dr.Ir. Kadarsah Suryadi as the Rector of ITB, the leaders of Bappenas and the leaders of the Geospatial Information Agency. The event that took place from 11:00 to 13:00 was also attended by previous BIG Heads such as Ir. Rudolf W Matindas, M.Sc. the period from 2002 to 2010, Dr. Asep Karsidi, M.Sc. the period from 2010 to 2014, and Dr. Priyadi Kardono, M.Sc. period 2014 to 2016.

The inauguration is based on Presidential Decree No. 122 / TPA Year 2016 on dismissal and appointment from inside the main high-level office of the Ministry of PPN / Bappenas. In his speech, the Minister of PPN / Bappenas, Bambang Brodjonegoro said, "Many people have not understood the Geospatial Information Agency, because one of the tasks of BIG Head is to continue to introduce BIG to the public both public and society which are the users of BIG's products" . Bambang said.

He is also advised by referring to Mr. President's policy with One Map Policy (BIG Map Policy) becomes very central and important. BIG is in charge of basic mapping even though other Ministries and Agencies also carry out mapping tasks but they work on their own needs. The most important thing is the task of BIG that makes its basic map should have synchronization between the maps that have been produced by other Ministries and Institutions. So BIG must be a consolidator that creates synchronization so that in the development becomes better starting from the map we have to be accurate and not just enough detail but the synchronization is also worth noting.

Pada sesi wawancara kepada wartawan, Kepala BIG yang baru, Prof. Ir. Hasanuddin Z Abidin, M.Sc. mengatakan bahwa luasnya Negara Indonesia bila dipetakan, maka dalam pemetaan yang dilakukan BIG, BIG tidak dapat bekerja sendiri. Maka BIG harus menjalin kerja sama seluas-luasnya dengan Kementerian dan Lembaga lain untuk membantu proses pemetaan di seluruh Indonesia baik di wilayah darat maupun laut. Beliau menambahkan dalam mendukung One Map Policy, pemetaan di laut juga sangat diperlukan mengingat 70% dari wilayah Indonesia adalah laut. Dalam pemetaan tidak hanya bekerja sama dengan Kementerian dan Lembaga tetapi juga masyarakat industri geospasial yang memang membutuhkan produk-produk yang dihasilkan BIG. "Jika masyarakat merasa produk yang dihasilkan BIG bermanfaat maka masyarakat juga dengan cepat membantu BIG. Maka BIG pertama-tama harus mengedepankan pelayanan publiknya terlebih dahulu." tambahnya.

Acara pelantikan diakhiri dengan pemberian ucapan selamat dari para hadirin kepada Kepala BIG yang baru dilantik. Semoga Kepala BIG yang baru dilantik dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik, sehingga tugas BIG sebagai lembaga penggerak dan terdepan dalam penyelenggaraan IG yang andal, terintegrasi dan mudah dimanfaatkan oleh bagi para penggunanya.

In an interview session to reporters, the new BIG Head, Prof. Ir. Hasanuddin Z Abidin, M.Sc. said that the extent of the State of Indonesia when mapped, then in the mapping conducted BIG, BIG can not work alone. Therefore, BIG must establish the widest possible cooperation with other Ministries and Institutions to assist the mapping process throughout Indonesia in both land and sea areas. He added that in support of One Map Policy, mapping in the sea is also very necessary considering 70% of the Indonesian territory is the sea. In mapping not only cooperate with Ministry and Institution but also society of geospatial industry which do need BIG product. "If people feel the BIG generated product is beneficial then the community also quickly helps BIG. So BIG must first prioritize its public services first, "he added.

The inauguration ceremony ended with a congratulatory gift from the audience to the newly ordained BIG Chief. Hopefully the newly appointed BIG Chief can perform his duties well, so that BIG's task as a driving force and leading in the implementation of IG is reliable, integrated and easy to be utilized by for its users.







SENAM BERSAMA DUKUNG KAMPANYE REVOLUSI MENTAL "BIG MELAYANI"

Dalam rangka mendukung Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental, Gerakan Revolusi Mental merupakan salahsatu program Nawacita pemerintah Presiden RI Joko Widodo. Pembangunan gerakan Revolusi Mental, yaitu membangun integritas, etos kerja, dan Gotong Royong. 3 (Tiga) nilai itu yang menjadi budaya masyarakat seluruh Indonesia, Kegiatan Gerakan revolusi mental ini melibatkan penyelenggara Negara baik pusat maupun daerah.

Salah satu implementasi Gerakan Revolusi Mental adalah Gerakan Indonesia Melayani. Sesuai dengan Inpres Nomor 12 Tahun 2016, agar layanan Publik kepada Masyarakat diselenggarakan secara tertib, bersih, mandiri dan bersatu. Dengan Tema "BIG Melayani", Badan informasi Geospasial (BIG) menyelenggarakan berbagai kegiatan terkait Gerakan Revolusi Mental dengan Tajuk BIG Melayani. Rangkaian kegiatan gerakan revolusi Mental "BIG Melayani diantaranya Workshop Pelayanan Publik, BIG Goes to Library, BIG Goes to Pesantren, BIG Goes to Kampung serta ditutup dengan kegiatan Senam Bersama.

Senam yang diselenggarakan tanggal 24 Maret 2017 di Lapangan Olah Raga BIG ini dibuka oleh Kepala BIG, Hasanudin Z. Abidin. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh Karyawan BIG dan Pejabat dilingkungan BIG. Selain itu kegiatan ini juga dihadiri oleh Perwakilan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN- RB). Pada Sambutannya, Kepala BIG mengatakan, Senam bersama ini merupakan rangkaian Gerakan Revolusi Mental yang diselenggarakan BIG. Gerakan Revolusi Mental yang diselenggarakan BIG meliputi Worshop Pelayanan Publik, BIG Goes to Library, BIG Goes To Kampung dan Senam Bersama. BIG menyambut baik kegiatan gerakan revolusi mental ini dengan berbagai kegiatan. Sementara itu Perwakilan Kementerian PAN-RB dalam sambutannya mengatakan, mengapresiasi kepada BIG yang langsung mengadakan kegiatan setelah terbitnya Inpres No.12

In order to support Presidential Instruction No. 12 of 2016 on the National Movement of the Mental Revolution, Mental Revolution Movement is one of the programs of the Nawacita of the Presidential Government of Indonesia Joko Widodo. Development of the Mental Revolution movement, which builds integrity, work ethic, and Gotong Royong. 3 (Three) values that become the culture of society throughout Indonesia, Activity This mental revolution movement involves the state organizers both central and regional.

One of the implementation of the Mental Revolution Movement is the Movement of Serving Indonesia. In accordance with Presidential Instruction No. 12 of 2016, Public Services to the Community shall be conducted in an orderly, clean, independent and united manner. With the "BIG Serving" Theme, Geospatial Information Agency (BIG) organizes various activities related to the Mental Revolution Movement with the BIG Serving Editor. The series of activities of the Mental Revolution movement "BIG Serve among others Public Service Workshop, BIG Goes to Library, BIG Goes to Pesantren, BIG Goes to Kampung and closed with the activities of Gymnastics Bersama.

Gymnastics held on March 24, 2017 at BIG Sport Field was opened by the Head of BIG, Hasanudin Z. Abidin. This activity was attended by all BIG Employees and BIG Officials. In addition, this activity was also attended by representatives of the Ministry of Administrative Reform and Bureaucracy Reform (PAN-RB). In his speech, Head of BIG said, Gymnastics together is a series of Mental Revolution Movement held BIG. The BIG Mental Revolution Movement includes Worshop Public Service, BIG Goes to Library, BIG Goes To Kampung and Gymnastics Together. BIG welcomes the activities of this mental revolutionary movement with various activities. Meanwhile, PAN-RB Ministry Representative in his speech said, appreciating to BIG who directly conduct activities after the issuance of Presidential Decree No.12 of 2016 on Mental Revolution Movement, hopefully BIG's activities can be an encouragement to other Ministries / Institutions to organize

Tahun 2016 tentang Gerakan Revolusi Mental, semoga kegiatan yang dilakukan BIG dapat menjadi dorongan semangat pada Kementerian/Lembaga lain untuk menyelenggarakan kegiatan serupa. Kegiatan Senam bersama dipandu oleh praktisi Senam Profesional.

similar activities. Gymnastics activities are guided by Professional Gymnastics practitioners.















INFORMASI GEOSPASIAL MENDUKUNG PROVINSI NTB GEMILANG

Dalam rangka mendukung nawacita pemerintah, Badan Informasi Geospasial (BIG) melakukan penyelenggaraan informasi geospasial untuk mendukung kedaulatan pangan, energi, maritim, periwisata, kesehatan masyarakat dan sebagainya. Terkait dengan itu, BIG sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang bertugas membina dan menyediakan data dan informasi geospasial bersama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menandatangani Nota kesepahaman Bersama (NKB). Penandatanganan NKB ini dilakukan oleh Kepala BIG, Hasanuddin Z. Abidin dan Gubernur NTB , Dr. TGH. M. Zainul Majdi di Lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur NTB, Mataram pada Sabtu, 17 Desember 2016. Lingkup NKB ini adalah penyediaan data dan informasi geospasial, pemanfaatan dan pengembangan basisdata informasi geospasial, peningkatan dan pengembangan infrastruktur informasi geospasial, pelaksanaan kegiatan survei dan pemetaan dan penyajian infromasi geospasial, berbagi pakai data dan informasi geospasial serta pengembangan dan peningkatan kapasitas Sumberdaya Manusia (SDM) Informasi Geospasial.

Penandatanganan NKB tersebut diadakan bersamaan dengan HUT Provinsi Nusa Tenggara Barat yang ke-58. Ada peringatan HUT ke-58 tahun ini, yang mengusung tema "NTB Gemilang, Ikhtiar Tiada Henti", dihadiri Wakil Gubernur NTB H. M. Amin, S.H., M.Si, Ketua DPRD Provinsi NTB Hj. Baiq Isvie Rupaeda.,SH.MH, Anggota Forum Koordinasi Pemerintah Daerah (FKPD) dan Satuan Kerja perangkat Daerah (SKPD) lingkup Provinsi NTB, serta tamu kehormatan antara lain: mantan Gubernur NTB ke-5 periode 1998-2003 Drs. H. Harun Al Rasyid, mantan Gubernur NTB ke-6 periode 2003-2008 H. Lalu Serinata, dan mantan Wakil Gubernur NTB Periode 2008-2013 H. L. Azhar.

Mengawali upacara, peserta upacara dan tamu undangan dihibur oleh Marching Band dari SMPN 15 Mataram dan atraksi polisi cilik yang berada dibawah asuhan Kapolres Lombok Tengah dan dibawah naungan Kapolda NTB. Dalam amanahnya, Gubernur NTB

In order to support the government's jaws, the Geospatial Information Agency (BIG) conducts geospatial information to support food sovereignty, energy, maritime, tourism, public health and so on. Related to that, BIG as a Non-Ministry Government Institution (LPNK) in charge of fostering and providing geospatial data and information together with West Nusa Tenggara (NTB) Government signed a Memorandum of Understanding (NKB). The signing of NKB was carried out by the Head of BIG, Hasanuddin Z. Abidin and Governor of NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi at Bumi Bumi Gora Field Office of the Governor of NTB, Mataram on Saturday, December 17, 2016. The scope of NKB is the provision of geospatial data and information, the utilization and development of geospatial information database, improvement and development of geospatial information infrastructure, the implementation of survey and mapping activities and presentation of geospatial information, geospatial data and information sharing and development and capacity building of Human Resources (HR) Geospatial Information.

The NKB signing was held in conjunction with the 58th anniversary of West Nusa Tenggara Province. There is the 58th anniversary of this year, which features the theme "NTB Gemilang, Endless Ending", attended by Deputy Governor of NTB H. M. Amin, S.H., M.Si, Chairman of DPRD NTB Hj. Baiq Isvie Rupaeda., SH.MH, Member of Local Government Coordination Forum (FKPD) and Regional Device Work Unit (SKPD) of NTB Province, and guest of honor include: former 5th NTB Governor period 1998-2003 Drs. H. Harun Al Rashid, former 6th Governor of NTB period 2003-2008 H. Lalu Serinata, and former Vice Governor of NTB Period 2008-2013 H. L. Azhar.

Initiating the ceremony, the participants of the ceremony and invited guests were entertained by the Marching Band from SMPN 15 Mataram and the attractions of the little police under the care of Central Lombok Police Chief and under the auspices of the NTB Police Chief. In his mandate, the Governor of NTB acting as Inspector

yang bertindak sebagai Inspektur Upacara Dr. TGH. M. Zainul Majdi menyampaikan peran NTB semakin kokoh dalam pembangunan nasional. "Hasil kerja keras ini tidak luput dari perjuangan para pemimpin terdahulu yang telah memberikan pondasi yang kuat," ujarnya.

Pada kesempatan ini juga, Zainul Majdi ingin masing-masing pihak melakukan introspeksi diri, untuk melihat sejauh mana pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Sejauh mana pertumbuhan pariwisata mampu menyerap ekonomi kreatif yang berkembang di masyarakat, serta memastikan setiap proses pembangunan tidak hanya menghasilkan kemanfaatan ekonomi tetapi juga memperhatikan daya dukung lingkungan.

Zainul Majdi berpesan untuk selalu menjaga momentum pembangunan dan kondisi daerah NTB yang aman dan kondusif. "Mari kita rawat persaudaraan diantara seluruh komponen masyarakat, baik agama, suku, profesi dan keberagaman yang lain. Kita sudah sepakat, seluruh keberagaman itu adalah kekuatan dan modal dalam membangun NTB," tegasnya.

Kepada seluruh rekan-rekan perangkat pemerintahan daerah Zainul Majdi juga berpesan untuk saling bahu membahu, tingkatkan etos kerja dan profesionalitas serta tingkatkan tranparansi dan akuntabilitas. "Mari menjadi pemimpin yang dapat diteladani oleh seluruh masyarakat. Kepada pelajar, pemuda, dan mahasiswa untuk selalu bersungguh-sungguh menuntut ilmu, persiapkan diri untuk menjadi penerus masa depan NTB dan bangsa, jauhi pergaulan bebas, narkoba dan perlaku destruktif lainnya," pungkasnya.

of Ceremony Dr. TGH. M. Zainul Majdi conveyed the role of NTB more solidly in national development. "The results of this hard work did not escape the struggle of previous leaders who have provided a strong foundation," he said.

On this occasion also, Zainul Majdi wants each side to do self introspection, to see how far economic growth can be felt evenly by all levels of society. The extent to which tourism growth is able to absorb the creative economy that develops in the community, as well as ensuring every development process not only generate economic benefits but also pay attention to the carrying capacity of the environment.

Zainul Majdi advised to always keep the momentum of development and the condition of NTB area that is safe and conducive. "Let us take care of brotherhood among all components of society, both religion, tribe, profession and other diversity. We have agreed, all the diversity is the strength and capital in building NTB, "he said.

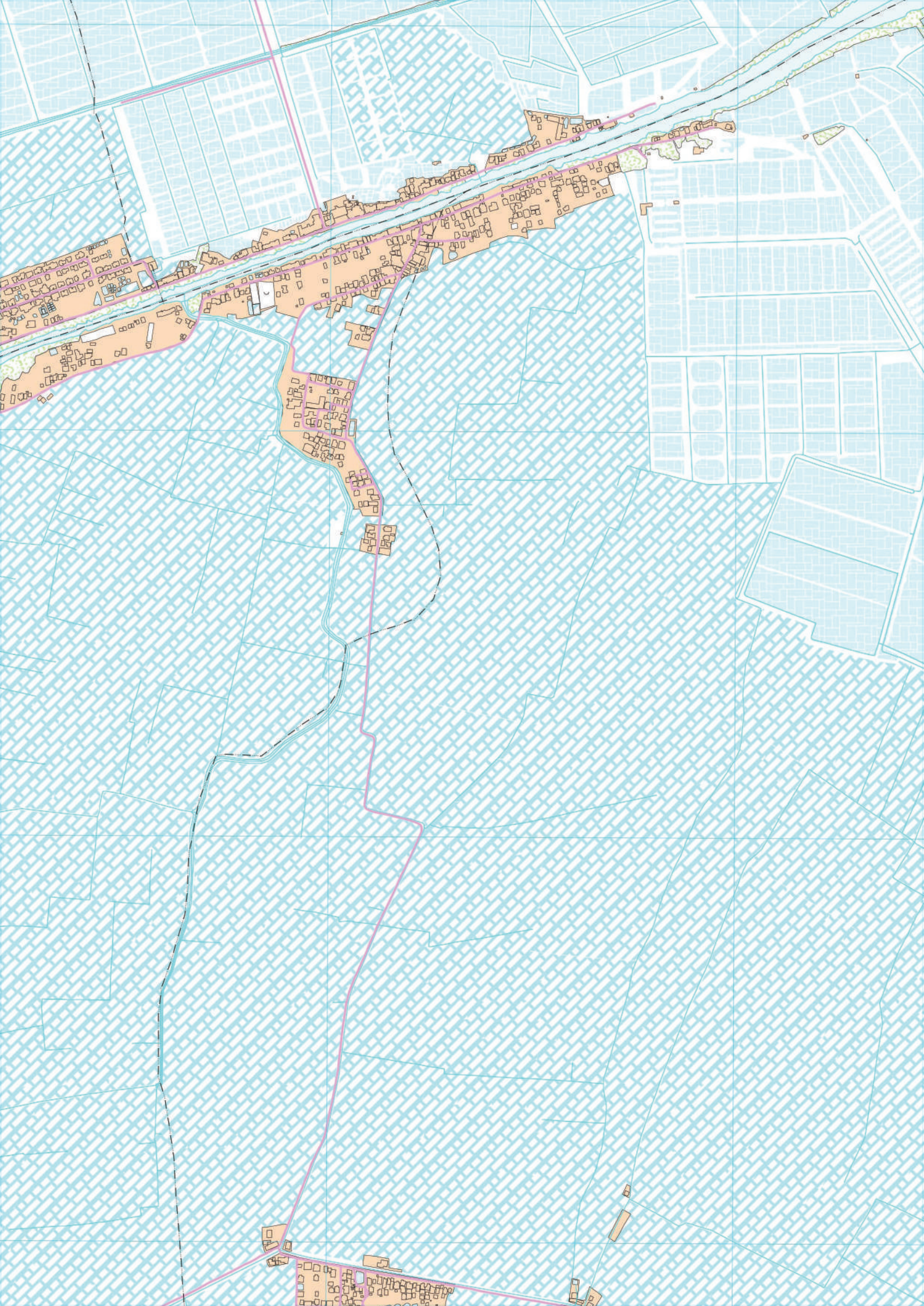
To all fellow local government officials Zainul Majdi also ordered to work together, improve work ethics and professionalism and increase transparency and accountability. "Let be a leader who can be imitated by the whole society. To the students, youth, and students to always be serious about studying, prepare themselves to be the future successor of NTB and the nation, away from promiscuity, drugs and other destructive treatment, "he concluded.z

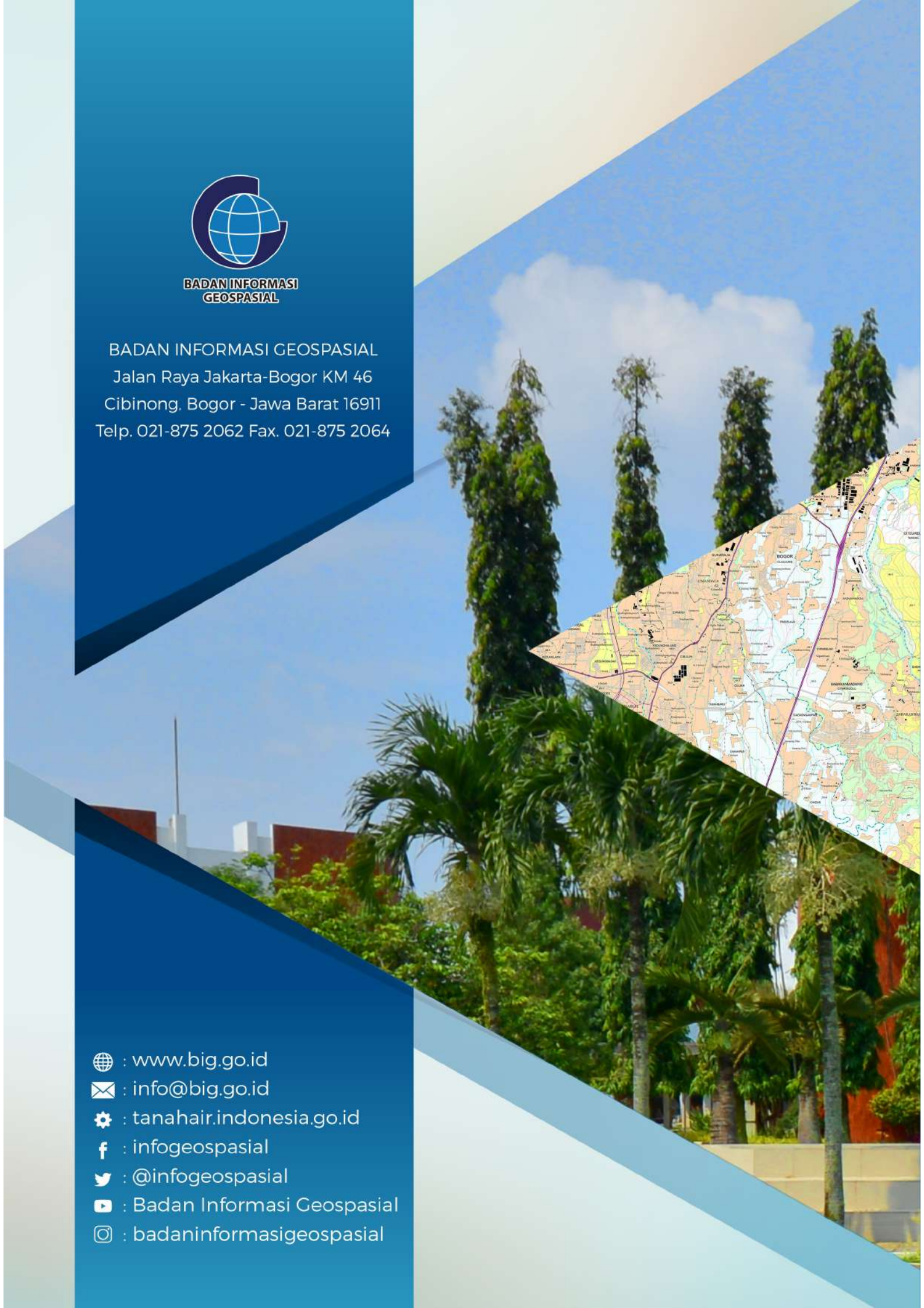












BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
Jalan Raya Jakarta-Bogor KM 46
Cibinong, Bogor - Jawa Barat 16911
Telp. 021-875 2062 Fax. 021-875 2064

: www.big.go.id
: info@big.go.id
: tanahair.indonesia.go.id
: infogeospasial
: @infogeospasial
: Badan Informasi Geospasial
: badaninformasigeospasial